



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NO 4 TAHUN 2021

# RPJM

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH

KOTA TERNATE  
TAHUN 2021-2026

BAPPELITBANGDA, TAHUN 2021







WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NO 4 TAHUN 2021

# RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH**

DAERAH KOTA TERNATE  
TAHUN 2021-2026

BAPPELITBANGDA, TAHUN 2021



**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
40. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);
41. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

dan

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026.





## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ternate, sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2020-2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari RPJMD adalah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai :
  - a. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD; dan
  - c. Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.





### **BAB III SISTEMATIKA RPJMD**

#### **Pasal 3**

RPJMD Kota Ternate 2021-2026 terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup.

#### **Pasal 4**

Penjabaran dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PELAKSANAAN RPJMD**

#### **Pasal 5**

- (1) RPJMD dilaksanakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Perangkat Daerah, dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke-4 (empat) setiap tahunnya.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang dijadikan landasan untuk penyusunan Renja PD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan visi RPJPD dan visi RPJMN.
- (3) Pengendalian dan evaluasi oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala BAPPELITBANGDA selaku Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah.



- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator masing-masing program dan kegiatan setiap tahunnya.
- (6) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala BAPPELITBANGDA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI PERUBAHAN RPJMD**

### **Pasal 7**

- (1) RPJMD dapat diubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 8**

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD, kebijakan umum APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara.

### **Pasal 9**

Dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan, maka RPJMD dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Kota Ternate Tahun 2021 dan perubahan RKPD Kota Ternate Tahun 2021 serta RKPD Kota Ternate Tahun 2022 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD, RPJPD dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS dan RAPBD/APBD tahun pertama periode pemerintahan atau masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.



## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 151);
- b. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 199).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 26 Oktober 2021

**WALIKOTA TERNATE,**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 26 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**JUSUF SUNYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 210

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : (4/2021)





**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajiban mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan RPJMD, serta melakukan pembinaan, fasilitasi pemantauan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain: seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan



dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain yaitu:

- a. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
- b. Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Ternate;
- c. Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
- d. Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah.

Visi Pemerintahan Kota Ternate yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Ternate Mandiri dan Berkeadilan"**. Untuk mewujudkan capaian target Visi secara maksimal, maka perlu dirumuskan kedalam beberapa Misi, dimana antara misi yang satu dengan yang lain saling terkait sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut :

1. Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif.
3. Meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate (*kie se gam magogugu matiti tomdi*).
5. Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi.
6. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan sarana prasarana perkotaan.
7. Daerah melindungi masyarakat yang kurang mampu.
8. Daerah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 12 (Dua Belas) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Maksud dan Tujuan; (3) Sistematika RPJMD; (4) Pelaksanaan RPJMD; (5) Pengendalian dan Evaluasi; (6) Perubahan RPJMD; (7) Ketentuan Lain-Lain; (8) Ketentuan Peralihan; dan (9) Ketentuan Penutup.

Selanjutnya untuk menjamin agar dokumen RPJMD yang akan dirumuskan berkesinambungan dengan dokumen RPJMD ini, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate dapat dicapai secara maksimal.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a, Cukup jelas

Huruf b, Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan terjadi perubahan yang mendasar seperti mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 152





# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1.	Latar Belakang.....	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3.	Hubungan Antar Dokumen .....	I-6
1.3.1	RPJMN Tahun 2020-2024.....	I-8
1.3.2	RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 .....	I-8
1.3.3	RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025.....	I-9
1.3.4	Hubungan Antara RPJMD dengan RTRW Kota Ternate.....	I-11
1.3.5	Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Ternate .....	I-11
1.3.6	Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Peringkat Daerah .....	I-11
1.3.7	Hubungan Antara RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	I-11
1.3.8	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lainya .....	I-12
1.4.	Maksud dan Tujuan .....	I-14
1.4.1	Maksud .....	I-14
1.4.2	Tujuan .....	I-14
1.5.	Sistematika Penulisan .....	I-14
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-16</b>
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-18
2.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	II-18
2.1.2	Topografi dan Kemiringan Lahan .....	II-20
2.1.3	Geologi.....	II-21
2.1.4	Hidrologi .....	II-22
2.1.5	Klimatologi.....	II-22
2.1.6	Penggunaan Lahan.....	II-23
2.1.7	Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-24
2.1.8	Wilayah Rawan Bencana.....	II-31
2.1.9	Aspek Demografi .....	II-34
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-37
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-37
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-47
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-54
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-55
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-55
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-69
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-78
2.3.4	Unsur Pendukung.....	II-82
2.3.5	Unsur Penunjang.....	II-84
2.3.6	Unsur Pengawasan.....	II-86
2.3.7	Unsur Kewilayahan.....	II-87
2.3.8	Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum.....	II-88



2.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-88
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-88
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-89
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-90
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-91
2.5.	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020.....	II-96
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-102</b>
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-102
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-103
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-106
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-108
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-108
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-109
3.3.	Kerangka Pendanaan .....	III-110
3.3.1	Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu .....	III-111
3.3.2	Analisa Kerangka Pendanaan .....	III-113
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>IV-115</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-116
4.1.1	Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional .....	IV-117
4.1.2	Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah .....	IV-120
4.1.3	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas.....	IV-121
4.1.4	Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan yang Berbasis Kepulauan.....	IV-122
4.1.5	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.....	IV-123
4.2.	Isu Strategis .....	IV-125
4.2.1	Isu Internasional .....	IV-125
4.2.2	Isu dan Kebijakan Nasional .....	IV-127
4.2.3	Isu atau Kebijakan Provinsi Maluku Utara.....	IV-129
4.2.4	Hasil Telaahan RPJPD Kota Ternate.....	IV-133
4.2.5	Hasil Telaahan KLHS Kota Ternate .....	IV-134
4.2.6	Isu-isu Strategis Kota Ternate .....	IV-136
4.2.7	Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara serta Isu Strategis KLHS .....	IV-137
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V-142</b>
5.1.	Visi .....	V-142
5.1.1	Gambaran Kota Ternate dalam Visi Tahun 2021-2026.....	V-143
5.1.2	Ternate Mandiri .....	V-144
5.1.3	Ternate Berkeadilan .....	V-144
5.2.	Misi .....	V 145
5.2.1	Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	V-145



5.2.2	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif .....	V-146
5.2.3	Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas.....	V-146
5.2.4	Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate ( <i>Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi</i> ) .....	V-147
5.2.5	Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi.....	V-147
5.2.6	Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.....	V-147
5.2.7	Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu .....	V-148
5.2.8	Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial .....	V-148
5.3.	Tujuan dan Sasaran .....	V-148
5.3.1	Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	V-149
5.3.2	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif .....	V-149
5.3.3	Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas.....	V-149
5.3.4	Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate ( <i>Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi</i> ) .....	V-150
5.3.5	Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi.....	V-150
5.3.6	Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.....	V-150
5.3.7	Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu .....	V-151
5.3.8	Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial .....	V-151
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM</b>	
	<b>PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VI-163</b>
6.1.	Strategi .....	VI-163
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan .....	VI-166
6.3.	Arah Kebijakan Kewilayahan .....	VI-167
6.3.1	Kawasan Strategis Pertahanan dan Militer .....	VI-169
6.3.2	Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.....	VI-169
6.3.3	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.....	VI-169
6.3.4	Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya .....	VI-170
6.4.	Program Pembangunan Daerah.....	VI-170
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII-196</b>
7.1.	Kerangka Pendanaan .....	VII-196
7.2.	Program Prioritas.....	VII-197
7.3.	Program Perangkat Daerah.....	VII-197
7.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	VII-197
7.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	VII-200
7.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	VII-206
7.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	VII-208
7.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	VII-209
7.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	VII-210
7.3.7	Unsur Kewilayahan.....	VII-210
7.3.8	Unsur Pemerintahan Umum.....	VII-210





<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>VIII-237</b>
<b>BAB IX PENUTUP</b>	<b>IX-247</b>
9.1. Pedoman Transisi	IX-247
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-247



# DAFTAR TABEL

1.1	Keterkaitan Antar Dokumen RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Maluku Utara, RPJPD Kota Ternate, RPJMD Kota Ternate dan RTRW Kota Ternate.....	I-13
2.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan.....	II-19
2.2	Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kota Ternate	II-20
2.3	Temperatur Rata-rata Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-23
2.4	Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Tingkat Penyinaran Tahun 2016-2020.....	II-23
2.5	Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Fungsi Hutan Kota Ternate (hektar), Tahun 2016-2020.....	II-24
2.6	Data Historis Bencana Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-34
2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2014-2019.....	II-35
2.8	Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2020 .....	II-35
2.9	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020 .....	II-36
2.10	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Ternate Tahun 2016-2020 (persen).....	II-38
2.11	PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 (juta rupiah) .....	II-39
2.12	PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 (juta rupiah).....	II-40
2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2016 – 2020.....	II-40
2.14	Nilai PDRB, PDRB per Kapita dan Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Ternate Tahun 2016-2020 .	II-43
2.15	Rasio Gini Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-43
2.16	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Ternate, Tahun 2016-2020.....	II-44
2.17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-47
2.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	II-49
2.19	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	II-49
2.20	Jumlah Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-50
2.21	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-51
2.22	Jumlah Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-51
2.23	Angka Kesakitan Menurut Penyakit Pasien Rawat Jalan Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-52
2.24	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-52
2.25	Jumlah Grup Kesenian dan Museum Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-55
2.26	Jumlah Klub Olah Raga dan Gedung Olah Raga Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-55
2.27	Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-56
2.28	Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-56
2.29	Angka Baca Tulis Al Qur'an Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-57
2.30	Rasio Guru dan Murid Kota Ternate Tahun 2018-2020.....	II-57
2.31	Rasio Rombel dan Murid Kota Ternate Tahun 2018-2020 .....	II-57
2.32	Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI dan SMP/MTs Kota Ternate Tahun 2020 .....	II-58
2.33	Tenaga Pendidikan Bersertifikasi Kota Ternate Tahun 2018-2020 .....	II-58
2.34	Persentase Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Ternate Tahun 2018-2020 .....	II-58
2.35	Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs Kota Ternate Tahun 2018-2020.....	II-59
2.36	Tenaga Pendidikan Berakreditasi Kota Ternate Tahun 2018-2020.....	II-59
2.37	Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-60
2.38	Persentase <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-60
2.39	Persentase <i>Annual Parasite Incidence</i> (API) Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-61
2.40	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Ternate Tahun 2018-2020.....	II-61



2.41	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per Satuan penduduk di Kota Ternate Tahun 2018-2020 .....	II-61
2.42	Akreditasi Puskesmas Kota Ternate Tahun 2018-2020 .....	II-62
2.43	Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Kota Ternate Tahun 2018-2020 .....	II-62
2.44	Panjang Jaringan Jalan Menurut Jenis dan Kondisi Jalan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-63
2.45	Panjang Jaringan Jembatan Menurut Jenis dan Kondisi Jembatan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .	II-63
2.46	Data Ketersediaan Air dan Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-63
2.47	Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-66
2.48	Rasio Rumah Layak Huni dan Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-66
2.49	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Keamanan dan Keindahan (K-3) Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-67
2.50	Cakupan Luas Wilayah yang Terproteksi Bahaya Kebakaran Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-68
2.51	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial (Penurunan PMKS) Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-68
2.52	Data Disabilitas Per Kecamatan Kota Ternate Tahun 2021 .....	II-68
2.53	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-69
2.54	Rasio Penduduk Bekerja Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-69
2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-70
2.56	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-71
2.57	Capaian Urusan Pertanahan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-71
2.58	Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020.....	II-72
2.59	Indikator Sasaran Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-72
2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-73
2.61	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-74
2.62	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-74
2.63	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-75
2.64	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-75
2.65	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-76
2.66	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-76
2.67	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-77
2.68	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-77
2.69	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-78
2.70	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-78
2.71	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-79
2.72	Daya Tarik Wisata Kota Ternate Tahun 2021 .....	II-79
2.73	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-80
2.74	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-81
2.75	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-81
2.76	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-82
2.77	Kinerja Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-83
2.78	Kinerja Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-83
2.79	Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Ditetapkan dengan Perda dan Perkada Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-84
2.80	Jumlah Kajian dan Penelitian Tahun 2015-2020.....	II-85
2.81	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-85
2.82	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-85
2.83	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Ternate Tahun 2015-2020 .	II-86
2.84	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-86



2.85	Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Kecamatan (Kewilayahan) Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-87
2.86	Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-88
2.87	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-89
2.88	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-89
2.89	Capaian Urusan Penataan Ruang Kota Ternate Tahun 2015-2020.....	II-90
2.90	Angka Kriminalitas di Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-91
2.91	Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-92
2.92	Hasil Analisis LQ di Kota Ternate Tahun 2017-2018 .....	II-93
2.93	Hasil Perhitungan Analisis <i>Shift-Share</i> Kota Ternate Tahun 2017 dan Tahun 2018 .....	II-94
2.94	Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020.....	II-96
3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	III-103
3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-105
3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-106
3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-107
3.5	Persentase Hasil Analisa Rasio Atas Neraca Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-107
3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-108
3.7	Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-109
3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-109
3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	III-110
3.10	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2022-2026.....	III-111
3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Ternate.....	III-114
3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah .....	III-114
4.1	Keterkaitan Isu Strategis Budaya Patrimonialisme, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-118
4.2	Keterkaitan Isu Strategis Pengelolaan Keuangan, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-118
4.3	Keterkaitan Isu Strategis Pendapatan Daerah, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-119
4.4	Keterkaitan Isu Strategis Pelayanan Publik, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-119
4.5	Keterkaitan Isu Strategis Kerjasama Antar Lembaga Sosial, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-120
4.6	Keterkaitan Isu Strategis Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-120
4.7	Keterkaitan Isu Strategis Lapangan Kerja, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-121
4.8	Keterkaitan Isu Strategis Dampak Covid-19, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-121
4.9	Keterkaitan Isu Strategis Pertumbuhan Antar Kawasan, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah.....	IV-122
4.10	Keterkaitan Isu Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-122
4.11	Keterkaitan Isu Strategis Inflasi, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-123
4.12	Keterkaitan Isu Strategis Sektor Informal, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-123
4.13	Keterkaitan Isu Strategis Daya Tampung Lingkungan, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-124
4.14	Keterkaitan Isu Strategis Kerawanan Bencana, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-124
4.15	Keterkaitan Isu Strategis Wilayah Rawan Bencana, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	IV-125
4.16	Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara dan Isu Strategis KLHS .....	IV-137



5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 .....	V-153
5.2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 .....	V-159
6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Ternate Tahun 2021-2026 .....	VI-164
6.2	Pemetaan Arah Kebijakan dalam Pentahapan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 .....	VI-167
6.3	Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota .....	VI-171
7.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate.....	VII-212
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Ternate .....	VIII-238
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Ternate.....	VIII-240





# DAFTAR GRAFIK

2.1	Piramida Penduduk Kota Ternate 2020 .....	II-36
2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-37
2.3	Perkembangan Inflasi Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-42
2.4	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	II-44
2.5	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Ternate, Maluku Utara dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-45
2.6	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja Kota Ternate Tahun 2016-2020 .....	II-45
2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2016-2020.....	II-46
2.8	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	II-47
2.9	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	II-48
2.10	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020...	II-48
2.11	Persentase Angka <i>Stunting</i> Kota Ternate Tahun 2015-2020 .....	II-53
2.12	Perbandingan IPG Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2016-2020..	II-53
2.13	Perbandingan IDG Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2016-2020 .	II-54
7.1	Proyeksi Belanja Kota Ternate Tahun 2021-2026 .....	VII-196

# DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	I-7
2.1	Peta Administrasi Kota Ternate .....	II-19
4.1	Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah .....	IV-116
4.2	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 dengan Isu Strategis RPJMD Kota Ternate 2021-2026 .....	IV-117
4.3	Tema/Fokus Pembangunan Dua Puluh Tahunan .....	IV-133
5.1	Piramida Perencanaan RPJMD Kota Ternate 2021-2026 .....	V-152
6.1	Kawasan Strategis Kota Ternate .....	VI-168



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1), 262 ayat (1) dan pasal 263 ayat (3), bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu pada setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pendekatan proses perencanaan pembangunan Daerah adalah:

1. **Pendekatan Teknokratik**, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

2. **Pendekatan Politis**, yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
3. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk menyalurkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan Atas-Bawah (*top down*)** dan **Bawah-Atas (*bottom up*)**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Sedangkan substansi rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan:

1. **Pendekatan Holistik-Tematik**: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan Integratif**: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. **Pendekatan Spasial**: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Berdasarkan pasal 201 Ayat (7) bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Atas dasar aturan tersebut, Kota Ternate merupakan salah satu Daerah dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang ikut melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah yakni Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020, untuk Masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2021-2024. Dan Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 9 Desember 2020 telah melaksanakan Pemilukada serentak sebagaimana telah ditentukan.

Dalam Pemilukada Kota Ternate telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si sebagai Walikota Ternate dan Jasri Usman, S.Ag sebagai Wakil Walikota Ternate untuk periode masa jabatan Tahun 2021-2024 dan telah dilantik pada tanggal 26 April 2021 oleh Gubernur Maluku Utara sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Dengan demikian Pemerintah Kota Ternate harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sesuai peraturan perundang-undangan yaitu penyusunan RPJMD. Proses penyusunan RPJMD sejak dari pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penjaringan gagasan, penyusunan *draft* awal pembahasan dan seterusnya sampai dengan penetapan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah harus menyusun rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021-2026 yang akan disusun ini memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam RKPD, ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD. Upaya untuk mengawal sinkronisasi RPJMD dengan dokumen RPJPD ini dilakukan selain secara substansi untuk menjaga konsistensi perencanaan, juga secara legal formal telah diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 memiliki masa transisi pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan periodisasi lima tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025, yang secara periodik memiliki pengaturan sebagai berikut:

1. RPJMD I Tahun 2005-2009
2. RPJMD II Tahun 2010-2014
3. RPJMD III Tahun 2015-2019
4. RPJMD IV Tahun 2020-2025

Karakteristik yang lain dari RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 yang akan disusun ini menyangkut waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021-2026 ini secara normal akan mulai berlaku pada bulan Oktober 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantik Kepala Daerah terpilih). Namun demikian, dengan mempertimbangkan masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang sudah dimulai sejak tanggal 26 April 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) menyebutkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2021. RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi Covid-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya menyasar permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain, mulai dari pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka  $-0,85$  yang berarti pertumbuhan ekonomi Kota Ternate mengalami penurunan sebesar 0,85 persen. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kota Ternate. Gambaran visioner atas kondisi di akhir periode RPJMD atau di tahun 2026, menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen Pemerintah dan Masyarakat Kota Ternate dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi Kota Ternate.

Dengan mengacu pada tema dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan



Isu Strategis Daerah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. RPJMD merupakan perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate yang terpilih, hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 -2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
37. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);
38. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187).

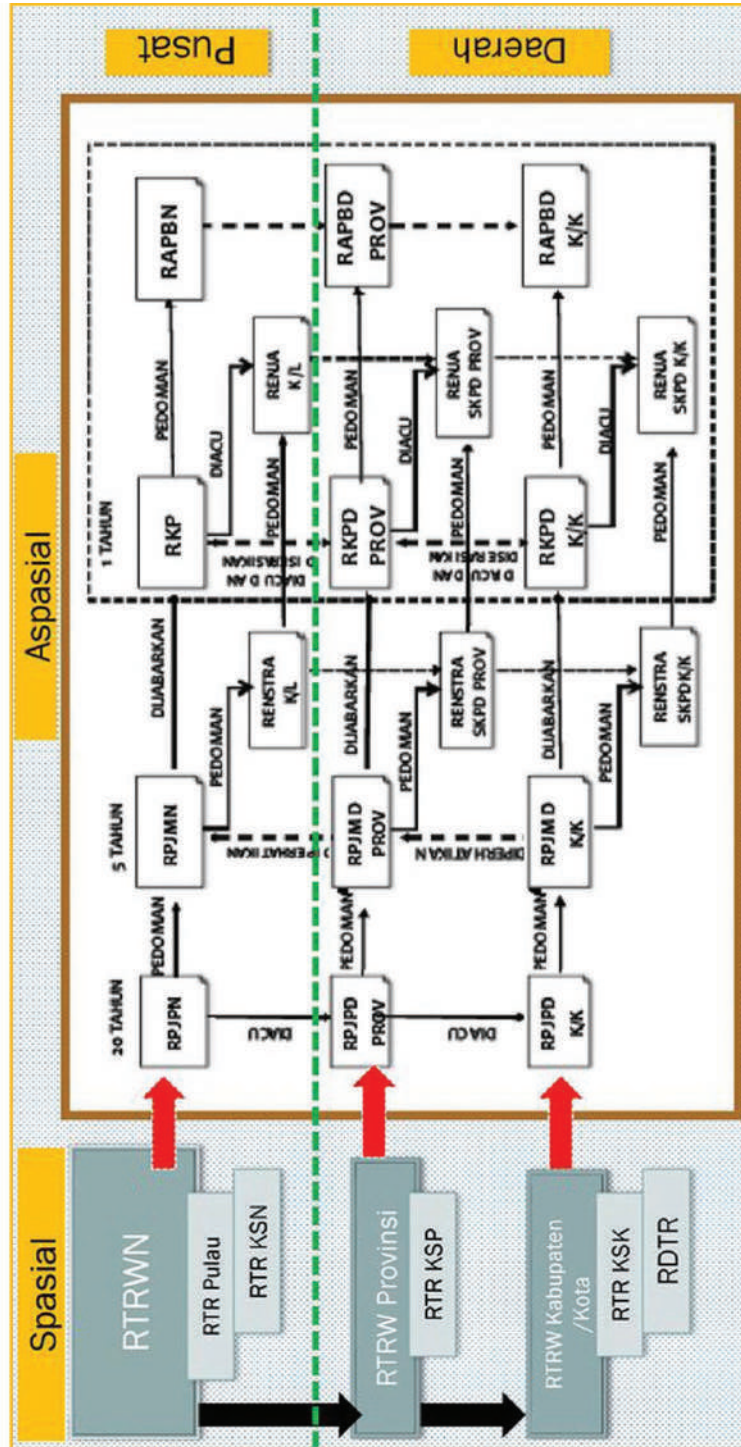
### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara, maka RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Ternate dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Bappeltbangda Kota Ternate, 2021

### 1.3.1 RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-7,0%;
2. Tingkat inflasi sebesar 2,7%;
3. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%.

### 1.3.2 RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan Visi : Maluku Utara Sejahtera, Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya). Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan 5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut:





1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya, Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah, Misi ini merupakan penopang bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
3. Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, Misi ini merupakan payung pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Misi ini merupakan *kerangka acuan* untuk memmanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

### 1.3.3 RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025, dalam mewujudkan visi Kota Ternate yaitu **“KOTA TERNATE MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERBASIS KEPULAUAN”**, mengandung makna yang luas, tetapi esensinya mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kota Ternate dan diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional, melalui:**

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
2. Percepatan kemandirian masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Harmonisasi produk hukum daerah dan penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah.
4. Penguatan perlindungan hukum dan HAM kepada masyarakat.
5. Menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban lingkungan.
6. Pemantapan independensi perempuan dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.
7. Pemantapan pelaksanaan *good governance* dan sumber daya aparatur yang profesional, bersih, berwibawa secara birokrasi.
8. Pemantapan Kualitas Pelayanan publik melalui fasilitasi, penertiban regulasi dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur yang mampu menciptakan kepuasan masyarakat.

**Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah, melalui:**

1. Melestarikan sistem pembangunan Kota Budaya.
2. Menjaga nilai-nilai luhur budaya Kota Ternate.
3. Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
4. Pengembangan integritas kelompok budaya berdasarkan kearifan lokal secara bijaksana sesuai jati diri masyarakat Kota Ternate.
5. Peningkatan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

**Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas, melalui:**

1. Pencapaian IPM Kota Ternate yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
2. Pemantapan SDM berdasarkan jalur pendidikan dan profesi.
3. Berkembangnya SDM terlatih pengelola sumber daya.
4. Pemerataan Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Pemerataan fasilitas kesehatan masyarakat.
6. Perbaikan gizi balita, anak dan ibu menyusui.
7. Penguatan organisasi kepemudaan dan olahraga melalui event kepemudaan dan olahraga.
8. Penguatan sumber daya kepemudaan melalui peningkatan sarana prasarana serta pembinaan kepemudaan.
9. Peningkatan profesionalisme tenaga kerja Kota Ternate.
10. Peningkatan tenaga *entrepreneur* dan perwujudan lapangan kerja secara mandiri.
11. Pemantapan kualitas hidup masyarakat miskin yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan sosial.
12. Terkoneksinya sektor makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat, menekan inflasi, dan meningkatkan akses sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan.
13. Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menguasai iptek dan inovasi dalam pembangunan Kota Ternate.
14. Persetujuan terhadap sejumlah paten yang diusulkan.

**Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan yang Berbasis Kepulauan, melalui:**

1. Peningkatan pemerataan infrastruktur pada berbagai wilayah yang mendukung perdagangan, pariwisata dan kelautan, serta sumber daya mineral dan energi Kota Ternate.
2. Penguatan struktur perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan secara maksimal sektor unggulan.
3. Penguatan kelembagaan dan SDM secara integratif untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing melalui perluasan akses pasar.
4. Terbentuknya mandiri pangan masyarakat secara berkelanjutan.

**Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari, melalui:**

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap daya dukung lingkungan.
2. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
3. Peningkatan pengendalian lingkungan yang menunjang sektor unggulan.
4. Perwujudan kelompok masyarakat atau komunitas peduli lingkungan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dengan demikian strategi pembangunan 5 tahun keempat Kota Ternate adalah pembiayaan dan akselerasi pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada pencapaian visi, misi dan sasaran pada RPJPD maupun RPJMD. Untuk pelaksanaan pembangunan yang telah tercapai pada RPJMD sebelumnya, tetap diperhatikan agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.



### 1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RTRW Kota Ternate

RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

### 1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Ternate

RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### 1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kota ternate Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### 1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pertimbangan aspek kelanjutan lingkungan dan sosial budaya berdasarkan kebijakan rencana dan program RPJMD Kota Ternate. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Adapun penyusunan KLHS Kota Ternate mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, segala bentuk perencanaan dan kebijakan tata ruang diharuskan memiliki Tujuan dan Sasaran yang jelas sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pada pasal 11. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penting dalam pelaksanaan penataan ruang

wilayah, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik dalam bentuk pembangunan jangka panjang, menengah, maupun pembangunan yang sifatnya jangka pendek. Di sisi lain, Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan produk tata ruang yang bersifat berkelanjutan dan menjamin ketersediaan ruang di masa mendatang. Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dipertegas pada Tujuan Bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Seiring dengan perkembangannya yang pesat serta dengan semakin kompleksnya persoalan dan tantangan yang dihadapi, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan upaya dalam mengantisipasi hal tersebut, tidak terkecuali pada tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (TPB) atau SDGs.

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business As Usual* (BAU) terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2023, berdasarkan kinerja Kota Ternate yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kota Ternate. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta gap terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan 2030.

Selanjutnya alternatif Proyeksi Capaian Indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Isu Strategis, permasalahan, dan Sasaran strategis daerah. Isu Strategis adalah rumusan isu utama dalam pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang dimaksud berupa tantangan pelaksanaan Tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun Sasaran strategis merupakan kondisi pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Isu Strategis dan permasalahan.

Proyeksi Capaian Indikator TPB dengan upaya tambahan disusun dalam rangka percepatan pencapaian Target Tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya tambahan tersebut disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pencapaian Target Tanpa upaya tambahan;
- Pencapaian Target yang ditetapkan secara daerah;
- Potensi, daya saing dan inovasi daerah;
- Daya Dukung dan daya tampung daerah; dan
- Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah.

### **1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya**

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.



**Tabel 1.1**  
Keterkaitan Antar Dokumen RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Maluku Utara, RPJPD Kota Ternate, RPJMD Kota Ternate dan RTRW Kota Ternate

No	RPJM Nasional	RPJMD Provinsi Maluku Utara	RPJPD Kota Ternate	RPJMD Kota Ternate	RTRW Kota Ternate
1	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya, Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif	Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri dan Berkelanjutan
	2. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan				
2	1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan yang berbasis kepulauan	1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	pada sektor unggulan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata
	2. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan			2. Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi	
3	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari	Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan	
4	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah	1. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate ( <i>Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi</i> )	Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri dan Berkelanjutan
				2. Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial	
5	1. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional	1. Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu	pada sektor unggulan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata
	2. Penegakan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga			2. Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	
	3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya				



## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026, adalah untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan Kota Ternate, sesuai visi misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kota Ternate.
2. Tersajinya informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kota Ternate selama 5 tahun yang lalu dan masa yang akan datang.
3. Tersajinya informasi mengenai potensi/kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB III : Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan, belanja dan penghitungan kerangka pendanaan.

**BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Ternate Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.

**BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Dalam Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi dan jangka waktunya; pernyataan dan penjelasan masing-masing misi yang merupakan penjabaran dari visi; rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam tabel/matrik.

**BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan



program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

- BAB VII :** Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab per urusan Perangkat Daerah.
- BAB VIII :** Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Bab ini membahas Penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX :** Penutup



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Ternate yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, yang merupakan perubahan status dari Kota Administratif Ternate sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate.

Kota Ternate memiliki sejarah panjang perjalanan pemerintahan yang berakar dari sistim ketatanegaraan Kesultanan yang telah dimulai sejak fase pemerintahan “*Kolano*” hingga sistem pemerintahan “Kesultanan” (*Sultan bersama staf urusan dunia/pemerintahan dan urusan akhirat/agama*) yang telah berlangsung sejak kurang lebih 771 tahun lalu.

Sejak zaman Sultan Ternate ke-18; Zainal Abidin Sjah (1486 - 1500) struktur pemerintahan dibagi atas dua bagian yakni; (1). Urusan Pemerintahan yang disebut dengan *Bobato Dunia* dan Urusan Keagamaan yang disebut dengan *Bobato Akhirat*. Pada masa ini pusat pemerintahan masih berkedudukan di Gamlamo (Kastela). Selain itu secara teritorial, wilayah kesultanan dibagi menjadi dua teritori yakni; (1). Pulau Ternate sebagai pusat kesultanan yang dibagi secara teritori menjadi *Gam Raha* (empat kawasan) yang terdiri dari *Soa-Sio*, *Sangadji*, *Heku* dan *Cim*. (2). Wilayah-wilayah seberang yang disebut dengan *Mie Gudu-Gudu* (utara-jauh) dan *Sara Lofu-Lofu* (selatan-dekat). Pejabat perwakilan pemerintahan di daerah seberang disebut; (1). *Sangadji* adalah wakil sultan di wilayah seberang, (2). *Salahakan* selaku koordinator wilayah khusus dan *Utusan* merupakan pejabat yang diberi tanggung-jawab untuk menjaga perbatasan (*hoofd grensadministratie*) sesuai karakter wilayahnya. Wilayah kekuasaan Ternate masa lalu bahkan jauh di luar wilayah NKRI saat ini, seperti Zulu, Zambuanga dan Mindanao di Philipina sekarang, dan juga mencapai pulau Selayar hingga Bima di selatan, termasuk di dalamnya Pulau Moti, Pulau Mayau dan Pulau Tifure. Atas dasar historis inilah maka dua Kecamatan pulau terluar, saat ini yakni Moti dan Batang Dua dapat di klaim sebagai wilayah administratif Kota Ternate.

Kesultanan Ternate ini merupakan salah satu dari empat kesultanan besar di Maluku dan Maluku Utara yang dikenal dengan sebutan *Moloku Kie Raha*, yakni Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Dalam sejarahnya dan menurut riwayatnya yang diyakini masyarakat, keempat kesultanan tersebut berasal dari satu garis keturunan.



Sistem pemerintahan kesultanan di Ternate masa lampau bersandar kepada landasan idiil yang disebut dengan "*Jou se Ngofangare*" (hubungan antara sultan dan rakyatnya/*hablun minannaas*). Sedangkan landasan spirituil adalah "*Adat Matoto Agama, Majojoko toma Kitabullah se Sunnah Rasul*" (adat bersendikan agama, dan bersumber pada kitabullah dan sunnah rasul). Dengan landasan falsafah pemerintahan dimaksud inilah melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang memegang teguh *adat se atorang* sebagai sebuah sistem nilai dan prinsip dasar hubungan sosial, yang dikenal dengan "*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*" yaitu 7 sistem nilai dasar yang tercermin dalam tatanan budaya Ternate, yang terdiri dari; (1). *Adat se Atorang*, (2). *Istiadat se kabasarang*, (3) *Galib se Lakudi*, (4). *Cing se Cingare*, (5) *Bobaso se Rasai*, (6) *Ngale se Cara*, dan (7) *Sere se Duniru*.

Bahasa daerah yang dominan dipakai masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari terutama pada kawasan tertentu yang masih homogen adalah bahasa Ternate, namun dalam perkembangan terkini kian hari semakin berkurang penuturnya kecuali pada kawasan kantong adat yang masih mempertahankan bahasa daerah identitas utama ini, sedangkan di dalam kawasan populasi yang heterogen bahasa Melayu-Ternate yang digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Walau demikian, populasi penduduk kota Ternate yang terdiri dari beragam suku bangsa yang ada, terdapat pula bahasa daerah lainnya yang digunakan dalam interaksi sosial, seperti bahasa Tidore, Makian, Galela, Tobelo, Sula, Bacan, Gorontalo, Sangir, Jawa, Bugis, Makassar, Buton dan lain-lain.

Masyarakat Kota Ternate hidup dalam keseharian, hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong royong yang disebut *Babari*, seperti; *babari munara* (kerja bakti gotong-royong), *babari bahan* (bantuan benda), *babari pipi* (gotong-royong dalam bentuk uang), *babari demo* (saling mengingatkan/menasehati) dan *babari akal* (sumbangan pemikiran/ide). Dan itu sudah menjadi ritme kehidupan masyarakat Kota Ternate. Kebiasaan-kebiasaan sosial tersebut sudah terlembagakan dalam istilah-istilah budaya lokal seperti: *Babari, Morom, Rorio, Lilian*, dan lainnya.

Sejarah mencatat bahwa Ternate pada masa lampau merupakan Kota bandar internasional yang menjadi salah satu pusat kawasan rempah dunia bersama Tidore, Moti, Bacan dan lainnya yang secara mondial dikenal sebagai Dunia Maluku. Ternate sebagai bagian dari Kepulauan Maluku pada saat itu menjadi titik temu dan perkenalan nusantara dengan dunia luar bermula. Perdagangan rempah-rempah telah menempatkan kepulauan Maluku sebagai bandar niaga penting dunia yang telah tercatat sejak periode Dinasti Tang pada abad ke-7 (618-907 M).

Ternate juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berdedikasi dan kontribusinya dalam pentas sejarah Indonesia, seperti Sultan Khairun dan yang paling terkenal secara nasional adalah Sultan Baabullah (1570-1583), yang mana sejarah perlawanannya dan pengusiran terhadap Portugis telah diakui negara, sehingga dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Selain itu, ada Sultan Zainal Abidin Syah yang menjadi salah satu peletak dasar syariat agama Islam sebagai landasan spiritual kerajaan dan merubah sistem *kerajaan (Kolano* sebagai kepala pemerintahannya) menjadi *kesultanan* Islam (*Sultan* sebagai kepala pemerintahannya). Selanjutnya adalah Sultan Mudaffar Syah II, yang terlepas dari pro-kontra pada masanya memiliki jasa yang besar untuk membangkitkan semangat mencintai budaya lokal serta inisiator dalam melestarikan aspek kebudayaan Ternate dengan lembaga kesultanan sebagai instrumen utama dan sentra kebudayaan Ternate.

Secara historis-morfologis, struktur tata ruang Kota Ternate saat ini adalah ruang kota warisan Kesultanan dan Kolonial Belanda, terletak di pesisir timur Pulau Ternate. Sementara itu, ibu kota sebelumnya di pesisir selatan Pulau Ternate, hanya menyisakan reruntuhan benteng Kastela dan perkampungan sekitarnya yang membentuk pola linear, sepanjang pesisir pantai dengan jarak 10 m hingga 250 m dari pantai. Tata ruang warisan Kesultanan masih dapat ditemui di ibu kota kesultanan, Soa Sio, meluas ke utara hingga Kelurahan Sangaji. Di bagian selatan Soa Sio, Kelurahan Makassar Barat, Kelurahan Makassar Timur, Kelurahan Gamalama, sebagian Kelurahan Santiong, Kelurahan Muhajirin hingga Kelurahan Kota Baru adalah pola tata ruang kota warisan Kolonial Belanda, dengan pola *grid* dan blok yang memuat area permukiman, perkantoran, rumah ibadah, dan fasilitas publik. Kedua Pusat kota ini kemudian meluas ke Utara ke area sekitar Benteng Toloko dan meluas ke selatan hingga area sekitar benteng Kalamata. Kedua benteng ini menjadi titik aktivita (*nodes*) terluar di ibu kota Ternate. Setelah kedua area tersebut, hanyalah berisi permukiman penduduk yang menyebar secara berkelompok, mengelilingi Pulau Ternate dengan diselingi area perkebunan. Pola ruang berupa linear di tepi

pantai dan *grid* di pusatnya, kemudian berubah karakteristiknya dimulai ketika pelaksanaan reklamasi pesisir pantai timur, membentuk jaringan jalan baru dan menampung berbagai aktivitas komersial, bisnis dan ruang publik. Kehadiran kawasan reklamasi yang dimulai sejak 2004 ini mengubah keaslian tata ruang pesisir warisan Kesultanan dan Kolonial Belanda.

Dalam menelusuri situs-situs Sejarah Kota Ternate yang merupakan tonggak awal untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah dalam konteks upaya pelestarian Sejarah Ternate, maka melalui pembentukan dan proses penelusuran oleh Tim Peneliti Sejarah Ternate telah ditetapkan Hari Jadi Kota Ternate pada Tanggal 29 Desember, yang di tahun 2021, Ternate telah memasuki usia yang ke 771 tahun. Proses penentuan hari jadi Ternate didasari pada pelaksanaan Seminar Sejarah yang merupakan forum kajian dan pemaparan makalah dari para Peneliti, selanjutnya melalui beberapa usul, pandangan dan tanggapan dari para peneliti tersebut, maka disepakati hari lahir Ternate ditetapkan pada tanggal 29 Desember tahun 1250, dengan asumsi bahwa pada Tanggal 29 Desember adalah hari kemenangan Sultan Babullah atas Portugis (diusirnya Portugis dari Benteng Gamlamo). Dimana peristiwa ini telah membangkitkan semangat patriotisme dan identitas diri "Masyarakat Ternate". Selanjutnya Ditetapkannya Tahun 1250 sebagai tahun lahirnya kota Ternate, karena di tahun itulah awal dari proses menuju berdirinya kota Sampalo sebagai Ibu kota pertama dari "Ternate".

Saat ini, Kota Ternate merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang memiliki luas wilayah Kota Ternate hanya 3,88% dari luas wilayah Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate merupakan Kota Kepulauan dan merupakan salah satu simpul strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara baik melalui jalur udara maupun laut. Jarak Kota Ternate ke Ibu Kota Sofifi adalah 21,10 Km.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Ternate dapat diuraikan sebagai berikut:

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Ternate dengan luas wilayah 5.709,72 km<sup>2</sup> terdiri dari perairan 5.547,55 km<sup>2</sup> dan daratan 162,17 km<sup>2</sup>, yang mencakup delapan kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Ternate 17,39 km<sup>2</sup>, Kecamatan Moti 24,78 km<sup>2</sup>, Kecamatan Batang Dua 29,03 km<sup>2</sup>, Kecamatan Hiri 6,69 km<sup>2</sup>, Kecamatan Ternate Barat 33,88 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Ternate Selatan 20,22 km<sup>2</sup>, Kecamatan Ternate Tengah 13,26 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Ternate Utara 13,92 km<sup>2</sup> serta Hutan Lindung 2,99 km<sup>2</sup>.

Secara astronomis, Kota Ternate terletak diantara 0°25'41,82"- 1°21'21,78" Lintang Utara dan antara 126°7'32,14" - 127°26'23,12" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kab. Halmahera Selatan
- Sebelah Timur : Pulau Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi

Kota Ternate merupakan daerah kepulauan terdiri dari 8 (delapan) pulau, 5 (lima) Pulau berpenghuni (Ternate, Moti, Hiri, Mayau dan Tifure) sedangkan 3 (tiga) pulau lainnya tidak berpenghuni yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida. Sebagaimana ciri daerah kepulauan yang banyak memiliki kelurahan yang memiliki pantai, wilayah ini juga memiliki ciri yang sama dimana dari 78 kelurahan yang tersebar di Kota Ternate, terdapat 56 kelurahan (71,79%) yang berada di daerah pesisir (*beach village*) dan 22 kelurahan lainnya (28,21%) berkarakter bukan daerah pesisir pantai (*non beach village*).



**Tabel 2.1**  
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Data BPS	
		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pulau Ternate	17,39	6,54
2	Moti	24,78	15,28
3	Pulau Batang Dua	29,03	17,90
4	Pulau Hiri	6,69	4,12
5	Ternate Barat	33,88	20,89
6	Ternate Selatan	20,22	12,47
7	Ternate Tengah	13,26	8,18
8	Ternate Utara	13,92	10,44
Jumlah		162,17	100

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

**Gambar 2.1**  
Peta Administrasi Kota Ternate



Sumber: Revisi RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032, 2021



### 2.1.2 Topografi dan Kemiringan Lahan

Kondisi topografi lahan Kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak di tengah Pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah puncak Gunung Gamalama terletak di tengah-tengah pulau. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai 8%.

Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 m dari garis pantai sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup dalam dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada. Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi lebih dari 700 M).

**Tabel 2.2**  
Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kota Ternate

No	Nama Pulau	Kelurahan		Ketinggian (meter)		
		Pantai	Bukan Pantai	0 - 499	500 - 699	700 +
1	Pulau Ternate	5	1	6	-	-
2	Moti	6	-	6	-	-
3	Pulau Batang Dua	6	-	6	-	-
4	Ternate Selatan	11	6	17	-	-
5	Ternate Tengah	4	12	16	-	-
6	Ternate Utara	11	3	14	-	-
7	Ternate Barat	7	-	7	-	-
8	Pulau Hiri	6	-	6	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut:

1. Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
2. Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
4. Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.



### 2.1.3 Geologi

Pulau Ternate sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut, sebagian berada di bawah permukaan laut dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau-pulau lain yang merupakan bagian dari gunung ini adalah Pulau Hiri, terletak di sebelah utara, Pulau Tidore dan Pulau Maitara, terletak bagian selatan. Bentuk Pulau Ternate yang merupakan bagian dari sebuah gunung, maka secara umum morfologinya dapat dibagi menjadi 3 satuan morfologi. Pembagian satuan morfologi tersebut sebagai berikut:

#### 1. Morfologi Kaki Gunung Gamalama

Merupakan daerah kaki gunung api yang hampir datar, terletak di kaki timur, utara dan selatan dari Gunung Gamalama dan melampar memajang sejajar pantai. Dilihat dari bentuk pendataran pantai ini, proses awalnya adalah adanya proses erosi yang terjadi di permukaan tubuh gunung api tersebut, kemudian material yang tererosi diendapkan ke tempat yang kemiringan lerengnya agak landai, pada bagian tubuh gunung terjal material erosi akan masuk ke dalam laut sehingga terbentuk endapan. Kemiringan lereng gunung api ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pedataran di Pulau Ternate yaitu yang paling luas adalah pedataran Timur sekarang menjadi pusat Kota Ternate, pedataran Selatan dan Utara yang relatif kecil. Berikut kondisi pedataran di Pulau Ternate:

- a. Pedataran Kota Ternate Terletak dikaki Timur dengan kemiringan lereng relatif lebih kecil yaitu  $< 8\%$ , sedangkan bagian Barat lebih terjal  $> 8\%$ , hal ini memberi kesempatan pelapukan batuan terendapkan. Pedataran pantai di Timur terbentuk cukup luas memanjang sejajar pantai dengan arah Utara-Selatan, lebar sekitar 1.000 meter lebih. Karena kondisinya cukup strategis dari beberapa aspek maka dipilih sebagai pusat permukiman, perkantoran dan jasa perdagangan. Kota Ternate yang sudah berkembang sejak jaman dulu, perkembangan permukiman dan infrastruktur lainnya sekarang berkembang semakin ke Selatan dan Utara. Pedataran ini tersusun oleh material lumpur, lempung, pasir dan pelapukan dari batuan vulkanik.
- b. Pedataran Kastela Pedataran ini terletak di kaki Selatan Gunung Gamalama memanjang sempit sejajar pantai dengan lebar sekitar 500 meter, kemiringan lereng  $< 5\%$ , merupakan pesisir pantai disebelah Utaranya langsung berbatasan dengan perbukitan yang relatif terjal. Hal ini tersusun oleh batuan vulkanik jenis stufa.
- c. Pedataran Sulamadaha ini terletak di kaki Utara Gunung Gamalama, tidak terlalu luas hanya berupa pedataran mirip cekuk, di sekitarnya ke arah daratan membentuk perbukitan relatif bergelombang. Pedataran ini tersusun oleh batuan vulkanik breksi dan stufa.

#### 2. Morfologi Tubuh Gunung Gamalama

Satuan ini merupakan bagian terbesar dari morfologi gunung api di Pulau Ternate, mulai dari kaki hingga tubuh pada elevasi 1.000 meter, dengan kemiringan lereng antara  $8\% - 40\%$ . Di bagian Timur- Utara tubuh Gunung Gamalama kemiringan lereng relatif lebih landai dibandingkan di bagian Barat. Pada morfologi ini dijumpai 2 buah kaldera yang dikenal dengan Danau Tolire dan Laguna, hal ini menunjukkan bahwa Gunung Gamalama pernah terbentuk kawah-kawah lain selain di puncak gunung. Batuan pembentuk morfologi ini adalah endapan vulkanik yang berasal dari gunung api itu sendiri, yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa dan pasir. Antara ketiga batuan tersebut dijumpai dalam keadaan selang seling.

#### 3. Morfologi Puncak Gunung Gamalama

Satuan ini merupakan bagian paling atas puncak gunung, pada elevasi di atas 1.000 meter dengan kemiringan lereng  $> 40\%$ , di daerah puncak memperlihatkan perpindahan titik kegiatan dari Selatan ke Utara. Menurut Bronto S, 1990, sejarah Gunung Gamalama awalnya dimulai terbentuknya pematang kawah terluar (tertua) berada di bagian Tenggara disebut Bukit Melayu. Kemudian pematang kawah tengah membuka ke arah Utara dikenal dengan nama Bukit Keramat atau Bukit Mediana (+1.669m), selanjutnya terbentuk kawah baru berada di bagian Utara berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 300 meter, puncak setinggi

+1.715 m dikenal dengan nama Gunung Arfat atau Piek van Ternate. Pulau Ternate dilihat dari stratigrafinya, tersusun oleh Gunung Api Holosen terdiri dari breksi vulkanik, lava andesit, pasir dan tufa.

Jenis tanah mayoritas adalah tanah regosol di Pulau Ternate, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Sedangkan jenis tanah rensina ada di Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, dan Pulau Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah Pulau vulkanis dan pulau karang.

#### 2.1.4 Hidrologi

Kota Ternate memiliki 2 buah Danau air tawar yaitu Danau Laguna yang terletak di pesisir pantai Timur Pulau Ternate (sebelah Selatan pusat Kota Ternate) dan Danau Tolire Jaha terletak arah Barat Daya Kota Ternate. Keberadaan Danau Laguna dan Danau Tolire Jaha di Kota Ternate merupakan suatu anugerah bagi masyarakat Kota Ternate. Namun pemanfaatannya hingga kini belum semaksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dengan volume air yang begitu besar (data Danau Laguna  $\pm 3.547,894 \text{ m}^3$  atau  $\pm 3,55$  Milyar Liter), maka Danau ini memiliki potensi sebagai sumber air bersih yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate. Untuk Danau Laguna saat ini telah dilakukan eksplorasi pemanfaatannya sebagai sumber air bersih oleh Pemerintah Daerah dimana telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yaitu instalasi Produksi, Transmisi dan Distribusi.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber air bersih di Pulau Ternate saat ini masih mengandalkan sumber air tanah dalam (sumur dalam) dan sebagian kecil lagi berupa mata air. Hal ini cukup riskan dimana pertumbuhan pembangunan di Kota Ternate sangat pesat yang diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahun, dikhawatirkan 10 tahun lagi lahan terbuka sebagai daerah resapan air telah berubah fungsi sebagai kawasan terbangun/hunian yang menyebabkan potensi air tanah akan semakin berkurang. Diharapkan setelah beroperasinya IPAM ini maka sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate dapat terpenuhi saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah riil berupa tindakan penyelamatan untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan di kawasan sekitar Danau Laguna dan Danau Tolire Jaha.

Selain potensi sumber daya air Danau, Kota Ternate memiliki sumber mata air antara lain Mata Air Ake Gaale, Mata Air Santosa, Mata Air Tege-Tege, Mata Air Ake Rica, dan Mata Air Minta.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua, hingga saat ini masyarakat masih mengandalkan sumur dangkal dan sumur tadah hujan. Adapun untuk Kecamatan Moti terdapat potensi sumber mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas.

Untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Ternate maka dibutuhkan rencana sistem jaringan air baku atau air bersih. Adapun rencana sistem jaringan air baku untuk air minum, meliputi:

1. Membangun bangunan bak penangkap mata air (*broncaptering*) pada sumber air baku di mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti);
2. Pengembangan sumber air baku Danau Laguna dan Danau Tolire sebagai sumber air bersih;
3. Jaringan transmisi dari sumber air baku (sumur bor, dan mata air) ke instalasi pengolahan air minum;
4. Membangun jaringan transmisi baru untuk menambah kapasitas produksi air baku;
5. Pelestarian kawasan sekitar sumber mata air tanah dan air permukaan dengan melakukan penghijauan;
6. Membangun jaringan transmisi pipa bawah laut ke Pulau Hiri.

#### 2.1.5 Klimatologi

Musim di wilayah Kota Ternate beriklim tropis sehingga keadaan iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai ciri indikasi umum iklim tropis. Di wilayah ini juga mengenal dua musim yaitu musim utara-barat dan musim timur-selatan yang biasanya diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahun. Melalui Stasiun Meteorologi dan Geofisika Ternate, selama tahun 2020 diperoleh informasi tentang klimatologi yakni; temperatur rata-rata  $27^{\circ}\text{C}$ , dengan suhu maksimum  $32^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $24^{\circ}\text{C}$ .



**Tabel 2.3**  
Temperatur Rata-rata Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	Temperatur		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2016	28	33	24
2017	27	31	24
2018	28	32	24
2019	27	33	24
2020	27	32	24

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Kelembaban udara rata-rata 86,00%, tingkat penyinaran 64,00% dan kecepatan angin rata-rata 8 km/jam dengan kecepatan maksimum mutlak rata-rata 31 knot terjadi di bulan November. Kelembaban udara paling tinggi terjadi bulan November sebesar 96% dan yang terendah terjadi pada bulan Februari yakni 83%, sedangkan tingkat penyinaran paling sering terjadi pada bulan Februari yaitu 79%.

Curah hujan tertinggi di Kota Ternate pada tahun 2020 terjadi di bulan Juli yaitu sebesar 291 mm<sup>3</sup>, sementara curah hujan terendah terjadi di bulan Januari sebesar 45,1 mm<sup>3</sup>. Begitu juga jumlah hari hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 21 hari dan terendah pada bulan Februari yakni 3 hari.

**Tabel 2.4**  
Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Tingkat Penyinaran Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelembaban Udara (persen)					
- Maksimum	94	102	94	95	91
- Minimum	60	69	56	63	78
- Rata-rata	82	86	82	81	86
Tekanan Udara (mb)	1.012,30	1.011,70	1.011,70	1.011	1.108
Kecepatan Angin (knot)	4	5	4	6	8
Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	228	151	228	146	179
Penyinaran Matahari (persen)	53	72	53	71	64

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

### 2.1.6 Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Bagian wilayah Kota Ternate selain merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan penggunaan lahan eksisting wilayah Kota Ternate.

**Tabel 2.5**  
**Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Fungsi Hutan**  
**Kota Ternate (hektar), Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hutan Lindung	4.403,83	4.342,11	4.403,82	4.392,01	4.392,01
Hutan Produksi Tetap	522,57	462,20	522,56	379,56	379,56
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	5.424,23	5.398,92	5.424,23	5.366,65	5.366,65
Areal Penggunaan Lain / Tubuh Air	n/a	2.319,42	5.999,89	6.025,97	6.025,97
<b>Jumlah Luas Hutan dan Perairan</b>	<b>10.350,63</b>	<b>12.522,65</b>	<b>16.350,50</b>	<b>16.164,19</b>	<b>16.164,19</b>

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Sumber daya lahan di Kota Ternate dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kota Ternate terdiri atas lahan hutan, perkebunan rakyat, permukiman, padang rumput/alang-alang, danau dan lain sebagainya.

### 2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah tidak bisa lepas dari penataan ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun, terutama yang terkait dengan pola ruang. Rencana Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Bentuk kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan bentuk kawasan yang memiliki fungsi budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Metode-metode yang digunakan atau dikembangkan untuk maksud tersebut mengacu pada dua azas utama penataan ruang, yaitu : azas kesesuaian dan azas kelestarian lingkungan. Berdasarkan kedua azas tersebut, maka pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan tertentu seyogianya dipertimbangkan dari sudut kesesuaiannya baik dari segi agro-ekologis (fisik), ekonomi, maupun sosial.

Pemanfaatan Ruang Kota Ternate berdasarkan fungsi utamanya secara makro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kota Ternate pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian ini deliniasi kawasan lindung diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi dan atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat direkomendasikan arahan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, Kawasan lindung di Kota Ternate terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
3. Kawasan Perlindungan Setempat;
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;
5. Kawasan Cagar Budaya;
6. Kawasan Rawan Bencana Alam.



sedangkan Kawasan Budidaya di Kota Ternate terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Produksi;
2. Kawasan Permukiman;
3. Kawasan Jasa dan Perdagangan;
4. Kawasan Perkantoran;
5. Kawasan Industri;
6. Kawasan Pariwisata;
7. Kawasan Perikanan;
8. Kawasan Pertanian;
9. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;
10. Kawasan Terbuka Non Hijau; dan
11. Kawasan Peruntukan lainnya.

Dari tinjauan aspek potensi pengembangan wilayah, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Kota Ternate memiliki nilai ekonomis yang tinggi, antara lain:

### 1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat diunggulkan untuk menyumbang perkembangan perekonomian di Kota Ternate. Potensi kegiatan wisata di Kota Ternate pada dasarnya berwujud objek maupun atraksi kesenian. Kegiatan wisata yang dikembangkan di Kota Ternate meliputi wisata peninggalan sejarah, wisata atraksi seni & budaya, wisata alam, wisata buatan dan wisata kuliner.

#### a. Wisata Peninggalan Sejarah

Kota Ternate memiliki sejarah masa lampau yang gemilang. Ternate merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia bagian Timur yang terbesar dan terluas daerah kekuasaannya. Di masa lampau Ternate juga merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal hingga mancanegara, sehingga mengundang bangsa asing untuk menguasainya. Kebesaran Ternate di masa lampau dapat dilihat dari banyaknya peninggalan sejarah masa lampau dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru kota yang menjadikan Kota Ternate sebagai Kota Pusaka (*Ternate The Heritage City*).

Berikut jejak peninggalan sejarah sebagai objek dan daya tarik wisata di Kota Ternate, antara lain : Kedaton Sultan Ternate, Rumah ibadah (Mesjid Sultan Ternate, Gereja Santo Willibrordus/Gereja Batu dan Klenteng Thian Hou King), benteng-benteng (peninggalan Portugis, Spanyol dan Belanda) dan Wisata Ilmu Pengetahuan, berupa jejak perjalanan Alfred Russel Wallace di Kota Ternate.

#### b. Wisata Atraksi Seni dan Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota Ternate kebudayaan tradisionalnya tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya yang dipegang teguh masyarakatnya. Berikut adalah keindahan tradisi budaya dan religi di Kota Ternate yang dapat dilihat dalam bentuk atraksi wisata, antara lain : Legu Gam, Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyira, Baramasuwen (Bambu Gila), Badabus, Soya-Soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat Perkawinan Malut, Lala, Dana-Dana, Salai Jin, serta Togal di Kelurahan Soa. Festival Ela-ela di seluruh Kota Ternate, Kololi Kie, Festival perahu Kora-kora.

#### c. Wisata Alam

Kota Ternate mempunyai sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik bagi wisatawan, baik yang alami maupun yang sudah dibudidayakan, antara lain : Wisata Pantai/Bahari (Pantai Hol dan Telaga Nita di Kelurahan Sulamadaha, Pantai Sulamadaha di Kelurahan Sulamadaha, Pantai pasir putih Tabanga di Kelurahan Tobololo, Pantai Ake Rica wisata di Kelurahan Rua, Pantai Bobane Ici di Kelurahan Rua, Pantai Kastela di Kelurahan Kastela dan Pantai Jikomalamo di Kelurahan Takome), wisata danau (Danau Laguna di Kelurahan Ngade dan Danau Tolire Kecil, Danau Tolire Besar di Kelurahan Takome), wisata bawah laut, wisata pegunungan, wisata *Geopark* dan lain-lain.



#### d. Wisata Buatan

Objek wisata buatan adalah objek wisata yang dibuat secara sengaja untuk menarik kunjungan wisatawan. Pengembangan objek wisata ini mulai marak dikembangkan di Kota Ternate, baik berupa taman kota, taman bermain, wahana permainan seperti *waterboom*, *outbond* dan lainnya serta wisata buatan yang terintegrasi dengan wisata alam yang dijadikan tempat makan, berkumpul maupun tempat foto/*selfie spot*.

## 2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan, perikanan dan peternakan. Komoditi hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman.

Fungsi utama kawasan pertanian adalah menghasilkan bahan pangan, palawija dan tanaman keras/ perkebunan. Kegiatan pemanfaatan kawasan pertanian sangat penting bagi upaya penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Kawasan pertanian tanaman pangan dan tanaman keras skala besar dapat berfungsi pula sebagai daerah resapan air hujan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Kondisi sektor pertanian di Kota Ternate cukup strategis selain karena *outputnya* merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat serta sebagian besar tenaga di perdesaan bekerja pada sektor ini. Kontribusi pertanian di Kota Ternate cukup besar, hal ini terlihat dari peranannya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah ini pada tahun 2009 sektor pertanian menempati posisi keempat setelah sektor perdagangan, jasa-jasa, pengangkutan/komunikasi, di samping itu yang tidak kalah penting andil sektor pertanian dalam perdesaan. Untuk itu perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang pertanian semakin meningkat setiap tahun melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor pertanian sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

Produksi pertanian di Kota Ternate dibedakan:

#### a. Pertanian Tanaman Perkebunan

Jenis usaha tani komoditi tanaman perkebunan banyak diusahakan di Kota Ternate. Secara historis komoditi tanaman perkebunan terutama cengkeh dan pala di Kota Ternate sudah dikenal sejak zaman kolonial sehingga dulu kota Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Sampai saat ini kedua produksi perkebunan ini tersebut masih menjadi bagian dari mata pencaharian sebagian penduduk. Produksi perkebunan tersebut tidak saja dipasarkan di dalam negeri tetapi juga merupakan komoditi ekspor yang mempunyai prospek ekonomi cukup potensial untuk dipasarkan ke luar negeri. Kegiatan



pengembangan produksi tanaman perkebunan di Kota Ternate telah memberikan dampak positif pada penumbuhan ekonomi daerah dan penyediaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha. Adapun jenis tanaman perkebunan yang diusahakan rumahtangga pertanian di daerah ini antara lain; cengkeh, kelapa, pala, kakao dan kayu manis.

Berdasarkan data yang diterbitkan BPS tahun 2020, luas produksi perkebunan untuk kelapa 566,1 Ha, kayu manis 4,59 Ha, kakao 9 Ha, cengkeh 330 Ha dan pala sebesar 1.006 Ha.

#### **b. Pertanian Tanaman Pangan**

Sektor pertanian tanaman pangan memiliki nilai tambah bagi masyarakat di Kota Ternate. Jenis tanaman yang diusahakan seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar, singkong, dan lainnya. Produksi pertanian yang dihasilkan cukup terserap untuk konsumsi domestik masyarakat.

Arahan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan:

- Meliputi Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri, Tifure dan Pulau Mayau.
- Untuk tanaman pangan jenis lainnya dapat dikembangkan atas dasar penelitian potensi lahan di setiap kawasan.
- Peningkatan jumlah produksi dengan mempertahankan pemanfaatan lahan yang ada (intensifikasi lahan).

Selanjutnya potensi tanaman pangan seperti jagung dan ubi kayu. Kedua jenis tanaman ini diminati oleh masyarakat Kota Ternate sebagai makanan utama selain nasi. Pada tahun 2020 luas panen jagung adalah 83,3 Ha.

#### **c. Pertanian Hortikultura**

Tingkat sebaran tanaman pangan jenis hortikultura di Kota Ternate tidak merata pada setiap kecamatan. Sumber data yang diperoleh memperlihatkan terdapat beberapa jenis tanaman dapat dikembangkan pada beberapa kecamatan saja yaitu: di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Moti dan Kecamatan Batang Dua dengan luas kurang lebih 1.063 Ha, hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik lahan untuk menunjang tumbuhnya jenis tanaman dan memiliki keterbatasan untuk tumbuh pada lahan tertentu.

Komoditas hortikultura di Kota Ternate dibedakan:

- Tanaman Sayuran
- Tanaman Buah-buahan

Tanaman Hortikultura pada tahun 2020, luas panen cabai sekitar 66 Ha dengan hasil produksi panennya sebanyak 303 kwintal. Luas panen tomat sekitar 46 Ha dengan hasil produksi sebanyak 743 kwintal tanaman biofarmaka di Kota Ternate meliputi jahe, laos, kencur dan kunyit. Produksi tanaman jahe sebesar 915 kg, laos sebesar 2.127 kg, kencur sebesar 580 kg dan kunyit sebesar 834 kg. Tanaman biofarmaka banyak ditanam di Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Tengah. Produksi buah-buahan di Kota Ternate meliputi buah mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, salak, rambutan, nenas, nangka, sukun, jambu, belimbing, duku, alpukat dan sirsak. Buah dengan produksi terbanyak yaitu mangga dengan hasil produksi sebanyak 1.206 kwintal.

#### **d. Peternakan**

Sektor peternakan memiliki nilai tambah bagi masyarakat di Kota Ternate. Ternak yang diusahakan oleh peternak dengan hasil seperti; Sapi, Kambing, Babi, Ayam dan lainnya. Potensi peternakan, di mana kebutuhan daging sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga untuk memenuhinya Pemerintah masih harus memasok pasokan daging dari luar wilayah Kota Ternate terutama dari Pulau Halmahera dan dari luar Maluku Utara, pada tahun 2020 populasi ternak di Kota Ternate yang paling banyak adalah Sapi dan Kambing dengan populasi sapi pada tahun 2020 sebanyak 3.282 ekor dan kambing 24.692 ekor.

### 3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi perikanan di Kota Ternate terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap serta potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan budidaya perikanan di Kota Ternate terdiri atas budidaya laut dan budidaya darat. Kawasan perikanan budidaya darat sebagian besar terdapat di Kelurahan Tadenas (Kecamatan Moti), Kelurahan Ngade, dan Gambesi (Kecamatan Ternate Selatan). Jenis ikan meliputi ikan nila, dan mujair dan Mas. Khusus di Kelurahan Gambesi, Fitu dan Ngade merupakan budidaya (pembibitan) ikan air tawar. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan darat berupa intensifikasi lahan dan peningkatan produksi. Khususnya untuk Danau Tolire pengembangan budidaya perikanan darat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai kualitas air Danau dan jenis ikan yang akan dibudidayakan.

Kegiatan kawasan budidaya perikanan laut khususnya rumput laut terdapat pada Kecamatan Moti dan Batang Dua. Rencana pengembangan budidaya perikanan laut yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut, mengingat potensi perikanan dan wilayah perairan memungkinkan untuk pengembangan budidaya perikanan laut.

Kawasan perikanan tangkap tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kota Ternate dengan jenis ikan yang ditangkap antara lain Pelagis besar antara lain jenis Tuna, Cakalang, Tenggiri, Kue (*giant traveling*) dan Cucut sedangkan Pelagis Kecil antara lain jenis layang, kembung, teri, julung, dan Tembang. Untuk jenis Ikan Demersal antara lain kakap, ikan kerapu, baronang.

Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, laut merupakan sumber penghidupan yang menjanjikan. Banyak masyarakat Kota Ternate yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu tradisi masyarakat Kota Ternate yang menjadikan ikan sebagai makanan pendamping nasi yang wajib dikonsumsi setiap hari, membuat nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Untuk mendukung pengembangan potensi perikanan, di Kota Ternate terdapat dua pelabuhan perikanan yaitu pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate Selatan dan Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Berdasarkan data yang ada, produksi perikanan Kota Ternate tahun 2020 yang terbesar adalah Kecamatan Ternate Utara yaitu sebesar 7.642 ton dan Kecamatan Ternate Selatan sebesar 7.166 ton.

Dalam konsep minapolitan di Kota Ternate terbagi zona-zona yaitu:

- Zona inti kawasan minapolitan terletak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong;
- Zona pendukung kawasan minapolitan terletak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa; dan
- Zona hinterland sebagai kawasan penyangga terletak di Pulau Hiri, Moti dan gugus Pulau Batang Dua.

Hal-hal yang diinginkan terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate ke depan yaitu:

- Aspek Infrastruktur, untuk infrastruktur pendukung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa cukup memadai. Pemerintah Kota Ternate juga mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) naik status menjadi pelabuhan samudera, sehingga dengan demikian akan terjadi pembagian kewenangan dalam hal pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan.
- Aspek kelembagaan dan regulasi, yang ingin diwujudkan pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan: produksi komoditas perikanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
- Keinginan para pengusaha perikanan di Kota Ternate agar ekspor hasil-hasil perikanan dari Kota Ternate yang melalui laut dapat dilakukan langsung dari pelabuhan Ternate ke negara tujuan ekspor tanpa harus melalui pelabuhan Bitung atau Surabaya. Selanjutnya Pemerintah Kota Ternate berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat membantu memperkuat kelembagaan koperasi nelayan dan memberdayakan kelompok-kelompok nelayan, sehingga dapat membantu para nelayan untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu melakukan reformasi regulasi dan kebijakan perijinan, bea masuk, serta menghilangkan peraturan yang dapat menghambat pengembangan sektor perikanan.



- Aspek Pendanaan, tentunya Pemerintah Kota Ternate sangat mengharapkan bantuan dari kementerian terkait untuk dapat mewujudkan konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate diharapkan ada kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang terkait lewat program-program pembinaan ekonomi, dunia usaha, pengembangan investasi usaha serta fasilitas peluang-peluang dari lembaga keuangan dan perbankan.
- Aspek Sosial Budaya, hal-hal yang ingin diwujudkan antara lain adanya peningkatan sarana sosial seperti pada pendidikan dan kesehatan, pembinaan tenaga kerja serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, begitu juga adat istiadat terus dipupuk.

Rencana kegiatan utama yang mendukung program Minapolitan antara lain:

- Pembangunan pabrik es di Pulau Moti dan Pulau Batang Dua;
- Pembangunan dan pengembangan dermaga di Pulau Hiri, Moti, Mayau dan Tifure;
- Pembangunan Pos Pemantau Angkatan Laut di Batang Dua;
- Pembangunan gedung pengolahan hasil perikanan;
- Pembangunan BBM industri di PPN Bastiong;
- Pembangunan dermaga tipe I (*lay by pier*) dan (*carrier pier*) di PPN Bastiong;
- Pembangunan *cold storage* PPN Bastiong;
- Pembangunan Prosesing Tuna di PPN Bastiong; dan
- Pembangunan Dermaga Tipe T di Bastiong.

#### 4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Sebagai kota orde satu di wilayah Provinsi Maluku Utara, maka peran industrialisasi di Kota Ternate dapat merupakan dukungan layanan bagi kawasan kota dan kabupaten sekitarnya. Pengelompokan kegiatan industri yang ada dan berpotensi dikembangkan di Ternate saat ini adalah tipologi industri kecil/lingan dan menengah.

Penetapan lokasi industri di suatu tempat tetap tergantung dari tipologi industri dalam hubungannya dengan kebutuhan keterdekatan pada pasar atau pada lokasi bahan baku. Dalam hubungannya dengan pasar dan bahan baku, maka dikenal istilah tipe industri primer (pengolah/pengambil bahan mentah primer), industri sekunder (pengolah bahan setengah jadi) dan industri tersier (kelompok jasa/servis/perantara dengan pengecer). Arah pengembangan industri adalah disesuaikan dengan keadaan pertumbuhan dunia industri yang sudah ada, serta kemungkinan peluang pengembangan jenis-jenis baru mengikuti perkembangan kebutuhan layanan bagi kehidupan perkotaan. Sebagai kota bercirikan pesisir dan kepulauan, maka kebutuhan dukungan layanan industri perkapalan kapasitas tertentu dan perbaikan permesinan kapal. Sedangkan sebagai kota jasa dan perdagangan yang juga mengandalkan transportasi darat, maka dibutuhkan dukungan layanan industri pendukung transportasi darat seperti industri perbengkelan kendaraan, karoseri serta pencucian/perawatan kendaraan bermotor. Sebagai kota wisata dibutuhkan dukungan industri kerajinan barang seni/cendera mata. Sebagai kota yang berbasis perikanan (minapolitan) maka dukungan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan sangat dibutuhkan sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi.

Penetapan skala prioritas kawasan unggulan pertanian per kecamatan, difokuskan pada upaya pengembangan sentra pengembangan potensi sektor pertanian, meliputi:

##### 1. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Tengah

Sistem budidaya pertanian di Kecamatan Ternate Tengah merupakan sistem pertanian lahan kering dengan komposisi pengembangan pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pertanian berbasis tanaman perkebunan adalah budidaya tanaman pertanian yang dilakukan pada lahan-lahan yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan komoditas utama adalah komoditas perkebunan. Pertanian berbasis tanaman perkebunan di Kecamatan Ternate Tengah dilaksanakan pada tipe lahan kering dengan kondisi drainase baik hingga agak cepat. Pengembangan komoditi perkebunan

meliputi cengkeh dan pala, sedangkan tanaman hortikultura yaitu durian dan sukun, juga dikembangkan tanaman semusim baik tanaman pangan maupun hortikultura (jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah dan tomat).

## **2. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Selatan**

Sistem budidaya pertanian di Kecamatan Ternate Selatan merupakan sistem pertanian lahan kering dengan komposisi pengembangan pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pertanian berbasis tanaman perkebunan adalah budidaya tanaman pertanian yang dilakukan pada lahan-lahan yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan komoditas utama adalah komoditas perkebunan. Pertanian berbasis tanaman perkebunan di Kecamatan Ternate Tengah dilaksanakan pada tipe lahan kering dengan kondisi drainase baik hingga agak cepat. Pengembangan komoditi perkebunan cengkeh, pala dan kelapa sedangkan tanaman hortikultura yaitu durian dan sukun pala, juga dikembangkan tanaman semusim baik tanaman pangan maupun hortikultura (jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah dan tomat).

## **3. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Utara**

Sistem budidaya pertanian di Kecamatan Ternate Utara merupakan sistem pertanian lahan kering dengan komposisi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Ternate Utara merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik hingga agak cepat. Pertanian tanaman pangan lahan kering diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu, jagung, tanaman hortikultura (bawang, cabe merah dan tomat), juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

## **4. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Pulau Ternate**

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Pulau Ternate merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik hingga agak cepat. Pertanian tanaman pangan lahan kering yang diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura bawang, cabe merah dan tomat, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

## **5. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Barat**

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kec. Ternate Barat merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik hingga agak cepat. Pertanian tanaman pangan lahan kering yang diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura bawang, cabe merah dan tomat, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

## **6. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Pulau Moti**

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Pulau Moti merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah sedang sampai baik. Pertanian tanaman pangan lahan kering diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura: bawang, cabe merah dan tomat. Pada zona ini juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pala, kakao, Kelapa dan durian.



## 7. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Pulau Hiri

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Pulau Hiri merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik sampai agak cepat. Prioritas pengembangan pertanian meliputi tanaman pangan kacang tanah, ubikayu/ubijalar, jagung; tanaman hortikultura cabe merah dan tomat.

## 8. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Batang Dua

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Batang Dua merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah sedang sampai baik. Prioritas pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura bawang merah, cabe dan tomat, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

Sementara itu, sebagai kota yang mengusung moto sebagai kota jasa, memfokuskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Sektor UKM yang berkembang di Kota Ternate adalah sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, perikanan, pertanian dan peternakan. UKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate selama 2020 sebanyak 13.765 unit, dengan 21.723 orang tenaga kerja. UKM sektor Perdagangan merupakan UKM yang paling banyak di Ternate, yakni sebanyak 9.058 unit, dengan serapan tenaga kerja sebesar 12.683 orang.

Dan untuk mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, Pemerintah Kota Ternate berusaha membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang perdagangan tersebut, sehingga sarana perdagangan pun setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sektor perdagangan, maka selain dari segi sarana perlu juga dibantu dari segi permodalan. Dari data yang ada menunjukkan, bahwa pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang berbadan hukum berjumlah 976, yang terdiri dari perseroan terbatas sebanyak 183 unit, CV sebanyak 421 unit, Koperasi sebanyak 46 unit, dan perorangan sebanyak 326 unit.

### 2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam didefinisikan sebagai perlindungan kawasan dengan tujuan untuk melindungi manusia dan aktivitas kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi dan tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan, kekeringan dan lain-lain.

Wilayah Kota Ternate merupakan salah satu daerah di Indonesia yang termasuk rawan bencana. Hal ini karena Kota Ternate berada pada interaksi 3 (tiga) lempeng besar dunia, yakni lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia dan lempeng Pasifik. Kota ternate juga merupakan daerah yang dilewati Pasifik *Ring of Fire* (rangkaian gunung merapi aktif dunia), Pulau Ternate secara langsung memiliki kerentanan terhadap bencana Gunung berapi dimana Pulau Ternate terbentuk dari proses pembentukan Gunung Api Gamalama yang muncul dari dasar laut. Gunung Api Gamalama adalah sala satu gunung api sangat aktif di Indonesia, tercatat sudah sebanyak 70 kali letusan dimulai dari tahun 1538 - 2016. Jarak letusan satu dengan berikutnya bervariasi dari 1 tahun hingga 50 tahun tetapi umumnya kurang dari 10 tahun. Gunung Api Gamalama (1.715 mdpl) berbentuk gunung strato, tersusun oleh bahan vulkanik berupa lava, piroklastik dan lahar. Korban manusia tercatat pada letusan tahun 1673, 1775, 1838 dan 1871. Pada tahun 1775 sebanyak 141 jiwa hilang di Kelurahan Takome, disebabkan oleh letusan freatik yang membentuk maar Tolire kecil.

Selain ancaman bencana banjir/banjir lahar dingin dari letusan gunung api, Kota Ternate juga memiliki ancaman bencana lain seperti: Gelombang pasang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi dan tsunami. Resiko bencana di Kota Ternate dipengaruhi oleh ancaman bencana,



kerentanan dan kapasitas adaptasi dalam menghadapi ancaman yang ada, Curah hujan yang cukup tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh eksploitasi air yang berlebihan dan pembangunan infrastruktur semakin meningkatkan ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah maupun komunitas Kota Ternate. Dampak perubahan iklim yang saat ini ada, secara signifikan mempengaruhi tingkat risiko bencana, karena selain mempengaruhi tingkat risiko bencana khususnya hidrometeorologis dan biologis, juga mempengaruhi kerentanan dan kapasitas yang ada. Kompleksnya bencana di Kota Ternate sebagai gerbang masuk di Maluku Utara maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana Penanggulangan Bencana Kota Ternate diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam 5 (lima) tahun mendatang. Baik bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Dimulai dari pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Untuk mengidentifikasi kawasan rawan bencana di Ternate, perlu dilakukan pengamatan terhadap kondisi geologi yang menunjukkan adanya daerah rawan terhadap bencana, agar dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar akibat adanya bencana. Kawasan rawan bencana meliputi seluruh wilayah Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate, adapun jenis bencana yang terdapat di Kota Ternate, antara lain:

1. Kawasan rawan bencana gempa Bumi terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
2. Kawasan rawan tanah longsor di Kota Ternate, terdapat pada hampir seluruh wilayah Kota Ternate, terutama pada kawasan dengan tingkat kemiringan lereng diatas 40% dengan kondisi vegetasi yang sedikit/gundul. Untuk kawasan dengan kemiringan lereng di bawah 40% pada umumnya berada pada kawasan pertambangan bahan galian mineral non logam dan batuan (Galian-C), kawasan perumahan dan permukiman yang pengembangannya dilakukan dengan pemerataan lahan serta perumahan dan permukiman yang berada di bantaran sungai/kalimati/barangka yang pembangunannya tidak memperhatikan jarak sempadan. Sedangkan untuk kawasan pesisir pada umumnya berada pada wilayah pantai yang topografinya merupakan tebing.
3. Kawasan rawan banjir yang terdapat di Kota Ternate terdiri dari banjir genangan, Banjir Rob dan banjir bandang/kiriman. Untuk banjir genangan terjadi di beberapa kelurahan, antara lain : Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Bastiong Karance, Kelurahan Gamalama, Kelurahan Jati, Kelurahan Santiong, Kelurahan Salero dan Kelurahan Akehuda. Untuk banjir rob terjadi di beberapa kelurahan yang berada di wilayah pesisir pantai. Sedangkan untuk banjir bandang terjadi akibat meluapnya air dari beberapa sungai/kalimati/barangka yang terdapat di Kota Ternate, antara lain : Kelurahan Tubo, Kelurahan Dufa-Dufa, Kelurahan Togafo, Kelurahan Loto, Kelurahan Marikurubu, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Takoma, Kelurahan Tanah Tinggi dan lain-lain.
4. Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi daerah rawan I, rawan II dan rawan III, yang meliputi:
  - 1) Kawasan rawan bencana terhadap aliran massa, berupa lahar/banjir, kemungkinan perluasan awan panas serta aliran lava dan rawan bencana terhadap hujan abu, tanpa memperhatikan arah tiupan angin dan kemungkinan lontaran batu (pijar) dengan radius 4,5 Km. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan I terdapat di Kelurahan Dufa-dufa, Tabam, Tubo, Kulaba, Bula, Tobololo, Takome, Lotto, dan Kelurahan Togafo. Khusus untuk Kelurahan Kulaba, harus diwaspadai terhadap bahaya banjir pada musim penghujan. Disamping itu, pemukiman yang juga harus waspada terhadap kemungkinan perluasan lahar adalah Kelurahan Taduma, Dorpedu, Kastela dan Kel. Toboko dengan luas kurang lebih 1.028,29 Ha.



- 2) Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan II terdapat di Sungai/barangka tepatnya di Kelurahan Sulamadaha hingga bagian timur laut yang berbatasan dengan Sungai Togorara. Alur Sungai yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah Sungai Togorara, Sungai Kulaba, Sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Kelawa, Sungai Tareba, Sungai Piatoe, Sungai Taduma dan Sungai Kastela. Pemukiman yang mungkin terancam terhadap bahaya lahar adalah Kelurahan Tubo, Tafure, Kulaba, Tobololo, Takome dan Kelurahan Loto, rawan bencana terhadap lontaran batu (pijar), Hujan abu lebat adalah kelurahan Foradiahi, Marikurubu (Lingkungan Air Tege-Tege dan Lingkungan Tongole), Buku Bendera dan Kelurahan Moya dengan luas kurang lebih 1.525,18 Ha.
- 3) Kawasan bencana III adalah kawasan yang letaknya terdekat dengan sumber bahaya dan sering terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu (pijar) dan aliran lava. Berhubung sangat tinggi tingkat kewaspadaannya maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. Sebagian alur sungai utama yang termasuk ke dalam daerah ini dan merupakan sarana air untuk material letusan yang bersifat aliran adalah: Sungai Piatoe, Sungai Tareba dan Sungai Takome, Sungai Sososma, Sungai Ruba, Sungai Kulaba, serta Sungai Togorara.

Sedangkan untuk daerah sangat rawan terhadap material lontaran atau guguran batu (pijar), meliputi daerah puncak dengan radius 2,5 km dari pusat letusan (Kawah Gn. Arfat). Di dalam kawasan rawan bencana III ini tidak terdapat beberapa pemukiman penduduk.

5. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berpotensi terjadi di sepanjang tepian pantai Kota Ternate.
6. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
7. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate, terutama pada kawasan dengan lahan terbuka tanpa adanya vegetasi.
8. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dapat terjadi di seluruh kawasan hutan dan lahan pertanian/perkebunan di wilayah Kota Ternate. Bencana ini dapat terjadi karena perubahan iklim yang menyebabkan kemarau panjang yang disertai akibat dari ulah manusia yang melakukan pembukaan dan penguasaan lahan dengan cara pembakaran vegetasi dan semak belukar.
9. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan meliputi kawasan tandus yang merupakan kawasan dengan tingkat hujan yang rendah dan tidak memiliki sumber air.

Wilayah Rawan Bencana di Kota Ternate dalam perkembangannya terus memperhatikan perubahan iklim, data jurnal dan riset tentang bencana di Kota Ternate, sehingga perubahan wilayah titik kawasan rawan bencana, siklus kebencanaan dan potensi bencana lainnya dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak resikonya melalui upaya-upaya adaptasi dan mitigasi kebencanaan.

**Tabel 2.6**  
Data Historis Bencana Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun dan Jenis Bencana	Historis Bencana				
	Kecamatan	Kerugian (Rp.)	Waktu Kejadian	Dampak	Keterangan
2016					
Gempa Bumi	Kec. Batang Dua	170.000.000	3 Juni 2016	55 Rumah Rusak Berat	
Erupsi Gunung Gamalama	Kecamatan di Wilayah Kota Ternate	-	3 Agustus 2016	-	
2017					
Banjir Bandang	Kec. Moti	8.000.000.000	17 Juni 2017	25 Rumah Rusak Sedang	
Tanah Longsor	Kec. Pulau Hiri	-	17 Juni 2017	-	
Tanah Longsor	Kec. Ternate Selatan	250.000.000	1 Juni 2017	4 Rumah Rusak Sedang	
Banjir Bandang	Kec. Pulau Ternate	261.000.000	25-Sep-17	75 Rumah Rusak Ringan	
2018					
Angin Puting Beliung	Kec. Ternate Utara	50.000.000	9 Februari 2018	4 Rumah Rusak Sedang	
2019					
Gempa Bumi (Potensi Tsunami)	Kec. Batang Dua	250.000.000	15-Nov-19	-	
2020					
Bencana Non Alam (Covid-19)	Kecamatan di Wilayah Kota Ternate	-	1 Maret 2020	-	

Sumber: BPBD Kota Ternate, 2021

### 2.1.9 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk Kota Ternate secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan Pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk Kota Ternate tahun 2019 sebanyak 233.208 jiwa. dibandingkan dengan tahun 2018, penduduk Ternate mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. Data jumlah penduduk Kota Ternate 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 207.789 jiwa,



sedangkan pada tahun 2019 mencapai 233.208 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sekitar 25.419 jiwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir.

**Tabel 2.7**  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2014-2019

No	Kecamatan	Tahun Perkembangan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pulau Ternate	16.209	16.553	16.892	17.233	8.720	8.914
2	Moti	4.814	4.909	5.001	5.094	5.404	5.525
3	Pulau Batang Dua	2.712	2.762	2.812	2.861	3.055	3.123
4	Pulau Hiri	3.003	3.064	3.124	3.183	3.359	3.434
5	Ternate Selatan	71.476	73.263	75.019	76.794	78.300	80.046
6	Ternate Tengah	58.698	60.312	61.839	63.385	63.960	65.403
7	Ternate Utara	50.877	52.134	53.341	54.561	55.981	57.229
8	Ternate Barat	-	-	-	-	9.326	9.534
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>		<b>207.789</b>	<b>212.997</b>	<b>218.028</b>	<b>223.111</b>	<b>228.105</b>	<b>233.208</b>
<b>Pertumbuhan Penduduk (%)</b>		<b>2,50</b>	<b>2,51</b>	<b>2,34</b>	<b>2,35</b>	<b>2,24</b>	<b>2,21</b>

Sumber: BPS Kota Ternate, 2021

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Sensus Penduduk, dengan tujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menurut *de facto* dan *de jure*, serta menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk Kota Ternate hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 205.001 jiwa yang terdiri atas 103.119 jiwa penduduk laki-laki dan 101.882 jiwa penduduk perempuan.

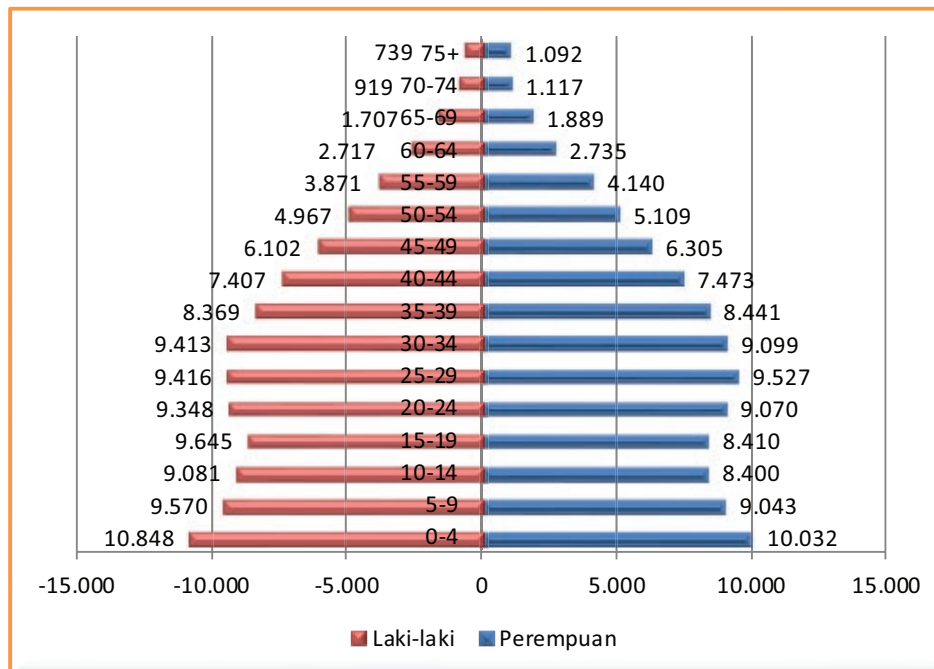
**Tabel 2.8**  
Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pulau Ternate	4.440	4.295	8.735	103,4
2	Moti	2.397	2.414	4.811	99,3
3	Pulau Batang Dua	1.434	1.357	2.791	105,7
4	Pulau Hiri	1.481	1.441	2.922	102,8
5	Ternate Barat	4.420	4.368	8.788	101,2
6	Ternate Selatan	37.309	37.020	74.329	100,8
7	Ternate Tengah	26.993	26.650	53.643	101,3
8	Ternate Utara	24.645	24.337	48.982	101,3
<b>Ternate</b>		<b>103.119</b>	<b>101.882</b>	<b>205.001</b>	<b>101,2</b>

Sumber: Sensus Penduduk 2020, BPS Kota Ternate, 2021

Sementara itu, jumlah rasio jenis kelamin Penduduk Kota Ternate pada tahun 2020 adalah 101,2. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada pada kelompok umur 0-4 dan 10-14 (108,1), sedangkan Rasio jenis kelamin terendah berada pada kelompok umur di atas 75 tahun (67,7). Rincian data tentang karakteristik penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada suatu wilayah.

**Grafik 2.1**  
Piramida Penduduk Kota Ternate 2020



Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Ditinjau dari angka kepadatan dan distribusi penduduk di Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh jumlah pertumbuhan penduduk dan luas wilayah daerah tersebut. Angka kepadatan penduduk ini bermanfaat untuk mengetahui daya tampung dari suatu daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta untuk menentukan strategi pembangunan yang dapat dikembangkan di masa datang.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Ternate pada tahun 2020 berjumlah 205.001 jiwa yang terdistribusi pada 8 (delapan) kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah sebesar 74.329 jiwa atau sekitar 36,25% dari jumlah penduduk Kota Ternate, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.791 jiwa atau sekitar 1,36% dan Kecamatan Pulau Hiri dengan jumlah penduduk sekitar 2.922 jiwa atau sekitar 1,42% dari jumlah penduduk Kota Ternate.

**Tabel 2.9**  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per km <sup>2</sup>
1	Pulau Ternate	8.735	17,39	502,3
2	Moti	4.811	24,78	194,15
3	Pulau Batang Dua	2.791	29,03	96,14
4	Pulau Hiri	2.922	6,69	436,77
5	Ternate Barat	8.788	33,88	259,39
6	Ternate Selatan	74.329	20,22	3.676,01
7	Ternate Tengah	53.643	13,26	4.045,48
8	Ternate Utara	48.982	13,92	3.685,63
Ternate		205.001	162,17	1.264,11

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021



Berdasarkan Tabel 2.9 menunjukkan distribusi dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Kota Ternate tahun 2020 mencapai 1.264,11 jiwa/Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ternate Tengah yaitu 4.045,48 jiwa/Km<sup>2</sup>, kemudian disusul oleh Kecamatan Ternate Utara dengan kepadatan 3.685,63 jiwa/Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Ternate Selatan dengan kepadatan 3.676,01 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan kepadatan rata-rata 96,14 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk tersebut dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan wilayah kecamatan. Sedangkan secara keruangan, pada dasarnya distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Ternate dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta kemudahan aksesibilitas terhadap wilayah sekitarnya, sehingga distribusi penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Ternate Selatan.

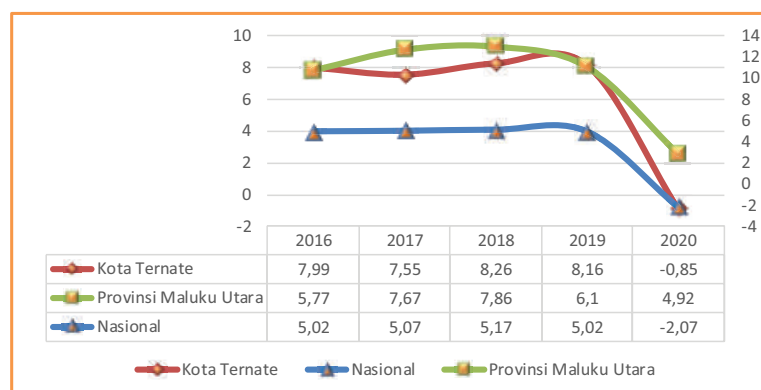
## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Ternate terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 2016-2020.

**Grafik 2.2**  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi  
Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Ternate Dalam Angka (diolah), 2021

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh Pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 7,59% hingga 8,25%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 melambat sebesar -0,85%. Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Ternate sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota Ternate selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,26%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -0,85%.



## 2. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Ternate tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 25,13% dan ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 yakni 26,42%, kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,15% dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 16,54% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,13% dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 16,69%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 8 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel 2.10.

**Tabel 2.10**  
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB  
Kota Ternate Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,02	3,91	3,80	3,81	4,08
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
C	Industri Pengolahan	3,52	3,31	3,12	2,91	2,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	6,54	6,63	6,74	6,77	7,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,88	25,73	26,32	26,42	25,13
H	Transportasi dan Pergudangan	16,30	16,88	16,63	16,69	13,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,13	1,10	1,09	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,77	7,73	7,72	7,58	8,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,98	6,95	6,84	6,68	7,31
L	<i>Real Estate</i>	0,22	0,23	0,24	0,23	0,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	0,75	0,74	0,75	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,53	16,06	16,17	16,54	19,15
P	Jasa Pendidikan	5,05	5,27	5,13	5,04	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,14	3,22	3,23	3,28	3,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,90	1,89	1,91	1,93	1,98
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

## 3. Pertumbuhan PDRB

Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2014 PDRB Kota Ternate sudah menggunakan tahun dasar terbaru yaitu tahun 2010. Selain itu, PDRB sudah dirinci menjadi 17 sektor lapangan usaha yang pada perhitungan sebelumnya hanya berdasarkan 9 sektor lapangan usaha.

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di suatu wilayah memberikan gambaran potensi perekonomian wilayah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate terus mengalami peningkatan



dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 10,54 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,07 triliun dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,61 triliun rupiah. Disamping itu, PDRB atas dasar harga konstan Kota Ternate tahun 2020 diperkirakan terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019. Pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga konstan sebesar 7,28 triliun rupiah dan menurun pada tahun 2020 dengan perkiraan menjadi 7,22 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 0,85 persen.

PDRB Kota Ternate disusun berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha. Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki distribusi persentase terbesar dibanding kategori lainnya. Dengan kata lain, tiga kategori tersebut memiliki andil paling besar terhadap perekonomian Kota Ternate. Besaran distribusi persentase ketiga kategori tersebut pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 25,13 persen untuk kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan untuk kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 19,15 persen. Sementara kategori transportasi dan pergudangan mempunyai andil terhadap perekonomian Kota Ternate sebesar 13,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Kategori G) masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Kota Ternate.

**Tabel 2.11**  
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	316.733,50	399.765,00	368.410,70	404.980,50	430.481,80
Pertambangan dan Penggalian	5.375,10	6.175,10	6.938,20	7.721,30	7.974,30
Industri Pengolahan	277.049,20	287.769,50	302.309,80	309.052,70	283.566,60
Pengadaan Listrik dan Gas	11.132,10	13.161,90	13.714,00	14.742,80	15.537,80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.976,80	6.504,20	6.842,00	7.233,30	7.835,60
Konstruksi	515.234,50	576.154,20	653.365,70	718.424,30	740.125,50
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.038.861,40	2.235.634,10	2.550.306,60	2.805.481,80	2.650.537,50
Transportasi dan Pergudangan	1.284.317,50	1.466.397,30	1.611.171,10	1.772.048,40	1.385.624,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.855,80	98.406,60	106.287,10	115.208,50	107.413,70
Informasi dan Komunikasi	612.285,60	671.765,20	748.147,60	804.823,10	861.723,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	549.659,40	603.705,10	662.804,70	709.227,60	770.839,40
<i>Real Estate</i>	17.654,50	20.147,50	22.878,50	24.691,50	23.585,60
Jasa Perusahaan	58.321,20	65.254,10	72.148,20	79.300,30	78.250,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.301.947,40	1.395.127,20	1.566.761,70	1.756.431,10	2.020.544,20
Jasa Pendidikan	397.678,80	457.845,30	497.183,70	534.633,20	562.017,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247.483,50	280.124,30	313.233,60	348.276,40	394.130,20
Jasa Lainnya	149.653,10	164.534,20	185.324,20	205.212,70	209.103,40
<b>TOTAL</b>	<b>7.877.219,50</b>	<b>8.688.470,50</b>	<b>9.687.833,40</b>	<b>10.617.489,60</b>	<b>10.549.290,70</b>

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.12**  
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	212.810,60	219.761,00	228.754,50	245.396,80	256.969,20
Pertambangan dan Penggalian	3.697,80	4.086,50	4.504,20	4.950,70	4.944,40
Industri Pengolahan	213.039,30	216.953,00	224.867,30	228.243,50	210.982,50
Pengadaan Listrik dan Gas	9.761,30	10.188,90	10.371,10	11.135,10	11.607,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.780,50	5.160,10	5.426,60	5.718,50	6.170,20
Konstruksi	390.561,10	423.212,20	465.002,70	507.542,30	517.141,40
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.491.361,80	1.614.531,60	1.765.969,70	1.938.210,80	1.793.908,00
Transportasi dan Pergudangan	877.991,40	962.332,20	1.046.436,30	1.122.408,70	892.949,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64.360,00	70.949,5	76.105,10	82.024,00	76.559,60
Informasi dan Komunikasi	545.345,90	589.791,20	637.917,20	704.550,40	778.260,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	400.158,70	423.112,80	448.368,00	472.006,70	514.482,80
Real Estate	13.552,60	14.974,50	16.352,50	17.569,50	16.689,80
Jasa Perusahaan	46.181,50	50.412,10	54.023,00	57.665,30	56.510,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	930.913,20	989.113,30	1.078.581,40	1.167.562,40	1.330.430,40
Jasa Pendidikan	275.956,60	295.967,20	311.024,20	325.215,70	336.759,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187.749,10	206.125,40	224.600,40	244.264,30	266.240,50
Jasa Lainnya	117.213,20	125.783,40	138.002,40	151.542,50	153.176,50
<b>TOTAL</b>	<b>5.785.434,40</b>	<b>6.222.453,80</b>	<b>6.736.306,70</b>	<b>7.286.007,20</b>	<b>7.223.782,10</b>

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan data PDRB harga konstan, hal ini untuk menghindari terjadinya perubahan harga.

Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2020 menurun dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Pada tahun 2019, perekonomian Kota Ternate tumbuh sebesar 8,16 persen, dan menurun menjadi -0,85 persen di tahun 2020.

**Tabel 2.13**  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2016 - 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,89	3,27	4,05	7,28	4,72
B Pertambangan dan Penggalian	8,06	10,51	10,22	9,91	-0,13
C Industri Pengolahan	6,65	1,84	3,75	1,50	-7,56
D Pengadaan Listrik dan Gas	17,02	4,38	1,79	7,37	4,24
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,31	7,94	5,11	5,38	7,90
F Konstruksi	6,29	8,36	9,87	9,15	1,89
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,36	8,26	9,95	9,75	-7,45
H Transportasi dan Pergudangan	9,25	9,61	7,80	7,26	-20,44
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,72	10,24	7,27	7,78	-6,66
J Informasi dan Komunikasi	10,35	8,15	8,16	10,45	10,46
K Jasa Keuangan dan Asuransi	15,44	5,74	5,97	5,27	9,00
L Real Estate	9,60	10,48	9,21	7,44	-5,01
M,N Jasa Perusahaan	9,23	9,16	7,16	6,74	-2,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,30	6,25	9,05	8,25	13,95
P Jasa Pendidikan	7,41	7,25	5,09	4,56	3,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,39	9,79	8,96	8,76	9,00
R,S,T,U Jasa Lainnya	9,63	7,31	9,71	9,81	1,08
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>7,99</b>	<b>7,55</b>	<b>8,26</b>	<b>8,16</b>	<b>-0,85</b>

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021



#### 4. Laju Inflasi

Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga suatu barang dan jasa yang pada umumnya terjadi secara terus menerus. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Upaya stabilisasi harga saat ini memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya pengendalian di sisi moneter namun diperlukan pula berbagai dukungan kebijakan di bidang fiskal. Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan permasalahan struktural yang membutuhkan koordinasi kebijakan, misalnya rentannya produksi pangan terhadap kondisi cuaca, struktur pasar dan berbagai masalah lainnya. Khusus untuk wilayah Maluku Utara, permasalahan infrastruktur, saluran distribusi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan dalam pengendalian inflasi.

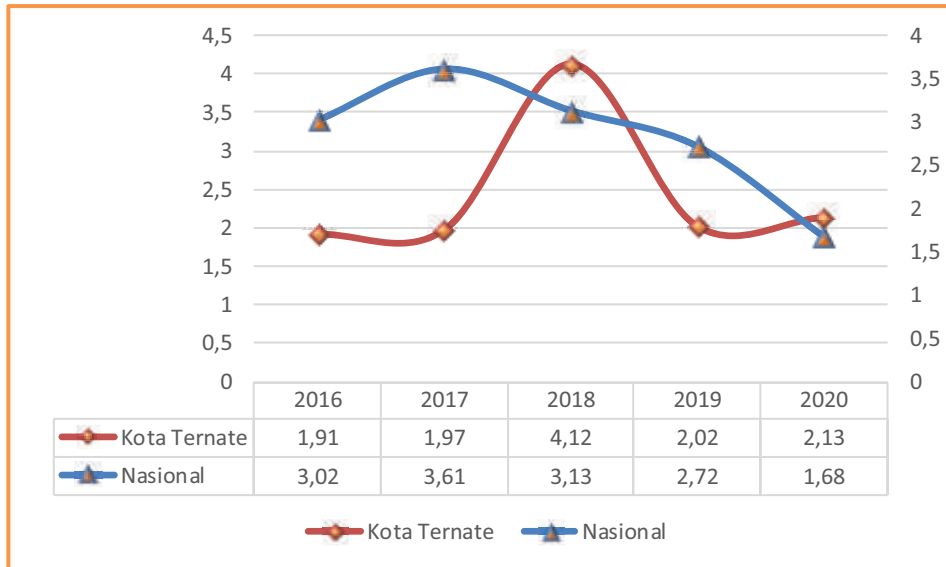
Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan.

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi di Kota Ternate lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2016 inflasi Kota Ternate adalah sebesar 1,91 persen. Tahun 2016 pergerakan inflasi Kota Ternate mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,91% (turun dari tahun 2015 yakni sebesar 4,52%). Dan pada tahun 2017 laju inflasi sedikit meningkat menjadi 1,97%, sementara itu pada tahun 2018 inflasi Kota Ternate meningkat pada angka 4,12%. Sedangkan tahun 2019, inflasi Kota Ternate mengalami penurunan menjadi 2,02%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,13%. Gambar 2.3 berikut adalah gambaran perkembangan Inflasi Kota Ternate dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Grafik 2.3**  
Perkembangan Inflasi Kota Ternate Tahun 2016-2020



Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Pada Desember 2020, Kota Ternate mengalami inflasi di enam kelompok pengeluaran dan deflasi di satu kelompok lainnya. Adapun inflasi di enam kelompok pengeluaran tersebut yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,54 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,03 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,70 persen dan kelompok Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,09 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,14 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,02; kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,18 dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,44.

## 5. Nilai PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Oleh karena itu, jika asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB.

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Ternate pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 51,45 juta rupiah atau meningkat sekitar 13,02 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 45,52 juta rupiah.

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 31.242.526,84 pada tahun 2019 menjadi Rp 35.237.789,57 di tahun 2020, atau terjadi kenaikan sebesar 12,78 persen. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.



PDRB perkapita yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2020, secara langsung telah berdampak pada perbaikan kemampuan atau daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan akan barang dan jasa. Pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan selama ini sangat berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Berdasarkan angka perkiraan, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Ternate tahun 2020 rata-rata 51,45 juta rupiah/tahun, sedangkan pendapatan perkapita ADHB tahun 2019 rata-rata 45,52 juta rupiah/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Ternate meningkat dari tahun 2019 sampai 2020.

Nilai PDRB Perkapita Kota Ternate sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.14 di bawah ini.

**Tabel 2.14**  
Nilai PDRB, PDRB per Kapita dan Pertumbuhan PDRB per Kapita  
Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nilai PDRB</b>					
ADHB (milyar rupiah)	7.877,21	8.688,47	9.687,83	10.617,48	10.549,29
ADHK (milyar rupiah)	5.785,43	6.222,45	6.736,30	7.286,00	7.233,78
<b>PDRB Per Kapita</b>					
ADHB (rupiah)	36.129.393,93	38.942.367,25	42.470.938,38	45.527.981,89	51.459.703,61
ADHK (rupiah)	26.535.281,71	27.889.498,05	29.531.604,74	31.242.526,84	35.237.789,57
<b>Pertumbuhan PDRB Per Kapita</b>					
ADHB (persen)	8,47	7,79	9,06	7,2	13,03
ADHK (persen)	5,50	5,10	5,89	5,79	12,79

Sumber: Ternate Dalam Angka (diolah), 2021

## 6. Rasio Gini

Rasio Gini atau Koefisien adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Rasio gini pada tahun 2016 sebesar 0,27 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Ternate sebesar 7,99% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 8,16% sehingga indeks gini Kota Ternate tetap pada 0,27. Indeks gini Kota Ternate dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

**Tabel 2.15**  
Rasio Gini Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Gini
2016	0,27
2017	0,28
2018	0,27
2019	0,27
2020	0,27

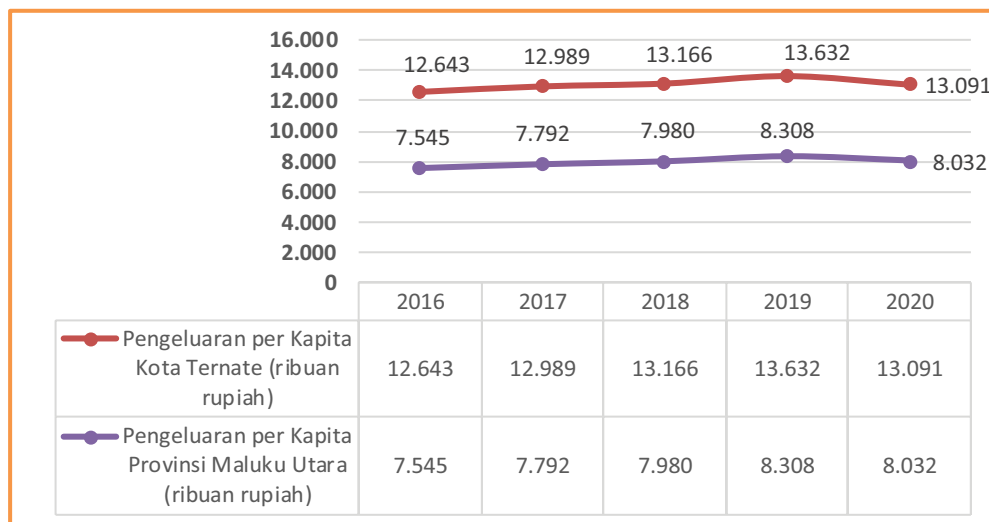
Sumber: BPS Kota Ternate, 2021



## 7. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Ternate terus meningkat sepanjang 2016-2020. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita Kota Ternate sebesar Rp.12.643.000, kemudian meningkat menjadi Rp.12.989.000 pada tahun 2017. Di tahun 2018 berada di angka Rp.13.166.000, dan di tahun 2019 naik hingga Rp.13.632.000. Namun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Ternate menurun sebesar Rp.13.091.000.

**Grafik 2.4**  
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020



Sumber: [www.bps.malut.go.id](http://www.bps.malut.go.id), 2021

## 8. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin (*head count index*) menurut konsep Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Rentang 2019-2020, tingkat kemiskinan Kota Ternate yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan dari 3,14 persen menjadi 3,46 persen. Menurut jumlah penduduk miskin di Kota Ternate mencapai 8.180 jiwa penduduk di tahun 2020.

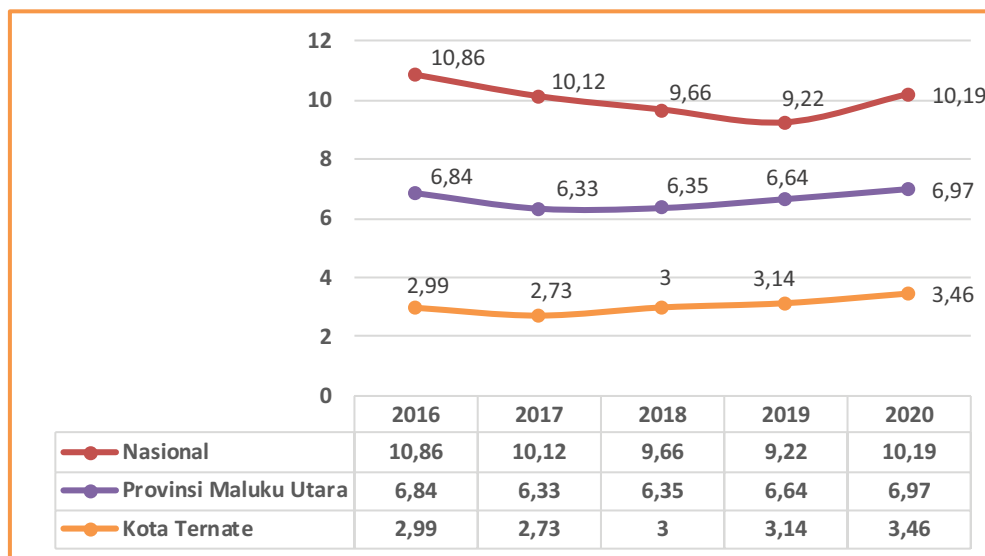
**Tabel 2.16**  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Ternate, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan
2016	5.740	2,99	0,21	0,01	434.061,00
2017	6.041	2,73	0,37	0,09	514.396,00
2018	6.760	3,00	0,26	0,05	537.524,00
2019	7.250	3,14	0,62	0,20	578.185,00
2020	8.180	3,46	0,38	0,10	595.553,00

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021



**Grafik 2.5**  
Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Ternate, Maluku Utara dan Nasional Tahun 2016-2020



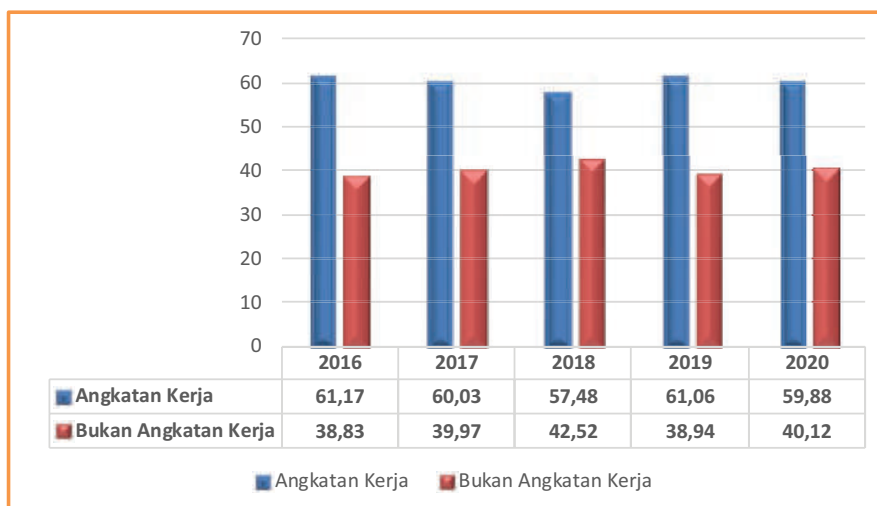
Sumber: BPS Kota Ternate (diolah), 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Ternate selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan Nasional. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi perubahan fluktuatif tingkat kemiskinan meski belum signifikan.

### 9. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Ternate Tahun 2020 tercatat sekitar 109.247 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja menurun dari 61,06% menjadi 59,88% atau turun 1,18 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 40,12% adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2020 seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia kerja.

**Grafik 2.6**  
Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja Kota Ternate Tahun 2016-2020

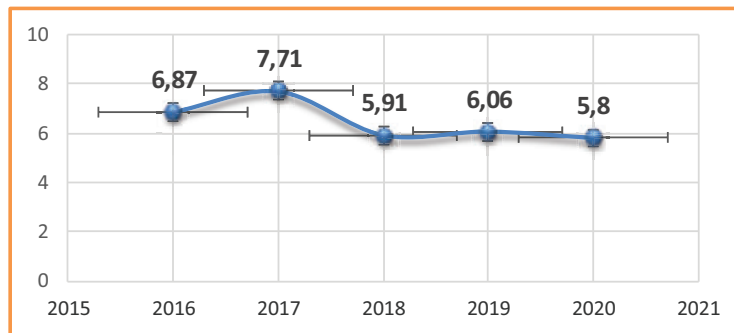


Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Selama rentang tahun 2019-2020 terjadi penurunan TPT di Kota Ternate, dari 6,06 persen pada tahun 2019 menjadi 5,80 persen di tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu indikasi semakin baiknya lapangan usaha dalam menyerap ketersediaan tenaga kerja di Kota Ternate. Dari sisi jumlah orang yang bekerja juga terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2019 sebanyak 98.665 orang menjadi 102.906 pada tahun 2020.

**Grafik 2.7**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2016-2020



Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

## 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan nilai IPM Kota Ternate setiap tahun, menunjukkan kemajuan yang dicapai Kota Ternate dalam pembangunan manusia sangat signifikan. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu ukuran kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan konsep BPS, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) indikator, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan paritas daya beli.

Kecepatan pembangunan manusia di Ternate pada 2020 mengalami perlambatan ditandai dengan pertumbuhan IPM yang berkontraksi sebesar 0,21 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2019 yang mencapai 1,55 persen. IPM Kota Ternate tahun 2020 adalah sebesar 79,82 lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 80,03. Jika diamati, angka IPM Kota Ternate terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2019. Tercatat IPM Kota Ternate tahun 2016 sebesar 77,80 dan terus meningkat hingga tahun 2019 angka IPM Kota Ternate menjadi 80,03, namun mengalami kontraksi di tahun 2020. Bila dilihat dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, IPM Kota Ternate masih menduduki posisi pertama selama lima tahun terakhir dibandingkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Bahkan IPM Kota Ternate lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Ternate telah berhasil menjadikan masyarakat Kota Ternate menjadi masyarakat yang berkualitas. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.17 di bawah ini.



**Tabel 2.17**  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang D disesuaikan (000)	Indeks Pembangunan Manusia
2016	70,17	15,06	11,13	12.643	77,80
2017	70,27	15,30	11,25	12.989	78,48
2018	70,50	15,72	11,26	13.166	79,13
2019	70,85	15,73	11,58	13.632	80,03
2020	70,97	15,74	11,71	13.091	79,82

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

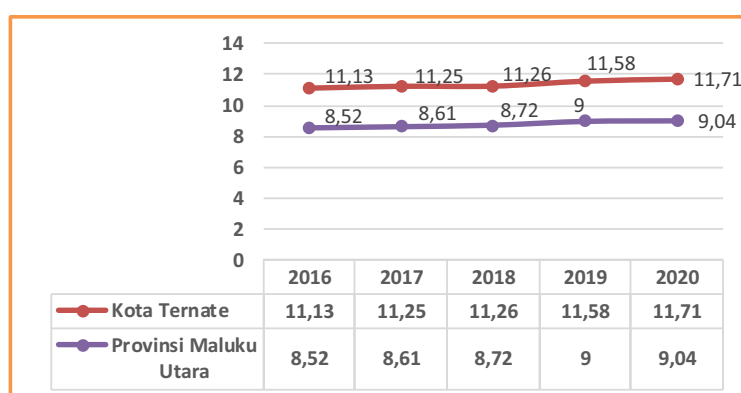
## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Ternate dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Gambaran Angka rata-rata lama sekolah di Kota Ternate pada tahun 2016 berada pada angka 11,13 tahun, pada tahun 2017 cenderung meningkat 11,25 tahun, kemudian pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah sedikit mengalami peningkatan sebesar 11,26 tahun, di tahun 2019 sebesar 11,58 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi 11,71 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan peningkatan, walaupun demikian belum mencapai target 12 tahun yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dokumen ini. Angka rata-rata lama sekolah Kota Ternate masih lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Maluku Utara.

Berikut disajikan data perbandingan Capaian Angka rata-rata lama sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.

**Grafik 2.8**  
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

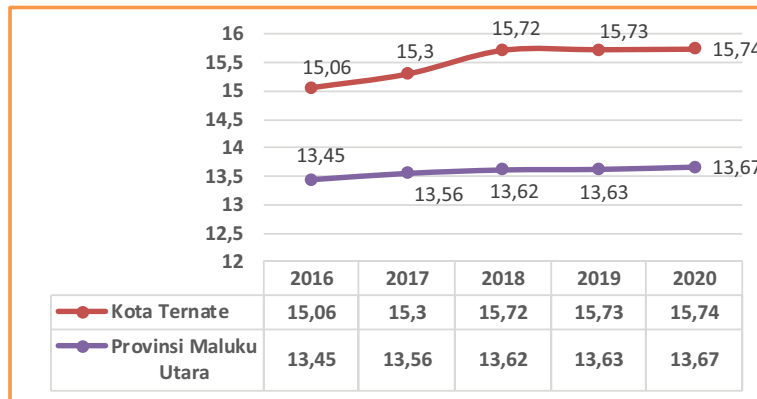


Sumber: [www.bps.malut.go.id](http://www.bps.malut.go.id), 2021

### 2. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan Pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Ternate selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Maluku Utara dan cenderung meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah Kota Ternate sebesar 15,74 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Ternate yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 15 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

**Grafik 2.9**  
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020



Sumber: [www.bps.malut.go.id](http://www.bps.malut.go.id), 2021

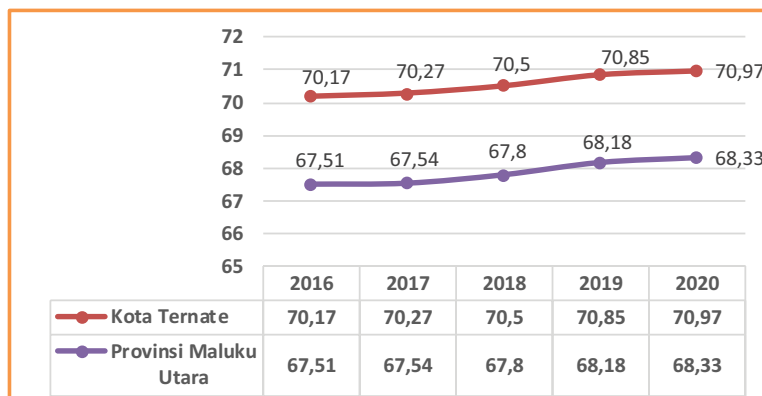
### 3. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2016 - 2020, Umur Harapan Hidup di Kota Ternate semakin meningkat dari 70,17 pada tahun 2016 menjadi 70,97 di tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Ternate dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 71 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Ternate secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

**Grafik 2.10**  
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020



Sumber: [www.bps.malut.go.id](http://www.bps.malut.go.id), 2021



#### 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Ternate sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

**Tabel 2.18**  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTs/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat (%)	
	Kota Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Maluku Utara
2016	102,86	113,70	96,60	89,13	90,34	83,67
2017	107,91	113,14	91,78	87,05	100,93	91,56
2018	108,88	113,74	90,26	91,10	89,27	88,04
2019	105,08	109,73	108,61	86,53	103,25	93,17
2020	100,52	108,71	107,68	88,28	87,59	93,44

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI/ sederajat sebesar 102,86%, tahun 2017 sebesar 107,91%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 108,88%, kemudian pada tahun 2019 menjadi 105,08%, dan pada tahun 2020 APK jenjang SD/MI/ sederajat mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu 100,52%. APK di jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi, APK jenjang SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 96,60% menjadi 91,78% di tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 90,26%, dan meningkat 108,61 di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 107,68%. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif menjadi 87,59 Di tingkat Provinsi Maluku Utara, APK jenjang SD/MI berada di atas 100% selama periode tahun 2016-2020 dan cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020, yaitu sebesar 108,71%. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 86%, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 83-93%.

#### 5. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Ternate dari tahun 2016-2020 jenjang SD/MI berada di kisaran 89% sampai dengan 98%. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun 2019. Demikian juga APM pada jenjang SM/MA/SMK pada akhir periode (2020) mengalami penurunan. Secara rinci perkembangan APM di Kota Ternate dari tahun 2016-2020 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut.

**Tabel 2.19**  
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTs/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat (%)	
	Kota Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Maluku Utara
2016	96,75	96,75	75,68	75,68	63,47	63,47
2017	93,45	97,01	74,60	76,26	67,60	63,52
2018	94,97	97,09	76,47	76,31	63,68	63,88
2019	98,39	97,09	88,81	76,20	85,16	63,95
2020	89,56	97,21	75,82	76,90	59,55	64,25

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021



## 6. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak 0 – 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi dan anak balita). Penyebab Kematian Balita berkaitan dengan kesehatan balita seperti asupan gizi, ketersediaan sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Gambaran Angka Kematian Balita di Kota Ternate pada tahun 2015 sebesar 0,98 per 1.000 kelahiran, pada tahun 2016 meningkat sebesar 1,99 per 1.000 kelahiran, pada tahun 2017 tidak ada kasus kematian Balita 0, pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 3,55 per 1.000 kelahiran, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,50 per 1.000 kelahiran, pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 4,78 per 1.000 kelahiran. Angka Kematian Balita mengalami fluktuatif setiap tahunnya, kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Ternate perlu melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang lebih optimal, terutama pemenuhan SPM Bidang Kesehatan serta peningkatan akses layanan kesehatan yang baik. Berikut ini adalah gambaran jumlah Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2015-2020:

**Tabel. 2.20**  
Jumlah Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	0,98	1,99	0	3,55	3,50	4,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

## 7. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,82 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 sebesar 3,72 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka *trend* Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2016 sampai 2020 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan angka 995,18 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan angka 997,91 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Ternate diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan *congenital*, kelainan saluran pencernaan, *pnemonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.



**Tabel 2.21**  
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	AKB per 1.000 Kelahiran	AKHB per 1.000 Kelahiran
2016	4,82	995,18
2017	4,13	995,87
2018	3,76	996,24
2019	2,09	997,91
2020	3,72	996,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

## 8. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu maternal adalah kematian ibu karena kehamilan, melahirkan atau selama nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang cukup penting untuk menggambarkan status kesehatan ibu baik dari asupan gizi, kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan dan kesadaran dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin baik disaat kehamilan maupun masa nifas. Gambaran Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Ternate pada tahun 2015 berada pada angka 140 per 100.000 kelahiran, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 122 per 100.000 per kelahiran, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 23,3 per 100.000 kelahiran (hanya 1 orang ibu yang melahirkan meninggal dari dari jumlah ibu yang melahirkan), pada tahun 2018 Angka Kematian Ibu meningkat sebesar 66,47 per 100.000 kelahiran, pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan sebesar 62,66 per 100.000 kelahiran sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 86,99 per 100.000 kelahiran, AKI pada 2015–2016 menunjukkan peningkatan kasus kematian ibu yang tinggi, kemudian 2017 mengalami penurunan, pada tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, artinya bahwa AKI mengalami fluktuatif dan merupakan masalah yang harus diselesaikan dari aspek kesehatannya. Berikut adalah sajian data Jumlah Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran di Kota Ternate Tahun 2015–2020:

**Tabel 2.22**  
Jumlah Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	140	122	23,3	66,47	62,66	86,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

## 9. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Berikut angka kesakitan menurut penyakit di Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.23 berikut.

**Tabel 2.23**  
Angka Kesakitan Menurut Penyakit Pasien Rawat Jalan Kota Ternate Tahun 2016-2020

Jenis Penyakit	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Demam Berdarah	Per 100.000 Penduduk	63	9,3	42	135	77,73
TB Paru	Per 100.000 Penduduk	219	203	202	226	190
Kusta	Per 10.000 Penduduk	4,8	5,2	6,4	5,19	4,74
HIV	Per 1.000 Penduduk	1,55	1,61	1,91	2,14	2,68
Malaria	Per 10.000 Penduduk	0,4	0,8	0,06	0,15	0,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

## 10. Persentase Bayi Baru Lahir Bergizi Buruk

Persentase gizi buruk adalah persentase bayi baru lahir dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah bayi. Gizi buruk yang dialami oleh bayi baru lahir dapat menjadi suatu indikator kesejahteraan dan kualitas kesehatan. Persentase bayi baru lahir gizi buruk di Kota Ternate 2020 sebesar 1,62%.

**Tabel 2.24**  
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Bayi Bergizi Buruk	Jumlah Bayi Baru Lahir	Persentase Gizi Buruk (%)
2016	60	4.145	1,44
2017	48	4.115	1,16
2018	48	4.513	1,06
2019	50	4.779	1,04
2020	74	4.559	1,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

Secara umum jumlah kasus bayi baru lahir gizi buruk di Kota Ternate dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Meski ada penurunan jumlah bayi baru lahir gizi buruk pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 48 kasus, tetapi jumlah bayi baru lahir gizi buruk sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 74 kasus.

## 11. Angka Stunting

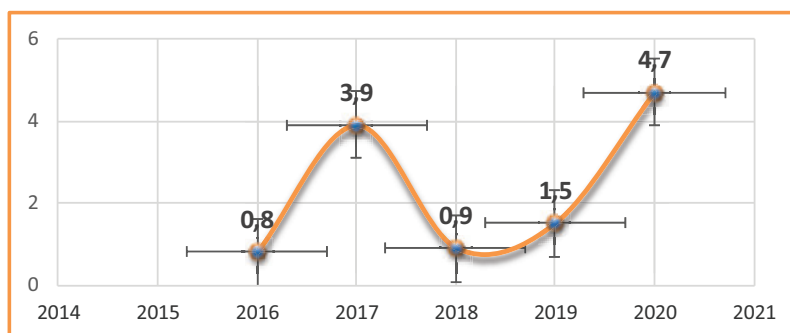
*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penyebab utama terjadinya *stunting* adalah rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein.

Faktor lain penyebab *stunting* adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran yang pendek dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Perkembangan angka *stunting* di Kota Ternate sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 2.11**  
Persentase Angka *Stunting* Kota Ternate Tahun 2016-2020

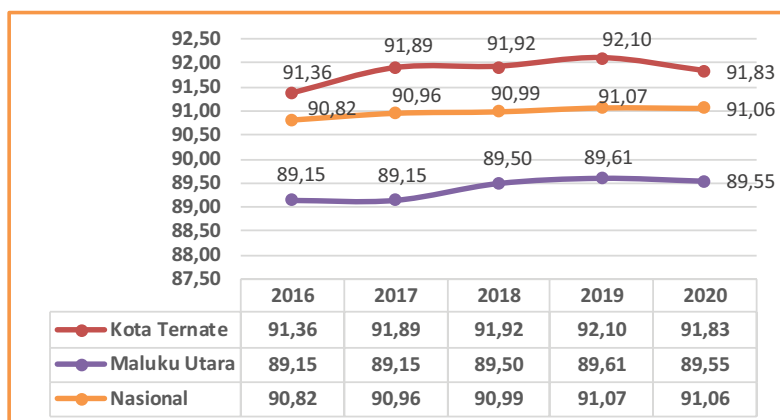


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

## 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

**Grafik 2.12**  
Perbandingan IPG Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2016-2020



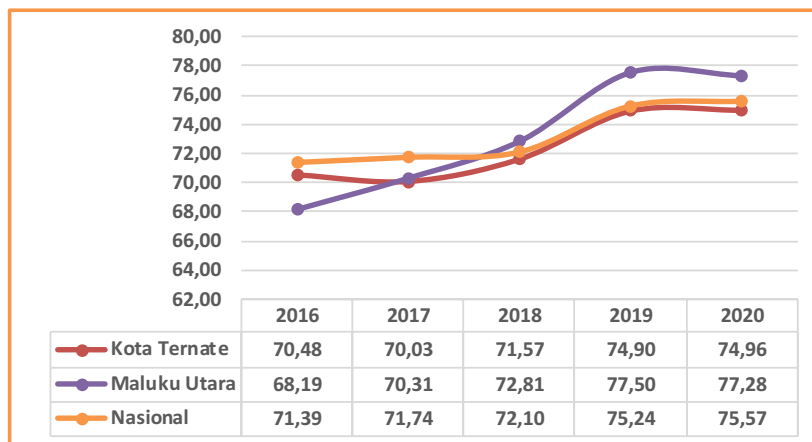
Sumber: [www.bps.malut.go.id](http://www.bps.malut.go.id), 2021

Perkembangan IPG Kota Ternate tahun 2016-2020 cenderung relatif stabil. Jika dibandingkan dengan IPG Prov. Maluku Utara, IPG Kota Ternate masih berada di atas rata-rata Prov. Maluku Utara. Pada tahun 2020, IPG Kota Ternate sebesar 91,83 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019, jika dibandingkan dengan IPG Prov. Maluku Utara dan IPG Nasional, IPG Kota Ternate masih di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Ternate semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan.

## 13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2020, nilai IDG Kota Ternate berfluktuasi. Pada tahun 2015 dan 2016, nilai IDG Kota Ternate sebesar 70,48, kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 70,03 dan meningkat kembali di tahun 2018 di angka 71,57. Pada tahun 2019 meningkat di angka 74,90, dan di tahun 2020 berada di angka 74,96. Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan Nasional sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG Kota Ternate masih di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan rata-rata Nasional. Ini dapat terlihat pada Grafik 2.13. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Ternate dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan Nasional dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.

**Grafik 2.13**  
Perbandingan IDG Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: [www.bps.malut.go.id](http://www.bps.malut.go.id), 2021

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Budaya literasi adalah merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan. Budaya literasi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian bangsa melalui nilai-nilai budaya yang ada sejak lama terbentuk. Hal ini dilakukan untuk menangkal berbagai dinamika perubahan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang maju secara cepat mampu merubah pola pikir masyarakat ke arah apatis dan hedonisme yang bertentangan dengan karakter bangsa maupun *adat se atorang* yang dimiliki Kota Ternate.

Ada tiga hal penting pembudayaan literasi yang perlu dilakukan untuk membentuk karakter, inovasi dan kreatifitas dalam mencapai pembangunan manusia dan menjadikan budaya sebagai jati diri bangsa sebagai berikut:

1. Pembudayaan Literasi Masyarakat yang ditujukan untuk pengembangan kecakapan hidup dan pengetahuan antara lain: Pendidikan literasi untuk orang tua (dewasa); Penyusunan panduan literasi di perpustakaan; Penguatan kompetensi literasi pustakawan/literasi; Peningkatan layanan perpustakaan/TBM; Pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial; Peningkatan akses dan konten literasi masyarakat.
2. Pembudayaan Literasi Keluarga merupakan pondasi awal dalam membentuk karakter anak pada usia dini antara lain: Penyusunan panduan literasi di keluarga: *pseudo-reading*, membacakan buku, mendongeng; Pemberian paket buku untuk bayi; Penguatan kemampuan *pseudo reading* untuk bayi; Peningkatan kemampuan membaca buku dengan suara keras/nyaring (*reading aloud*); Peningkatan kemampuan mendongeng; dan Penyediaan konten literasi keluarga.
3. Pembudayaan Literasi Sekolah ditujukan untuk mendukung pembelajaran dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis Peserta Didik antara lain: Penyusunan panduan literasi dalam pembelajaran; Penguatan kompetensi literasi guru; Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis literasi; Peningkatan hasil asesmen literasi; Pengembangan Perpustakaan Sekolah; dan Peningkatan layanan Perpustakaan Sekolah.



Indikator lainnya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan yang berkembang di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah grup kesenian di Kota Ternate tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.

Jika dalam tahun 2016 grup kesenian masih berjumlah 15 grup, maka pada tahun 2020 telah bertambah menjadi 20 grup kesenian. Demikian juga perkembangan museum, jika pada tahun 2016 masih terdapat 1 museum, maka sampai dengan tahun 2020 telah menjadi 2 museum. Data pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.25**  
Jumlah Grup Kesenian dan Museum Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	Kinerja Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	10	15	15	17	20
Jumlah Museum	1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Ternate, 2021

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi yang sudah di depan mata, maka Pemerintah Kota Ternate telah menindaklanjuti seruan tersebut diantaranya dengan mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat. Pertumbuhan sarana olahraga dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.26**  
Jumlah Klub Olah Raga dan Gedung Olah Raga Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	Kinerja Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olah Raga	15	15	15	15	17
Jumlah Gedung Olah Raga per 10.000 penduduk	11	11	11	11	12

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, 2021

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Bidang Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pekembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Berdasarkan data dan informasi Angka PAUD sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.27**  
Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi PAUD	%	85	85	86	87	90	60

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

### b. Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

**Tabel 2.28**  
Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0	0	0	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

### c. Angka Baca Tulis Al-Qur'an

Pada jenjang pendidikan dasar membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran merupakan kompetensi dasar yang harus dicapai khususnya siswa-siswi yang beragama Islam. Saat ini telah berkembang berbagai model pembelajaran baca tulis Al-Quran, baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang diharapkan mampu melahirkan siswa-siswa beragama Islam yang mampu membaca, menulis dan menghafal serta memahami isi kandungan Al-Quran.

Pemerintah Kota Ternate mewajibkan siswa – siswi kelas VI SD/MI yang beragama Islam harus memiliki sertifikat Baca Tulis Al-Quran yang melanjutkan pendidikan selanjutnya (SMP/MTs). Upaya tersebut dapat tercapai dengan baik yaitu pada tahun 2015-2020 100 persen Siswa SD Kelas VI yang beragama Islam mampu membaca dan menulis Al-Quran.

Ternate Andalan menjadikan program Baca Tulis Al-Quran sebagai target untuk menciptakan siswa-siswa beragama Islam yang mampu membaca, menulis dan menghafal serta memahami isi kandungan Al-Quran, melalui penguatan pendidikan formal maupun non formal yang ada saat ini, namun perlu membutuhkan dukungan pada aspek penguatan SDM dan ketersediaan sarana pendukungnya, sehingga upaya ini dapat tercapai dengan baik.

Berikut adalah gambaran capaian persentase siswa-siswa Sekolah Dasar kelas VI beragama Islam yang mampu membaca dan tulis Al-Quran dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.29**  
Angka Baca Tulis Al Qur'an Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Siswa SD Kelas VI Beragama Islam yang Dapat Baca Tulis Al-Qur'an	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

#### d. Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Rombel terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2018-2020, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid usia anak sekolah di Kota Ternate mengalami fluktuasi.

**Tabel 2.30**  
Rasio Guru dan Murid Kota Ternate Tahun 2018-2020

Rasio Guru dan Murid Per Kecamatan	Jenjang Pendidikan SD/MI			Jenjang Pendidikan SMP/MTs		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Moti	1:7	1:7	1:9	1:5	1:5	1:6
Batang Dua	1:4	1:6	1:7	1:3	1:5	1:5
Pulau Hiri	1:6	1:8	1:9	1:8	1:9	1:10
Pulau Ternate	1:6	1:8	1:8	1:7	1:9	1:9
Ternate Barat	1:10	1:10	1:11	1:4	1:6	1:7
Ternate Selatan	1:13	1:15	1:16	1:10	1:12	1:13
Ternate Tengah	1:16	1:16	1:19	1:14	1:14	1:16
Ternate Utara	1:13	1:15	1:6	1:14	1:16	1:17

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

Sedangkan rasio antara murid dan rombongan belajar menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan kecukupan antara ruang kelas dan rombongan yang tersedia dengan jumlah murid di Kota Ternate.

**Tabel 2.31**  
Rasio Rombel dan Murid Kota Ternate Tahun 2018-2020

Rasio Guru dan Murid Per Kecamatan	Jenjang Pendidikan SD/MI			Jenjang Pendidikan SMP/MTs		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Moti	1:11	1:11	1:14	1:19	1:21	1:22
Batang Dua	1:5	1:7	1:8	1:14	1:14	1:17
Pulau Hiri	1:10	1:10	1:13	1:20	1:21	1:23
Pulau Ternate	1:15	1:17	1:17	1:24	1:26	1:26
Ternate Barat	1:15	1:17	1:17	1:21	1:23	1:24
Ternate Selatan	1:21	1:23	1:24	1:23	1:23	1:24
Ternate Tengah	1:24	1:24	1:27	1:29	1:31	1:31
Ternate Utara	1:20	1:22	1:23	1:29	1:30	1:30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

**e. Jumlah Guru Berkualifikasi Pendidikan dan Tenaga Pendidik Bersertifikasi**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas Guru. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Guru yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.

**Tabel 2.32**  
Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI dan SMP/MTs Kota Ternate Tahun 2020

Kualifikasi Pendidikan Guru	Jenjang Pendidikan Guru SD/MI					Jenjang Pendidikan Guru SMP/MTs				
	SLTA	Diploma	S-1	S-2	Jumlah	SLTA	Diploma	S-1	S-2	Jumlah
Guru PNS	105	91	728	11	935	38	18	467	23	546
Guru PTT	0	7	112	0	119	0	0	86	0	86
Guru Honorer	0	28	131	1	160	0	0	130	2	132
<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	<b>126</b>	<b>971</b>	<b>12</b>	<b>1.214</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>683</b>	<b>25</b>	<b>764</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

Sedangkan untuk tenaga pendidik yang bersertifikasi untuk 3 tahun terakhir di Kota Ternate baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.

**Tabel 2.33**  
Tenaga Pendidikan Bersertifikasi Kota Ternate Tahun 2018-2020

Tenaga Pendidik Bersertifikasi	Jenjang Pendidikan Guru SD/MI			Jenjang Pendidikan Guru SMP/MTs		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Tenaga Pendidik PNS	810	816	935	505	515	546
Sertifikasi	420	424	436	345	348	367
Belum Sertifikasi	390	392	499	160	167	179

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

**f. Angka Kelulusan Sekolah**

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, sepanjang tahun 2018-2020 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs selama kurun waktu 2018-2020 dapat mencapai 100 persen.

**Tabel 2.34**  
Persentase Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Ternate Tahun 2018-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun		
	2018	2019	2020
SD/MI (Persen)	100	100	100
SMP/MTs (Persen)	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

**g. Fasilitas Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs**

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik. Dalam kurun waktu 2018-2020, kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs mengalami fluktuasi.



**Tabel 2.35**  
Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs Kota Ternate Tahun 2018-2020

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Bangunan				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
2018	SD/MI (Persen)	36,09	51,27	7,36	5,27	100
2019	SD/MI (Persen)	13,90	62,83	16,45	6,82	100
2020	SD/MI (Persen)	43,50	32,96	8,81	14,73	100
2018	SMP/MTs (Persen)	24,20	58,45	8,68	8,68	100
2019	SMP/MTs (Persen)	3,81	76,96	13,11	6,13	100
2020	SMP/MTs (Persen)	41,84	45,71	6,12	6,33	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

#### h. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel berikut menunjukkan sekolah jenjang SD/MI sampai SMP/MTs yang memperoleh akreditasi.

**Tabel 2.36**  
Tenaga Pendidikan Berakreditasi Kota Ternate Tahun 2018-2020

Tahun	PERINGKAT AKREDITASI									
	Jenjang Pendidikan Guru SD/MI					Jenjang Pendidikan Guru SMP/MTs				
	A	B	C	Tidak Terakreditasi	TOTAL	A	B	C	Tidak Terakreditasi	TOTAL
2018	29	28	2	41	100	11	9	3	4	27
2019	41	31	2	31	105	11	9	3	7	30
2020	41	32	2	35	110	11	9	3	7	30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2021

## 2. Bidang Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting untuk ditingkatkan guna menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itulah peran serta Pemerintah sangat diperlukan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat semakin meningkat. Peran Pemerintah dalam pembangunan kesehatan menyangkut berbagai aspek seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik menyangkut biaya maupun tempatnya. Selain itu, pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih memahami pola hidup sehat dan upaya menjaga kesehatan secara baik terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah ini melalui Dinas Kesehatan.

Penyediaan fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, termasuk tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas serta pusat pelayanan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Ternate telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, di antaranya dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan yang menyebar di setiap kecamatan.

#### a. Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin

Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Salah satu upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal adalah melalui peningkatan ketersediaan akses pelayanan kesehatan, salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan gratis pada tingkat pertama atau Puskesmas, hal ini dilakukan untuk menjamin setiap warga Kota Ternate mendapat pelayanan khususnya masyarakat miskin.

Berdasarkan data dan informasi pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di Kota Ternate tahun 2015-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.37**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin Kota Ternate Tahun 2015-2020**

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

**b. Universal Child Immunization (UCI)**

*Universal Child Immunization* (UCI) merupakan suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak di bawah umur 1 tahun). Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Selain itu, Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap pada setiap bayi dan anak.

Perkembangan capaian kinerja UCI di Kota Ternate sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.38**  
**Persentase *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Ternate Tahun 2015-2020**

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
<i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	persen	90	92	93	97	95	84

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

**c. Annual Parasite Incidence (API)**

*Annual Parasite Incidence* merupakan jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positif terhadap populasi di wilayah dan waktu tertentu per 1.000 penduduk. Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu bayi, anak di bawah lima tahun (balita), ibu dan ibu hamil. Selain itu, malaria secara langsung juga dapat menyebabkan anemia dan menurunkan produktivitas kerja.

Penyakit malaria masih endemis di wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Ternate. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan perkembangan penyakit malaria di Kota Ternate, antara lain: bekerjasama antara jajaran kesehatan dengan masyarakat dalam melaksanakan penyemprotan pada tempat-tempat perindukan nyamuk, pembubuhan larvasida pada air, serta pengeringan cekungan yang menampung air. Selain itu, memberikan bantuan kelambu berinsektisida kepada masyarakat untuk melindungi dari gigitan nyamuk malaria.

Berdasarkan data dan informasi capaian indikator kinerja pelaksanaan API di Kota Ternate sejak tahun 2015-2020, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.



**Tabel 2.39**  
**Persentase Annual Parasite Incidence (API) Kota Ternate Tahun 2015-2020**

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Annual Parasit Incidence (API)	%	5	1,2	0,8	0,06	0,1	0,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

#### d. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

**Tabel 2.40**  
**Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Ternate Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu/ Balita
2018	177	23.836	7,42
2019	178	22.742	7,83
2020	178	20.880	8,52
Rata-rata			7,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

Jumlah Posyandu dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1.000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1.000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1.000 Balita selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018-2020 adalah 7,92, yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 8 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 126 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Ternate Tahun 2018-2020 berdasarkan data, secara agregat, jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

**Tabel 2.41**  
**Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Ternate Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Rumah Sakit	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2018	228.105	11	0,048	14	0,061	6	0,026
2019	233.208	11	0,047	14	0,060	6	0,026
2020	205.001	11	0,053	14	0,068	6	0,029

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021



Mutu penyelenggaraan kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi Puskesmas.

**Tabel 2.42**  
Akreditasi Puskesmas Kota Ternate Tahun 2018-2020

Tahun	Dasar	Madya	Utama	Paripurna
2018	4	5	0	0
2019	4	6	0	0
2020	4	7	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

#### e. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Ternate, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2018-2020, dokter umum di Kota Ternate lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi.

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian dan gizi, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta laboratorium. Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Data perkembangan tenaga dokter dan paramedis dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**  
Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Kota Ternate Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Dokter Spesialis	4	4	4
Dokter Umum	26	37	33
Dokter Gigi	9	9	12
Perawat	64	120	118
Bidan	153	193	206
Kesehatan Masyarakat	43	79	72
Kesehatan Lingkungan	9	12	14
Farmasi	19	25	30
Gizi	23	36	42
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	6	19	21

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2021

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Pekerjaan Umum

Jaringan transportasi baik darat, laut maupun udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu wilayah, yaitu memberi kemudahan atau meningkatkan interaksi antar wilayah/pusat pelayanan. Dengan demikian akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya), karena hubungan antar wilayah yang semakin mudah akan mendorong pergerakan penduduk. Dengan terbukanya wilayah yang terisolasi, maka wilayah tersebut akan semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.



### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan di Kota Ternate kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.44**  
Panjang Jaringan Jalan Menurut Jenis dan Kondisi Jalan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	65,42	63,15	66,26	69,01	71,04	74,34

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2021

### b. Proporsi Panjang Jaringan Jembatan

Kondisi jaringan jembatan di Kota Ternate kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.45**  
Panjang Jaringan Jembatan Menurut Jenis dan Kondisi Jembatan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	67,3	73,41	76,88	79,19	81,50	88,44

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2021

### c. Ketersediaan Air dan Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air digunakan manusia untuk mencuci, mandi, dan minum. Air bersih sangat mempengaruhi kesehatan manusia, ketersediaan air bersih sangat penting diperhatikan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Jika hanya mengandalkan air hujan saja tidak akan cukup memenuhi kebutuhan air manusia, oleh karena itu pengelolaan air yang baik dapat menjamin selalu tersedianya air bersih bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ternate memiliki Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat Kota Ternate.

Ketersediaan air dan persentase penduduk berakses air minum di Kota Ternate Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.46**  
Data Ketersediaan Air dan Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Data Ketersediaan Air	Ltr/detik	n/a	12.922.940	14.469.673	15.992.658	16.666.908	16.782.716
Data Kapasitas Air	Ltr/detik	n/a	12.771.291	14.324.977	15.878.938	14.589.784	14.612.209
Proporsi Penduduk Berakses Air Minum	%	71,33	74,42	78,32	81,95	91,13	83,97

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2021

#### d. Drainase Perkotaan

Permasalahan drainase perkotaan, khususnya Kota pantai seperti Kota Ternate, bukanlah hal yang sederhana sebab sangat di pengaruhi oleh kondisi air laut namun keuntungan yang dimiliki Kota Ternate karena kondisi topografi dengan tingkat kemiringan yang sangat baik sehingga tidak perlu mempergunakan teknologi untuk mendraian (mengeringkan drainase). Oleh karenanya pengaturan kembali sistem drainase sehingga dapat membentuk sebuah jaringan drainase mulai dari hulu hingga hilir berdasarkan kapasitas drainase sangat diperlukan. Penggunaan lahan yang tak terkontrol terutama pada kawasan-kawasan pegunungan serta daerah sekitar aliran sungai sehingga kawasan yang tadinya merupakan tangkapan hujan (daerah resapan air) atau kawasan yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan bagi sungai terus mengalami penyempitan akibat laju pertumbuhan kota, dengan demikian tentunya hujan tidak lagi dapat terserap ke dalam tanah atau sungai tidak mampu lagi berfungsi secara maksimal, sehingga air yang seharusnya mengalir mengikuti badan sungai meluap dan menggenangi daerah-daerah yang memiliki topografi yang rendah.

Drainase yang mengalami penurunan kapasitas akibat pendangkalan dan penyempitan yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi dan sampah. Selain itu pula, daya tampung drainase yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada akibat dari perencanaan drainase yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan Kota.

Penyebab dari terjadi genangan di Kota Ternate diakibatkan oleh faktor:

- 1) Penyebab alam, seperti lokasi yang cekung dan terisolir tanpa adanya *outlet* untuk mengeringkan daerah tersebut.
- 2) Bentuk, ukuran penampang saluran drainase yang tidak terencana dengan baik.
- 3) Pemeliharaan yang tidak memadai sehingga sering terjadi penyumbatan pada mulut gorong-gorong atau sedimentasi yang berlebihan pada dasar saluran.
- 4) Pendangkalan drainase akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase.
- 5) Berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan perumahan yang tidak terkendali.

#### e. Air Minum

Permasalahan Air bersih di Kota Ternate salah satunya adalah air tanah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara air minum sebagai air baku air minum, dimana saat ini terdapat beberapa sumur milik PDAM sudah mengalami intrusi air laut, sehingga mengganggu pelayanan air minum terutama dari aspek kuantitas dan kualitas air minum yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama masyarakat bagian utara Kota Ternate.

Beberapa Isu dan Permasalahan Air Minum yang dihadapi Pemerintah Kota Ternate dalam rangka Peningkatan akses Aman Air Minum dan Penyediaan Air Baku, yaitu:

- 1) Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk.
- 2) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun.
- 3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal.
- 4) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (JP) baru mencapai 62,13 % oleh PDAM.
- 5) Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali yaitu 27,6 % dan Air Tadah Hujan (ATH) yaitu 2,4 %.
- 6) Penggunaan BJP dan yang diselenggarakan masyarakat belum memadai dan tidak sesuai dengan standar kesehatan.
- 7) Penggunaan BJP seperti sumur pada beberapa kawasan Terjadi intrusi.
- 8) Tingkat kehilangan air yang cukup tinggi.
- 9) Kualitas dan kuantitas Sumber Air Baku untuk air minum masih belum memenuhi standar pelayanan dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Ternate.



#### f. Air Limbah

Pertumbuhan penduduk Kota Ternate yang cukup tinggi akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan sarana prasarana dan utilitas. Salah satu aspek kebutuhan yang penting adalah aspek sanitisasi terutama yang terkait dengan air limbah, yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap degradasi lingkungan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat, memiliki permasalahan pada pembuangan limbah rumah tangga. Permukiman padat di perkotaan banyak yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan untuk mengolah kembali air ataupun mengendapkan limbah cair rumah tangga yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti: mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci alat masak dan alat makan, cuci pakaian, cuci kendaraan ataupun aktivitas lainnya.

Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah tangga ke alam bebas, antara lain:

- 1) Dampak dari Aspek Kesehatan, air limbah yang berasal toilet mengandung bakteri *E. Coli* yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti typhus, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur (apalagi bila jarak antara sumur dan septic-tank tidak sesuai baku mutu, seperti yang banyak ditemukan di permukiman padat). Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, seperti; cuci piring, mandi, gosok gigi dan kegiatan penggunaan air sumur lainnya tanpa melalui proses memasak.
- 2) Dampak dari Aspek Lingkungan, jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu. Keadaan ini dapat merusak ekologi lingkungan secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan.

Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Tidak hanya hewan-hewan yang hidup di dalamnya, tumbuhan air pun akan terganggu produktivitasnya karena air berguna sebagai pembentuk protoplasma yang berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis.

- 3) Dampak dari Aspek Estetika, seperti halnya limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang.

#### Penataan Ruang

Berdasarkan isu lingkungan dalam beberapa dasawarsa belakangan ini mulai dikedepankan oleh Kota-kota besar di dunia. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya daya dukung lingkungan terutama lingkungan perkotaan yang semakin terhimpit dengan peningkatan aktifitas warganya. Konsep pembangunan berkelanjutan sudah cukup lama menggema di Indonesia, namun baru mengemuka sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sejak saat itu banyak daerah di Indonesia mulai mengedepankan isu lingkungan dengan mencoba mengembangkan konsep hijau yang salah satunya adalah mengembangkan 30% luas wilayahnya untuk ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung

manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Seiring jalannya pembangunan, dalam upaya memberikan kenyamanan dan lingkungan sehat bagi warga kota, Konsep *Green City* dapat menjadi solusi bagi pelaku pembangunan Kota Hijau (*green city*), suatu jargon yang sedang dicanangkan di seluruh dunia agar masing-masing kota memberi kontribusi terhadap penurunan emisi karbon untuk penurunan pemanasan global.

Untuk memenuhi kebutuhan RTH sebesar 30% di Kota Ternate sulit untuk terealisasi lebih dari kondisi Ternate saat ini dengan luas lahan yang tidak terbangun hanya sedikit, dan cenderung telah terbangun dengan kegiatan perkantoran, dominasi perumahan yang sangat tinggi serta pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Berdasarkan *survey* kecukupan luasan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Ternate tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**  
Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	11,2	11,5	11,9	12,3	12,6	12,6

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2021

#### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kota Ternate terus berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan capaian kinerja pengelolaan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur dengan beberapa indikator pencapaian tentang rasio rumah layak huni dan persentase lingkungan permukiman kumuh. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.48**  
Rasio Rumah Layak Huni dan Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Layak Huni	%	n/a	n/a	15,80	23,98	28,14	33,60
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	n/a	n/a	5,06	8,65	35,50	16,80

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2020

#### 5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, menjelaskan jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
4. Penegakan Peraturan Daerah.

Cakupan Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

**a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Keamanan dan Keindahan (K-3), sebagaimana tersaji pada tabel berikut:**

**Tabel 2.49**  
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Keamanan dan Keindahan (K-3) Kota Ternate  
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan)	%	37	45	50	50	50	90

Sumber: Satpol PP Kota Ternate, 2021

**b. Pengurangan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam dan Kebakaran**

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPd Tahun 2021 antara lain:

- 1) Kebijakan pengurangan resiko bencana alam, serta standarisasi pemadam kebakaran dan SDM Damkar;
- 2) Peningkatan sarana prasarana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bahaya kebakaran;
- 3) Implementasi penerapan SPM bidang bencana alam dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan kerjasama dalam melakukan penanggulangan bencana alam dan bahaya kebakaran;
- 5) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana alam dan kebakaran.

Keberhasilan capaian kinerja pengurangan resiko dan penanggulangan bencana alam serta bahaya kebakaran dapat diukur dengan beberapa Indikator antara lain: 1). Persentase kesiapsiagaan rawan bencana 2). Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap dan 3). Cakupan luas wilayah yang terproteksi bahaya kebakaran, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



**Tabel 2.50**  
Cakupan Luas Wilayah yang Terproteksi Bahaya Kebakaran Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kesiapsiagaan rawan bencana	%	19,5	n/a	6,49	6,49	2,6	3,9
Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap ( <i>respon time</i> )	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Luas Wilayah yang Terproteksi Bahaya Kebakaran (WMK)	%	65	75	75	75	75	88

Sumber: BPBD dan Dinas Kebakaran Kota Ternate, 2021

## 6. Bidang Sosial

Jenis pelayanan bidang sosial sesuai standar pelayanan minimal untuk daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penanganan bidang sosial khususnya terkait penurunan PMKS, tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.51**  
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial (Penurunan PMKS) Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penurunan PMKS	%	n/a	n/a	2,1	0,94	0,94	10,26

Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate, 2021

Di samping gambaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial terkait capaian PMKS, Pemerintah Kota Ternate melalui Program Ternate Andalan yaitu menciptakan Kota Inklusif Ramah Disabilitas. Program ini dibuat untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang berpihak pada kelompok disabilitas dan rentan sekaligus memberikan ruang yang lebih luas terhadap penyandang disabilitas dalam pembangunan.

**Tabel 2.52**  
Data Disabilitas Per Kecamatan Kota Ternate Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pulau Ternate	114 Orang
2	Moti	73 Orang
3	Pulau Batang Dua	39 Orang
4	Pulau Hiri	37 Orang
5	Ternate Barat	130 Orang
6	Ternate Selatan	450 Orang
7	Ternate Tengah	325 Orang
8	Ternate Utara	236 Orang
Jumlah		1.404 Orang

Sumber: Dinas Sosial, 2021



## 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### 1. Bidang Tenaga Kerja

#### a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Lebih dari separuh penduduk usia kerja di Ternate yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas masuk dalam angkatan kerja. Hal ini terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 59,88 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya maka kondisi ketenagakerjaan di Ternate relatif lebih baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 6,06 pada tahun 2019 menjadi 5,80 persen di tahun 2020.

**Tabel 2.53**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,87	7,71	5,91	6,06	5,80

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

#### b. Rasio Penduduk yang Bekerja

Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya.

Adapun rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Ternate mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana terlihat bahwa pada tahun 2016 nilainya sebesar 93,12 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 92,29, meningkat di tahun 2018 menjadi 94,09 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 93,76 persen dan kembali meningkat menjadi 94,19 persen di tahun 2020. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja selama periode 2016-2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.54**  
Rasio Penduduk Bekerja Kota Ternate Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk Bekerja	%	93,12	92,29	94,09	93,76	94,19

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

## 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Indikator capaian urusan pemberdayaan perempuan diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Tingkat Capaian Kota Layak Anak. Indeks pembangunan gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dimana berfokus pada kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Adapun Indeks pemberdayaan gender merupakan indikator yang menunjukkan peran perempuan aktif dalam pembangunan. Sedangkan kota layak anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.

Berikut tabel data dan capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Ternate tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.55**  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,36	91,89	91,92	92,10	91,83
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	70,48	70,03	71,57	74,90	74,96
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	skor	0	550 Pratama	600 Pratama	650 Madya	650 Madya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kota Ternate, 2020

## 3. Bidang Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.



Cakupan indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain: "Pencapaian skor pola pangan harapan". Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.56**  
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	%	n/a	0	0	0	83,70	73,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, 2020

#### 4. Bidang Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari cakupan bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kota Ternate. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
Capaian Urusan Pertanahan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat Milik Pemerintah	%	n/a	n/a	40	50	33	48

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2021

#### 5. Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang lestari merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan utama pada bidang lingkungan hidup di Kota Ternate adalah terkait dengan Penanganan Sampah Perkotaan terutama dalam hal pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan pemilahan sampah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sarana prasarana persampahan, seperti : armada angkut, trans depo dan TPS3R. Di sisi lain skema atau pola penanganan sampah saat ini masih dilakukan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ke depannya perlu dilakukan perubahan atau inovasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Ternate.

Data tentang urusan lingkungan hidup dan persentase penanganan timbulan sampah tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.58**  
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Predikat Pengelolaan Lingkungan	Nilai	Adipura	74,64	75	75,02	Belum ada (Covid)	Tidak ada (Covid)
Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	n/a	1,93	5,63	6,64	9,48	9,26
Persentase Pengangkutan Sampah	%	65	66,38	64,87	64,62	64,65	63,18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2020

## 6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Data dan informasi tentang indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, persentase kepemilikan elektronik, persentase kepemilikan Kartu Keluarga, persentase kepemilikan Akte Kelahiran serta jumlah inovasi layanan tahun 2015-2020, tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.59**  
Indikator Sasaran Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	0	75,89	78,67	78,39	82,16	79
Persentase Kepemilikan Elektronik	%	69,44	98,86	82,11	89,47	92,19	94,02
Persentase Kepemilikan KK	%	89,91	97,26	97,26	93,90	98,49	100,7
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	39,00	51,00	62,62	77,11	83,74	88,97
Jumlah Inovasi Layanan	Jumlah	4	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, 2021

## 7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan jumlah penduduk perlu mendapat perhatian karena jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan ketersediaan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan mendasar dan juga kesempatan kerja akan menjadi permasalahan. Strategi yang dikembangkan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu dengan terus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi KB.



Partisipasi masyarakat terhadap program KB di Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat hasilnya, karena di samping memberikan dampak positif dalam hal menekan angka kelahiran, program KB juga cukup mempunyai andil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data capaian laju pertumbuhan penduduk Kota Ternate, pada tahun 2015 adalah sebesar 2,51 persen, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2,41 persen dan pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,24 persen. Berikut tabel capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2015-2020.

**Tabel 2.60**  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,51	2,40	2,29	2,24	2,24	2,21

Sumber: Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB Kota Ternate, 2021

## 8. Bidang Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Seiring dengan bertambahnya panjang jalan yang berkondisi baik dan semakin mudahnya fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula angkutan darat maupun kendaraan pribadi di Kota Ternate. Berdasarkan laporan SAMSAT Kota Ternate pada tahun 2019 jenis kendaraan terbanyak di Kota Ternate yaitu jenis sepeda motor sebanyak 33.4331 unit, mobil sebanyak 5.654 unit dan truck sebanyak 2.060 unit (Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2021).

Sedangkan banyaknya penumpang yang bepergian ke wilayah di luar Maluku Utara melalui pelabuhan Ahmad Yani sebanyak 40.446 orang, dan penumpang yang datang sebanyak 44.699 orang. Di sisi lain, arus bongkar muat Trafik Peti Kemas barang angkutan dalam negeri yang terjadi di pelabuhan Ahmad Yani pada tahun 2020 sebanyak 518.750 ton (bongkar) sedangkan barang yang dimuat sebanyak 520.174 ton. Untuk kegiatan arus bongkar Trafik Non Peti Kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada tahun 2020 sebanyak 575.460 ton, sedangkan kegiatan muat sebesar 78.195 ton.

Untuk transportasi udara akan ditinjau dari perbandingan atau rasio antara penumpang dengan jumlah penerbangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Ternate, jumlah penumpang yang berangkat untuk penerbangan selama Tahun 2020 adalah sebanyak 174.661 orang, sedangkan penumpang yang datang sebanyak 181.770 orang dan transit sebanyak 19.846 orang. Adapun jumlah pesawat yang berangkat selama periode tahun 2020 adalah sebanyak 2.520 kali, sedangkan pesawat yang datang adalah sebanyak 2.520 kali.

Berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya yang secara akumulasi telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Ternate berada pada posisi tertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ini secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.



**Tabel 2.61**  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	55	50	70	80	80	68

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tahun 2021

## 9. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembangunan urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) persentase pelayanan masyarakat melalui penggunaan TIK; (ii) persentase ketersediaan *database* informasi daerah yang akurat; serta (iii) luas wilayah yang terakses jaringan internet/seluler. Tabel berikut merupakan gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Ternate tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.62**  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelayanan Masyarakat Melalui Penggunaan TIK	%	0	0	20	20	30	40
Persentase Ketersediaan <i>Database</i> Informasi Daerah yang Akurat	%	20	20	50	60	70	75
Luas Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/seluler	%	30	30	40	40	50	75

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, 2021

## 10. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Salah satu faktor yang memicu pertumbuhan perekonomian adalah meningkatnya peran serta masyarakat perekonomian masyarakat. Untuk mendorong peran masyarakat dimaksud salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menguatkan lembaga perekonomian masyarakat melalui penguatan aspek permodalan koperasi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan UMKM, adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
3. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara umum antara lain:

1. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembinaan Koperasi dan UMKM.
2. Pertumbuhan usaha dan industri kecil menengah yang melambat.
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya (jiwa wirausaha dan manajemen usaha).



4. Peran Koperasi dan pengembangan UMKM yang belum optimal.
5. Masih rendahnya daya saing usah Koperasi dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya.

Data proporsi UMKM yang memperoleh penghargaan atau *award* dan persentase koperasi yang berkualitas di Kota Ternate tahun 2015-2020, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.63**  
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kota Ternate  
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi UMKM yang Memperoleh Penghargaan/ <i>Award</i>	%	1	1	1	1	1	0
Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	7,14	8,33	7,06	8,99	5,56	7,32

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2021

## 11. Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Kewenangan tersebut meliputi, antara lain:

- 1) Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- 3) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
- 4) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Cakupan kinerja urusan penanaman modal, dapat diukur melalui realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), seperti tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.64**  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Investasi PMDN / PMA	Jutaan Rupiah	n/a	n/a	113.532,00	88.441,66	85.713,61	167.967,90
Jumlah Izin	Izin	n/a	3.072	3.238	2.696	2.636	2.086
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	76	78	84,75	85,8	86,5

Sumber: DPMPSTP Kota Ternate, 2021

## 12. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga.

Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Ternate tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.65**  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang Olahraga	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0
Jumlah Atlet Berprestasi	Atlit	2	2 (Int)	2 (Int)	2 (Int)	2 (Int)	n/a

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate, 2021

## 13. Bidang Statistik

Pada tahun 2020, kinerja urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Buku Kota Ternate Dalam Angka tahun 2020, PDRB dan Inflasi Kota Ternate tahun 2020, Buku Monografi tahun 2020 dan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate tahun 2020. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran capaian indikator pelaksanaan urusan statistik, dapat juga diukur melalui capaian indikator kinerja (i) tersedianya buku "Kota Ternate Dalam Angka"; dan (ii) tersedianya buku "PDRB dan Inflasi Kota Ternate", sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.66**  
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Buku Ternate Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	1
Tersedianya Buku Ternate PDRB dan Inflasi	Buku	1	1	1	1	1	1

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate Tahun, 2021

## 14. Bidang Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.



Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator, melalui persentase sekolah dasar yang menerapkan pelajaran bahasa daerah dan jumlah peraturan daerah tentang pelestarian dan perlindungan budaya lokal, sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.67**  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SD yang Menerapkan Pelajaran Bahasa Daerah	%	88	87	100	100	100	94
Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Budaya Lokal	Perda	0	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kota Ternate, 2021

## 15. Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) persentase jumlah pengunjung perpustakaan; (ii) persentase jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; dan (iii) rasio perpustakaan yang dibina.

**Tabel 2.68**  
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	32	40	60	70	80	100
Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	20	25	45	60	75	100
Rasio Perpustakaan yang Dibina	%	4	20	35	50	75	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Ternate, 2021

## 16. Bidang Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui sistem sentralisasi di mana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi di mana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Ternate sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat diukur melalui indikator Persentase jumlah OPD yang tertib arsip. Berikut tabel capaian kinerja urusan kearsipan daerah tahun 2015-2020.

**Tabel 2.69**  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah PD yang Tertib Arsip	%	25	10	40	65	80	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Ternate, 2021

### 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari pulau-pulau kecil memiliki luas lautan wilayah dan mengandung sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti perikanan pantai, terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Produksi ikan hasil tangkapan di laut oleh nelayan di Kota Ternate dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun pengelolaan hasil produksi perikanan cenderung masih rendah. Produksi perikanan tangkap di tahun 2018 adalah sebesar 32.466 ton. Dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 33.064 ton. Adapun jumlah perusahaan perikanan di tahun 2019 adalah sebanyak 5.050 perusahaan dan 285 kelompok nelayan, dan jumlah armada (perahu/kapal) adalah sebanyak 3.124 unit (sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2020).

Untuk mendukung tercapainya kinerja pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimaksud, maka Pemerintah Kota Ternate telah membangun dan mengembangkan 2 (dua) buah pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate Selatan dan Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate.

Data capaian kinerja sektor perikanan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.70**  
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Ternate	%	2,04	2,65	3,46	6,03	9,37	9,37
Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove	%	22	2,5	4,1	5	3,5	3,5
Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Terumbu Karang	%	23	3,2	8,3	8,3	2,9	2,9

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2021

#### 2. Bidang Pariwisata

Capaian kinerja pengelolaan sektor pariwisata Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan objek-objek wisata lainnya yang lebih tematik sesuai dengan peruntukan masing-masing destinasi wisata. Berikut tersaji tabel Capaian Kinerja urusan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata (DTW).



**Tabel 2.71**  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.678	5.226	4.870	2.331	1.501	314
Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal	Orang	200.015	294.780	278.200	278.230	208.871	153.289
Jumlah Lama Rata-rata Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	3	4	4	3

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate dan BPS Kota Ternate, 2021

Pada tabel Capaian kinerja urusan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan pada kolom kondisi kinerja awal tahun 2015 sebesar 1.578 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, mengalami lonjakan cukup tinggi di tahun 2016 sebesar 5.226, karena di tahun itu bertepatan dengan terjadinya fenomena alam Gerhana Matahari Total (GMT). Mulai dari fenomena GMT itu, Kota Ternate semakin dikenal wisatawan mancanegara, tren kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2017, 2018 dan 2019 masih menunjukkan tren yang baik, jika dilihat dari data kondisi awal di tahun 2015, walaupun di setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini membutuhkan strategi promosi pariwisata yang harus lebih baik dan lebih maksimal lagi ke depan.

Data kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu menjadi 314 kunjungan. Hal ini disebabkan terjadinya wabah Covid 19 yang melanda dunia. Pandemi Covid 19 meluluhlantakkan seluruh aktivitas pariwisata hingga mati suri. Sekalipun semua orang ingin *traveling*, kesehatan diri dan keluarga jadi prioritas tertinggi saat itu. Orang lebih memilih tetap tinggal di rumah sebagai pilihan terbaik. Penerbangan dibatasi, hotel-hotel tidak terisi, hingga berbagai tempat wisata sepi pengunjung.

Namun untuk kunjungan wisatawan lokal, mulai dari kinerja awal tahun 2015, sudah menunjukkan tren pertumbuhan kunjungan yang tetap stabil, walaupun ada penurunan kunjungan namun tidak terlalu signifikan. Hal ini sejalan dengan strategi pemulihan pariwisata di pasca pandemi Covid-19 ini, yaitu lebih mengoptimalkan pasar wisatawan lokal. Ke depan Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pariwisata terus melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka pemulihan ekonomi sektor pariwisata.

Begitu juga dengan strategi pengembangan daya tarik wisata di Kota Ternate. Ketersediaan aspek 3A dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Ternate tidak hanya difokuskan pada potensi daya tarik wisata saja, namun juga harus memperhatikan aspek 3A (*Accessibility, Amenities* dan *Ancillary Service*). Hal ini karena aspek 3A tersebut yang menjadi pelengkap keberadaan daya tarik wisata. Berikut tersaji tabel daya tarik wisata di Kota Ternate.

**Tabel 2.72**  
Daya Tarik Wisata Kota Ternate Tahun 2021

No	Nama Destinasi	Alamat	Jenis Destinasi	Jarak dari Pusat Kota
1	Batu Angus	Kel. Kulaba	Geowisata	± 8,7 Km
2	Pantai Sulamadaha	Kel. Sulamadaha	Wisata Alam	± 13 Km
3	Danau Tolire Besar	Kel. Takome	Wisata Alam	± 18 Km
4	Danau Tolire Kecil	Kel. Takome	Wisata Alam	± 18 Km
5	Pantai Tolire	Kel. Takome	Wisata Alam	± 18 Km
6	Benteng Kalamata	Kel. Kayu Merah	Wisata Sejarah	± 3,7 Km
7	Benteng Orange	Kel. Gamalama	Wisata Sejarah	± 1,5 Km
8	Pantai Tobololo	Kel. Tobololo	Wisata Alam & <i>Camping Ground</i>	± 8,6 Km
9	Pantai Jikomalamo	Kel. Takome	Wisata Alam	± 17 Km
10	Pulo Tareba	Kel. Takome	<i>Camping Ground</i>	± 18 Km



**Tabel 2.72 (Lanjutan)**  
**Daya Tarik Wisata Kota Ternate Tahun 2021**

No	Nama Destinasi	Alamat	Jenis Destinasi	Jarak dari Pusat Kota
11	Benteng Kastela	Kel. Kastela	Wisata Sejarah	± 11,4 Km
12	Pantai Kastela	Kel. Kastela	Wisata Alam	± 11,4 Km
13	Danau Laguna	Kel. Ngade	Wisata Alam	± 6,4 Km
14	Benteng Toloko	Kel. Sangaji	Wisata Sejarah	± 3,7 Km
15	Pantai Dorpedu	Kel. Dorpedu	Wisata Alam	± 17,3 Km
16	Bobane Ici	Kel. Dorpedu	Wisata Alam	± 16,8 Km
17	Kedaton Kesultanan Ternate	Kel. Salero	Wisata Sejarah	± 2,2 Km
18	Bukit Bintang	Kel. Tubo	Wisata Alam	± 5,1 Km
19	Pantai Tabanga	Kel. Tobololo	Wisata Alam	± 12,2 Km
20	Taman Nukila	Kel. Gamalama	Wisata Buatan	± 400 M
21	Landmark	Kel. Muhajirin	Wisata Buatan	± 78 M
22	Waterboom	Kel. Kayu Merah	Wisata Buatan	± 3,8 Km
23	Masjid Sultan	Kel. Soa-Sio	Wisata Sejarah	± 2,2 Km
24	Makam Sultan Babullah	Kel. Foradiahi	Wisata Sejarah	± 12 Km
25	Bukit Ngade	Kel. Ngade	Wisata Alam	± 5,6 Km
26	Pantai Falajawa	Kel. Muhajirin	Wisata Alam	± 230 M
27	Kebun Cengkeh	Kel. Gambesi	Wisata Alam	± 8,8 Km
28	Taman Love	Kel. Moya	Wisata Alam	± 3,9 Km
29	Cengkeh Afo	Kel. Tongole	Wisata Alam	± 4,2 Km
30	Taman Moya	Kel. Moya	Wisata Alam	± 3,9 Km
31	Pantai Fitu	Kel. Fitu	Wisata Alam	± 7,6 Km
32	Pantai Akerica	Kel. Akerica	Wisata Alam	± 13,7 Km
33	Gunung Gamalama	Kel. Marikrubu	Wisata Alam & <i>Camping Ground</i>	± 4,8 Km
34	Taman Kota Baru	Kel. Kota Baru	Wisata Buatan	± 4,1 Km
35	Gereja Katolik St. Willibrordus	Kel. Tanah Raja	Wisata Religi	± 250 M

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate, 2021

### 3. Bidang Pertanian

Perkembangan sektor pertanian di daerah Kota Ternate hingga tahun 2020 mengalami suatu kemajuan dilihat dari peningkatan produksi dari berbagai komoditas pertanian. Di tahun 2020, produksi komoditas pertanian tanaman pangan tertinggi adalah tanaman jagung yaitu sebesar 83,3 ton. Adapun tanaman perkebunan produksi tertinggi adalah Pala sebanyak 1.006,00 ton, kelapa 566,10 ton dan cengkeh kering sebanyak 330,00 ton. Sedangkan sektor peternakan, sesuai data dan informasi populasi untuk ternak unggas adalah sebanyak 411.111 ekor, sedangkan populasi kambing sebanyak 24.692 ekor dan sapi sebanyak 3.282 ekor (sumber: Dinas Pertanian Kota Ternate, 2021).

Kinerja sektor pertanian dapat diukur melalui kontribusi sektor pertanian secara umum (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan). Berikut data capaian kinerja urusan pertanian dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.73**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Ternate Tahun 2015-2020**

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	0,82	3,10	3,17	1,46	1,19	1,70

Sumber : BPS Kota Ternate, 2021



#### 4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu sektor yang masuk dalam lingkup urusan energi dan sumber daya mineral adalah listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer untuk saat ini, karena listrik sangat menunjang kegiatan sehari-hari manusia. Jika tidak ada listrik, maka aktifitas sehari-hari akan menjadi terhambat dan ruang gerak manusia pun menjadi terbatas. PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang mengurus pelistrikan setiap tahunnya selalu berupaya untuk memperluas jaringan agar seluruh pelosok di wilayah Indonesia dapat terlayani listrik. Namun kendala letak geografis serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dapat menghambat proses perluasan jaringan listrik tersebut. Di Kota Ternate, dari 8 kecamatan, semua kecamatan telah teraliri listrik melalui jaringan PT PLN (Persero), namun untuk kecamatan Pulau Batang Dua belum dapat 24 jam teraliri listrik jaringan PLN, karena untuk Kecamatan Batang Dua ketersediaan listriknya dikelola dengan bantuan mesin dari Pemerintah Kota Ternate maupun PT PLN (Persero).

Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral di Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2015-2020 berdasarkan harga konstan, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.74**  
Capaian Kinerja Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap PDRB							
- Pertambangan dan Penggalian	%	15,78	8,06	10,51	10,22	9,91	-0,13
- Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,11	0,14	4,38	1,78	7,33	4,24

Sumber : BPS Kota Ternate, 2021

#### 5. Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut terlihat dalam struktur PDRB Kota Ternate di mana dari tahun ke tahun sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor kegiatan lainnya. Capaian kinerja urusan perdagangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.75**  
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,46	8,36	7,70	10,45	9,71	-7,45

Sumber : BPS Kota Ternate, 2021

#### 6. Bidang Perindustrian

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perusahaan industri pengolahan di Indonesia ke dalam empat kategori : a) Industri kerajinan rumah tangga : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 1 – 4 orang, b) Industri kecil : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang, c) Industri sedang : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 20 – 99 orang dan d) Industri besar : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Hal tersebut lebih didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya (yang bekerja di perusahaan industri) tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi serta tidak memperhatikan model kapital yang digunakan.

Industri kecil mempunyai kedudukan yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan tidak berakta notaris, dan secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lemah dalam pasar karena sifat usahanya yang tidak terorganisir. Para pengusaha industri kecil kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi sebagai sarana untuk menggalang kekuatan usaha bersama, tetapi lebih suka bekerja sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang menjurus pada kompetisi yang merugikan, bahkan saling mematikan atau *cut throat competition*.

Sektor industri di wilayah Kota Ternate didominasi oleh kelompok industri kecil dan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya modal dan teknologi yang digunakan. Walaupun masih berskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang dilakukan cukup besar maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate.

Pengembangan jenis usaha sektor industri berdasarkan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate pada tahun 2020 jumlah perusahaan industri sebanyak 1.447 perusahaan dan tenaga kerja sebanyak 4.082 orang, yang terbagi menjadi : bidang kimia dan bahan bangunan sebanyak 369 perusahaan; bidang logam sebanyak 251 perusahaan; bidang pangan berjumlah 578 perusahaan; bidang sandang sebanyak 150 perusahaan dan; serta bidang kerajinan umum sebanyak 99 buah.

Walaupun masih berskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang dilakukan cukup besar, maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate. Jenis usaha yang potensial tersebut berupa industri batik Tubo, industri kue atau oleh-oleh khas Ternate, Ikan Asap (cakalang fufu), Industri kursi bambu Tongole serta beberapa pelaku usaha industri kecil berskala rumah tangga atau *home Industry*. Industri jenis usaha ini sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai salah satu potensi yang dapat mendorong dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha industri.

Adapun kinerja urusan perindustrian dapat diukur melalui indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dan persentase pasar rakyat dalam kondisi baik. Capaian kinerja Urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.76**  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB	%	9,97	6,65	1,73	4,05	2,05	-7,56
Persentase Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	%	100	76,5	72,7	83,3	73,3	85,19

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Perindag, 2021

### 2.3.4. Unsur Pendukung

#### 1. Sekretariat Daerah

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, perumusan kegiatan dalam RKP Kota Ternate Tahun 2021 antara lain:



- 1) *Review* Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang dapat memberi dampak dalam kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik.
- 2) Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah.
- 3) Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- 4) Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja daerah Kota Ternate.

Adapun kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan meliputi antara lain: laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP), sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.77**  
Kinerja Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah Kota Ternate  
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Nasional LPPD	Nilai	n/a	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	C	CC	CC	B	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Ternate, 2021

## 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki 3 fungsi yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (PERDA), fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan anggaran daerah atau APBD, sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengontrolan pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja urusan penyelenggaraan sekretariat DPRD meliputi antara lain: peraturan daerah yang disahkan serta rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.78**  
Kinerja Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peraturan Daerah yang Disahkan	%	80	80	100	100	21	25
Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindak lanjuti	%	80	80	85	82	80	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate, 2021

### 2.3.5. Unsur Penunjang

#### 1. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pendayagunaan Hasil Penelitian

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam 5 tahun terakhir dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate semakin berkualitas. Indikasi semakin berkualitasnya dokumen perencanaan dimaksud salah satunya dapat diukur dengan telah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ternate Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2016-2021, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2012-2032 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Indikasi lain yang dapat dijadikan ukuran semakin berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan, dapat diukur dengan telah tersedianya website Bappelitbangda dengan alamat [www.bappeda.kota-terbate.go.id](http://www.bappeda.kota-terbate.go.id). Media ini disediakan sebagai alat untuk menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui media ini diharapkan masyarakat akan berpartisipasi memberikan masukan dan sekaligus koreksi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Data dan informasi tentang tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Walikota Ternate dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.79**  
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Ditetapkan dengan Perda dan Perkada Kota Ternate Tahun 2015-2020

No	Tahun	Dokumen RPJPD		Dokumen RPJMD		Dokumen RKPD	
		Ada/Tidak	No/Tanggal	Ada/Tidak	No/Tanggal	Ada/Tidak	No/Tanggal
1	2015	Ada	No. 1 / 2012	Ada	No. 22 / 2010 08/11/2010	Ada	No. 15 / 2015 07/05/2015
2	2016	Ada	No. 1 / 2012	Ada	No. 08 / 2016 15/08/2016	Ada	No. 09 / 2016 02/06/2016
3	2017	Ada	No. 1 / 2012	Ada	No. 08 / 2016 15/08/2016	Ada	No. 47 / 2017 22/05/2017
4	2018	Ada	No. 18 / 2018	Ada	No. 08 / 2016 15/08/2016	Ada	No. 07 / 2018 21/05/2018
5	2019	Ada	No. 18 / 2018	Ada	No. 08 / 2016 15/08/2016	Ada	No. 17A/2019 24/06/2019
6	2020	Ada	No. 18 / 2018	Ada	No. 08/2016 15/08/2016	Ada	No. 19 / 2020 29/06/2020

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

Selain meningkatkan kualitas perencanaan, dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2021 perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- 3) Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi daerah; dan
- 4) Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi SDM penelitian berbasis fungsional.

Data dan informasi capaian indikator kinerja bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.80**  
Jumlah Kajian dan Penelitian Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kajian/ Penelitian yang Dilaksanakan Bappelitbangda	Penelitian	1	2	4	4	4	2
Persentase Hasil Kajian/ Penelitian yang Ditindaklanjuti	%	20	40	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan juga hasil kajian ataupun penelitian terkait perencanaan pembangunan sangatlah menunjang kinerja perencanaan. Secara umum, perbaikan kualitas perencanaan baik dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek merupakan unsur kunci dalam perencanaan terutama penetapan tujuan dan sasaran kinerja beserta indikator dan target kerjanya.

Adapun kinerja urusan perencanaan dapat diukur melalui indikator persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan. Capaian kinerja Urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.81**  
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Perencanaan	%	13,97	13,75	16,39	17,16	17,73	18,57

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## 2. Bidang Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, beberapa kebijakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate meliputi: 1) peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD; 2) penerapan sistem aplikasi *e-budgeting*; 3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 4) peningkatan sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator kinerja bidang Keuangan Daerah di Kota Ternate, antara lain: 1) Opini BPK terhadap laporan keuangan; dan 2) Rasio kemandirian daerah. Capaian kinerja Urusan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.82**  
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021



### 3. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan aparatur yang maju dan mandiri. Pengembangan sumber daya aparatur Kota Ternate diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, beberapa kebijakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate antara lain: 1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai bidang tugasnya; 2) pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintah Kota Ternate; 3) koordinasi dan integrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat diukur melalui indikator persentase kasus PNS yang ditindaklanjuti oleh BPK dan persentase jabatan struktural yang terisi. Capaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.83**  
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kasus PNS yang Ditindaklanjuti oleh BPK	%	24	17	43	55	38	30
Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	%	70	52	70	70	78	77

Sumber: BKPSDM Kota Ternate, 2021

#### 2.3.6. Unsur Pengawasan

##### 1. Inspektorat

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintahan daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Untuk itulah dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2021, perumusan kegiatan dalam rencana kerja yang akan disusun oleh Inspektorat Kota Ternate dalam rangka pembinaan dan pengawasan akan melakukan beberapa kebijakan antara lain: 1) Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 3) Pengawasan Reformasi Birokrasi; dan 4) Penegakan Integritas.

Adapun indikator kinerja bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Kota Ternate sesuai dengan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, antara lain: 1) tingkat maturitas SPIP; dan 2) tingkat kapabilitas APIP. Capaian kinerja Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.84**  
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2	2
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	2	3	3

Sumber: Inspektorat Kota Ternate, 2021



## 2.3.7 Unsur Kewilayahan

### 1. Kecamatan

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Kecamatan memiliki peran dalam pemerintahan berupa pemberdayaan kepada masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Kota Ternate terbagi atas 8 kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Ternate Barat, Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, kecamatan dituntut untuk dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana ada asas-asas pelayanan publik yang harus dipenuhi antara lain; kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan.

Indikator dalam mengukur tingkat kinerja pelayanan di kecamatan yakni dengan melakukan *survey* kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.85**  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Kecamatan (Kewilayahan) Kota Ternate Tahun 2015-2020

Kecamatan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
Ternate Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	n/a	B	B	B
Ternate Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	n/a	B	B	B
Ternate Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	B	B	B	B
Pulau Ternate	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	n/a	B	B	B
Ternate Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	-	B	B
Moti	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	B	B	B	BB
Pulau Hiri	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	B	B
Pulau Batang Dua	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	B	B

Sumber: Kecamatan di Kota Ternate, 2021

### 2.3.8. Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

#### 1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- 2) Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- 3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 4) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat diukur melalui indikator persentase penurunan konflik antar masyarakat, seperti tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.86**  
Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat	%	16	13	9	7	1	2

Sumber: Badan Kesbanglinmas Kota Ternate, 2021

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Dalam implementasinya, daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Ternate dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan di analisis menurut kecamatan di wilayah Kota Ternate. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya manusia.

#### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

##### 1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan. Untuk menghindari pengaruh perubahan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.



Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

**Tabel 2.87**  
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Pangan	40,62	42,20	42,50	41,05	40,69
Pengeluaran Non Pangan	59,38	57,80	57,50	58,95	59,31
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Susenas BPS Kota Ternate 2016-2021 (data diolah), 2021

## 2. Rasio Kemandirian Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan telah mengalami perkembangan yang sangat mendasar. Hal ini terkait dengan berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat diukur melalui rasio kemandirian keuangan. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bias melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Perkembangan derajat otonomi fiskal Kota Ternate sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.88**  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kemandirian Daerah	%	8,05	8,53	11,02	11,96	12,10	12,68

Sumber: BP2RD dan Bappelitbangda Kota Ternate (data diolah), 2020

### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah dalam berbagai periode pembangunan selalu menjadi salah satu isu sentral, keberadaannya sangat dekat dengan jumlah dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat untuk menunjang interaksi dan mobilitasnya. Tuntutan publik yang muncul dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini adalah meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur daerah. Adapun perspektif pemerintah daerah, cenderung menghendaki agar pembangunan infrastruktur daerah ini dapat mendukung meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur Kota Ternate diharapkan sesuai dengan arahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate, sehingga fokus pengembangan wilayah kota mengedepankan aspek teknologi, ekonomi, sosial dan aspek budaya sesuai tuntutan era globalisasi.

Fokus pengembangan Kota Ternate dengan demikian diarahkan pada sistem kawasan secara berjenjang. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengembangan infrastruktur wilayah adalah ketataan pembangunan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RTRW.

**Tabel 2.89**  
Capaian Urusan Penataan Ruang Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW	%	49,63	60,39	52,00	69,57	71,50	79,31

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### Kerjasama Antar Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XVII tentang Kerja Sama Daerah pasal 363 ayat (1) menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya pasal 364 ayat (2) poin e kerjasama dimaksud adalah kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

Melalui pendekatan wilayah dimungkinkan untuk melihat dan memperhatikan berbagai potensi yang ada, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama antardaerah untuk bersinergi dan saling mendukung demi mendapatkan manfaat bersama. Dalam mewujudkan kerjasama antardaerah melalui pendekatan wilayah tersebut, masing-masing Kabupaten/Kota harus mampu melihat dan memanfaatkan potensi maupun fasilitas yang dimilikinya agar berdayaguna dengan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk memanfaatkannya. Pengamatan potensi daerah sendiri dan potensi daerah lain dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah perencanaan pembangunan melalui pendekatan wilayah. Dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, akan terbuka kesempatan untuk mengatasi masalah-masalah bersama dengan melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah.

Kota Ternate saat ini masih menjadi titik awal berkembangnya kehidupan di Maluku Utara. Akan tetapi bila dilihat dan ditinjau kembali, Kota Ternate pada dasarnya tidak dapat terus berdiri sendiri. Kondisi yang ada saat ini baik ditinjau dari aspek geografis dan sumber daya alam menunjukkan bahwa Kota Ternate pun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itulah kerjasama antardaerah terdekat dirasa perlu dalam rangka mengatasi masalah-masalah bersama dengan melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah. Dalam hal ini wilayah terdekat yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, bertempat di Halaman kantor Walikota Ternate. Tiga kepala daerah berkumpul untuk menandatangani kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut menjadi awal dari terbentuknya kerjasama antar daerah yang disebut SEGITIGA EMAS (Halmahera Barat, Ternate, dan Tidore). Bentuk kerjasama adalah kesepakatan antar daerah tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah melalui keterpaduan sejumlah program dan kebijakan strategis sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kerja sama antar daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan dan konektivitas antar wilayah terdekat dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas program strategis bersama di bidang pertanian dan kepariwisataan maupun bidang-bidang lain yang dianggap strategis sebagaimana tertuang dalam objek dan ruang lingkup kerja sama antar daerah dimaksud.

Kerja sama antar daerah ini bertujuan mewujudkan konektivitas antar wilayah terdekat melalui keterpaduan program strategis antar daerah dan membentuk simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan



potensi dan karakteristik geografis yang diharapkan akan mengerucut menjadi poros utama Kawasan Segitiga Emas Ternate, Tidore, Jailolo (TTJ) sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas nasional poros maritim dan tol laut. Kerjasama antar daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Objek dan ruang lingkup kerjasama dalam kesepakatan bersama ini diprioritaskan bidang pertanian dan kepariwisataan serta bidang-bidang lain yang dianggap urgen dan strategis antara lain:

1. Penguatan sektor pertanian berbasis ketahanan pangan.
2. Pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataan.
3. Promosi bersama bidang kepariwisataan.
4. Kerjasama sektor jasa dan perdagangan serta UMKM terpadu antar daerah.
5. Pengendalian inflasi bersama.
6. Kerjasama bidang perhubungan melalui pembukaan akses transportasi terpadu.
7. Pengembangan kerjasama pengelolaan potensi dan pemasaran bidang perikanan.
8. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

### Angka Kriminalitas

Untuk memberikan kenyamanan iklim berinvestasi dalam hal keamanan, Kota Ternate dilindungi oleh sarana keamanan berupa 1 kantor Polres, 5 kantor Polsek, 3 kantor Polisi Subsektor, dan 3 kantor Pos Polisi. Selain itu, Kepolisian Resort Ternate juga diperkuat dengan sejumlah personil polisi. Terdapat 463 orang polisi laki-laki, 35 orang polisi wanita, dan 4 orang perempuan PNS Polisi.

Kriminalitas di Kota Ternate dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Sepanjang tahun 2020 terdapat 206 kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Ternate. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.90**  
Angka Kriminalitas di Kota Ternate Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas	Kasus	350	228	93	135	161	206

Sumber: Kepolisian Resort Ternate, 2021

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber utama data ketenagakerjaan yang digunakan BPS adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya. Yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Penduduk Ternate paling banyak bekerja di sektor jasa. Karena banyaknya lapangan usaha yang berada di sektor ini misalnya saja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bengkel, salon, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor yang paling sedikit digeluti oleh penduduk Ternate adalah sektor listrik, gas, dan air, karena potensi kota Ternate di sektor ini tidak sebesar sektor lainnya.



Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

### Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Ternate sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.91**  
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia 0 - 14 (jiwa)	62.857	64.304	65.648	66.979	56.974
Penduduk Usia 64 + (jiwa)	5.861	6.212	6.590	6.993	7.463
Penduduk Usia 15 - 64 (jiwa)	139.570	141.868	144.124	146.313	140.564
<b>Rasio Ketergantungan (%)</b>	<b>49,31</b>	<b>49,71</b>	<b>50,12</b>	<b>50,56</b>	<b>45,84</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk dan Sensus Penduduk BPS Kota Ternate (diolah), 2021

### Kebijakan Ekonomi Daerah

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2021-2026. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subjek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta



membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Kota Ternate terkini dan analisis kinerja perekonomian dari beberapa indikator ekonomi.

### Analisis Kinerja Perekonomian Wilayah Kota Ternate

Analisis komparatif dan kompetitif wilayah untuk melihat kondisi sektor yang saat ini telah mengalami ketidakefisienan, sehingga terjadi peralihan kontribusi terhadap kinerja perekonomian wilayah. Berbagai metode perhitungan yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang ada dalam suatu perekonomian. Salah satu metode yang bisa dipergunakan adalah metode *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ ini merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik *output*/nilai tambah untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (*economic base*) masyarakat daerah/lokal. Dengan menggunakan data PDRB sebagai indikator, analisis *Location Quotient* dilakukan untuk melihat keberadaan sektor maupun komoditas sebagai sektor basis di wilayah Kota Ternate.

Analisis basis ekonomi atau komparatif wilayah Kota Ternate melalui analisis LQ dipandang perlu untuk mengetahui sektor unggulan. Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi sektor yang memiliki karakteristik yang dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa. Berdasar hasil analisis LQ dari setiap subsektor yang ada pada PDRB Kota Ternate tahun 2017, ternyata dari 17 sektor PDRB terdapat sekitar 5 sektor yang bukan merupakan sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih kecil dari 1 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sedangkan 12 sektor lainnya merupakan sektor basis. Pada tahun 2018 sektor bukan basis menurun menjadi 4 sektor yakni terjadi perubahan pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang pada tahun 2017 bukan merupakan sektor basis tapi pada tahun 2018 mengalami perubahan struktur dan menjadi sektor basis. Sehingga sektor basis menjadi 13 sektor. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.92**  
Hasil Analisis LQ di Kota Ternate Tahun 2017 dan 2018

Lapangan Usaha	Location Quotient (LQ)	
	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0,1540	0,1594
Pertambangan dan Penggalian	0,0070	0,0067
Industri Pengolahan	0,5958	0,4297
Pengadaan Listrik dan Gas	1,5114	1,4826
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,9102	0,9195
Konstruksi	1,0207	1,0237
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,4281	1,4535
Transportasi, Pergudangan	2,6677	2,6760
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,4795	2,4088
Informasi dan Komunikasi	2,1193	2,1725
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,1826	2,2332
Real Estate	2,0061	2,0273
Jasa Perusahaan	2,3686	2,4078
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,9922	1,0227
Jasa Pendidikan	1,3744	1,3977
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,5294	1,5599
Jasa Lainnya	2,3903	2,4642

Sumber: Olahan Data Sekunder PDRB Kota Ternate, 2020

Berdasarkan hasil analisis LQ diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018, peranan sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan serta beberapa sektor lainnya merupakan sektor basis, ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut dalam perekonomian wilayah Kota Ternate mempunyai kemampuan menarik pendapatan yang berasal dari luar daerah, sehingga mampu memberikan peningkatan pada perputaran konsumsi yang ada di wilayah Kota Ternate, yang pada akhirnya akan meningkatkan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah. Karena besarnya peran sektor tersebut terhadap proses peningkatan *output* suatu wilayah, melalui proses *multiplier*, maka subsektor dimaksud dapat disebut sebagai *leading sector* bagi perekonomian daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut sektor-sektor basis diidentikkan dengan sektor yang mampu dikirim keluar daerah dan dapat menciptakan aliran pendapatan yang berasal dari luar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai siklus konsumsi di wilayah itu.

Sebagai gambaran umum untuk wilayah Kota Ternate, secara spasial memiliki posisi strategis karena merupakan daerah penghubung antar wilayah di Provinsi Maluku Utara sehingga memiliki keterkaitan baik dalam mobilitas penduduk maupun mobilitas barang dan jasa yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan Kota Ternate memiliki keuntungan lokasi yang dapat dimanfaatkannya sebagai salah satu sumber tambahan aliran uang ke daerahnya atau dikenal dengan *intervening opportunity*. Ternyata *intervening opportunity* dimanfaatkan oleh Kota Ternate, hal ini terlihat dari peranan sektor transportasi dan sektor informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu sektor basis, selain sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi serta sektor jasa keuangan, sektor jasa perusahaan yang juga merupakan sektor basis.

Kaitan dengan aspek pertanian, kehutanan dan perikanan, walaupun bukan merupakan sektor basis tetapi bila ditunjang oleh sektor andalan wilayah kota dalam hal ini dari sektor transportasi dan pergudangan, serta perdagangan dan jasa diharapkan dapat menunjang pengembangan sektor pertanian dan dijadikan wilayah inti yang menerima pasokan bahan pangan dari wilayah *hinterland* (sentra produksi), yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Penjelasan dengan menggunakan analisis LQ tersebut dapat didukung dengan analisis *shift-share* (SSA) yang dapat menggambarkan pergeseran suatu sektor pada wilayah Kota Ternate dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang setingkat di atasnya (dalam hal ini wilayah Provinsi Maluku Utara). Analisis menggunakan dua titik tahun yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Dalam analisis *shift share* ini terdiri dari nilai komponen *growth economic*, nilai komponen proporsional (*proportional shift*), dan nilai komponen diferensial (*differential share*). Hasil analisis shift share dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.93**  
Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kota Ternate Tahun 2017 dan Tahun 2018

Lapangan Usaha	Pergeseran Proporsional Provinsi Maluku Utara	Pergeseran Diferensial Kota Ternate
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-0,088	-0,047
Pertambangan dan Penggalian	0,077	0,019
Industri Pengolahan	0,399	-0,034
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,049	-0,065
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,037	-0,024
Konstruksi	0,018	0,020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,004	0,015
Transportasi, Pergudangan	-0,001	0,002
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,007	-0,024



**Tabel 2.93 (Lanjutan)**  
**Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kota Ternate Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Lapangan Usaha	Pergeseran Proporsional Provinsi Maluku Utara	Pergeseran Diferensial Kota Ternate
Informasi dan Komunikasi	-0,030	-0,001
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,051	-0,023
<i>Real Estate</i>	-0,010	0,002
Jasa Perusahaan	-0,031	-0,011
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,034	0,001
Jasa Pendidikan	-0,057	-0,036
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,016	0,007
Jasa Lainnya	0,005	0,038

Sumber: Olahan Data Sekunder PDRB Kota Ternate dan Maluku Utara, 2020

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis SSA menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara secara agregat sebesar 0,162. Artinya bahwa secara agregat tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki perkembangan positif atau dapat dikatakan produktivitas kinerja ekonomi Provinsi Maluku Utara pada dua periode tahun tersebut mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena komponen *share* dari sektor-sektor penting atau penentu juga mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan yang dihasilkan dari kontribusi berbagai sektor PDRB cenderung bersifat lamban. Hasil ini menunjukkan secara spasial dapat dilihat nilai komponen *proportional shift* hampir semua sektor dapat dikatakan berjalan lambat, walaupun nilai komponen *share* memiliki nilai positif, bahkan ada dari sektor penyumbang PDRB yang menghasilkan nilai negatif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan total yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (-0.088), sektor Pengadaan Listrik dan Gas (-0.049), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang (-0.037), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (-0.004), sektor transportasi dan pergudangan (-0.001), sektor informasi dan komunikasi (-0.030), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (-0.051), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0.034) serta sektor jasa pendidikan (-0.057) dan sektor lainnya (lihat tabel di atas). Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar terdapat pada sektor Industri Pengolahan (0.399), sektor pertambangan dan penggalian (0.077), serta sektor konstruksi (0.018) dibandingkan pertumbuhan sub sektor secara keseluruhan. Khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan, sesuai hasil analisis nilai proporsional *shift* negatif, kondisi ini bertolak belakang dengan nilai pertumbuhan ekonominya. Hal ini memperlihatkan *performance* yang menurun terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami pergeseran yang proporsional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai proporsional *share* yang negatif. Fenomena pergeseran ini diduga terjadi karena ketidakefisienan dalam pengelolaan potensi sumber daya.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek nilai *differential share* PDRB khususnya di Kota Ternate, nilai tertinggi dan memiliki kontribusi positif terdapat pada sektor Jasa Lainnya yaitu sebesar 0,038, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 0,020 dan sektor Pertambangan dan Penggalian yakni 0,019, serta beberapa sektor lainnya. Sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan dan beberapa sektor lainnya bernilai negatif (lihat tabel analisa). Hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan perekonomian wilayah yakni kesulitan mendapatkan faktor-faktor produksi seperti benih/bibit unggul, pupuk, serta sarana produksi lainnya sehingga hanya petani/nelayan dengan teknologi tinggi dan bermodal besar yang memperoleh keuntungan maksimal atas kondisi demikian. Sementara itu, banyak dari para petani ataupun pelaku pertanian yang meninggalkan aktivitas pertanian (dalam hal ini untuk komoditas) karena adanya konversi lahan ataupun rendahnya kualitas dalam pengelolaan lahan secara produktif. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa pendidikan, serta sektor penyediaan makan dan minum serta beberapa sektor lainnya yang menunjukkan nilai negatif dalam sumbangan terhadap perekonomian Kota Ternate. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa

perkembangan subsektor tersebut di wilayah Kota Ternate berjalan dengan lambat, bahkan telah mengalami pergeseran, belum memberikan sumbangan yang berarti serta tidak memiliki keunggulan kompetitif terhadap pembangunan di Kota Ternate.

## 2.5 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020

RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Perubahan RPJMD sampai dengan tahun 2020. Hasil evaluasi ditunjukkan dengan Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Ternate yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

**Tabel 2.94**  
Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020

Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
			Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>										
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,5	12	12	-	11,58	11,71	11,71	12	Belum Tercapai
Angka Partisipasi PAUD	%	85	90	90	-	90	60	60	90	Belum Tercapai
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0	0	-	0	0	0	0	Tercapai
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0	0	0	-	0	0	0	0	Tercapai
Annual Parasit Incidence (API)	%	5	2	1,5	-	0,1	0,05	0,05	1,5	Tercapai
Angka Stunting	%	16	15,2	15	-	15,2	5	5	15	Tercapai
Cakupan Luas Wilayah yang Terproteksi Bahaya Kebakaran (WMK)	%	65	85	90	-	75	88	88	90	Akan Tercapai
Indeks Kemiskinan	%	3,16	3,00	2,09	-	3,14	3,46	3,46	2,09	Belum Tercapai
Laju Inflasi	%	4,2	3,52	3,27	-	2,02	2,13	2,13	3,27	Tercapai
Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Perlindungan Budaya Lokal	Dok	0	0	1	-	0	1	1	1	Tercapai
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,51	2,1	2	-	2,24	2,21	2,21	2	Tercapai
Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
Persentase Penurunan PMKS	%	n/a	3,0	2,5	-	0,94	10,26	10,26	2,5	Tercapai
Persentase SD yang Menerapkan Pelajaran Bahasa Daerah	%	88	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
Persentase Siswa SD kelas VI Beragama Islam yang Dapat Baca Tulis Al-Qur'an	%	100	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat	Kasus	16	6	3	-	1	2	2	3	Tercapai



**Tabel 2.94 (Lanjutan)**  
**Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020**

Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
			Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	37	55	60	-	50	90	90	60	Tercapai
Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,87	5,95	5,55	-	6,06	5,80	5,80	5,55	Akan Tercapai
Universal Child Immunization (UCI)	%	90	95	95	-	95	84	84	95	Belum Tercapai
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,07	70,47	70,57	-	70,85	70,97	70,97	70,57	Tercapai
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>										
Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat Milik Pemerintah	%	n/a	60	70	-	33	48	48	70	Belum tercapai
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,36	92,52	93,10	-	92,10	91,83	91,83	93,10	Akan tercapai
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	29,89	31,29	32,61	-	74,90	74,96	74,96	32,61	Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	C	B	A	-	B	B	B	A	Belum tercapai
Jumlah UMKM yang Memperoleh Penghargaan/ Award	Unit	1	1	1	-	1	0	0	1	Belum tercapai
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Ternate	%	2,04	7	8	-	9,37	9,37	9,37	8	Tercapai
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	B	BB	-	B	BB	BB	BB	Tercapai
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Perencanaan	%	13,97	17,93	18,30	-	17,73	18,57	18,57	18,30	Tercapai
Peringkat Nasional LPPD	Nilai	n/a	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Belum	Belum	Tinggi	Belum Tercapai
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	65,42	76,4	86,22	-	71,04	74,34	74,34	86,22	Belum Tercapai
Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	76,32	92,76	98,03	-	92,76	99,34	99,34	98,03	Tercapai
Rasio Rumah Layak Huni	%	n/a	30	35	-	28,14	33,60	33,60	35	Akan Tercapai
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	n/a	20	15	-	35,50	16,80	16,80	15	Akan Tercapai
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	71,33	83,97	87,6	-	91,13	83,97	83,97	87,6	Akan Tercapai
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	55	90	100	-	80	68	68	100	Belum Tercapai
PDRB per Kapita	Rp.	25.133,2	31.377,6	33.170,80	-	31.242,5	35.237,7	35.237,70	33.170,80	Tercapai
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	%	0	80	85	31.242,5	83,70	73,70	73,70	90	Belum Tercapai



**Tabel 2.94 (Lanjutan)**  
**Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020**

Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
			Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	0,82	1,22	1,25	-	1,19	1,7	1,7	1,25	Tercapai
Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,97	3	3	-	2,05	-7,56	-7,56	3	Belum Tercapai
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,46	9,50	9,50	-	9,71	-7,45	-7,45	9,50	Belum Tercapai
Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	7,14	6	6	-	5,56	7,32	7,32	5	Tercapai
Rasio Kemandirian Daerah	%	8,05	12,01	13,04	-	12,10	12,68	12,68	13,04	Akan Tercapai
Realisasi Investasi PMDN	%	jutaan Rupiah	85.713,61	167.967,90	85.713,61	85.713,61	167.967,90	167.967,90	167.967,90	Tercapai
Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	3	3	-	2	2	2	3	Belum Tercapai
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	-	3	3	3	3	Tercapai
<b>Aspek Daya Saing</b>										
Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	11,2	12,6	13,1	-	12,6	12,6	12,6	13,1	Akan Tercapai
Predikat Pengelolaan Lingkungan	Nilai	Adipura	Adipura	Adipura	-	Tidak	Tidak	Tidak	Adipura	Belum Tercapai
Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	n/a	11,78	12,72	-	9,48	9,26	9,26	12,72	Belum Tercapai
Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove	%	22	15	10	-	3,5	3,5	3,5	10	Belum Tercapai
Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	%	23	11	8,5	-	2,9	2,9	2,9	8,5	Belum Tercapai
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Lokal	Org	1.678 200.015	2.700 295.700	2.900 295.700	-	1.501 208.871	314 153.289	314 153.289	2.900 295.700	Belum Tercapai
Jumlah Lama Rata-rata Tinggal Wisatawan	Hari	2	4	4	-	4	3	3	4	Belum Tercapai
Jumlah Atlit Berprestasi	atlit	2	2	2	-	2	0	0	10	Belum Tercapai
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>										
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,5	12	12	-	11,58	11,71	11,71	12	Belum Tercapai
Angka Partisipasi PAUD	%	85	90	90	-	90	60	60	90	Belum Tercapai
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0	0	-	0	0	0	0	Tercapai
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0	0	0	-	0	0	0	0	Tercapai
Annual Parasit Incidence (API)	%	5	2	1,5	-	0,1	0,05	0,05	1,5	Tercapai
Angka Stunting	%	16	15,2	15	-	15,2	5	5	15	Tercapai



**Tabel 2.94 (Lanjutan)**  
**Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020**

Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
			Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cakupan Luas Wilayah yang Terproteksi Bahaya Kebakaran (WMK)	%	65	85	90	-	75	88	88	90	Akan Tercapai
Indeks Kemiskinan	%	3,16	3,00	2,09	-	3,14	3,46	3,46	2,09	Belum Tercapai
Laju Inflasi	%	4,2	3,52	3,27	-	2,02	2,13	2,13	3,27	Tercapai
Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Perlindungan Budaya Lokal	Dok	0	0	1	-	0	1	1	1	Tercapai
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,51	2,1	2	-	2,24	2,21	2,21	2	Tercapai
Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
Persentase Penurunan PMKS	%	n/a	3,0	2,5	-	0,94	10,26	10,26	2,5	Tercapai
Persentase SD yang Menerapkan Pelajaran Bahasa Daerah	%	88	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
Persentase Siswa SD kelas VI Beragama Islam yang Dapat Baca Tulis Al-Qur'an	%	100	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat	Kasus	16	6	3	-	1	2	2	3	Tercapai
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	37	55	60	-	50	90	90	60	Tercapai
Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,87	5,95	5,55	-	6,06	5,80	5,80	5,55	Akan Tercapai
Universal Child Immunization (UCI)	%	90	95	95	-	95	84	84	95	Belum Tercapai
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,07	70,47	70,57	-	70,85	70,97	70,97	70,57	Tercapai
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>										
Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat Milik Pemerintah	%	n/a	60	70	-	33	48	48	70	Belum tercapai
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,36	92,52	93,10	-	92,10	91,83	91,83	93,10	Akan tercapai
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	29,89	31,29	32,61	-	74,90	74,96	74,96	32,61	Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	C	B	A	-	B	B	B	A	Belum tercapai
Jumlah UMKM yang Memperoleh Penghargaan/ Award	Unit	1	1	1	-	1	0	0	1	Belum tercapai
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Ternate	%	2,04	7	8	-	9,37	9,37	9,37	8	Tercapai
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	B	BB	-	B	BB	BB	BB	Tercapai

**Tabel 2.94 (Lanjutan)**  
**Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020**

Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
			Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Perencanaan	%	13,97	17,93	18,30	-	17,73	18,57	18,57	18,30	Tercapai
Peringkat Nasional LPPD	Nilai	n/a	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Belum	Belum	Tinggi	Belum Tercapai
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	65,42	76,4	86,22	-	71,04	74,34	74,34	86,22	Belum Tercapai
Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	76,32	92,76	98,03	-	92,76	99,34	99,34	98,03	Tercapai
Rasio Rumah Layak Huni	%	n/a	30	35	-	28,14	33,60	33,60	35	Akan Tercapai
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	n/a	20	15	-	35,50	16,80	16,80	15	Akan Tercapai
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	71,33	83,97	87,6	-	91,13	83,97	83,97	87,6	Akan Tercapai
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	55	90	100	-	80	68	68	100	Belum Tercapai
PDRB per Kapita	Rp.	25.133,2	31.377,6	33.170,80	-	31.242,5	35.237,7	35.237,70	33.170,80	Tercapai
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	%	0	80	85	31.242,5	83,70	73,70	73,70	90	Belum Tercapai
Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	0,82	1,22	1,25	-	1,19	1,7	1,7	1,25	Tercapai
Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,97	3	3	-	2,05	-7,56	-7,56	3	Belum Tercapai
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,46	9,50	9,50	-	9,71	-7,45	-7,45	9,50	Belum Tercapai
Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	7,14	6	6	-	5,56	7,32	7,32	5	Tercapai
Rasio Kemandirian Daerah	%	8,05	12,01	13,04	-	12,10	12,68	12,68	13,04	Akan Tercapai
Realisasi Investasi PMDN	%	jutaan Rupiah	85.713,61	167.967,90	85.713,61	85.713,61	167.967,90	167.967,90	167.967,90	Tercapai
Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	3	3	-	2	2	2	3	Belum Tercapai
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	-	3	3	3	3	Tercapai
<b>Aspek Daya Saing</b>										
Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	11,2	12,6	13,1	-	12,6	12,6	12,6	13,1	Akan Tercapai
Predikat Pengelolaan Lingkungan	Nilai	Adipura	Adipura	Adipura	-	Tidak	Tidak	Tidak	Adipura	Belum Tercapai
Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	n/a	11,78	12,72	-	9,48	9,26	9,26	12,72	Belum Tercapai



**Tabel 2.94 (Lanjutan)**  
**Capaian Kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2020**

Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
			Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove	%	22	15	10	-	3,5	3,5	3,5	10	Belum Tercapai
Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	%	23	11	8,5	-	2,9	2,9	2,9	8,5	Belum Tercapai
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Lokal	Org	1.678 200.015	2.700 295.700	2.900 295.700	-	1.501 208.871	314 153.289	314 153.289	2.900 295.700	Belum Tercapai
Jumlah Lama Rata-rata Tinggal Wisatawan	Hari	2	4	4	-	4	3	3	4	Belum Tercapai
Jumlah Atlet Berprestasi	atlit	2	2	2	-	2	0	0	10	Belum Tercapai

Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2020 pada 3 Aspek Kinerja Pembangunan, dengan total indikator sebanyak 54 (lima puluh empat) indikator, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (20 indikator), sebanyak 14 (empat belas) indikator tercapai baik sesuai atau melebihi target (tingkat capaian  $\geq 100\%$ ), 2 (dua) indikator diharapkan akan tercapai (tingkat capaian 90-100 %), dan 4 (empat) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian  $< 90\%$ ).
2. Aspek Pelayanan Umum (26 indikator), sebanyak 11 (sebelas) indikator tercapai baik sesuai atau melebihi target (tingkat capaian  $\geq 100\%$ ), 5 (lima) indikator diharapkan akan tercapai (tingkat capaian 90-100 %), 10 (sepuluh) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian  $< 90\%$ ).
3. Aspek Daya Saing (8 indikator), sebanyak 1 (satu) indikator diharapkan akan tercapai (tingkat capaian 90-100 %) dan 7 (tujuh) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian  $< 90\%$ ).

## **BAB III**

# **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2016-2020), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi, kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan Kerangka Pendanaan.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020, kinerja keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor



71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

Terkait dengan terbitnya beberapa regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka fokus analisis terhadap keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksud terdiri dari, laporan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 termasuk gambaran kondisi neraca daerah.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Ternate selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk mencapai target-target sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode 2016-2020. Oleh karena itu, perkembangan dari sisi pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pada Pemerintah Kota Ternate, dapat dijabarkan ke dalam (i) perkembangan pendapatan daerah; (ii) perkembangan belanja daerah; dan (iii) perkembangan pembiayaan daerah.

#### 1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Data rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-Rata
	PENDAPATAN DAERAH	882.756.714.513,11	944.243.999.954,97	902.529.838.131,58	980.725.838.061,12	945.313.760.645,52	3,11
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.390.176.544,11	93.755.330.223,97	96.425.003.776,58	105.903.492.250,12	78.274.781.177,55	7,12
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40.371.419.894,00	45.516.684.750,00	52.091.259.186,12	57.996.842.888,00	49.802.378.454,00	8,24
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.337.695.972,00	16.816.067.938,00	16.980.872.337,00	18.048.954.310,75	16.077.017.079,00	1,54
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	356.500.800,00	573.704.420,00	928.651.667,53	1.206.784.356,00	1.310.008.542,79	83,40
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.324.559.878,11	30.848.873.115,97	26.424.220.585,93	28.650.909.695,37	11.085.377.101,76	18,63



**Tabel 3.1 (Lanjutan)**  
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-Rata
2	PENDAPATAN TRANSFER	813.366.536.709,00	830.488.669.731,00	806.104.834.365,00	874.822.346.811,00	846.824.505.760,00	2,40
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	21.780.524.211,00	16.960.129.594,00	16.884.154.782,00	12.255.786.432,00	17.998.507.800,00	6,70
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.914.054.211,00	2.772.517.547,00	12.580.528.509,00	8.763.514.762,00	25.322.364.016,00	85,33
2.3	Dana Alokasi Umum	621.354.106.000,00	610.438.912.000,00	610.569.215.000,00	653.094.117.000,00	599.701.700.000,00	2,12
2.4	Dana Alokasi Khusus	89.928.671.000,00	166.632.969.350,00	109.263.019.267,00	122.901.427.638,00	110.883.631.467,00	23,20
2.5	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
2.6	Dana Penyesuaian	57.231.677.100,00	7.500.000.000,00	28.128.529.000,00	44.225.740.000,00	65.584.074.000,00	50,50
2.7	Transfer Pemerintah Provinsi	20.157.504.202,00	26.184.141.240,00	28.679.387.807,00	33.581.760.979,00	27.334.228.477,00	3,21
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.260,00	20.000.000.000,00	-	-	20.214.473.707,97	n/a
3.1	Pendapatan Hibah	-	20.000.000.000,00	-	-	20.214.473.707,97	n/a

Sumber: Realisasi APBD - BPKAD Kota Ternate, 2021

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3.1 di atas terlihat, bahwa secara umum realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari komponen pajak daerah lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana diketahui, bahwa totalitas pendapatan asli daerah terbentuk atas beberapa komponen pendapatan asli daerah yang dalam pengelolaannya masih dalam jangkauan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan komponen pembentukan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah telah merumuskan berbagai kebijakan yang kondusif dan sejalan dengan dinamika terkini yang berkembang di kalangan masyarakat umum, utama di dunia usaha/swasta.

## 2. Pertumbuhan Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, bahwa komponen belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- 2) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.



**Tabel 3.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-Rata
5	BELANJA DAERAH	877.571.425.067,22	943.433.566.559,78	898.312.618.176,08	974.453.146.494,88	944.038.093.308,26	8,08
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	443.379.536.751,00	401.792.670.129,00	391.367.208.833,00	410.869.396.427,00	494.073.954.246,00	13,26
5.1.1	Belanja Pegawai	424.247.070.531,00	364.884.716.309,00	356.294.833.013,00	373.460.882.903,00	398.710.135.588,00	-4,77
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	1.664.000.000,00	0,00	0,00	-
5.1.4	Belanja Hibah	7.657.790.000,00	11.267.000.000,00	14.567.090.000,00	19.829.980.000,00	56.616.300.500,00	298,06
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.116.000.000,00	18.505.154.000,00	13.299.676.000,00	11.883.758.020,00	2.015.750.000,00	139,90
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	813.109.720,00	813.109.720,00	813.109.720,00	744.924.504,00	686.743.920,00	-16,20
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.545.566.500,00	6.322.690.100,00	4.728.500.100,00	4.949.851.000,00	36.045.024.238,00	621,69
5.2	BELANJA LANGSUNG	434.191.888.316,22	541.640.896.430,78	506.945.409.343,08	563.583.750.067,88	449.964.139.062,26	9,35
5.2.1	Belanja Pegawai	75.546.951.019,00	94.184.157.799,00	99.358.753.221,00	102.399.890.349,00	88.003.949.865,00	19,17
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.506.226.035,14	256.242.997.493,78	205.934.770.630,94	233.200.760.898,13	173.442.243.836,26	7,62
5.2.3	Belanja Modal	175.138.711.262,08	191.213.741.138,00	201.651.885.491,14	227.983.098.820,75	188.517.945.361,00	10,38

Realisasi APBD - BPKAD Kota Ternate, 2021

Dengan mencermati data yang disajikan pada tabel 3.2 di atas tampak, bahwa perkembangan belanja daerah Kota Ternate sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tumbuh secara signifikan. Dimana pada tahun 2016 total belanja Kota Ternate masih sebesar Rp. 877.571.425.067,22, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 944.038.093.308,26,-. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan belanja daerah sebesar Rp. 898.312.618.176,08.

### 3. Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diarahkan untuk menutup selisih antara penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode akuntansi serta untuk membentuk modal pemerintah guna mendorong terciptanya likuiditas keuangan daerah melalui kebijakan:

- 1) Memprioritaskan pembiayaan pengeluaran terhadap sisa kurang perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan pembiayaan atas pengeluaran investasi melalui kerjasama operasi dengan, BUMD dan Swasta di Daerah.

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang harus digunakan untuk menutup defisit.

Perkembangan pembiayaan daerah Kota Ternate selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-Rata
	PEMBIAYAAN DAERAH	(10.375.350.645,66)	(8.190.061.199,77)	(12.379.627.804,58)	(13.162.407.839,08)	(4.806.514.549,84)	(42,18)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(1.375.350.645,66)	(5.190.061.199,77)	(7.379.627.804,58)	(8.162.407.839,08)	(4.806.514.549,84)	35,59
1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.375.350.645,66	5.190.061.199,77	7.379.627.804,58	8.162.407.839,08	(4.806.514.549,84)	16,48
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN DAERAH	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	10,77
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	10,77
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN Netto	(10.375.350.646)	(8.190.061.200)	(12.379.627.805)	(6.889.716.273)	(3.530.847.213)	(49,37)
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)	(5.190.061.200)	(7.379.627.805)	(8.162.407.839)	(4.806.514.550)	(3.530.847.213)	52,50

Sumber: Realisasi APBD - BPKAD Kota Ternate, 2021

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Data dan informasi tentang pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.4.

Berdasarkan data tabel analisa di bawah dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate untuk tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 Pemerintah mampu memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan bahwa likuid, sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dikatakan ilikuid.



**Tabel 3.4**  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	
1	Persediaan	12.767.281.396,00	4.861.521.640,07	10.733.573.802,39	11.301.969.279,70	11.302.187.579,70	16,04
2	Investasi Jangka Panjang	47.562.964.208,18	52.382.326.997,26	52.222.776.699,92	58.871.704.161,51	58.871.704.161,51	5,64
3	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
4	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
5	Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
6	Investasi Permanen	47.562.964.208,18	52.382.326.997,26	52.222.776.699,92	58.871.704.161,51	58.871.704.161,51	5,64
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.562.964.208,18	52.382.326.997,26	52.222.776.699,92	58.871.704.161,51	58.871.704.161,51	5,64
8	Aset Tetap	1.218.172.864.562,45	2.056.029.075.553,57	2.197.460.463.401,71	2.328.875.007.026,74	2.513.972.351.518,74	22,40
9	Tanah	238.240.845.860,00	1.055.813.869.646,00	1.064.147.930.646,00	1.074.856.940.646,00	1.081.069.873.096,00	86,39
10	Peralatan dan Mesin	203.073.631.004,71	227.958.468.709,31	247.091.134.184,81	274.744.026.269,42	296.101.344.886,42	9,90
11	Gedung dan Bangunan	811.613.610.931,10	785.562.399.129,10	824.855.882.698,10	885.029.612.425,52	908.529.422.852,52	2,94
12	Jalan, Irigasi dan Jaringan	759.324.223.771,26	838.312.799.969,26	920.377.929.455,12	987.013.814.984,62	1.047.392.230.434,62	8,39
13	Aset Tetap Lainnya	24.983.075.796,00	30.663.910.974,00	39.949.226.441,00	86.866.589.956,90	47.957.287.346,00	31,42
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.963.766.288,38	67.666.036.490,79	129.935.342.287,07	172.913.996.350,00	246.472.287.346,00	51,46
15	Aset Lainnya	47.986.297.787,25	143.068.870.456,62	62.730.984.586,67	63.627.498.505,67	63.627.498.505,67	35,86
16	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
17	Tuntutan Ganti Rugi	114.337.727,80	18.109.293,00	16.164.293,00	-	-	-
18	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	32.189.170.000,00	33.356.080.000,00	33.356.080.000,00	33.356.080.000,00	33.356.080.000,00	0,91
19	Aset Tak Berwujud	750.794.490,00	1.814.864.244,00	2.337.353.973,00	2.155.579.169,00	2.155.579.169,00	40,68
20	Aset Lain-lainnya	14.872.233.297,25	107.987.926.212,62	27.037.550.613,67	28.115.839.336,67	28.115.839.336,67	138,78
21	Jumlah Aset Daerah	1.366.107.612.787,55	2.295.787.669.991,22	2.343.038.469.427,05	2.482.041.788.170,99	1.885.967.940.456,62	13,01
22	Kewajiban	32.866.553.862,40	35.518.991.574,99	26.699.045.662,25	36.614.883.310,88	83.423.425.583,42	37,05
23	Kewajiban Jangka Pendek	32.866.553.862,40	35.518.991.574,99	26.699.045.662,25	36.614.883.310,88	83.423.425.583,42	37,05
24	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.789.740.618,40	11.724.138.754,99	10.700.070.985,25	10.350.092.496,22	34.884.522.449,76	74,43
25	Utang Belanja	3.287.218.340,00	2.832.039.000,00	2.533.754.389,00	4.578.720.945,00	22.243.065.228,00	110,53
26	Utang Jangka Pendek Lainnya	22.789.594.904,00	20.962.813.820,00	13.465.220.288,00	21.210.871.203,00	25.820.639.239,00	8,87
27	Ekuitas Dana	1.333.241.058.823,15	2.260.268.678.416,23	2.316.339.423.764,80	2.445.426.904.860,11	2.445.426.904.860,11	19,40
28	Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-	-
29	SILPA	1.375.350.646	5.190.061.200	7.379.627.805	6.079.206.116,08	-	-
30	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
31	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	-

Realisasi APBD - BPKAD Kota Ternate, 2021

**Tabel 3.5**  
Persentase Hasil Analisa Rasio Atas Neraca Kota Ternate Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Rasio Likuiditas					
	Rasio Lancar	159,39	124,74	119,16	83,76	73,42
	Rasio <i>Quick</i>	120,54	111,06	77,40	52,89	55,37
2	Rasio Solvabilitas					
	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	2,41	1,55	1,10	1,48	1,58
	Rasio Hutang Terhadap Modal	2,47	1,57	1,11	1,50	1,61
3	Rasio Aktivas					
	Rasio Rata-rata Umur Piutang	7,58	9,96	9,58	9,47	11,16
	Rasio Rata-rata Umur Persediaan	281,77	661,78	265,16	355,82	460,18

Sumber: BPKAD Kota Ternate (data diolah), 2021

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, evaluasi sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Terkait dengan hal tersebut, maka data yang dianalisis dan disajikan sebagai informasi awal dalam menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah data APBD yang telah diaudit oleh BPK.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun, disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Ternate. Demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, efisiensi dan efektif, serta transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam hal belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang mencakup paling sedikit target dan sasaran, indikator capaian keluaran dan indikator capaian hasil. Terkait dengan Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja, dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Ternate  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2016	427.146.588.115,00	885.758.315.347,22	48,22
2	Tahun 2017	365.660.352.309,00	945.247.972.913,00	38,68
3	Tahun 2018	356.996.163.813,00	902.499.508.456,08	39,56
4	Tahun 2019	374.039.975.403,00	978.708.221.990,88	38,22
5	Tahun 2020	399.268.221.088,00	943.351.349.388,26	42,32

Sumber: BPKAD Kota Ternate (data diolah), 2021



### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis terhadap defisit riil anggaran Kota Ternate dilakukan dalam rangka untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Perkembangan defisit riil anggaran Kota Ternate tahun 2016 sampai tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Realisasi Pendapatan	882.756.714.513,11	944.243.999.954,97	902.529.838.141,58	980.725.838.061,12	945.3131.760.645,52
Realisasi Belanja	877.571.425.067,22	943.433.566.559,78	898.312.618.176,08	973.708.221.990,88	943.351.349.388,26
Realisasi Transfer	-	-	-	744.924.504,00	686.743.920,00
Pembiayaan (Netto)	(10.375.350.645,66)	(8.190.061.199,77)	(12.379.627.804,58)	(11.079.206.116,08)	(4.806.514.549,84)
Defisit Riil	(5.190.061.199,77)	(7.379.627.804,58)	(8.162.407.839,08)	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021

Sedangkan untuk Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-11,28	-2,03	-19,51	-20,91	-78,34
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021

Dan untuk Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Ternate, dalam kurun waktu mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada Tabel berikut

**Tabel 3.9**  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	2016		2017		2018	
	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
Jumlah SILPA	-5.190.061.199,77	-	-7.379.627.804,58	-	-8.162.407.839,08	-
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	22.789.594.904	-	20.962.813.820	-	13.465.220.288	-
Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

**Tabel 3.9 (Lanjutan)**  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	2019		2020	
	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
Jumlah SILPA	-4.806.514.549,84	-	-3.530.847.212,58	-
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	21.210.871.203	-	17.610.107.448	-
Kegiatan lanjutan	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kota Ternate untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kapasitas riil keuangan daerah dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.





3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kota Ternate.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

### 3.3.1 Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun.

Sedangkan untuk menutup defisit anggaran bila ternyata total realisasi belanja daerah ternyata lebih besar dari pendapatan daerah, maka solusi yang digunakan adalah melalui mekanisme pembiayaan. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10**  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2022-2026

No	Uraian	Pertumbuhan %	PROYEKSI				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	PENDAPATAN DAERAH	3,11	984.062.154.771,50	1.014.666.487.784,89	1.046.222.615.555,00	1.078.760.138.898,77	1.112.309.579.218,52
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,11	84.189.828.963,44	86.808.132.644,21	89.507.865.569,44	92.291.560.188,65	95.161.827.710,52
1.1.1	Pajak Daerah	3,11	52.948.817.971,07	54.595.526.209,97	56.293.447.075,10	58.044.173.279,14	59.849.347.068,12
1.1.2	Retribusi Daerah	3,11	17.092.557.393,00	17.624.135.927,93	18.172.246.555,28	18.737.403.423,15	19.320.136.669,61
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,11	14.148.453.599,37	14.588.470.506,31	15.042.171.939,06	15.509.983.486,36	15.992.343.972,79
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,11	899.872.325.808,06	927.858.355.140,69	956.714.749.985,56	986.468.578.710,11	1.017.147.751.508,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3,11	801.084.633.405,65	825.998.365.504,56	851.686.914.671,76	878.174.377.718,05	905.485.600.865,08
	Dana Bagi Hasil Pajak	3,11	19.135.423.321,89	19.730.534.987,20	20.344.154.625,30	20.976.857.834,15	21.629.238.112,79
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3,11	26.921.907.101,50	27.759.178.412,35	28.622.488.860,98	29.512.648.264,55	30.430.491.625,58
	Dana Alokasi Umum	3,11	637.583.183.221,26	657.412.020.219,44	677.857.534.048,26	698.938.903.357,16	720.675.903.251,57
	Dana Alokasi Khusus	3,11	117.444.119.761,01	121.096.631.885,58	124.862.737.137,22	128.745.968.262,18	132.749.967.875,14
1.2.2	Transfer Antar Daerah	3,11	98.787.692.402,41	101.859.989.636,12	105.027.835.313,81	108.294.200.992,07	111.662.150.642,92
	Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Pusat	3,11	69.726.836.975,01	71.895.341.604,94	74.131.286.728,85	76.436.769.746,12	78.813.953.285,22
	Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi	3,11	29.060.855.427,39	29.964.648.031,19	30.896.548.584,96	31.857.431.245,95	32.848.197.357,70

**Tabel 3.10 (Lanjutan)**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2022-2026**

No	Uraian	Pertumbuhan %	PROYEKSI				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	2,71	970.471.224.875,24	996.770.995.069,36			1.080.024.430.973,66
2.1	BELANJA OPERASI	2,71	738.783.094.311,77	758.804.116.167,62	779.367.707.715,76	800.488.572.594,86	822.181.812.912,18
2.1.1	Belanja Pegawai	2,71	420.215.949.039,07	431.603.801.258,03	443.300.264.272,13	455.313.701.433,90	467.652.702.742,76
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,71	256.714.177.671,39	263.671.131.886,28	270.816.619.560,40	278.155.749.950,49	285.693.770.774,15
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	2,71	59.726.483.564,35	61.345.071.268,94	63.007.522.700,33	64.715.026.565,51	66.468.803.785,44
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,71	2.126.484.036,96	2.184.111.754,36	2.243.301.182,90	2.304.094.644,96	2.366.535.609,84
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	2,71	192.581.851.069,43	197.800.819.233,41	203.161.221.434,64	208.666.890.535,52	214.321.763.269,03
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,71	38.381.809.701,97	39.421.956.744,89	40.490.291.772,68	41.587.578.679,72	42.714.602.061,94
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,71	38.381.809.701,97	39.421.956.744,89	40.490.291.772,68	41.587.578.679,72	42.714.602.061,94
2.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT	2,71	5.970.692.146,64	6.132.497.903,81	6.298.688.597,01	6.469.383.057,99	6.644.703.338,86
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-



**Tabel 3.10 (Lanjutan)**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2022-2026**

No	Uraian	Pertumbuhan %	PROYEKSI				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Hibah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	2,71	5.970.692.146,64	6.132.497.903,81	6.298.688.597,01	6.469.383.057,99	6.644.703.338,86

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021

### 3.3.2 Analisa Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Ternate

No	Uraian	Tahun Proyeksi (Rp)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	984.062.154.771	1.014.666.487.784	1.046.222.615.555	1.078.760.138.898	1.112.309.579.218
	Total Penerimaan	984.062.154.771	1.014.666.487.784	1.046.222.615.555	1.078.760.138.898	1.112.309.579.218
	Dikurangi					
2	Belanja Tidak Terduga	38.381.809.701	39.421.956.744	40.490.291.772	41.587.578.679	42.714.602.061
3	Belanja Transfer	-	-	-	-	-
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	945.680.345.069	975.244.531.040	1.005.732.323.782	1.037.172.560.219	1.069.594.977.156

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021

Setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun ke depan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Prioritas I (Utama)

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah, yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Prioritas II

Program Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, melalui pelaksanaan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Di samping itu Program Prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

### 3. Prioritas III

Program Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, yang merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kelurahan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan kebutuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

**Tabel 3.12**  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Tahun Proyeksi (Rp)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	945.680.345.069	975.244.531.040	1.005.732.323.782	1.037.172.560.219	1.069.594.977.156
2	Prioritas I	480.810.551.516	462.281.850.300	508.061.237.252	536.557.660.238	545.439.895.693
3	Prioritas II	401.923.971.339	449.299.276.152	433.281.919.130	435.491.696.073	458.289.473.031
4	Prioritas III	62.945.822.213	63.663.404.586	64.389.167.398	65.123.203.907	65.865.608.431

BPKAD Kota Ternate (data diolah), 2021



## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan dan isu-isu strategis Kota Ternate untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2021-2026 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Ternate.

Memasuki awal tahun 2020, Covid-19 yang merupakan varian virus baru ditemukan di beberapa negara. Penyebaran virus tersebut tentunya berdampak pada perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Namun demikian, dampaknya baru dirasakan pada triwulan II tahun 2020 setelah diumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Secara umum perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.

Nilai PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 10,54 triliun rupiah. Secara nominal, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,1 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya sebesar 10,60 triliun rupiah. Begitupun jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 7,29 triliun rupiah menjadi 7,22 triliun rupiah.

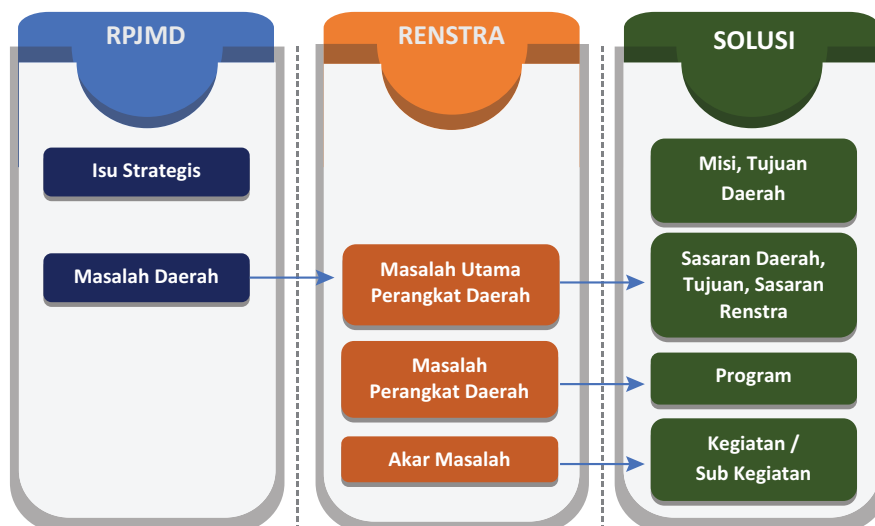
Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen, tidak demikian halnya dengan perekonomian Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 hanya mengalami perlambatan sebesar 4,92 persen. Tetapi Kota Ternate mengalami kontraksi sebesar -0,85 persen.

Tidak bisa dipungkiri, adanya pandemi Covid-19 sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian Kota Ternate. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk bepergian, pembatasan kegiatan ekonomi, dibatasinya kegiatan belajar, adanya program *Work from home*, *refocusing* anggaran, berdampak pada roda perekonomian di Kota Ternate. Jika dilihat dari sisi *supply*, Sektor ekonomi yang paling terdampak Covid-19 di Kota Ternate adalah sektor transportasi dan pergudangan yang berkontraksi sebesar 20,44 persen. Berkurangnya jumlah penumpang angkutan udara serta angkutan laut disinyalir menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan sektor transportasi. Masyarakat yang hendak bepergian diwajibkan untuk melakukan Rapid tes baik antibodi maupun antigen, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat udara maupun kapal laut. Sektor selanjutnya terdampak Covid-19 adalah sektor perdagangan yang berkontraksi sebesar 7,45 persen. Adanya penutupan *mall*, pusat perbelanjaan, toko-toko pada saat awal pandemi Covid-19 di Kota Ternate, serta menurunnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat turut memberikan andil terhadap penurunan sektor perdagangan. Sektor lainnya yang tak kalah yang terdampak Covid-19 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang mengalami kontraksi sebesar 6,66 persen. Pembatasan kegiatan restoran dan rumah makan, serta berkurangnya jumlah pengunjung/wisatawan ke Maluku Utara mempengaruhi tingkat hunian hotel sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum.

Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Ternate, regional, nasional maupun internasional, semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi Covid-19 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Ternate.

#### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) tematik yang melibatkan *stakeholder* terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan gambar 4.1.

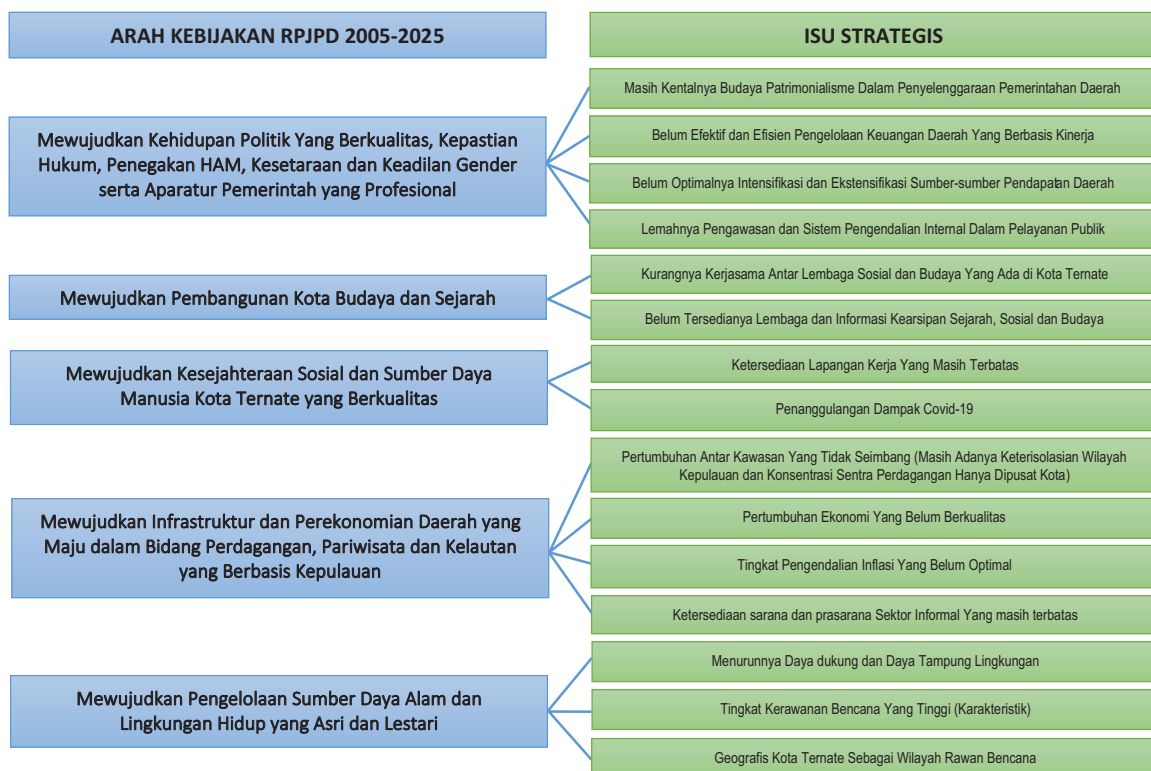


**Gambar 4.1**  
Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah



Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV, ditemukan 15 (lima belas) isu strategis yang menjadi masalah daerah di Kota Ternate dalam rangka mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan.

Selanjutnya, isu strategis yang menjadi Masalah Daerah tersebut akan diselesaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah. Sesuai dengan kerangka logis permasalahan daerah dan Perangkat Daerah yang dijelaskan dalam Gambar 4.1, maka masalah daerah akan dijabarkan dalam masalah utama PD, yang akan diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Secara sistematis uraian masalah utama, masalah daerah dan permasalahan renstra (masalah utama PD dan masalah PD) sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 tahap IV dapat dijelaskan sebagai berikut.



**Gambar 4.2**  
Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 dengan Isu Strategis RPJMD Kota Ternate 2021-2026

#### 4.1.1 Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional, terdapat 4 (empat) Isu Strategis, yaitu:

##### 1. Masih Kentalnya Budaya Patrimonialisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.1.



**Tabel 4.1**  
Keterkaitan Isu Strategis Budaya Patrimonialisme, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal ( <i>Smart Governance</i> )	Belum optimalnya domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kominfo
	Masih rendahnya penerapan keterbukaan informasi publik (KIP)	Kominfo, Seluruh Urusan
	Masih terbatasnya sarana infrastruktur jaringan komunikasi	Kominfo, Seluruh Urusan
	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dan satu data	Statistik
	Belum optimalnya manajemen pengelolaan persandian	Persandian
Belum Optimalnya Implementasi Manajemen ASN	Belum optimalnya keterisian jabatan, formasi ASN, dan pola pengembangan ASN	Kepegawaian, Diklat
	Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan	Kepegawaian, Diklat
Akuntabilitas Kinerja Masih Perlu Ditingkatkan	Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan	Perencanaan
	Implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan	Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Belum Optimalnya Penerapan Zona Integritas	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Pengawasan
	Belum optimalnya pengawasan internal PD dan implementasi Zona Integritas	Semua Urusan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## 2. Belum Efektif dan Efisien Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Kinerja

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
Keterkaitan Isu Strategis Pengelolaan Keuangan, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Akuntabilitas Keuangan Masih Perlu Dipertahankan dan Ditingkatkan	Beratnya mempertahankan opini WTP dari BPK	Keuangan
	Rasio Silpa masih cukup tinggi	Seluruh Urusan
	Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah	Keuangan
	Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal	Keuangan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## 3. Belum Optimalnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.3.



**Tabel 4.3**  
Keterkaitan Isu Strategis Pendapatan Daerah, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Akuntabilitas Pendapatan Daerah Masih Perlu Ditingkatkan	Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD	Keuangan
	Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja Modal (investasi)	Keuangan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

#### 4. Lemahnya Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelayanan Publik

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
Keterkaitan Isu Strategis Pelayanan Publik, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	Pelayanan publik belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat	Kecamatan dan Seluruh Urusan
	Pelayanan publik belum seluruhnya berbasis elektronik	Seluruh Urusan
	Belum optimalnya penanganan bencana	Trantibum
	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan	Perpustakaan
	Belum optimalnya pengawasan kearsipan tingkat kota	Arsip
	Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan	Adminduk dan Capil
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui PTSP	Penanaman Modal
	Terbatasnya kapasitas SDM layanan publik	Kecamatan dan Seluruh Urusan
	Penegakan aturan hukum daerah	Unsur Penunjang
Mutu Pendidikan Kota Ternate Masih Perlu Ditingkatkan	Belum optimalnya pengelolaan manajerial pendidikan yang profesional	Pendidikan
	Belum optimalnya strategi pembelajaran	
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan	
Belum Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan	Belum optimalnya penyusunan kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan	Pendidikan
	Belum optimalnya pendidikan karakter dan keagamaan	
Masih Rendahnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Belum terpenuhinya SPM Kesehatan, sehingga masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Bayi (AKB), Balita (AKABA) serta Angka Kesakitan	Kesehatan
	Belum optimalnya ketersediaan alat farmasi dan alat kesehatan	Kesehatan
	Belum optimalnya kapasitas SDM Kesehatan	Kesehatan
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

#### 4.1.2 Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah, terdapat 2 (dua) isu strategis, yaitu:

##### 1. Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
Keterkaitan Isu Strategis Kerjasama Antar Lembaga Sosial,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan tata kehidupan politik	Pemerintahan Umum
	Masih rendahnya kesadaran budaya literasi dan hidup toleransi dalam masyarakat	Kebudayaan, Seluruh Urusan
Belum Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsif gender	Pemberdayaan Perempuan
	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Pemberdayaan Perempuan
Belum Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas	Belum optimalnya pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan	Sosial
	Belum optimalnya sarana dan prasarana ramah disabilitas	Sosial

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

##### 2. Belum Tersedianya Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
Keterkaitan Isu Strategis Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya - Kesultanan Ternate	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pemerintahan Umum
	Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan dan sosial budaya	Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Pemerintahan Umum
Terbatasnya Intensitas <i>Event</i> Seni dan Budaya yang Diselenggarakan	Sinergitas pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas belum optimal	Seluruh Urusan
	Pengelolaan komunitas budaya belum optimal	Kebudayaan
	Belum optimalnya pengelolaan museum	Kebudayaan
Belum Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
	Belum optimalnya pembinaan keolahragaan	

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021



### 4.1.3 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas, terdapat 2 (dua) isu strategis, yaitu:

#### 1. Ketersediaan Lapangan Kerja yang Masih Terbatas

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
Keterkaitan Isu Strategis Lapangan Kerja, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Tenaga Kerja, Pendidikan
	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	Tenaga Kerja, Penanaman Modal
	Belum optimalnya pengembangan tenaga kerja mandiri	Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

#### 2. Penanggulangan Dampak Covid-19

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
Keterkaitan Isu Strategis Dampak Covid-19, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Penanganan Covid-19	Belum optimalnya kapasitas SDM Satgas Covid-19	Trantibum, Kesehatan
	Belum optimalnya alat farmasi penanganan Covid-19	Trantibum, Kesehatan
Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Belum optimalnya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial	Sosial
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya bencana	Sosial
	Belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk	Pengendalian Penduduk dan KB
Belum Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan	Pangan
	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan dan produksi pertanian	Pangan, Pertanian
	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	Pangan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

#### 4.1.4 Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan yang Berbasis Kepulauan

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan yang Berbasis Kepulauan, terdapat 4 (empat) isu strategis, yaitu:

##### 1. Pertumbuhan Antar Kawasan yang Tidak Seimbang (Masih Adanya Keterisolasian Wilayah Kepulauan dan Konsentrasi Sentra Perdagangan Hanya Dipusat Kota)

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
Keterkaitan Isu Strategis Pertumbuhan Antar Kawasan, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Tidak Seimbangnya Pertumbuhan Antar Wilayah	Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi di luar Pulau Ternate	Perdagangan, Seluruh Urusan
	Belum optimalnya pelayanan dalam penyaluran barang dan jasa bagi masyarakat Moti, Hiri dan Batang Dua	Perdagangan
	Kurangnya akses pasar bagi masyarakat Moti, Hiri dan Batang Dua	Perdagangan
	Sulitnya usaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha	Koperasi dan UKM

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

##### 2. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.10.

**Tabel 4.10**  
Keterkaitan Isu Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkontraksi Akibat Pandemi Covid-19 serta Masih Rendahnya Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kreatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal	Unsur pendukung, Pariwisata, Perindustrian
	Infrastruktur pengembangan pariwisata yang belum memadai	Pariwisata
	Keterbatasan media promosi potensi unggulan daerah	Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Kominfo
	Pertumbuhan investasi belum optimal	Penanaman Modal
	Pertumbuhan usaha dan industri kecil menengah yang melambat	Koperasi dan UKM, Perindustrian
	Peran Koperasi dan pengembangan UKM yang belum optimal	Koperasi dan UKM
	Pengelolaan hasil produksi Perikanan yang masih Rendah	Kelautan dan Perikanan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021



### 3. Tingkat Pengendalian Inflasi yang Belum Optimal

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.11.

**Tabel 4.11**  
Keterkaitan Isu Strategis Inflasi,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Pengendalian Inflasi	Masih tingginya ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi serta faktor cuaca dan kondisi geografis	Unsur penunjang, Sekretariat Daerah
	Adanya kesenjangan informasi atau <i>asymmetric information</i> antarpelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar	Unsur penunjang, Sekretariat Daerah
	Masih adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga	Unsur penunjang, Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya produktivitas pangan di Kota Ternate	Pertanian

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

### 4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sektor Informal yang Masih Terbatas

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.12.

**Tabel 4.12**  
Keterkaitan Isu Strategis Sektor Informal,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Masih Terbatasnya Sarana Prasarana Sektor Informal	Belum optimalnya promosi dan informasi potensi dan peluang usaha	Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Akses usaha yang belum merata	Perdagangan
	Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan sektor informal	Perdagangan
	Terbaikannya potensi kawasan pesisir pantai yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai	Kelautan dan Perikanan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

#### 4.1.5 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari, terdapat 3 (tiga) isu strategis, yaitu:

##### 1. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.13.

**Tabel 4.13**  
Keterkaitan Isu Strategis Daya Tampung Lingkungan,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh	Belum optimalnya pengembangan perumahan	Perumahan dan Permukiman
	Belum optimalnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Perumahan dan Permukiman
	Belum optimalnya cakupan layanan limbah domestik	PU-PR
	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan lingkungan perumahan	PU-PR
	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Permukiman
Belum Optimalnya Tutupan Lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup
Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Masih rendahnya kepatuhan IMB	PU-PR
	Masih lemahnya pengawasan penataan ruang	PU-PR
Belum Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana air bersih	PU-PR
	Keterbatasan sumber air baku	PU-PR
Belum Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah	PU-PR
	Belum optimalnya sarana prasarana penanganan sampah	Lingkungan Hidup
Penataan Sistem Drainase yang Belum Optimal	Belum optimalnya kapasitas saluran dan masih diperlukan normalisasi, peningkatan atau penambahan ruas saluran drainase	PU-PR
Belum Optimalnya Layanan Transportasi Perkotaan	Belum optimalnya kapasitas jalan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan	Perhubungan
	Belum optimalnya pemanfaatan ruang publik layanan transportasi	Perhubungan
	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi perairan	Perhubungan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## 2. Tingkat Kerawanan Bencana yang Tinggi (Karakteristik)

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.14.

**Tabel 4.14**  
Keterkaitan Isu Strategis Kerawanan Bencana,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Tanggap Darurat Bencana dan Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Terkait	Belum optimalnya sarana prasarana bencana	Trantibum
	Belum optimalnya personil pendukung dan relawan tanggap bencana	Trantibum
	Belum optimalnya pembentukan kelurahan tanggap bencana	Trantibum
	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana	Trantibum

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021





### 3. Geografis Kota Ternate sebagai Wilayah Rawan Bencana

Hasil pemetaan Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 4.15.

**Tabel 4.15**  
Keterkaitan Isu Strategis Wilayah Rawan Bencana,  
Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

Masalah Daerah	Masalah Utama PD	Urusan
Belum Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini	Belum optimalnya penanggulangan bencana yang berorientasi pada mitigasi bencana	Trantibum
	Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi	Trantibum
Belum Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana	Belum optimalnya pemanfaatan peta Kawasan Rawan Bencana alam (gempa, tanah longsor; gelombang pasang dan tsunami, banjir dan gunung api) serta untuk Membangun Kesiapsiagaan	Trantibum
	Belum optimalnya penanganan dampak bencana	Trantibum, Sosial
Belum Optimalnya Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim	Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Lingkungan Hidup

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## 4.2 Isu Strategis

### 4.2.1 Isu Internasional

#### 1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Di Kota Ternate, rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Isu strategis SDG's dibagi dalam 4 Pilar yaitu :

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial fokus pada penurunan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baik menurut jenis kelamin dan kelompok umur, mendorong ketercapaian program jaminan sosial ketenagakerjaan dan cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jumlah yang menerima Jamkesda), penanganan kawasan permukiman kumuh; dan kerugian ekonomi langsung serta mendorong capaian indikator pendidikan dan pengendalian penduduk.
2. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi fokus pada Target peningkatan laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan PDB per tenaga kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketersediaan sarana pelayanan dasar (Jalan dalam kondisi baik); Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB serta Peningkatan pendapatan pemerintah termasuk rasio penerimaan pajak sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; dan upaya mendorong tercapainya Pendapatan Asli Daerah.

3. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan fokus pada target Cakupan akses sanitasi layak, dengan meningkatkan desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Pengelolaan dan penyehatan DAS yang dapat meningkatkan jumlah mata air melalui konservasi sumber daya air, Kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil, Indeks Risiko Bencana (IRB); dan Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana tingkat daerah. Melestarikan kawasan konservasi laut dan memberikan perlindungan terhadap nelayan; dan Pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi terdegradasi dan lahan kritis.
4. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan fokus pada target Bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi kelompok masyarakat miskin; Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I, II, III dan IV); Penggunaan *e-procurement terhadap belanja pengadaan*; *Kepatuhan pelaksanaan* Undang-undang pelayanan publik dan pemerintah daerah; Pencatatan kelahiran bagi anak di bawah 5 tahun dan kepemilikan akta lahir.

Isu-isu strategis yang digambarkan pada 4 pilar SDGs akan didorong dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra) untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs telah direspon dengan baik oleh Perangkat Daerah.

## 2. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## 3. Perkembangan Teknologi Informasi yang Sangat Cepat dengan Menembus Batas-batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan *spasial temporal* (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Maluku Utara serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

## 4. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru



dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemi ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagian besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama.

#### 4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

##### 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Isu strategisnya adalah:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam  
Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.
- 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi  
Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat  
Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.
- 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital  
Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

## 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

## 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan  
Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.
- 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk  
Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial.
- 3) Pemenuhan Layanan Dasar  
Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, *stunting* masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.
- 4) Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda  
Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.
- 5) Pengentasan Kemiskinan  
Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.
- 6) Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing  
Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

## 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa

- 1) Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
- 2) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
- 3) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
- 4) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
- 5) Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
- 6) Rendahnya budaya literasi.
- 7) Belum optimalnya peran keluarga.



## 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak.
- 2) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
- 3) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
- 4) Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
- 5) Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi.
- 6) Konektivitas Transportasi Jalan.
- 7) Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.

## 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

- 1) Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup.
- 2) Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- 1) Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir.
- 2) Pemberantasan korupsi belum optimal.
- 3) Indeks profesionalisme ASN.
- 4) Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah.
- 5) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas.
- 6) Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Terkait dengan arahan pengembangan wilayah Maluku/Maluku Utara. Prioritas pembangunan akan dilakukan pada kerangka koridor pertumbuhan yang meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Tengah, dan Kab. Halmahera Selatan; serta koridor pemerataan meliputi Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Barat, dan Kab. Kepulauan Sula. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan wilayah Maluku/Maluku Utara akan mencakup kegiatan prioritas: 1) Pengembangan sektor unggulan; 2) Pengembangan daerah tertinggal; 3) Pengembangan kawasan perkotaan; 4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan 5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

### 4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi Maluku Utara

Isu strategis pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2023 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang penting dan mendesak untuk diselesaikan, kebijakan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, kebijakan dalam RPJM Nasional 2020-2024, serta tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Visi dan Misi serta Janji Kerja Gubernur/Wakil Gubernur juga menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Dari berbagai perspektif tersebut teridentifikasi 14 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) isu utama, yaitu: Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM); Pemerataan infrastruktur dan daya saing wilayah; Kemandirian dan daya saing ekonomi; Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; Harmoni sosial dan kondusifitas wilayah; dan Tata kelola pemerintahan dan kesetaraan. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Maluku Utara lima tahun ke depan semakin tidak mudah. Diperlukan suatu lompatan kuantum (*quantum leap*) kebijakan untuk dapat memenuhi sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang mengamankan kualitas SDM berada di atas rata-rata nasional pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat, namun

masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan disparitas IPM antar wilayah kabupaten/kota yang semakin melebar. Demikian pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan pencapaian IPM dari perspektif keadilan antara laki-laki dan perempuan, juga terus meningkat namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Isu-isu strategis dalam kelompok Isu strategi utama yang pertama ini terdiri dari 5 (lima) isu strategis, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tantangan pembangunan kesehatan Maluku Utara ke depan adalah tentang menghasilkan generasi yang sehat agar mampu menjalani kehidupan secara produktif. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, memberikan keyakinan bahwa masih banyak persalinan di luar fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk itu. Masih tingginya prevalensi *stunting* dan *wasting* pada balita akan membebani pembangunan ke depan jika tidak ditangani secara dini. Demikian pula pada angka prevalensi dan insidensi penyakit menular maupun tidak menular, meskipun masih dalam rentang yang dapat dikendalikan, namun kecenderungannya yang terus meningkat memerlukan perhatian yang seksama. Sistem-sistem kesehatan di seluruh wilayah perlu segera diperkuat, baik secara aksesibilitas maupun mutu pelayanan, serta jaminan kesehatan semesta untuk memastikan penduduk miskin/rentan miskin memperoleh haknya untuk hidup sehat.

Kedua, Peningkatan taraf pendidikan, kesempatan belajar dan apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah. Tantangan pembangunan pendidikan Maluku Utara ke depan tentang menghasilkan SDM yang terdidik dan berkarakter. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari lemahnya dukungan kebijakan masa lalu untuk mengatasi persoalan putus sekolah dan perluasan akses belajar berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah jika tidak ditangani dengan segera akan memberikan persoalan baru di masa depan. Mereka yang putus sekolah akan memasuki pasar kerja sebagai angkatan kerja yang kurang terdidik, pada lapangan kerja kurang produktif dan pendapatan kurang layak, yang tentunya akan mempengaruhi produktivitas daerah yang saat ini juga masih rendah. Tantangan lainnya adalah tentang menyediakan sarana dan prasarana belajar yang berkualitas di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas SDM juga perlu diimbangi dengan penguatan karakter. Pemajuan khasanah kebudayaan daerah hendaknya tidak terbatas pada muatan lokal dalam kurikulum sekolah, melainkan dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan keseharian masyarakat, serta dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Ketiga, Peningkatan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan. Angkatan kerja Maluku Utara didominasi oleh kaum muda usia >15-40 tahun, namun dengan produktifitas yang masih rendah. Mereka menguasai pasar kerja namun pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan pendapatan tetap karena status pekerjaan yang kurang produktif. Pembudayaan olahraga selain diharapkan menjadi sarana untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan produktif, juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk berprestasi yang memberikan kebanggaan bagi daerah serta jaminan kesejahteraan bagi pelakunya. Namun hingga saat ini harapan tersebut belum tercapai.

Keempat, Peningkatan kualitas perempuan dan anak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Hal ini karena perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Namun hingga saat ini masih terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Maluku Utara.

Kelima, Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan. Persoalan paling krusial dalam pembangunan SDM berkualitas di Maluku Utara adalah bukan sekedar menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Perbaikan tata kelola kependudukan sangat penting untuk memastikan keakuratan pengambilan kebijakan lintas sektor, demi meningkatkan efektifitas pemberian intervensi bagi para penduduk yang benar-benar membutuhkan.

Arahan RPJMN 2020-2025 memosisikan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu dari tujuh agenda pembangunan nasional. Demikian pula, pembangunan SDM merupakan fokus utama yang meliputi hampir seluruh tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.





## 2. Pemertaraan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah

Isu-isu strategis dalam kelompok Isu strategi utama yang kedua ini terdiri dari 3 (tiga) isu strategis, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar. Menjamin akses atas air dan sanitasi yang aman dan layak, serta akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua, adalah tujuan dalam SDGs yang harus dicapai pada tahun 2030. Akses air dan sanitasi yang aman dan layak dan terjangkau di Maluku Utara masih rendah berada di bawah rata-rata secara Nasional. Rasio elektrifikasi terus meningkat tapi belum merata antar wilayah. Mengurangi luas kawasan kumuh juga masih memerlukan perhatian.

Kedua, Peningkatan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah. Salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mempercepat transformasi digital. Ini akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Maluku Utara karena masih banyak desa/UPT yang belum terakses jaringan telekomunikasi seluler yang merupakan harapan utama di tengah kendala geografis daerah. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara terus dibangun untuk menghubungkan antar wilayah, dari pusat-pusat pertumbuhan ke desa-desa. Namun masih ada desa/UPT yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang sudah ada juga perlu ditingkatkan, yaitu dengan mengembangkan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau. Hal ini mengingat kesenjangan daya saing transportasi dan logistik antar daerah yang sangat tinggi.

Ketiga, Pemerataan pengembangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah Maluku Utara lebih rendah dari rata-rata Nasional. Namun di tengah keterbatasan informasi yang disediakan indeks tersebut, tipologi kelas wilayah menunjukkan bahwa setengah dari sepuluh wilayah pada tahun 2018 dalam status daerah relatif tertinggal. Ini tentunya tantangan yang tidak mudah mengingat masih banyak Desa dengan status desa tertinggal menurut Indeks Pembangunan Desa.

## 3. Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

Arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 meminta pencapaian di tahun 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, tingkat pengangguran di bawah 10 persen dan kemiskinan di bawah 10 persen. Ketiga sasaran tersebut telah dicapai. Namun kemandirian dan daya saing ekonomi masih belum terwujud. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mencerminkan transformasi struktural yang mensyaratkan bergesernya sektor sekunder sebagai penopang utama ekonomi daerah melalui tumbuhnya industri pengolahan yang memberikan nilai tambah. Turunnya tingkat pengangguran tidak dibarengi dengan tersedianya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak diimbangi dengan efektifitas penanggulangan kemiskinan untuk menjaga agar kesenjangan antar penduduk miskin tidak semakin melebar. Isu strategis utama yang ketiga ini terdiri dari 3 (tiga) isu strategis, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kualitas kemandirian pangan dan kesejahteraan petani/ nelayan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tantangan ke depan dalam pembangunan pangan Maluku Utara adalah meningkatkan kualitas kemandirian pangan, yaitu bagaimana meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, serta kelautan perikanan yang disertai dengan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan membuat pangan dapat disimpan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan. Hilirisasi hasil tanaman perkebunan yang merupakan tulang punggung utama sebagian masyarakat Maluku Utara juga memerlukan perhatian utama.

Kedua, Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang memberikan lapangan pekerjaan yang layak, serta industrialisasi berkelanjutan. Investasi bernilai tambah di Maluku Utara masih di dominasi sektor pengolahan dan pemurnian mineral (smelterisasi). Tantangan



ke depan adalah bagaimana mendorong hilirisasi yang lebih luas pada sektor pertanian dan perikanan dimana kedua sektor merupakan tulang punggung utama sebagian besar masyarakat Maluku Utara. Sektor pariwisata yang menyimpan begitu banyak potensi masih belum berkontribusi secara optimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut merupakan arahan dalam RPJPD.

Ketiga, Peningkatan efektifitas pengentasan kemiskinan dengan memperkuat ekonomi rakyat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memintakan meminta untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Tantangan pengentasan kemiskinan Maluku Utara adalah bagaimana mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan masuk langsung ke jantung kemiskinan, yaitu perbaikan daya beli dengan membangun kemandirian. Agenda-agenda filantropi dengan memberikan bantuan tunai secara langsung tetap diperlukan untuk menjaga disparitas antar penduduk miskin tidak semakin melebar. Upaya-upaya membangun kemandirian ekonomi rakyat merupakan tantangan yang sesungguhnya mengingat struktur perekonomian Maluku Utara didominasi oleh kelompok ini.

#### **4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Isu ini menjadi sangat strategis mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memintakan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati; melindungi dan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; serta mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Kerangka ini sejalan dengan arahan RPJPD untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan.

#### **5. Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah**

Isu ini menjadi strategis merujuk pada arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 yang mengisyaratkan untuk meningkatkan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat yang tercermin dari semakin menurunnya sikap saling mencurigai, ketegangan dan potensi konflik antarkelompok maupun antargolongan masyarakat, serta meningkatnya kerjasama antarkelompok masyarakat dalam berbagai bentuk yang positif, konstruktif dan berkesinambungan; serta tertanamnya kembali nilai-nilai "*Marimoi Ngone Futuru*" sebagai ciri identitas masyarakat Maluku Utara. Kondisi harmonis dan kondusif diperlukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memintakan untuk mendorong masyarakat damai.

#### **6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan**

Isu menjadi strategis merujuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal yang berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Kondisi ini tergambar melalui rendahnya skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah, pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas lembaga pemerintahan, transparansi lembaga pemerintah diukur melalui kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan tatakelola ini juga hendaknya mampu menata kembali sistem pengelolaan keuangan daerah, maupun dengan mengakomodasi peran ke-litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan melalui kajian dan litbang (*research based policy*) serta penguatan lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memintakan untuk menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Tantangan reformasi birokrasi dan perbaikan tatakelola juga perlu menyentuh peningkatan kerjasama pembangunan melalui revitalisasi kemitraan, mencakup kemitraan global, kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, terutama dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di provinsi Maluku Utara. Disamping itu, penggunaan teknologi

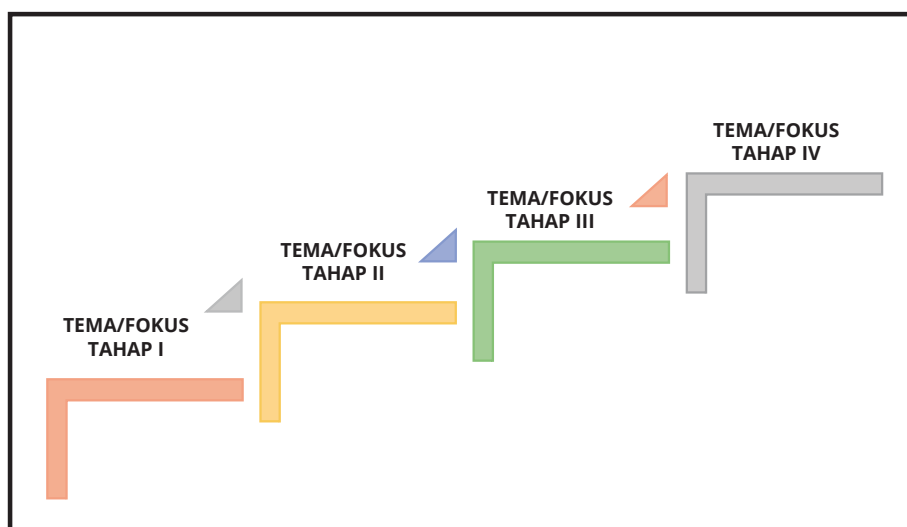


dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang sangat penting untuk pencapaian pelaksanaan pembangunan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu menjadi perhatian penting, utamanya untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagaimana arahan RPJPD, bahwa terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemberian kemudahan berinvestasi, keberpihakan pada masyarakat miskin melalui prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas kelembagaan.

#### 4.2.4 Hasil Telaahan RPJPD Kota Ternate

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah **KOTA TERNATE MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERBASIS KEPULAUAN**. Ada misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas.
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan Berbasis Kepulauan.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.



Sumber: Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017, 2021

**Gambar 4.3**  
Tema/Fokus Pembangunan Dua Puluh Tahunan

Secara umum, RPJPD Kota Ternate 2005-2025 diarahkan untuk pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk menciptakan Kota Ternate yang mandiri, maju, adil dan sejahtera. Mandiri, maju, adil, dan sejahtera bermakna masyarakat sejahtera ekonomi maupun sosial, mendapatkan hak pelayanan umum secara baik dan berkeadilan, berdaya saing, yang merepresentasikan Ternate sebagai entitas yang memiliki keunikan di antara seluruh daerah otonom di Indonesia. Pentahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan juga diselaraskan dengan kondisi sumber daya daerah, diusung berdasarkan tema masing-masing.

Tema: **TERCAPAINYA** Kota Ternate sebagai Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim berbasis Kepulauan. Dengan arah Kebijakan Pembangunan RPJMD ke-4 diarahkan pada “Tercapainya Kota Ternate yang mandiri, maju, adil dan sejahtera yang didukung budaya, perdagangan, pariwisata dan maritim berbasis kepulauan”.

Dengan demikian strategi pembangunan 5 tahun keempat Kota Ternate adalah pembiayaan dan akselerasi pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada pencapaian visi, misi dan sasaran pada RPJPD maupun RPJMD. Untuk pelaksanaan pembangunan yang telah tercapai pada RPJMD sebelumnya, tetap diperhatikan agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga, didukung oleh:

- Perwujudan aspek kehidupan beragama dalam tatanan politik, Hukum dan HAM, serta kesetaraan gender.
- Perwujudan Kota Ternate sebagai kota budaya dan pesisir.
- Perwujudan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.
- Perwujudan infrastruktur dan perekonomian daerah sesuai potensi yang berbasis kepulauan.
- Perwujudan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

#### 4.2.5 Hasil Telaahan KLHS Kota Ternate

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)). Makna strategis dalam KLHS mengandung arti sangat penting dan berpengaruh. Pada dasarnya, KLHS mengevaluasi kondisi dan rencana daerah yang sangat penting dan berpengaruh di wilayah kajian, karena komponen-komponen tersebut akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan jika dibiarkan. Pendekatan strategis yang digunakan dalam kebijakan, rencana, dan/atau program dapat digunakan untuk memperkirakan, merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan kebijakan, rencana dan program (KRP) dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

1. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan;
2. Skenario Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2026 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau *Business As Usual* (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2026;
3. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2026 (masa berakhirnya RPJMD) dengan *Business As Usual* (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut;
4. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kota Ternate mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2026 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang; dan



5. Rekomendasi program. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kota Ternate 2021-2026 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

Secara umum, Daya Dukung dan Daya Tampung (D3T) lingkungan hidup Kota Ternate **telah terlampaui**, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus “secara bijaksana” menjadikan status lingkungan hidup Kota Ternate sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terhadap kelima aspek penting yang telah disebutkan di atas maka akan diuraikan dua hal aspek yang terpenting, yaitu status lingkungan hidup serta penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah, karena kedua aspek harus dicermati dan dijadikan masukan penting bagi RPJMD Kota Ternate.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdapat dua pengertian tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, yaitu: Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Metode Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Ternate dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Pangan

Daya dukung pangan Pulau Ternate dipengaruhi oleh komoditas pangan setara beras yang memproduksi per tahun dan luasan lahan produktif. Namun ketersediaan pangan tersebut juga akan dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan produktif menjadi peruntukan lain.

2. Daya Dukung Lingkungan Hidup Air

Daya dukung air Pulau Ternate cenderung lebih besar karena curah hujan max 2.000 – 2.500 mm/tahun dengan koefisien limpasan rata-rata 0,65 dan pemakaian normal air di 100 – 120 L/org/hari. Namun ketersediaan air tersebut juga akan dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

3. Daya Dukung Lingkungan Hidup Lahan

Analisa DDTLH Lahan ditentukan berdasarkan pada parameter: morfologi, kemiringan lereng, satuan kemampuan lahan dan aspek kebencanaan (gerakan tanah, gunung api dan tsunami). Berdasarkan parameter tersebut di atas menghasilkan 3 (tiga) kategori daya dukung lahan yaitu; Lahan Potensial, Lahan Kendala dan Lahan Limitasi.

4. Daya Dukung Lingkungan Hidup Demografi

Daya dukung demografi Pulau Ternate cenderung lebih besar di wilayah kepadatan penduduk tinggi dan didasarkan pada laju penggunaan lahan (Ha/Jiwa).

Melalui pendekatan kinerja layanan atau jasa ekosistem Penyedia bahan pangan, penyedia serat, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama penyakit, pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan serta pendukung siklus hara menghasilkan prediksi lokasi dengan sumberdaya pangan yang tinggi, meliputi:

1. Kec. Pulau Ternate (Jambula, Kastela, Foramadiahi, Rua, Dorpedu)
2. Kec. Ternate Selatan (Kayu Merah, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Sasa, Gambesi, Tanah Tinggi, Fitu, Jati, Tanah Tinggi Barat, Ngade, Kalumata, Tabona)
3. Kec. Ternate Tengah (Maliaro, Makassar Barat, Moya, Marikurubu, Tongole)
4. Kec. Ternate Utara (Soa, Tubo)
5. Kec. Ternate Barat (Loto, Sango, Tarau, Bula, Sulamadaha, Takome)

Melalui pendekatan kinerja layanan atau jasa ekosistem penyediaan air bersih, pengaturan tata aliran banjir, pengaturan pemurnian air dan pengolahan penguraian limbah menghasilkan menghasilkan prediksi lokasi dengan sumber daya air yang tinggi, meliputi:

1. Kec. Pulau Ternate (Jambula, Kayu Merah, Kastela, Rua, Dorpedu, Afe Taduma)
2. Kec. Ternate Selatan (Mangga Dua, Toboko, Mangga Dua Utara, Sasa, Gambesi, Kota Baru, Fitu, Jati, Ngade, Kalumata)
3. Kec. Ternate Tengah (Maliaro, Tabona, Moya, Marikuburu, Tongole)
4. Kec. Ternate Utara (Dufa Dufa, Sangaji Utara, Akehuda, Tubo, Tarau)
5. Kec. Ternate Barat (Loto, Kulaba, Bula, Tobololo, Sulamadaha, Takome)

#### 4.2.6 Isu-isu Strategis Kota Ternate

Isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi bertransformasi menjadi masalah atau peluang di masa yang akan datang atau juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola. Dengan demikian maka isu strategis lebih berorientasi ke masa depan.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan. Rumusan isu-isu strategis diperoleh melalui analisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi, hasil telaahan dan analisis terhadap permasalahan dan kinerja pembangunan, melalui *focus group discussion* (FGD). Setiap isu strategis bersifat, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Ternate melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih Kentalnya Budaya Patrimonialisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Belum Efektif dan Efisien Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Kinerja.
3. Belum Optimalnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
4. Lemahnya Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelayanan Publik.
5. Menurunnya Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
6. Pertumbuhan Antar Kawasan yang tidak Seimbang (Masih Adanya Keterisolasian Wilayah Kepulauan dan Konsentrasi Sentra Perdagangan Hanya Dipusat Kota).
7. Ketersediaan Lapangan Kerja yang Masih Terbatas.
8. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas.
9. Tingkat Pengendalian Inflasi yang Belum Optimal.
10. Ketersediaan sarana dan prasarana Sektor Informal yang masih terbatas.
11. Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate.
12. Belum Tersedianya Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya.
13. Tingkat Kerawanan Bencana yang Tinggi (Karakteristik).
14. Geografis Kota Ternate sebagai Wilayah Rawan Bencana.
15. Penanggulangan Dampak Covid-19.



#### 4.2.7 Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara serta Isu Strategis KLHS

Berdasarkan uraian di atas, hubungan isu strategis Kota Ternate dengan Isu-isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara serta Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Ternate dapat dijelaskan dalam Tabel berikut.

**Tabel 4.16**  
Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara dan Isu Strategis KLHS

No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu Internasional (SDGs)	Isu dan Kebijakan Nasional	Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara	Isu Strategis KLHS
1	Masih Kentalnya Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (<i>Smart Governance</i>).</li> <li>2. Belum Optimalnya Implementasi Manajemen ASN.</li> <li>3. Akuntabilitas Kinerja Masih Perlu Ditingkatkan.</li> <li>4. Belum Optimalnya Penerapan Zona Integritas.</li> </ol>	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah.</li> <li>2. Kerjasama Antara Daerah dan Dunia Usaha.</li> <li>3. Permasalahan Sumber Daya Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Belum Efektif.</li> <li>4. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi.</li> <li>5. Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan.</li> </ol>
2	Belum Efektif dan Efisien Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja	Akuntabilitas Keuangan Masih Perlu Dipertahankan dan Ditingkatkan.			Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Ekonomi Perkotaan Belum Sinergi Dengan Kegiatan Ekonomi Kelurahan Sehingga Wilayah Luar Cenderung Mengalami Dampak Penurunan Pertumbuhan (<i>backwash effects</i>).</li> <li>2. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Belanja Daerah Yang Belum Optimal.</li> <li>3. Akses Pemodal, Pengembangan dan Peluang Usaha yang Masih Kurang dan Belum Optimal.</li> </ol>
3	Belum Optimalnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Akuntabilitas Pendapatan Daerah Masih Perlu Ditingkatkan.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Ekonomi Perkotaan Belum Sinergi Dengan Kegiatan Ekonomi Kelurahan Sehingga Wilayah Luar Cenderung Mengalami Dampak Penurunan Pertumbuhan (<i>backwash effects</i>).</li> <li>2. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Belanja Daerah Yang Belum Optimal.</li> <li>3. Akses Pemodal, Pengembangan dan Peluang Usaha yang Masih Kurang dan Belum Optimal.</li> </ol>
4	Lemahnya Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (<i>Smart Governance</i>).</li> <li>2. Mutu Pendidikan Kota Ternate Masih Perlu Ditingkatkan.</li> <li>3. Belum Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.</li> </ol>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan</li> <li>2. Peningkatan taraf pendidikan, kesempatan belajar dan apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah.</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Terutama Pelayanan Dasar Seperti Pendidikan, Kesehatan, Listrik, Air Bersih dan Utilitas Lainnya.</li> <li>2. Fenomena Kemiskinan dan Pengangguran Akibat Kurangnya Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan.</li> </ol>



**Tabel 4.16 (Lanjutan)**  
**Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara dan Isu Strategis KLHS**

No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu Internasional (SDGs)	Isu dan Kebijakan Nasional	Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara	Isu Strategis KLHS
		4. Belum Optimalnya Capaian Keluarga Sehat.	2. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.			3. Makin Menjauhnya Sebagian Besar Masyarakat Dari Nilai Adat Budaya Lokal.
5	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1. Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh 2. Belum Optimalnya Tutupan Lahan 3. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Belum Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih 5. Belum Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan 6. Penataan Sistem Drainase Yang Belum Optimal 7. Belum Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan	1. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 3. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 4. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem berkelanjutan daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar	1. Urbanisasi Tidak Terkendali Sehingga Melahirkan Kawasan Permukiman Kumuh. 2. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrim. 3. Kawasan Rawan Banjir Terdapat Di Kelurahan Mangga Dua Yaitu Jalan Raya Mangga Dua kurang lebih 0,11 Ha, Kelurahan Bastiong Talangame yaitu Kawasan Terminal dan Pasar Bastiong Kurang Lebih 0,21 Ha, Kelurahan Bastiong Karance Yaitu Jalan Raya Bastiong dan Jalan Pelabuhan Fery Kurang Lebih 0,45 Ha, Kelurahan Gamalama Yaitu Jalan Pahlawan Revolusi dan Jalan Boesori Kurang Lebih 1,25 Ha, Kelurahan Jati yaitu Jalan Depan Hotel Bela Kurang Lebih 0,24 Ha, Kelurahan Santiong Yaitu Di Kawasan Kuburan Cina Kurang Lebih 0,12 Ha dan Kelurahan Mangga Dua Kurang Lebih 0,04 Ha. 4. Kawasan Rawan Banjir/Genangan Di Kelurahan Gamalama, Bastiong, Mangga Dua dan Kelurahan Santiong Dengan Panjang Total Kurang Lebih 9.013 m





**Tabel 4.16 (Lanjutan)**  
Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara dan Isu Strategis KLHS

No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu Internasional (SDGs)	Isu dan Kebijakan Nasional	Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara	Isu Strategis KLHS
						5. Alih Fungsi Lahan Secara Besar Di Wilayah Pesisir Pantai dan Kawasan Hutan Lindung. 6. Belum Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Akibat Kebijakan Komersialisasi Kawasan Perkotaan. 7. Penurunan Kualitas dan Kuantitas SDA Sehingga Pelayanan Air Bersih/Air Minum Kurang Optimal. 8. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Komersil, Industri dan Rumah Sakit.
6	Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Tidak Seimbang (Masih Adanya Keterisolasian Wilayah Kepulauan dan Konsentrasi Sentra Perdagangan Hanya Dipusat Kota)	Tidak Seimbangnya Pertumbuhan Antar Wilayah	1. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. 2. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah. 2. Pemerataan pengembangan wilayah.	1. Belum Terintegrasinya Keruangan ( <i>Spatial Integration</i> ) Secara Seimbang Pada Setiap Simpul Strategis Wilayah Perkotaan. 2. Tidak Seimbangnya Pertumbuhan Antar Wilayah, Terutama Wilayah Utara dan Selatan Ternate, Termasuk Wilayah Kecamatan Di Luar Pulau Ternate Seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. 3. Kegiatan Ekonomi Perkotaan Belum Sinergi Dengan Kegiatan Ekonomi Kelurahan Sehingga Wilayah Luar Cenderung Mengalami Dampak Penurunan Pertumbuhan ( <i>backwash effects</i> ).
7	Ketersediaan Lapangan Kerja Yang Masih Terbatas.	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.	Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak.	1. Permasalahan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha. 2. Fenomena Kemiskinan dan Pengangguran Akibat Kurangnya Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemerataan pembangunan. 3. Akses Pemodal, Pengembangan dan Peluang Usaha Yang Masih Kurang dan Belum Optimal.

**Tabel 4.16 (Lanjutan)**  
**Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara dan Isu Strategis KLHS**

No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu Internasional (SDGs)	Isu dan Kebijakan Nasional	Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara	Isu Strategis KLHS
8	Pertumbuhan Ekonomi Yang Belum Berkualitas.	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkontraksi Akibat Pandemi Covid-19 serta Masih Rendahnya Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	2. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.	Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak.	4. Kurangnya Kemandirian Fiskal Kota Ternate. 5. Produktifitas Ketenagakerjaan Rendah dan Kemandirian Ekonomi Rakyat Rentan.
9	Tingkat Pengendalian Inflasi Yang Belum Optimal.	Belum Optimalnya Pengendalian Inflasi.				
10	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sektor Informal Yang Masih Terbatas.	Masih Terbatasnya Sarana Prasarana Sektor Informal.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak.	1. Kurangnya Ruang Untuk Mewadahi Kegiatan PKL Yang Menimbulkan Marginalisasi Sektor Informal Dari Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Integrative. 2. Akses Pemodal, Pengembangan dan Peluang Usaha Yang Masih Kurang dan Belum Optimal. 3. Terabaikannya Potensi Kawasan Pantai Dengan Tersedianya Prasarana dan Sarana Kelautan Sehingga Aktivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Menurun.
11	Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate.	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial. 2. Belum Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak. 3. Belum Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas.	1. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 3. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 4. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa.	1. Peningkatan taraf pendidikan, kesempatan belajar dan apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah. 2. Peningkatan kualitas perempuan dan anak. 3. Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah.	1. Berkurangnya Perhatian dan Kesadaran Pemerintah Daerah dan Stakeholder Daerah Untuk Melakukan Rekonstruksi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal. 2. Kesadaran Budaya Hidup Atau Toleransi Masyarakat Yang Masih Rendah. 3. Makin Menjauhnya Sebagian Besar Masyarakat Dari Nilai Adat Budaya Lokal.



**Tabel 4.16 (Lanjutan)**  
**Keterkaitan Isu Strategis Kota Ternate, Isu Internasional, Isu dan Kebijakan Nasional, Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara dan Isu Strategis KLHS**

No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu Internasional (SDGs)	Isu dan Kebijakan Nasional	Isu dan Kebijakan Provinsi Maluku Utara	Isu Strategis KLHS
12	Belum Tersedianya Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya - Kesultanan Ternate .</li> <li>2. Terbatasnya Intensitas Event Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan.</li> <li>3. Belum Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</li> <li>2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</li> <li>3. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>	4. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Peningkatan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya Perhatian dan Kesadaran Pemerintah Daerah dan <i>Stakeholder</i> Daerah Untuk Melakukan Rekonstruksi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal.</li> <li>2. Kesadaran Budaya Hidup Atau Toleransi Masyarakat Yang Masih Rendah.</li> <li>3. Makin Menjauhnya Sebagian Besar Masyarakat Dari Nilai Adat Budaya Lokal.</li> </ol>
13	Tingkat Kerawanan Bencana Yang Tinggi (Karakteristik).	Belum Optimalnya Tanggap Darurat Bencana Serta Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Terkait.			Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem.</li> <li>2. Kebijakan Pemerintah Kota Yang Belum Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan.</li> <li>3. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana Seperti Gempa Bumi, Banjir dan Longsor Serta Gelombang Pasang Yang Diprediksi Dapat Menimbulkan Tsunami.</li> <li>4. Ancaman Kerawanan Pangan, Apabila Alih Fungsi Di Lahan Pertanian Tanaman Pangan Menjadi Peruntukan Lain.</li> </ol>
14	Geografis Kota Ternate Sebagai Wilayah Rawan Bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini .</li> <li>2. Belum Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana.</li> <li>3. Belum Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim.</li> </ol>	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem.</li> <li>2. Kebijakan Pemerintah Kota Yang Belum Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan.</li> <li>3. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana Seperti Gempa Bumi, Banjir dan Longsor Serta Gelombang Pasang Yang Diprediksi Dapat Menimbulkan Tsunami.</li> <li>4. Ancaman Kerawanan Pangan, Apabila Alih Fungsi Di Lahan Pertanian Tanaman Pangan Menjadi Peruntukan Lain.</li> </ol>
15	Penanggulangan Dampak Covid-19.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Penanganan Covid-19.</li> <li>2. Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan.</li> <li>3. Belum Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.</li> <li>2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.</li> <li>3. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>2. Peningkatan kualitas kemandirian pangan dan kesejahteraan petani/nelayan.</li> <li>3. Peningkatan produktifitas pengentasan kemiskinan dengan memperkuat ekonomi rakyat.</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan dan Hilangnya Mata Pencarian Masyarakat Akibat Bencana (covid-19)</li> <li>2. Produktifitas Ketenagakerjaan Rendah dan Kemandirian Ekonomi Rakyat Rentan.</li> <li>3. Belum Sinergi Integrasi Sosial Masyarakat Dalam Upaya Peningkayan Partisipasi Dalam Kebijakan Publik.</li> </ol>

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## **BAB V**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan analisis isu-isu strategis pembangunan Kota Ternate, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah, terutama di Kecamatan-Kecamatan yang masih perlu perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh Pemerintah Kota Ternate bagi peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate 2021-2026.

Demikian pula, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kota Ternate. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan di Kota Ternate lebih diarahkan pada model pembangunan yang bersifat kepentingan masyarakat, seperti kualitas lingkungan hidup, pelayanan dasar Air Bersih dan penanganan Sampah Perkotaan, hingga pelayanan publik yang efektif. Melalui pendekatan pembangunan yang demikian, diharapkan akan terciptanya suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya, untuk menyalurkan kebutuhan antara wilayah, agar terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih Mandiri dan Berkeadilan.

### **5.1 Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI Dan BERKEADILAN”  
- TERNATE ANDALAN -**



Untuk mencapai Visi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan, maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diperlukan kolaborasi berbagai instrumen lainnya sebagai modal pembangunan. Dukungan modal pembangunan dimaksud merupakan dimensi yang saling terkait antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian Visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

### 5.1.1 Gambaran Kota Ternate dalam Visi Tahun 2021-2026

Kota Ternate merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku Utara yang memiliki berbagai sumber daya alam dan beranekaragam kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kota Ternate berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri sekaligus membangun daya saing daerah, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai pusat perekonomian Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate memiliki segala potensi untuk maju dan bersinar, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional atau bahkan internasional. Namun, berbagai potensi itu terkesan belum terasah maksimal. Kota ini juga membawa narasi sejarah, yang tak hanya penting dalam skala nasional, tetapi dunia. Sejarah mencatat, Ternate menjadi pintu masuk bangsa-bangsa Eropa ke Kepulauan Maluku dan Nusantara pada era penjelajahan dan penaklukan dunia pada abad ke-16. Sejumlah benteng bangsa Eropa di Ternate menjadi saksi bisu persaingan dan perebutan pengaruh pada abad kolonialisme itu, pada saat Eropa begitu haus akan rempah-rempah.

Kota Ternate yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada potensi-potensi unggulan yang ada di Kota Ternate. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran Pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir.

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kota Ternate, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah utamanya pulau di luar Pulau Ternate, yaitu Hiri, Moti dan Batang Dua yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh Pemerintah Daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian pula, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kota Ternate. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan di Kota Ternate lebih diarahkan pada model pembangunan horizontal dimana pelaksanaan pembangunan di setiap bidang pembangunan akan memiliki porsi yang proporsional dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan mempertimbangkan masih adanya kesenjangan antar wilayah di Kota Ternate. Melalui pendekatan pembangunan yang demikian, diharapkan akan membangun kemandirian dan tercipta suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, sosial dan keseimbangan antar dan antara wilayah, serta mendorong terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Upaya-upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 merupakan tujuan bersama Kota Ternate, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Ternate akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi *stakeholder-stakeholder* atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Ternate. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para *stakeholder* ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial. Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Ternate tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Ternate sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak.

Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 5.1.2 Ternate Mandiri

RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Ternate tahun 2005-2025. Oleh karena itu, pemaknaan Mandiri yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya.

Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah; untuk membangun Pemerintah Daerah yang mandiri mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing; kemandirian aparatur Pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kota Ternate yang menunjang proses pelayanan dan pembangunan infrastruktur fisik dan digital Kota Ternate, dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan layanan publik yang berkesinambungan, dengan menumbuh-kembangkan lembaga sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

### 5.1.3 Ternate Berkeadilan

RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Ternate tahun 2005-2025. Oleh karena itu, pemaknaan Berkeadilan yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa berkeadilan dapat diartikan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang atau dengan definisi



lain terkait dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan *'basis necessities'* (kebutuhan dasar) kehidupan. Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam perlindungan dan konsistensi perlindungan hukum, partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya. Supaya tercipta keadilan bagi masyarakat Kota Ternate, diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin atau kaya, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, cacat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lain-lain pelayanan dasar.

Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun tanpa diskriminasi, setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan hukum, serta mampu memberikan perlindungan masyarakat yang kurang mampu dan memberikan ruang tumbuh kembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang berkeadilan di akhir periode RPJMD.

## 5.2 Misi

Secara umum, Misi dapat dirumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi, juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi Pemerintah Kota Ternate, dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ke-delapan rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate di tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*).
5. Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi.
6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
7. Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu.
8. Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial.

Seluruh misi tersebut merepresentasikan kebutuhan pembangunan yang diformulasikan pada visi pembangunan daerah. Penjabaran 8 butir misi dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Upaya pengembangan ekonomi daerah menjadi proses pembangunan yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tepat sasaran serta bertujuan untuk membuka keterisolasian. Kota Ternate,



hingga saat ini masih adanya pertumbuhan yang tidak seimbang karena masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan dan konsentrasi sentra perdagangan hanya berada di pusat kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, tingkat pengendalian inflasi yang masih belum berkualitas dan adanya potensi ekonomi kreatif yang belum diberdayakan.

Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, diantaranya kendala geografi, kendala transportasi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan antar kawasan yang seimbang; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian laju inflasi, dengan sasaran terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan optimalnya pengendalian inflasi.

### **5.2.2 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif**

Tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif menjadi bagian yang paling terpenting dalam mengarahkan kebijakan yang terintegritas. Selama ini, Kota Ternate masih belum mengoptimalkan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, masih adanya budaya yang patrimonialisme dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja.

Misi ini bertujuan untuk menghilangkan budaya patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik; optimalnya implementasi manajemen ASN; meningkatnya akuntabilitas kinerja; optimalnya penerapan zona integritas; meningkatnya akuntabilitas keuangan dan meningkatnya akuntabilitas pendapatan daerah.

### **5.2.3 Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas**

Untuk mencapai Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan, maka salah satu hal yang harus diupayakan peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selama ini, kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme yang masih kuat yang mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Dalam hal pelayanan kesehatan upaya peningkatan kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi perhatian utama, antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Ternate akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga oleh swasta



dan masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan publik.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik, dengan sasaran optimalnya kualitas pelayanan publik (*smart governance*); meningkatnya mutu pendidikan Kota Ternate; optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan, serta optimalnya capaian keluarga sehat.

#### **5.2.4 Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)**

Kota Ternate sebagai kota yang heterogen, dari perbedaan agama, etnis dan budaya, akan melestarikan dan mempertahankan *asset* dan identitas kota, melalui menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*), yang terdiri dari: 1) *Adat se Atorang*; 2) *Istiadat se Kabasarang*; 3) *Galib se Lakudi*; 4) *Cing se Cingare*; 5) *Bobaso se Rasai*; 6) *Ngale se Cara*; dan 7) *Sere se Duniru*.

Hingga kini, Kota Ternate belum secara menyeluruh mengoptimalkan dan menumbuh-kembangkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan lembaga sosial dan budaya lainnya. Kota Ternate juga menjadi anggota jejaring kota kreatif nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi, apabila di kolaborasikan pada potensi kearifan lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Ternate berbasis lokal. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Dan jika ditelaah lebih jauh lagi, Kota Ternate harus tetap dapat merawat dan menjaga nilai-nilai kultur Ternate dalam interaksi sosial masyarakat dan lembaga.

Misi ini bertujuan untuk menyediakan lembaga dan informasi kearsipan sejarah, sosial dan budaya, dengan sasaran optimalnya peran lembaga sosial budaya – Kesultanan Ternate, meningkatnya intensitas *event* seni dan budaya yang diselenggarakan dan optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga.

#### **5.2.5 Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi**

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan adanya kesempatan berekonomi, sehingga upaya memberikan hak untuk masyarakat kota dalam berekonomi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun ke depan akan ditingkatkan dan disebar secara merata, adil dan proporsional.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana sektor informal, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.

#### **5.2.6 Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan**

Pemerintah dan masyarakat Kota Ternate, secara saat ini dihadapkan pada pemenuhan layanan masyarakat. Konsistensi pelayanan sebagai norma dari sebuah kebijakan pemerintahan daerah. Semua warga Kota harus mendapatkan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang. Hingga kini, Kota Ternate dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang hak pelayanannya, mendapatkan pelayanan terhadap daya dukung lingkungan yang asri.

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Ternate, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak banjir yang diakibatkan drainase lingkungan yang kurang memadai dan tata kelola sampah perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh; optimalnya tutupan lahan; optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; optimalnya cakupan layanan air bersih; optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan; optimalnya penataan sistem drainase dan optimalnya layanan transportasi perkotaan.

### **5.2.7 Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu**

Negara berkewajiban menyejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kota Ternate hingga kini belum secara utuh mengoptimalkan perlindungan hak bagi masyarakat yang kurang mampu, serta belum memaksimalkan pemetaan terhadap mitigasi kerawanan bencana alam hingga bencana non alam.

Misi ini bertujuan untuk melaksanakan tanggap darurat kerawanan bencana; melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan melakukan penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19, dengan sasaran optimalnya tanggap darurat bencana serta koordinasi antar instansi terkait; optimalnya mitigasi, pemantauan resiko bencana dan penetapan sistem peringatan dini; optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan kebencanaan dan kawasan rawan bencana; optimalnya ketahanan kota terhadap perubahan iklim; optimalnya penanganan Covid-19; optimalnya penanganan kemiskinan dan optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat.

### **5.2.8 Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial**

Sejatinya, Heterogenitas Kota menjadi nilai tersendiri jika dioptimalkannya norma masyarakat. Jika potensi nilai tersebut terabaikan, maka potensi konflik akan menjadi masalah bagi kehidupan masyarakat kota ke depannya. Selain itu, Kota Ternate hingga kini belum mengoptimalkan secara efektif terkait dengan pengarusutamaan gender, hak anak, dan kota ramah terhadap disabilitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya yang ada di Kota Ternate, dengan sasaran optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial; optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dan optimalnya kota inklusif ramah disabilitas.

Misi pembangunan Kota Ternate bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kunci dari sebuah kesuksesan misi pembangunan ialah kolaborasi pada setiap PD. Selain itu, pentingnya konsep Pentahelix antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, yang bertujuan mendukung secara optimal program-program yang populis dan inklusif sebagai bentuk pembangunan kualitas SDM, dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi di Kota Ternate.

## **5.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan



rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan Visi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

### **5.3.1 Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu: "Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan yang Seimbang.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
3. Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
3. Optimalnya Pengendalian Inflasi.

### **5.3.2 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif**

Untuk mencapai target Misi 2 yaitu: "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghilangkan Budaya Patrimonialisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Kinerja.
3. Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Optimalnya Implementasi Manajemen ASN.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
4. Optimalnya Penerapan Zona Integritas.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah.

### **5.3.3 Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas**

Untuk mencapai target Misi 3 yaitu: "Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (*Smart Governance*).
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate.
3. Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan.
4. Optimalnya Capaian Keluarga Sehat.

#### **5.3.4 Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)**

Untuk mencapai target Misi 4 yaitu: “Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)”, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya – Kesultanan Ternate.
2. Meningkatnya Intensitas *Event* Seni dan Budaya yang Diselenggarakan.
3. Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

#### **5.3.5 Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi**

Untuk mencapai target Misi 5 yaitu: “Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi”, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menciptakan Lapangan Kerja.
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.

#### **5.3.6 Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan**

Untuk mencapai target Misi 6 yaitu: “Setiap Warga Masyarakat Memiliki Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan”, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh.
2. Optimalnya Tutupan Lahan.
3. Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih.
5. Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan.
6. Optimalnya Penataan Sistem Drainase.
7. Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan.



### 5.3.7 Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu

Untuk mencapai target Misi 7 yaitu: “Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu”, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana.
2. Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana.
3. Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Tanggap Darurat Bencana serta Koordinasi Antar Instansi Terkait.
2. Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini.
3. Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana.
4. Optimalnya Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim
5. Optimalnya Penanganan Covid-19.
6. Optimalnya Penanganan Kemiskinan.
7. Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.

### 5.3.8 Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial

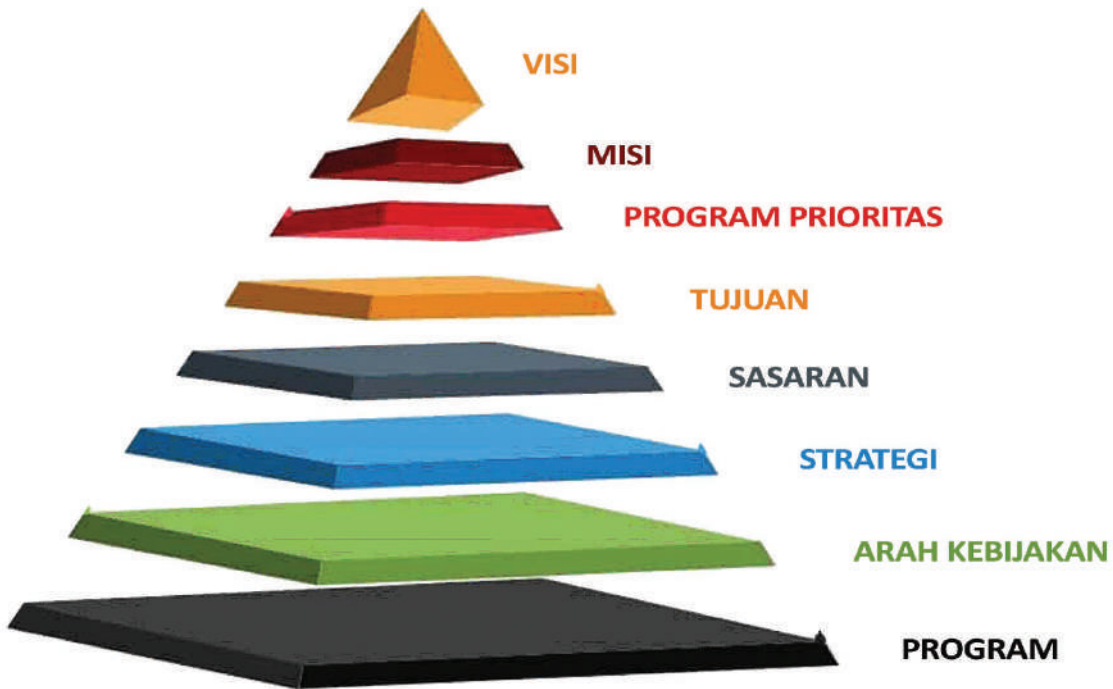
Untuk mencapai target Misi 8 yaitu: “Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial”, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang ada di Kota Ternate.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial.
2. Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak.
3. Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas.

Kerangka berpikir dalam rangka penyusunan RPJMD, yang menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan perlu dioptimalkan sampai dengan tahapan akhir program dan kegiatan, dapat digambarkan dalam piramida perencanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.



**Gambar 5.1**  
Piramida Perencanaan RPJMD Kota Ternate 2021-2026

Penjabaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.





**Tabel 5.1**  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 Visi: “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2021	2022	2023	2024	2025		2026	
<b>Misi 1 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional</b>													
1	Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan yang Seimbang	Simpul Ekonomi Baru		Cluster	n/a	1	2	1	2	1	1	8	
		Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	Persen	40	50	55	60	65	70	75	75	
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB Perkapita		Rupiah	45.380.000	46.287.600	47.213.352	48.157.619	49.120.771	50.103.186	51.105.249	51.105.249	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,07	7,08	7,13	7,18	7,23	7,28	7,33	7,33	
3	Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi	Tingkat Inflasi		Persen	2,13	2,11	2,8	2,5	2	2	1,93	1,93	
		Optimalnya Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	Persen	2,13	2,11	2,8	2,5	2	2	1,93	1,93	
<b>Misi 2 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif</b>													
1	Menghianakan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	n/a	75	75	80	80	85	85	85	
		Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	65	65	70	75	80	85	90	90	
		Optimalnya Implementasi Manajemen ASN	Persentase Pengisian IPT Pertama Melalui Seleksi Terbuka	Persen	n/a	9,62	14,42	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kota	Kategori	B	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
		Optimalnya Penerapan Zona Integritas	OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM	OPD	n/a	n/a	5	7	10	12	15	15	

**Tabel 5.1 (lanjutan)**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 Visi: "Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan"**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
2	Mempertahankan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Kinerja	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah	Persen	n/a	9,36	9,36	9,36	9,4	9,36	9,36	9,36
						95	97	98	99	99	99	
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas</b>												
1	Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,82	79,87	79,97	80,2	80,3	80,5	80,6	80,6
						B	B	B	A	A	A	A
						12	12	12	12	12	12	12
						90	92	95	97	97	98	98
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (Smart Governance)	Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Partisipasi PAUD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
						100	100	100	100	100	100	
						100	100	100	100	100	100	
Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	70,97	71,1	71,2	71,3	71,40	71,45	71,50	71,50
						71,1	71,2	71,3	71,40	71,45	71,50	
						71,1	71,2	71,3	71,40	71,45	71,50	



**Tabel 5.1 (lanjutan)**  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 Visi: “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
<b>Misi 4 : Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi)</b>												
1	Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya - Kesultanan Ternate	Persentase Lembaga Sosial yang Mandiri	Indeks	n/a	60	70	80	90	95	100	100
						65	70	75	80	85	90	90
						4	4	5	6	7	8	8
						90	90	90	90	90	95	95
2	Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal	Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	Persen	20	20	25	25	25	30	30	30
						20	25	25	25	30	30	30
						90	90	90	90	90	95	95
						59,88	62,1	64,21	66,32	67,43	69,54	69,54
<b>Misi 5 : Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi</b>												
1	Menciptakan Lapangan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,8	5,6	5,5	5,24	5,09	4,83	4,68	4,68
						5,6	5,5	5,24	5,09	4,83	4,68	4,68
2	Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal	Optimalisasi Sarana Prasarana Pendukung Sektor Informal	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung	Persen	40	50	55	60	65	70	75	75
						50	55	60	65	70	75	80

**Tabel 5.1 (lanjutan)**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 Visi: “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD						
						2021	2022	2023	2024	2025		2026					
1 Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Misi 6 : Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	n/a	n/a	50-59	60-69	60-69	>70	>70	>70					
						Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Perumahan Kumuh	Pengurangan Luasan Kumuh	Hektar	287,4	287,4	229,92	172,44	114,96	57,48	0	0	
						Optimalnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	n/a	n/a	55	58	60	61	63	63	
						Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	71,16	72	73	74	75	76	77	77	
						Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih	Rasio Akses Air Minum \ Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	83,97	84	85	86	87	89	90	90	
						Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	Persentase Layanan Persampahan	Persen	63,2	69,2	70,5	71,7	74,4	75,6	76,9	76,9	
						Optimalnya Penataan Sistem Drainase	Luas Genangan Banjir dan Rob	Ha	11,8	9,9	8,4	8,4	5	3,1	1,3	1,3	
						Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	Kategori	C	C	C	B	B	B	B	B	
							Persentase Keterhubungan Jalan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100



**Tabel 5.1 (lanjutan)**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 Visi: “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
<b>Misi 7 : Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu</b>												
1	Melaksanakan Tanggapan Darurat Kerawanan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana			100	100	100	100	100	100	100	100
		Optimalnya Tanggapan Darurat Bencana dan Koordinasi Antar Instansi Terkait	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggapan Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana	Indeks Resiko Bencana		Kelas Resiko	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	
		Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini	Ketersediaan Sistem Peringatan Dini	Persen	44,4	44,4	55,6	77,6	88,9	100	100	
		Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang - undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Kebencanaan	Persen	15,8	19,2	25,6	32	38,5	44,9	44,9	
		Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	Persen	n/a	29	30	31	32	33	33	
			Indeks Kerentanan Kota	Indeks	0,75	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	

**Tabel 5.1 (lanjutan)**  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 Visi: “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
3 Melakukan Penanganan dan Penganggulangan Dampak Covid-19	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Penanganan Covid-19	Persentase Jumlah Penurunan pasien COVID 19	Persen	3,36	3,26	3,16	3,6	3	2,4	2,4	2,4
						100	100	100	100	100	100	100
						3,26	3,16	3,6	3	2,4	2,4	2,4
1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	86	90	92	94	96	98	99,5	99,5
						90	92	94	96	98	99,5	99,5
						90	92	94	96	98	99,5	99,5
<b>Misi 8 : Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial</b>												
1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
						100	100	100	100	100	100	100
						100	100	100	100	100	100	100
1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,83	91,83	92,00	92,5	92,55	92,6	92,65	92,65
						91,83	92,00	92,5	92,55	92,6	92,65	92,65
						91,83	92,00	92,5	92,55	92,6	92,65	92,65
1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas	Indeks Aksesibilitas Sarana dan Prasarana yang Ramah terhadap Disabilitas dan Kelompok Rentan	Indeks	74,96	74,96	75,00	75,05	75,1	75,15	75,2	75,2
						74,96	75,00	75,05	75,1	75,15	75,2	75,2
						74,96	75,00	75,05	75,1	75,15	75,2	75,2
1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate	Indeks Kemiskinan	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Indeks	Skor	600	600	650	665	675	685	695	695
						600	650	665	675	685	695	695
						600	650	665	675	685	695	695
1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang Ada di Kota Ternate	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas	Indeks Aksesibilitas Sarana dan Prasarana yang Ramah terhadap Disabilitas dan Kelompok Rentan	Indeks	n/a	40,83	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96
						40,83	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96
						40,83	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021



Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Walikota Ternate pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Ternate.

**Tabel 5.2**  
Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah  
Kota Ternate Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
<b>Misi 1 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional</b>				
Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang	Simpul Ekonomi Baru	Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	PDRB Perkapita	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Perindag 3. Diskomsandi 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Dinas PMPTSP 6. Dinas Kelautan dan Perikanan
Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi	Tingkat Inflasi	Optimalnya Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pertanian
<b>Misi 2 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif</b>				
Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Diskomsandi
		Optimalnya Implementasi Manajemen ASN	Persentase Pengisian JPT Prata-ma Melalui Seleksi Terbuka	BKPSDMD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kota	1. Bappelitbangda 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD
		Optimalnya Penerapan Zona Integritas	OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM	Inspektorat
Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. BPKAD 2. Inspektorat
Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	BP2RD



**Tabel 5.2 (lanjutan)**  
**Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah**  
**Kota Ternate Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas</b>				
Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	Indeks Pembangunan Manusia	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Kecamatan 2. DPMPSTP 3. Dinas Pemadam Kebakaran 4. Dinas Arsip dan Perpustakaan 5. Dinas Kependudukan dan Capil
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi PAUD	
			Angka Putus Sekolah SD/MI	
		Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Keagamaan	Dinas Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan		
<b>Misi 4 : Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (<i>Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi</i>)</b>				
Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearifan Sejarah, Sosial dan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya - Kesultanan Ternate	Persentase Lembaga Sosial yang Mandiri	1. Dinas Kebudayaan 2. Sekretariat Daerah 3. Badan Kesbangpol
		Meningkatnya Intensitas Event Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Jumlah Event Seni dan Budaya yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan
		Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase OKP yang aktif	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi			
<b>Misi 5 : Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama Dalam Berekonomi</b>				
Menciptakan Lapangan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas PMPTSP 4. Dinas Koperasi dan UKM
Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal	Persentase Capaian Ketersediaan Sarana Prasarana	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Sektor Informal	Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dinas Kelautan dan Perikanan



**Tabel 5.2 (lanjutan)**  
Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah  
Kota Ternate Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
<b>Misi 6 : Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan</b>				
Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Luasan Kumuh	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perkim
		Optimalnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PUPR
		Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih	Rasio Akses Air Minum Terhadap Jumlah Penduduk	Dinas PUPR
		Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	Persentase Layanan Persampahan	1. Dinas PUPR 2. Dinas Lingkungan Hidup
		Optimalnya Penataan Sistem Drainase	Luas Genangan Banjir dan Rob	Dinas PUPR
		Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan ( <i>Level Of Service</i> )	Dinas Perhubungan
<b>Misi 7 : Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu</b>				
Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Optimalnya Tanggap Darurat Bencana dan Koordinasi Antar Instansi Terkait	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	BPBD
Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana		Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini	Ketersediaan Sistem Peringatan Dini	BPBD
		Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang - undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana	Tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	1. BPBD 2. Dinas Sosial
		Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) Indeks Kerentanan Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19	Indeks Kemiskinan	Optimalnya Penanganan Covid-19	Persentase Jumlah Penurunan Pasien Covid 19	1. Satpol PP 2. Dinas Kesehatan
		Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Kemiskinan	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pengendalian Penduduk & KB
		Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian

**Tabel 5.2 (lanjutan)**  
**Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah**  
**Kota Ternate Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
<b>Misi 8 : Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial</b>				
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate	Meningkatnya Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial	1. Dinas Kebudayaan 2. Badan Kesbangpol
		Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
			Indeks Pemberdayaan Gender	
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak		
Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas	Indeks Aksesibilitas Sarana dan Prasarana yang Ramah terhadap Disabilitas dan Kelompok Rentan	Dinas Sosial		

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021



## BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Ternate dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

### 6.1 Strategi

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci pada tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1**  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Ternate Tahun 2021-2026

**Visi: “Mewujudkan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
<b>Misi 1 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional</b>				
Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang	Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	Peningkatan sinergitas kegiatan ekonomi antar pulau Ternate dan daya tarik pariwisata yang mendukung daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi	1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua. 2. Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua. 3. Pengembangan Kota Sebagai Pusat Informasi dan Konsolidasi Barang/ Jasa	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dinas Pariwisata 4. Diskomsandi 5. DPMPSTP 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Sekretariat Daerah 8. Dinas Pertanian
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas			
Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi	Optimalnya Pengendalian Inflasi			
<b>Misi 2 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif</b>				
Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Implementasi reformasi birokrasi melalui optimalisasi pencapaian akuntabilitas kinerja berbasis digitalisasi sektor pemerintah	Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	1. Diskomsandi 2. BKPSDMD 3. Bappelitbangda 4. Sekretariat Daerah 5. Sekretariat DPRD 6. Inspektorat
	Optimalnya Implementasi Manajemen ASN			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			
	Optimalnya Penerapan Zona Integritas			
Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Peningkatan transparansi, fungsi kontrol dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah dan pendapatan daerah	1. Revitalisasi dan Penguatan Peran BUMD 2. Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah	1. BPKAD 2. Inspektorat 3. BP2RD
Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah			
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas</b>				
Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat termasuk pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Kecamatan 2. DPMPSTP 3. Dinas Pemadam Kebakaran 4. Dinas Arsip dan Perpustakaan 5. Dinas Kependudukan dan Capil 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Kebudayaan 8. Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate	Peningkatan akses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan karakter dan keagamaan, yang didukung dengan peningkatan kualitas keluarga sehat		
	Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan			
	Optimalnya Capaian Keluarga Sehat			
<b>Misi 4 : Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Kebudayaan Ternate (<i>Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi</i>)</b>				
Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya - Kesultanan Ternate	Peningkatan Peran Kesultanan Ternate dan Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas serta peningkatan peran serta kepemudaan	Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya	1. Dinas Kebudayaan 2. Sekretariat Daerah 3. Badan Kesbangpol 4. Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya Intensitas Event Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan			
	Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga			
<b>Misi 5 : Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama Dalam Berekonomi</b>				
Menciptakan Lapangan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pengurangan angka pengangguran dengan peningkatan kompetensi dan membangun semangat wirausaha melalui penyediaan sarana prasarana sektor informal	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas PMPTSP 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Dinas Perindag 6. Dinas Kelautan dan Perikanan
Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Informal	Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal			



**Tabel 6.1 (lanjutan)**  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Ternate Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
<b>Misi 6 : Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan</b>				
Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan layanan air bersih, penanganan limbah perkotaan dan drainase, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan layanan transportasi perkotaan	1. Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota Yang Berkelanjutan. 2. Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif. 3. Konservasi Sumber Daya Air	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perkim 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perhubungan
	Optimalnya Tutupan Hutan			
	Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
	Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih			
	Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan			
	Optimalnya Penataan Sistem Drainase			
Belum Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan				
<b>Misi 7 : Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu</b>				
Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana	Optimalnya Tanggap Darurat Bencana Serta Koordinasi Antar Instansi Terkait	Peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kebencanaan melalui aksi terpadu dan peran aktif instansi dan stakeholder terkait	Literasi dan Mitigasi kebencanaan	1. BPBD 2. Dinas Sosial 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Satpol PP 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pengendalian Penduduk & KB 7. Dinas Ketahanan Pangan 8. Dinas Pertanian
Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana	Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini			
	Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang - undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana			
Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19	Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim	Penanganan Covid-19 secara terpadu dan penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin, disertai perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat		
	Optimalnya Penanganan Covid-19			
	Optimalnya Penanganan Kemiskinan			
	Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat			
<b>Misi 8 : Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial</b>				
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate	Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif, didukung pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta penyandang disabilitas, melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait	Membangun dan Menghidupkan Entitas Keragaman Sosial Budaya Masyarakat	1. Dinas Kebudayaan 2. Badan Kesbangpol 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 4. Dinas Sosial
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak			
	Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas			

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

### 1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, dengan berdasarkan RTRW Kota Ternate untuk mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan dan pemanfaatan fungsi-fungsi ruang potensial. Pembangunan daerah Tahun 2021 ditujukan untuk “Implementasi 5 Program 100 Hari Kerja, Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

### 2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tema Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk “Sinergitas Program dan Kegiatan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua, Revitalisasi dan Penguatan Peran BUMD serta Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah”.

### 3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tema Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk “Pengembangan Iklim Usaha yang Kondusif serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM Demi Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua”.

### 4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tema Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk “Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif dan Konservasi Sumber Daya Air”.

### 5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tema Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk “Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya sekaligus Membangun dan Menghidupkan Entitas Keragaman Sosial Budaya Masyarakat dan Literasi dan Mitigasi Kebencanaan dalam Pencapaian Pengembangan Kota sebagai Pusat Informasi dan Konsolidasi Barang/Jasa dan Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota yang Berkelanjutan”.

Keterkaitan antara Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan pada tabel berikut.





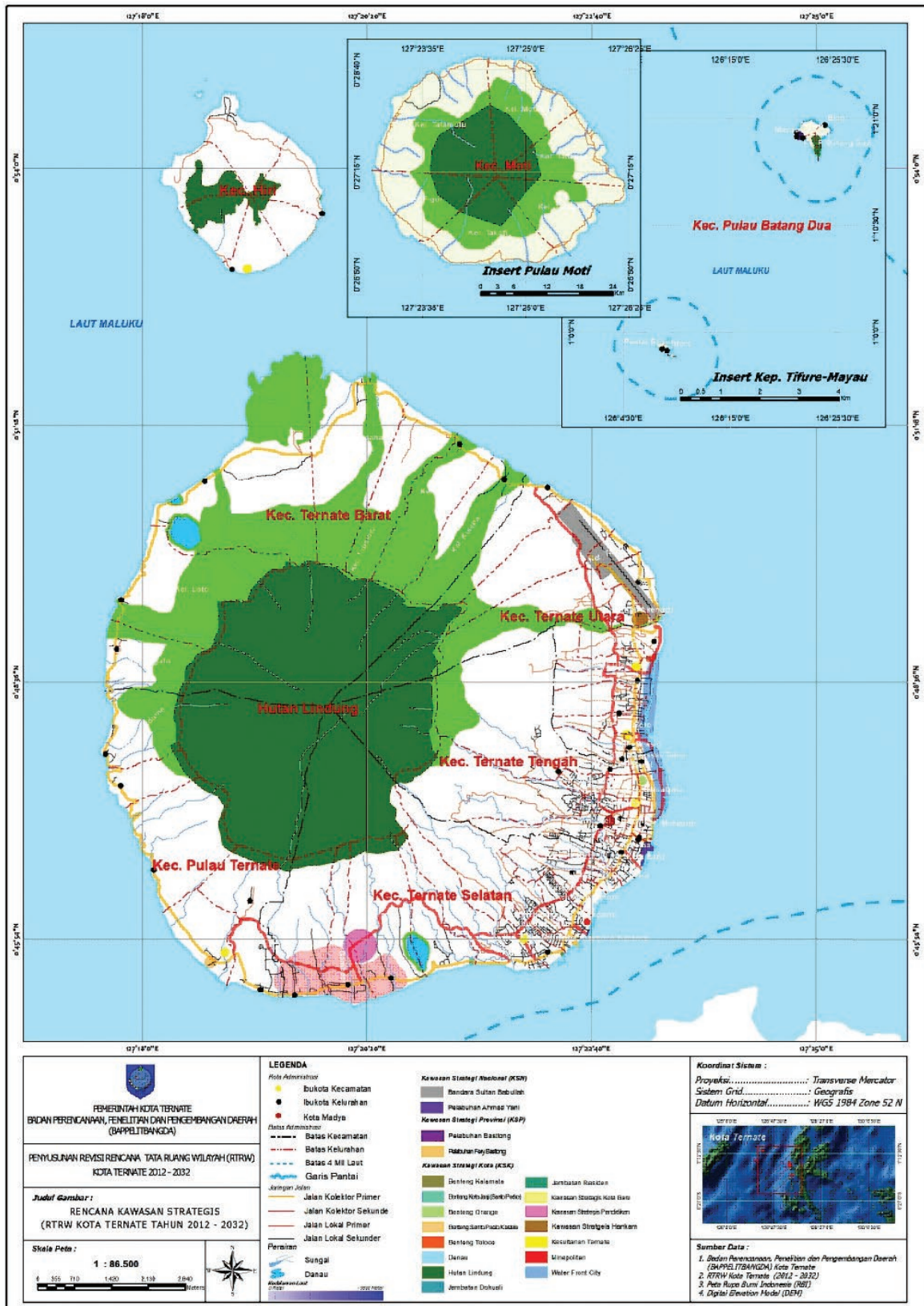
**Tabel 6.2**  
Pemetaan Arah Kebijakan dalam Pentahapan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Implementasi 5 Program 100 Hari Kerja</b>					
1. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional.					
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.					
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.					
4. Revitalisasi dan Penguatan Peran BUMD.					
5. Optimalisasi Sumber-Sumber Penerimaan Daerah.					
6. Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM.					
7. Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.					
8. Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif.					
9. Konservasi Sumber Daya Air.					
10. Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya.					
11. Membangun dan Menghidupkan Entitas Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.					
12. Literasi dan Mitigasi Kebencanaan.					
13. Pengembangan Kota Sebagai Pusat Informasi dan Konsolidasi Barang/Jasa.					
14. Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota Yang Berkelanjutan.					

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

### 6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota Ternate baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, kawasan strategis juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan penetapan secara tegas dan rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan yang ada di sekitarnya, dan harmonis tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, kawasan strategis digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Revisi RTRW Kota Ternate 2012-2032, 2021

Gambar 6.1  
Kawasan Strategis Kota Ternate



### 6.3.1 Kawasan Strategis Pertahanan dan Militer

Kawasan strategis pertahanan dan militer, merupakan kawasan yang dinilai memiliki nilai strategis dan prioritas untuk kegiatan pertahanan dan keamanan. Sistem kegiatan di dalamnya memiliki spesifikasi dan aktivitas khusus terkait dengan sistem keamanan dan pertahanan negara. Perlunya ditetapkan deliniasi kawasan strategis ini, yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi kepentingan sistem pertahanan dan keamanan negara, lokasi kawasan ini antara lain; di Kelurahan Tubo (Lapangan tembak AD), Kelurahan Takome (Lapangan tembak AD), Kelurahan Akehuda (AL), Kelurahan Sangaji (KOREM), Kelurahan Manggadua Utara (KODIM), Kelurahan Salahudin (Kipan/AD), Kelurahan Takoma (Kepolisian/Polres). Sedangkan untuk pengembangan kawasan strategis pertahanan dan keamanan hingga tahun 2030, dapat memanfaatkan lahan yang dipandang memiliki nilai strategis untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara.

### 6.3.2 Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan ekonomi Kota Ternate. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota Ternate, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh.
2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
3. Potensi ekspor.
4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang diarahkan pengembangannya di Kota Ternate meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru Ternate di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau.  
Pengembangan kawasan kota baru pada dasarnya diperuntukkan untuk pengembangan kawasan permukiman kurang lebih sebesar 60% dari rencana luas lahan 600 Ha, yang meliputi wilayah Kelurahan Fitu sampai dengan Kelurahan Kastela. Sedangkan sisanya seluas 40 % diperuntukkan untuk pengembangan kawasan Jasa dan Perdagangan, Kawasan Pendidikan, Kawasan Wisata dan lainnya.
2. Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate.  
Pengembangan kawasan minapolitan merupakan rencana pengembangan lahan untuk pengelolaan Hasil Perikanan.
3. Kawasan *Water Front City* (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate.  
Ketersediaan lahan di Kota Ternate yang sangat terbatas tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang sangat pesat, sehingga salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reklamasi pantai, yaitu reklamasi kawasan Salero-Dufa-Dufa dan reklamasi kawasan Kayu Merah-Sasa. Program pengembangan kawasan reklamasi ini diperuntukkan untuk mendukung perkembangan Kota Ternate sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dan menyediakan ruang untuk sempadan pantai. Peruntukan ruang di kawasan reklamasi sebagian besar disediakan untuk pengembangan sarana prasarana dan fasilitas jasa perdagangan, sarana prasarana umum dan ruang terbuka publik.
4. Kawasan Lokasi Industri di Tafure dan Tabam.
5. Kawasan pengembangan lahan pertanian di Kecamatan Pulau Moti dan Batang Dua.
6. Kawasan Agrowisata di Foramadiahi dan Loto.

### 6.3.3 Kawasan Strategis Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Rawan Bencana ditetapkan sebagai bagian dari perlunya pertimbangan faktor kebencanaan di dalam pengembangan wilayah. Kawasan ini ditetapkan di pada Kawasan Gunung Gamalama utama, yaitu:

1. Hampir seluruh wilayah Kota Ternate untuk kawasan rawan letusan gunung.
2. Kawasan sepanjang pesisir pantai untuk kawasan rawan bencana tsunami, terutama di Kecamatan Batang Dua (Pulau Mayau dan Tifure).
3. Kawasan Danau Laguna dan sekitarnya.
4. Kawasan Danau Tolire dan Sekitarnya.
5. Kawasan Mata Air Ake Gale, Santosa, Tege-Tege, Ake Rica, Ake Minta, Ake Tubo.

Kawasan-kawasan tersebut perlu dilakukan pelestarian untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian lingkungan, yang berfungsi untuk menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

#### **6.3.4 Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, seperti:

1. Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara.
2. Pesta Rakyat yang disebut "Legu Gam" yang sudah menjadi agenda tahunan Kota Ternate yang setiap tahun dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo.
3. Kawasan Benteng Kota Janji di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan.
4. Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.
5. Kawasan Benteng Toloco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara.
6. Kawasan wisata budaya di Kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salajin dan Togal yang merupakan wisata budaya yang memiliki potensi sebagai atraksi budaya tradisional Ternate.

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri khas kota, serta sebagai daya tarik atraksi wisata budaya.

#### **6.4 Program Pembangunan Daerah**

Mendasari pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026, maka program Perangkat Daerah dijabarkan pada setiap misi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.3 berikut.



**Tabel 6.3**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>MISI 1 : MENCiptakan KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT, SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL</b>																		
<b>1.1 Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan yang Seimbang</b>																		
1.1.1	Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah																	
02.17.01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		100	2.611.200.000	100	7.592.992.880	100	4.500.759.675	100	4.773.511.630	100	4.844.582.900	100	4.702.440.360	29.025.427.445	Dinas Koperasi dan UKM
02.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Perentase Fasilitasi Penerimaan Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi	%	100	261.120.000	100	354.800.000	100	419.462.500	100	366.050.000	100	371.500.000	100	360.600.000	2.133.532.500	Dinas Koperasi dan UKM	
02.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Perentase Fasilitasi Penerimaan Izin Pembukaan Kantor Cabang/ Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	%	100	304.640.000	100	212.880.000	100	218.850.000	100	219.630.000	100	222.900.000	100	216.360.000	1.395.260.000	Dinas Koperasi dan UKM	
02.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Perentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Dijaja Keseluruhannya	%	100	217.600.000	100	425.760.000	100	437.700.000	100	439.260.000	100	445.800.000	100	432.720.000	2.398.840.000	Dinas Koperasi dan UKM	
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Perentase Jumlah Anggota yang Telah Mengikuti Pelatihan	%	100	217.600.000	100	354.800.000	100	291.800.000	100	366.050.000	100	371.500.000	100	360.600.000	1.962.350.000	Dinas Koperasi dan UKM	
03.30.01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	13.623.570.100	100	11.050.283.176	100	11.363.062.317	100	11.406.746.428	100	11.625.133.663	100	11.244.163.323	70.312.959.007	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perentase Penikmatan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	%	100	85.835.706	100	76.975.009	100	87.048.195	100	96.094.286	100	107.277.508	100	114.542.918	567.774.622	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			%	100	56.551.629	100	50.714.544	100	57.350.460	100	63.310.348	100	70.678.250	100	75.464.966	374.070.197	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	%	100	-	100	106.440.000	100	120.367.500	100	132.876.150	100	148.339.950	100	158.386.338	666.409.938	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Kosumen	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, Pengawasan dan Penyidikan Metrologi Legal yang Berkualitas	%	100	102.163.975	100	91.618.925	100	103.607.111	100	114.374.014	100	127.684.580	100	136.332.074	675.780.679	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Promosi Pemasaran, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	100	30.460.997	100	27.316.907	100	30.891.280	100	34.101.517	100	38.070.163	100	40.648.486	201.489.350	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas																		
1.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas																	
02.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan Publik Dan Layanan Administrasi yang terintegrasi dengan sistem, menghubungkan layanan pemerintah	%	70	1.436.160.000	75	2.378.579.200	80	2.616.453.880	85	2.809.583.684	90	3.051.013.693	90	3.168.800.069	15.460.590.526	Diskomsandi	
02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	435.200.000	100	709.600.000	100	1.094.250.000	100	1.464.200.000	100	1.486.000.000	100	1.803.000.000	6.992.250.000	Dinas Koperasi dan UKM	
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	%	50	304.640.000	50	283.840.000	55	328.275.000	60	366.050.000	65	371.500.000	75	360.600.000	2.014.905.000	DPMP/TSP	
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.222.276.493	100	4.823.045.155	100	4.958.302.481	100	4.975.974.293	100	5.050.059.964	100	4.901.888.622	29.931.547.008	Dinas Kelautan dan Perikanan	
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	100	2.535.682.608	100	5.795.658.000	100	6.119.137.188	100	6.258.462.089	100	5.642.773.869	100	5.146.045.973	31.497.759.726	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	%	100	2.143.873.101	100	5.795.658.000	100	6.131.447.500	100	6.226.510.500	100	6.244.915.000	100	6.061.686.000	32.604.090.101	Dinas Kelautan dan Perikanan	





**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%		100	148.596.472	100	999.116.800	100	1.129.849.600	100	1.247.264.128	100	1.392.417.664	100	1.486.719.759	6.403.964.424	Dinas Kelautan dan Perikanan
					100	64.980.191	100	333.512.000	100	377.151.500	100	380.692.000	100	408.650.000	100	432.720.000	1.997.705.691	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan Usaha Sumbardaya Kelautan dan Perikanan	%		100	192.923.838	100	234.168.000	100	264.808.500	100	271.096.630	100	297.370.890	100	311.219.436	1.571.587.294	Dinas Kelautan dan Perikanan
					100	3.390.643.200	100	2.080.547.200	100	3.715.343.500	100	2.551.368.500	100	2.649.537.999	100	2.478.403.800	16.865.844.199	Dinas Pariwisata
03.26.01	Program Penujangan Unsur Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari		2	1.653.760.000	2	1.383.720.000	3	1.422.525.000	3	1.464.200.000	4	1.486.000.000	4	1.587.240.000	8.997.445.000	Dinas Pariwisata
					2	5.638.451.200	2	4.860.760.000	3	5.150.270.000	3	5.315.046.000	4	4.034.490.000	4	4.160.724.000	29.159.741.200	Dinas Pariwisata
03.26.02	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang		1000	1.582.735.360	1100	1.316.143.373	1200	1.380.114.321	1300	1.426.584.160	1400	1.491.258.833	1500	1.490.929.672	8.687.765.719	Dinas Pariwisata
					10.000	8.225.280.000	11.000	6.853.316.800	12000	7.199.916.970	13000	7.383.267.448	14.000	7.655.060.871	15.000	7.592.317.103	44.910.159.192	Dinas Pariwisata
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%		100	2.001.920.000	100	1.713.684.000	100	1.849.829.625	100	1.949.243.704	100	2.077.178.631	100	2.117.044.804	11.708.900.764	Dinas Pariwisata
					300	2.144.665.600	350	1.835.877.120	400	1.981.730.520	450	2.088.240.576	500	2.225.290.498	550	2.267.999.303	12.543.803.617	Dinas Pariwisata
03.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		100	215.789.900	100	235.904.824	100	243.647.434	100	245.759.826	100	205.807.651	100	244.931.669	1.391.841.304	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					100	147.672.064	100	132.429.910	100	149.758.034	100	165.320.962	100	184.560.610	100	197.060.058	976.801.538	Dinas Perindustrian dan Perdagangan





Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Ketersediaan Persetujuan IUI, IPU, IUK dan IPI kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIMAS)	%		100	248.360.000	100	280.857.500	100	310.044.350	100	346.126.550	100	369.568.122	1.554.956.522	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUK dan IPI Kewenangan Kabupaten/Kota	%		100	248.360.000	100	218.850.000	100	219.630.000	100	222.900.000	100	216.360.000	1.126.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
1.3 Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi																		
1.3.1	Optimalnya Pengendalian Inflasi																	
03.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		100	1.786.674.432	100	1.495.475.000	100	1.500.805.000	100	1.523.150.000	100	1.478.460.000	9.239.244.432	Dinas Pertanian		
03.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	%		100	572.375.040	100	291.800.000	100	292.840.000	100	297.200.000	100	288.480.000	2.097.495.040	Dinas Pertanian		
04.01.03	Program Perencanaan Dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan	%02.	100	2.263.040.000	100	1.896.700.000	100	2.049.880.000	100	2.154.700.000	100	2.091.480.000	12.300.760.000	Sekretariat Daerah			
JUMLAH 29 PROGRAM												66.261.242.723	67.927.382.591	68.974.068.223	68.872.429.737	68.095.936.855	399.749.152.035	
<b>MISI 2 : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EKSTRAKTIF DAN RESPONSIF</b>																		
2.1 Menghimpun Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		
2.1.1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
02.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	3.577.680.941	100	3.128.803.166	100	3.377.374.587	100	3.558.882.429	100	3.792.462.952	100	3.865.249.656	21.300.453.733	Diskomsandi	
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemanfaatan Aplikasi elektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	%	40	3.242.240.000	65	5.002.680.000	70	5.245.634.500	75	5.369.821.722	80	5.558.766.685	85	5.503.583.020	29.922.925.927	Diskomsandi	



**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pemangung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.20.02	Program Penyelesaian Statistik Sektor	Persentase Terepenuhinya Kebutuhan Data Statistik Sektor	%	70	243.712.000	73	808.944.000	76	881.527.800	79	937.749.818	82	1.008.814.372	85	1.037.968.157	4.918.716.148	Diskomsandi	
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penguasaan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	50	413.440.000	53	354.800.000	55	382.987.500	58	403.570.125	61	430.057.688	64	438.311.554	2.423.166.866	Diskomsandi	
2.1.2	Optimalnya Implementasi Manajemen ASN																	
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	20.971.853.285	100	17.626.753.618	100	18.027.092.212	100	18.183.386.414	100	17.962.622.006	100	17.821.130.359	110.592.837.894	BKPSDMD	
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Kepegawaian Daerah	%	100	3.755.905.329	100	7.612.219.853	100	7.825.696.706	100	7.853.586.155	100	7.970.517.688	100	7.736.658.622	42.754.586.353	BKPSDMD	
2.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja																	
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	38.887.31.200	100	31.703.508.800	100	32.592.601.000	100	30.732.093.800	100	32.675.654.000	100	31.716.933.600	198.308.522.400	Sekretariat Daerah	
04.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	42.088.577.090	100	47.055.152.153	100	44.383.811.760	100	51.220.394.746	100	35.928.093.725	100	56.026.459.492	278.702.488.965	Sekretariat DPRD	
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Capaian Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	IKM	90	8.599.260.808	90	14.078.855.642	90	16.644.735.015	90	19.209.667.006	90	22.420.024.550	90	25.026.540.999	105.979.084.021	Sekretariat DPRD	
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.396.480.000	100	4.475.802.000	100	4.679.742.500	100	4.775.305.275	100	4.926.090.000	100	4.859.085.000	29.112.504.775	Bappeltbangda	

Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
05.01.02	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Ternate yang Berkualitas dan Tepat Waktu	%	100	100	1.028.920.000	100	1.094.250.000	100	1.134.755.000	100	1.188.800.000	100	1.189.980.000	100	6.855.265.000	Bappelitbangda	
																		348.160.000
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Tepat Waktu	%	100	100	461.240.000	100	510.650.000	100	512.470.000	100	557.250.000	100	540.900.000	100	3.148.270.000	Bappelitbangda	
																		696.320.000
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelembagaan	%	75	80	461.240.000	85	510.650.000	85	549.075.000	90	594.400.000	90	613.020.000	90	3.250.625.000	Bappelitbangda	
																		609.280.000
2.1.4	Optimalnya Penerapan Zona Integritas	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	n/a	30	212.880.000	35	237.087.500	35	237.932.500	40	260.050.000	40	252.420.000	40	1.461.490.000	Bappelitbangda	
06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	4.919.089.120	100	5.597.307.600	100	5.908.779.100	100	5.826.977.500	100	5.653.486.800	100	33.119.684.272	Inspektort	



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Program Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPI/MD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPI/MD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Pengendalian Intern Pemerintah	%	70	100	51.745.280	100	74.508.000	100	83.892.500	100	87.852.000	100	92.875.000	100	97.362.000	488.234.780	Inspektorat			
2.2 Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja																					
2.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan																				
05.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Peringkat Daerah	%		100	9.405.888.323	100	8.204.968.819	100	9.025.523.515	100	9.691.729.636	100	10.524.548.529	100	11.328.077.235	58.180.706.057	BPKAD			
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengalokasian Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%		100	22.608.204.755	100	19.721.710.525	100	21.694.020.540	100	23.295.333.665	100	25.297.122.274	100	26.273.734.192	1.388.990.125.951	BPKAD			
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		100	448.794.206	100	391.494.571	100	430.646.787	100	462.434.363	100	502.171.757	100	521.558.426	2.757.100.110	BPKAD			
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Penilaian LHP dan Tidak lanjut Rekomendasi TLHP	%	65	100	2.138.918.218	100	1.958.496.000	100	2.148.377.500	100	2.243.886.500	100	2.284.725.000	100	2.268.174.000	13.042.577.218	Inspektorat			
2.3 Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah																					
2.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah																				
05.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Peringkat Daerah	%		100	13.021.336.976	100	11.193.940.000	100	11.642.820.000	100	12.161.645.200	100	12.679.295.000	100	12.703.938.000	73.402.975.176	BP2RD			
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Aparatur Pelugas Lapangan yang Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		100	1.526.561.112	100	1.252.444.000	100	1.298.510.000	100	1.339.743.000	100	1.378.265.000	100	1.345.036.000	61.40.561.112	BP2RD			
		Persentase Jumlah Peralatan Sistem Informasi, Survei Data, Pengelolaan dan Penerapan Pajak Daerah	%		100	870.394.290	100	716.696.000	100	811.204.000	100	819.952.000	100	837.361.000	100	814.956.000	48.70.563.290	BP2RD			
<b>JUMLAH ZI PROGRAM</b>															187.380.497.965	184.396.546.269	191.278.368.522	202.886.347.454	197.074.544.726	221.978.465.112	1.184.994.770.048



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS</b>																		
<b>3.1. Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik</b>																		
3.1.1	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (Smart Governance)																	
01.05.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.993.027.975	100	10.225.268.259	100	7.008.236.860	100	7.101.666.162	100	7.128.271.071	100	7.040.646.152	44.497.116.479	Dinas Pemadam Kebakaran	
01.05.04	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	94	47.872.000	96	948.380.400	97	390.282.500	98	438.527.900	99	1.327.741.000	100	380.793.600	3.533.597.400	Dinas Pemadam Kebakaran	
02.12.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.482.499.773	100	3.996.236.641	100	4.516.951.434	100	4.987.819.456	100	5.561.974.134	100	5.936.497.666	29.481.981.103	Dinas Kependudukan dan Capil	
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	85	13.712.412	70	106.440.000	75	109.425.000	80	109.815.000	85	111.450.000	90	108.180.000	559.022.412	Dinas Kependudukan dan Capil	
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	89	52.224.000	80	177.400.000	82	189.670.000	85	197.667.000	87	208.040.000	90	216.360.000	1.041.361.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	93	1.564.532.241	78	1.277.280.000	85	1.349.575.000	90	1.361.706.000	90	1.389.410.000	100	1.370.280.000	8.312.783.242	Dinas Kependudukan dan Capil	
02.18.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.172.956.646	100	5.035.104.942	100	5.987.878.016	100	6.820.203.097	100	7.744.493.644	100	8.315.937.002	39.076.513.347	DPMP/TSP	



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	3.46	35 skala 4	304.640.000	283.840.000	35 skala 4	306.390.000	35 skala 4	329.445.000	35 skala 4	349.210.000	35 skala 4	360.600.000	1.934.125.000	DPMP/TSP	
02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Yang Didapati Pelaku Usaha	%	n/a	60	409.088.000	338.479.200	45	355.266.500	38	362.389.500	25	390.075.000	25	418.296.000	2.273.594.200	DPMP/TSP	
02.18.06	Program Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100	100	217.600.000	248.360.000	100	291.800.000	100	329.445.000	100	334.350.000	100	360.600.000	1.782.155.000	DPMP/TSP	
02.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	4.117.128.976	3.548.000.000	100	3.829.875.000	100	4.026.550.000	100	4.272.250.000	100	4.327.200.000	24.121.003.976	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina	%	100	100	826.880.000	709.600.000	100	802.450.000	100	841.915.000	100	891.600.000	100	937.560.000	5.010.005.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	%	100	100	21.760.000	212.880.000	100	255.325.000	100	292.840.000	100	334.350.000	100	360.600.000	1.477.755.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Tingkat OPD	%	100	100	330.752.000	298.032.000	100	342.865.000	100	366.050.000	100	408.650.000	100	432.720.000	2.179.069.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24.03	Program Perindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	348.160.000	319.320.000	100	342.865.000	100	366.050.000	100	408.650.000	100	432.720.000	2.217.765.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penelibitan Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	100	130.560.000	141.920.000	100	182.375.000	100	219.630.000	100	260.050.000	100	288.480.000	1.223.015.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	9.245.762.757	8.009.012.508	100	8.187.178.500	100	9.663.720.000	100	10.353.705.000	100	10.092.472.800	55.551.851.565	Kec. Ternate Utara	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	85	71.825.347	88.700.000	85	109.425.000	85	128.117.500	85	148.600.000	85	162.270.000	708.937.847	Kec. Ternate Utara	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100	3817.445.851	2.923.552.000	100	3.749.630.000	100	4.509.736.000	100	5.334.740.000	100	5.906.628.000	26.241.731.851	Kec. Ternate Utara	

**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01.04	Program Koordinasi Kentramanan Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	85	100	14.192.000	100	21.885.000	100	29.284.000	100	37.150.000	100	43.272.000	100	145.783.000	Kec. Ternate Utara	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	109.988.000	100	127.662.500	100	142.759.500	100	159.745.000	100	176.694.000	100	783.869.793	Kec. Ternate Utara	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	100	894.074.880	100	838.925.000	100	878.520.000	100	928.750.000	100	937.550.000	100	5.258.389.880	Kec. Ternate Utara	
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	11.962.157.945	100	10.486.928.344	100	10.351.894.000	100	10.506.020.000	100	10.157.768.000	100	63.819.898.289	Kec. Ternate Tengah	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	85	65.245.184	90	56.768.000	95	58.360.000	100	63.155.000	100	61.302.000	100	363.398.184	Kec. Ternate Tengah	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100	6.319.104.000	100	5.151.696.000	100	5.299.817.500	100	5.318.706.500	100	5.239.518.000	100	32.726.737.000	Kec. Ternate Tengah	
07.01.04	Program Koordinasi Kentramanan Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	100	17.408.000	100	14.192.000	100	14.590.000	100	14.642.000	100	18.030.000	100	97.437.000	Kec. Ternate Tengah	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	130.560.000	100	106.440.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.786.000	100	683.191.000	Kec. Ternate Tengah	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	100	1.035.776.000	100	844.424.000	100	868.105.000	100	871.199.000	100	858.228.000	100	5.361.902.000	Kec. Ternate Tengah	
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	12.609.192.166	100	10.778.824.000	100	11.107.367.000	100	11.187.220.100	100	11.020.657.200	100	68.057.043.466	Kec. Ternate Selatan	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	90	82.650.877	95	65.283.200	97	68.208.250	100	69.549.500	100	70.585.000	100	424.790.827	Kec. Ternate Selatan	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100	3.291.574.851	100	2.694.954.360	100	2.770.641.000	100	2.785.911.377	100	2.762.196.000	100	17.150.967.588	Kec. Ternate Selatan	
07.01.04	Program Koordinasi Kentramanan Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	100	12.995.072	100	10.608.520	100	10.942.500	100	10.981.500	100	10.818.000	100	67.490.592	Kec. Ternate Selatan	





**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	204.451.241	100	167.283.233	100	171.067.750	100	172.629.180	100	174.270.650	100	170.095.020	1.059.797.074	Kec. Ternate Selatan	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	1.153.105.920	100	940.149.040	100	966.587.500	100	970.398.550	100	984.883.650	100	956.022.720	5.971.147.380	Kec. Ternate Selatan	
07.01.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	7.662.513.218	100	6.576.310.254	100	6.804.249.173	100	6.829.964.295	100	6.933.882.423	100	6.730.438.767	41.537.358.130	Kec. Pulau Ternate	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	29.729.478	100	48.252.800	100	48.876.500	100	49.050.700	100	50.524.000	100	41.829.600	268.263.078	Kec. Pulau Ternate	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	2.323.436.760	100	1.634.006.422	100	1.694.420.446	100	1.715.101.505	100	1.748.067.097	100	1.703.989.913	10.819.022.143	Kec. Pulau Ternate	
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	8.703.634	100	14.119.200	100	17.508.000	100	16.838.300	100	18.575.000	100	19.472.400	95.289.334	Kec. Pulau Ternate	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	65.157.535	100	85.152.000	100	58.360.000	100	91.512.500	100	66.870.000	100	155.058.000	522.110.035	Kec. Pulau Ternate	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	239.173.351	100	202.236.000	100	211.555.000	100	215.969.500	100	220.671.000	100	128.765.933	1.218.370.784	Kec. Pulau Ternate	
07.01.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.482.975.443	100	4.749.794.313	100	4.892.460.895	100	4.917.239.113	100	4.950.450.295	100	4.844.027.931	29.876.967.990	Kec. Ternate Barat	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	73.100.368	85	125.599.200	85	129.121.500	85	129.581.700	85	131.511.000	85	127.652.400	716.566.168	Kec. Ternate Barat	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	2.508.945.851	100	2.165.943.632	100	2.250.840.655	100	2.258.862.842	100	2.292.494.320	100	2.225.231.364	13.702.318.664	Kec. Ternate Barat	



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	85	100	43.520.000	100	42.576.000	100	51.065.000	100	51.247.000	100	52.010.000	100	50.484.000	100	290.902.000	Kec. Ternate Barat
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	94.035.649	100	85.152.000	100	91.187.500	100	109.815.000	100	111.450.000	100	1.081.800.000	100	599.820.149	Kec. Ternate Barat
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	100	246.497.280	100	200.958.720	100	206.594.400	100	207.330.720	100	210.417.600	100	2.042.433.840	100	1.276.042.560	Kec. Ternate Barat
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	5.150.925.949	100	5.145.479.272	100	4.791.214.925	100	4.735.081.222	100	4.805.580.314	100	4.700.642.130	100	29.328.923.812	Kec. Pulau Hiri
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	100	14.989.968	100	12.895.135	100	14.590.000	100	14.642.000	100	14.860.000	100	1.4424.000	100	86.401.103	Kec. Pulau Hiri
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100	2.369.850.641	100	2.286.838.423	100	2.350.970.447	100	2.359.349.506	100	2.394.477.097	100	2.324.221.914	100	14.085.708.028	Kec. Pulau Hiri
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	100	73.782.911	100	152.400.082	100	156.842.500	100	157.401.500	100	159.745.000	100	1.550.580.000	100	855.229.993	Kec. Pulau Hiri
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	155.404.593	100	126.694.822	100	130.247.848	100	130.712.062	100	132.658.192	100	1.287.655.933	100	804.483.450	Kec. Pulau Hiri
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	100	14.989.968	100	12.895.135	100	14.590.000	100	14.642.000	100	14.860.000	100	1.4424.000	100	86.401.103	Kec. Pulau Hiri
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	97	100	1.508.138.805	100	1.401.922.778	100	1.455.352.500	100	1.497.144.500	100	1.519.435.000	100	1.518.126.000	100	8.900.119.583	Kec. Moti
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	85	19.575.035	85	143.339.200	85	147.359.000	85	147.884.200	85	150.086.000	85	1.456.682.400	85	753.925.835	Kec. Moti
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	85	100	1.488.563.769	100	1.258.583.577	100	1.307.993.500	100	1.349.260.300	100	1.369.349.000	100	1.372.443.600	100	81.146.193.746	Kec. Moti
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	85	100	8.700.083	100	14.192.000	100	14.590.000	100	14.642.000	100	14.860.000	100	1.4424.000	100	81.408.083	Kec. Moti



**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	107.028.005	100	180.238.400	100	192.588.000	100	193.274.400	100	196.152.000	100	190.396.800	1.059.677.605	Kec. Moti	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	171.294.720	100	139.649.280	100	143.565.600	100	144.077.280	100	146.222.400	100	141.932.160	886.741.440	Kec. Moti	
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	3.865.881.600	100	3.151.688.400	100	3.242.262.750	100	3.254.916.600	100	3.305.607.000	100	3.208.618.800	20.028.975.150	Kec. Batang Dua	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Keuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	15.817.257	100	12.895.135	100	14.590.000	100	17.131.140	100	18.575.000	100	18.030.000	97.038.532	Kec. Batang Dua	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	2.805.050.962	100	2.286.838.422	100	2.372.855.452	100	2.397.627.500	100	2.433.325.000	100	2.361.930.000	14.657.627.336	Kec. Batang Dua	
07.01.04	Program Koordinasi Kemitraan Dan Keterlibatan Masyarakat Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	186.934.938	100	178.655.282	100	185.853.986	100	201.327.500	100	204.325.000	100	198.330.000	1.155.426.706	Kec. Batang Dua	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	186.934.938	100	178.655.282	100	193.148.980	100	188.881.800	100	198.381.000	100	192.560.400	1.138.562.400	Kec. Batang Dua	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	155.404.695	100	126.694.825	100	130.247.848	100	130.712.059	100	132.658.191	100	128.765.933	804.483.551	Kec. Batang Dua	
3.1.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate																	
01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	155.656.288.463	100	133.244.930.384	100	143.830.729.354	100	151.560.522.014	100	161.507.910.464	100	164.607.645.058	910.408.025.737	Dinas Pendidikan	



**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%		100	60.775.680.000	100	52.025.211.000	100	56.158.414.594	100	59.176.496.354	100	63.060.433.863	100	64.270.718.905	Dinas Pendidikan	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama																
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD																
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik Pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah Diploma Empat atau ST atau memiliki Sertifikat	%		100	152.320.000	100	130.389.000	100	140.747.906	100	148.312.021	100	158.046.200	100	161.079.496	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Pendidik pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah Diploma Empat atau ST atau memiliki Sertifikat																
		Jumlah Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar																
3.1.3	Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter Dan Keagamaan																	
01.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Penyelenggaraan Bahasa dan Sastra Daerah	%	75	4.352.000.000	80	372.540.000	85	402.136.875	85	423.748.631	90	451.560.572	90	460.227.131	Dinas Kebudayaan		
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pelayanan Kesehatan																	
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		100	48.742.058.461	100	40.798.806.800	100	42.095.797.500	100	42.397.741.250	100	43.183.160.000	100	42.071.202.000	Dinas Kesehatan	



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																										
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD																																																																																																																									
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																											
01.02.02	Program Pemenuhan Pelayan Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	57.011.200.000	100	45.591.800.000	100	47.052.750.000	100	47.403.475.000	100	48.295.000.000	100	47.022.240.000	292.376.465.000	Dinas Kesehatan																																																																																																																										
																		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan	%	100	26.112.000.000	100	21.554.585.730	100	22.249.750.000	100	22.512.075.000	100	23.033.000.000	100	22.537.500.000	137.998910730																																																																																																											
																																	Angka Kematan Ibu (Per 1.000 kelahiran Kehamilan Hidup)	per 1.000 kelahiran Kehamilan Hidup	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74																																																																																												
																																																Angka Kematan Bayi (Per 1.000 kelahiran Kehamilan Hidup)	per 1.000 kelahiran Kehamilan Hidup	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3																																																																													
																																																															Prevalensi Stunting pada Balita	%	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7																																																														
																																																																														Jumlah Puskesmas yang Direakreditasi	PKM	3	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
																																																																																													Jumlah Puskesmas yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik	PKM	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																
																																																																																																												Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	%	100	365.940.720	100	401.225.000	100	420.957.500	100	445.600.000	100	457.562.500	100	482.950.000	450.750.000	2.519.873.220																
																																																																																																																												Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	80	407.920.655	84	437.700.000	86	457.562.500	88	482.950.000	90	486.810.000	92	486.810.000	486.810.000	2.751.663.156
MISI 4 : MENUMBUH-KEMBANGKAN KELEMBAGAAN SOSIAL DALAM BINGKAI 7 NILAI KEBUDAYAAN TERMATE (KIE SE GAM MAGOGUGU MATTI TOMDI)																																																																																																																																											
	4.1. Menyediakan Lembaga dan Informasi Keartisan Sejarah, Sosial dan Budaya																																																																																																																																										
		4.1.1	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya Ternate	%	100	10.375.168.000	100	8.458.432.000	100	10.037.823.100	100	10.298.723.000	100	9.996.553.200	57.862.339.300	Sekretariat Daerah																																																																																																																											
																	Program Pemeliharaan Dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	7.080.181.419	100	4.723.497.057	100	5.088.484.587	100	5.571.163.902	100	5.840.377.350	33.164.904.140	Badan Kesbangpol																																																																																																													
																															Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.861.199.825	100	4.861.199.825	100	4.861.199.825	100	4.861.199.825	100	4.861.199.825	4.861.199.825	4.861.199.825	4.861.199.825																																																																																														

Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
0801.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	50	329.200.991	50	295.221.881	50	510.650.000	75	475.865.000	75	482.950.000	75	468.780.000	2.562.667.872	Badan Kesbangpol	
0801.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pemahaman Politik dan Pengembangan Etika Politik Serta Budaya Politik	%	64	948.290.416	50	1.102.086.714	50	1.293.483.599	50	1.309.075.185	75	1.391.720.581	75	1.394.158.790	7.438.815.283	Badan Kesbangpol	
0801.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	46	82.687.782	50	420.500.885	50	455.937.500	50	490.507.000	75	531.245.000	75	544.506.000	2.525.384.167	Badan Kesbangpol	
0801.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Tingkat Kerawanan Sosial	%	80	675.864.561	50	1.270.184.000	50	1.305.805.000	50	1.383.669.000	75	1.329.970.000	75	1.052.952.000	7.018.444.561	Badan Kesbangpol	
4.1.2	Meningkatnya Intenstias Event Seni Dan Budaya Yang Diselenggarakan																	
0222.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.396.480.000	100	4.619.496.000	100	4.986.497.250	100	5.254.483.028	100	5.599.351.092	100	5.430.680.151	31.286.987.521	Dinas Kebudayaan	
0222.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kebudayaan	%	80	1.784.320.000	80	1.527.414.000	80	1.648.761.188	85	1.737.369.389	90	1.851.398.345	90	1.886.931.239	10.436.194.161	Dinas Kebudayaan	
0222.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	80	261.120.000	85	223.524.000	85	241.282.125	90	254.249.179	90	270.936.343	90	276.136.278	1.527.247.925	Dinas Kebudayaan	
0222.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah	%	80	261.120.000	85	223.524.000	85	241.282.125	90	254.249.179	90	270.936.343	90	276.136.279	1.527.247.926	Dinas Kebudayaan	
0222.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	80	304.640.000	85	260.778.000	85	281.495.813	90	296.624.042	90	316.092.401	90	322.158.992	1.781.789.248	Dinas Kebudayaan	
0222.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Permuseuman	%	80	261.120.000	85	223.524.000	85	241.282.125	90	254.249.179	90	270.936.343	90	276.136.279	1.527.247.926	Dinas Kebudayaan	
4.1.3	Optimalnya Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga																	
0219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.354.762.681	100	3.693.988.367	100	3.872.356.211	100	3.961.197.867	100	4.088.902.360	100	4.042.854.874	24.014.062.360	Dinas Pemuda dan Olah Raga	



**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Esaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Pejabat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
021902	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	1.080.148.992	100	2.135.896.000	100	2.301.572.500	100	2.397.627.500	100	2.563.350.000	100	2.578.290.000	1.3056.884.992	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
021903	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Pelaksanaan Even Olahraga Berprestasi Di Daerah	%	100	3.702.813.969	100	4.239.155.225	100	4.485.700.461	100	4.560.255.878	100	4.527.104.052	100	4.596.933.704	26.111.963.289	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
021904	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	0	652.800.000	80	461.240.000	85	510.650.000	85	549.075.000	85	594.400.000	90	613.020.000	3.381.185.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
<b>JUMLAH 16 PROGRAM</b>					35.331.737.217	36.235.146.491	35.795.892.954	38.304.804.113	39.959.179.762	39.596.605.136	225.223.365.671							
<b>MISI 5 : SETIAP WARGA MEMILIKI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DALAM BEREKONOMI</b>																		
<b>5.1 Menciptakan Lapangan Kerja</b>																		
5.1.1	Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)																	
010105	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	69.632.000	100	59.606.400	100	64.341.900	100	67.799.781	100	72.249.692	100	73.636.341	407.266.114	Dinas Pendidikan	
020701	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Pemerintahan Daerah	%	100	4.002.203.015	100	3.338.638.426	100	3.614.325.968	100	3.787.537.633	100	3.795.634.055	100	3.792.484.271	22.330.823.368	Dinas Tenaga Kerja	
020703	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	100	3.238.256.832	100	2.655.873.140	100	2.757.710.613	100	2.793.162.828	100	2.860.754.325	100	2.798.454.330	1.710.421.068	Dinas Tenaga Kerja	
020704	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate	%	100	4.619.822.080	100	3.894.071.920	100	4.109.054.650	100	4.189.588.670	100	4.170.236.100	100	4.260.633.240	252.43.406.660	Dinas Tenaga Kerja	
020705	Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial Yang Dislesaikan	%	100	2.249.984.000	100	1.883.988.000	100	1.984.240.000	100	2.042.559.000	100	2.121.265.000	100	2.120.328.000	12.402.364.000	Dinas Tenaga Kerja	
021705	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	%	100	348.160.000	100	283.840.000	100	218.850.000	100	292.840.000	100	297.200.000	100	288.480.000	1.729.370.000	Dinas Koperasi dan UKM	





**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	20	50	304.640.000	55	283.840.000	60	328.275.000	65	366.050.000	70	371.500.000	75	396.660.000	2.050.965.000	DPMPSTP
5.2 Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Informal																		
5.2.1	Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal																	
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan (UMKM)	%		100	261.120.000	100	425.760.000	100	492.412.500	100	439.260.000	100	445.800.000	100	432.720.000	2.497.072.500	Dinas Koperasi dan UKM
03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	%		100	173.940.397	100	155.986.806	100	176.397.423	100	194.728.732	100	217.390.784	100	232.113.669	1.150.557.811	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	%		100	674.720.937	100	1.857.732.800	100	1.918.585.000	100	1.907.376.735	100	2.019.834.355	100	1.896.756.000	10.275.005.827	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Pembinaan Mutu Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran, Skala Mikro dan Kecil	%		100	371.417.088	100	390.280.000	100	408.520.000	100	409.976.000	100	416.080.000	100	403.872.000	2.400.145.088	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>JUMLAH 10 PROGRAM</b>						16.313.896.349	15.229.617.492	16.072.713.054	16.490.879.379	16.787.944.311	16.696.137.851	97.591.188.436						
<b>MISI 6 : SETIAP WARGA MASYARAKAT MEMILIKI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN</b>																		
6.1 Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan																		
6.1.1	Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas																	
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Per센	100	100	14.558.993.255	100	23.077.434.452	100	24.909.463.578	100	26.177.259.354	100	27.853.460.452	100	28.133.551.402	144.710.162.493	Dinas PUPR
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	Per센	55,28	55,5	541.324.7925	60	533.840.4209	65	664.701.5098	70	809.094.1709	75	997.601.3667	80	117.866.208504	47.251.831.112	Dinas PUPR



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah domestik	Perse	n/a	89,34	3.236.147.200	89,5	5.585.954.170	89,75	5.960.285.790	90	6.555.888.381	90,25	7.294.699.070	90,5	8.071.806.755	36.704.781.366	Dinas PUPR
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kota Ternate Yang Terbangun	Km	319.789	319.789	7.311.360.000	319.816	67.757.930.000	319.843	65.685.350.000	319.870	55.127.130.000	319.897	55.947.900.000	319.924	54.306.360.000	304.136.030.000	Dinas PUPR
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki sertifikat kompetensi	Orang	-	-	71.714.092	20	73.725.240	20	73.725.240	20	73.988.003	20	75.089.586	20	72.886.419	367.403.340	Dinas PUPR
01.04.01	Program Penjangkuran Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	6.541.234.561	100	6.237.682.123	100	6.777.361.483	100	6.801.516.576	100	6.902.782.155	100	6.700.250.996	39.960.827.894	Disperkim
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Jumlah Kualitas Perumahan Swadaya	Unit	779	-	2.463.021.600	1091	1.631.891.500	1500	1.631.891.500	1700	1.747.522.700	1800	1.934.029.000	1900	2.093.643.600	9.870.108.400	Disperkim
01.04.03	Program Kawasan Perumahan	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Perse	61,18	45,64	304.640.000	35	283.840.000	25	291.800.000	15	256.235.000	10	222.900.000	5	216.360.000	1.575.775.000	Disperkim
01.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah Kawasan dan Lingkungan Perumahan Kumuh yang Tertangani	Ha	n/a	45,44	8.443.793.615	105	3.516.443.733	165	3.158.735.000	225	2.781.980.000	285	2.749.100.000	345	2.654.016.000	23.304.068.349	Disperkim
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	69,23	76,92	-	80,77	5.591.937.517	84,62	3.771.719.260	88,46	3.201.479.157	92,31	1.699.371.768	100	2.476.156.541	16.740.664.242	Disperkim
02.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Umum	Persentase Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan Umum	%	n/a	16,4	5.222.400.000	16,7	4.328.560.000	16,7	4.449.950.000	16,7	4.465.810.000	16,7	4.532.300.000	16,7	4.399.320.000	27.398.340.000	Disperkim
02.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Penataan dan Perlindungan Aset Tanah Pemerintah	%	n/a	-	-	20	2.661.000.000	20	2.735.625.000	20	274.537.500	20	278.625.000	20	270.450.000	6.220.237.500	Disperkim
02.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Tanah Aset Pemerintah	Bidang & Kel	n/a	-	-	407 Bid & 8 Kel	798.300.000	307 Bid & 8 Kel	620.075.000	307 Bid & 8 Kel	622.285.000	307 Bid & 8 Kel	631.550.000	156 Bid & 6 Kel	306.510.000	2.978.720.000	Disperkim



**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Program Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
6.1.2	Optimalnya Tutupan Lahan																	
02.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	7.092.540.134	100	7.963.814.687	100	7.454.004.154	100	7.623.330.212	100	7.811.483.691	100	7.582.290.765	100	7.582.290.765	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang tersedia	%	1	217.600.000	2	496.720.000	2	510.650.000	2	512.470.000	1	445.800.000	1	432.720.000	1	432.720.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.04	Program Pengelolaan Keeneroganman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikali terhadap luas RTH Publik	%	12,6	1.576.036.152	13	1.953.954.560	14	2.010.137.250	14,4	2.024.622.550	15	2.054.766.500	15	2.066.598.600	15	2.066.598.600	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penyelenggaraan pengendalian bahan beracun dan limbah beracun (B3) dan limbah bahan beracun dan beracun (LBB3)	%	100	-	100	35.480.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.450.000	100	180.300.000	100	180.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	87.040.000	100	248.360.000	100	328.275.000	100	402.655.000	100	482.950.000	100	486.810.000	100	486.810.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.07	Program Pengakuan Keber-Aadaan Masyarakat Hukum Adat (Pmha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pph	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	%	0	-	02:06	70.960.000	02:06	72.950.000	4	146.420.000	4	148.600.000	4	144.240.000	4	144.240.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	26.112.000	100	120.632.000	100	145.900.000	100	256.235.000	100	334.350.000	100	324.540.000	100	324.540.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	34.816.000	100	70.960.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.450.000	100	108.180.000	100	108.180.000	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	%	13,8	87.040.000	16,2	212.880.000	18,5	291.800.000	20,8	329.445.000	23,1	371.500.000	23,1	360.600.000	23,1	360.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
6.1.3	Optimalnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang																	
01.03.07	Program Pembangunan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman	Persen	n/a	-	100	2.500.000.000	100	2.700.000.000	100	2.916.000.000	100	3.149.280.000	100	3.464.208.000	100	3.464.208.000	Dinas PUPR
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan	Rekomendasi	241	5.310.971.904	261	5.493.297.440	265	6.114.304.250	268	5.908.193.420	272	7.894.266.300	275	10.636.257.600	275	10.636.257.600	Dinas PUPR



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Perisen	n/a	448.866.673	100	365.941.855	100	376.204.317	100	377.545.141	100	383.166.289	100	371.923.994	2.323.648.269	Dinas PUPR	
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota	Perisen	n/a	271.940.552	50	1.296.633.375	100	967.651.989	100	977.051.673	100	998.242.119	100	976.046.555	5.487.566.263	Dinas PUPR	
6.1.4	Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih																	
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Rumah Tangga di Kota Ternate	Perisen	n/a	3.081.918.195	92	6.670.240.000	92,25	8.228.760.000	92,25	9.909.705.600	92,75	12.088.697.600	93	14.057.515.008	54.016.836.403	Dinas PUPR	
6.1.5	Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan																	
01.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Pengelolaan Persampahan Regional	Perisen	5,13	522.240.000	6,41	496.720.000	7,69	536.182.500	8,97	564.998.175	10,26	602.080.763	11,54	613.636.175	3.335.857.613	Dinas PUPR	
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	9,4	12.310.757.123	9,51	11.435.666.659	9,62	11.847.555.634	9,73	11.926.386.330	9,84	12.178.254.436	9,95	11.893.058.222	71.591.678.403	Dinas Lingkungan Hidup	
6.1.6	Optimalnya Penataan Sistem Drainase																	
01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Perisen	99,12	7.411.143.088	99,3	7.250.386.675	99,4	8.944.459.548	99,5	10.771.606.035	99,6	13.118.377.190	99,7	15.280.172.752	62.776.145.288	Dinas PUPR	
6.1.7	Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan																	
02.15.01	Program Peninjauan Pemertintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	80	9.080.580.758	100	8.900.314.932	100	8.961.364.367	100	9.562.528.068	100	10.342.357.115	100	10.768.935.081	57.616.080.321	Dinas Perhubungan	
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	%	68	1.346.440.038	75	6.986.977.766	85	4.009.953.096	87	4.141.033.315	90	4.318.310.294	100	4.232.521.114	25.035.235.623	Dinas Perhubungan	
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Standar Keselamatan Pelayaran	%	80	2.592.160.870	80	1.979.784.000	80	1.269.330.000	80	2.335.399.000	80	1.478.570.000	80	2.553.048.000	12.206.291.870	Dinas Perhubungan	
<b>JUMLAH 23 PROGRAM</b>					<b>102.530.020.043</b>		<b>192.261.945.845</b>		<b>189.701.329.054</b>		<b>187.081.827.899</b>		<b>198.441.772.995</b>		<b>208.021.122.083</b>	<b>1.078.038.017.918</b>		

**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>MISI 7 : DAERAH MELINDUNGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU</b>																		
<b>7.1 Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana</b>																		
7.1.1	Optimalnya Tanggap Darurat Bencana Serta Koordinasi Antar Instansi Terkait																	
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	100	3.350.151.315	100	3.606.169.434	100	4.075.508.285	100	4.175.906.545	100	4.175.906.545	100	4.175.906.545	100	22.834.608.104	BPPD
<b>7.2 Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana</b>																		
7.2.1	Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana Dan Penetapan Sistem Peringatan Dini																	
7.2.2	Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kebencanaan Dan Kawasan Rawan Bencana																	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.236.604.926	100	5.375.826.038	100	5.443.232.089	100	5.369.471.254	100	5.369.471.254	100	5.369.471.254	100	32.282.976.446	BPPD
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	%	0.02	663.476.000	0.08	750.290.750	0.07	764.175.500	0.08	741.754.200	0.08	741.754.200	0.08	741.754.200	0.08	4.107.861.300	Dinas Sosial
7.2.3	Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim																	
02.11.03	Program Pegendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	56.21	510.912.000	56.31	525.240.000	56.41	557.250.000	56.61	540.900.000	56.71	540.900.000	56.71	540.900.000	56.71	2.857.254.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.7		91.81		91.92	92.14	92.02	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25		
<b>7.3 Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19</b>																		
7.3.1	Optimalnya Penanganan Covid-19																	
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	60	278.528.000	65	291.800.000	70	371.500.000	75	396.660.000	80	396.660.000	85	396.660.000	85	1.926.937.000	Dinas Kesehatan



**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026 RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		85	8853633307	100	9104842320	100	9191891306	100	9328746401	100	9059408132	53.558.662.588	Satpol PP		
01.05.02	Program Peningkatan Kenertahanan Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trambuan yang dapat diselesaikan	%	70	85	1.124.783.611	90	1.192.123.572	95	1.217.237.251	100	1.257.650.303	100	1.235.174.200	6.809.061.443	Satpol PP		
7.3.2	Optimalnya Penanganan Kemiskinan																	
01.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	7.112.782.166	100	8.043.478.085	100	8.072.145.725	100	8.192.329.291	100	7.951.962.159	43.905.305.426	Dinas Sosial		
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial	%	10,69	7,04	1.435.166.000	7,08	1.622.955.125	7,36	1.628.739.475	7,36	1.652.989.250	5,26	1.604.489.700	9.434.899.550	Dinas Sosial		
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Terhadap Fakir Miskin	%	1,15	0,85	1.933.660.000	1,29	2.186.676.250	1,13	2.194.469.750	1,57	2.227.142.500	1,36	2.161.797.000	13.634.817.500	Dinas Sosial		
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	16,67	16,67	171.013.600	16,67	193.390.450	16,67	194.079.710	16,67	196.969.300	16,67	191.190.120	1.069.369.580	Dinas Sosial		
02.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah				5.243.779.373		5.505.447.501		5.662.052.615		5.896.520.814		5.889.469.210	34.518.687.036	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wUS per wanita		2,21	2,20	273.196.000	2,19	308.943.250	2,18	341.048.785	2,17	380.739.205	2,16	406.524.934	2.028.148.174	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	87,99	88,40	1.459.771.380	88,80	1.575.720.000	89,20	1.660.402.800	89,60	1.769.083.000	90,00	1.803.000.000	9.973.277.624	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Merode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	57,89	60,00		60,50		61,00	61,50	62,00							



Tabel 6.3 (lanjutan)  
Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.14.04	Program Pembudayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) ≥ 21 Tahun	%	38.86	40.00	42.25	44.50	46.25	48.50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.727.161.982		
		Persentase Bayi Dua Tahun (Baduta) Stunting	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			1.035.498.960	
		Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	%	50	55	60	65	70	75	75	75	75	75	75			75	
7.3.3	Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat																	
02.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	24.977.171.455		
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur dan Dokumen Pendukung yang Tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	2.182.507.500		
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Kebutuhan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Dengan Konsumsi Pangan B2SA yang Difasilitasi Untuk Mendukung Stabilitas Harga Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	12.233.693.277		
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Informasi Daerah Rawan Pangan Serta Status Kesehatan dan Gizi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	1.286.968.954		
02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	1.550.814.538		
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Diberikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian	5.667.072.269		
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Pengawasan Pasokan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian	449.709.600		
03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian	1.096.249.960		
JUMLAH 23 PROGRAM					44.397.930.259	45.396.532.296	49.372.953.881	50.539.651.899	52.565.423.758	51.840.723.214	51.840.723.214	51.840.723.214	51.840.723.214	51.840.723.214	294.113.215.306			





**Tabel 6.3 (lanjutan)**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Walikota**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
<b>MISI 8 : DAERAH MEMBERIKAN RUANG UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA BUDAYA MASYARAKAT DENGAN MEMPERHATIKAN SISTEM NILAI DAN NORMA SOSIAL</b>																					
8.1 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate																					
8.1.1	Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial																				
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	0	25	318.190.970	269.648.000	50	310.037.500	50	322.124.000	338.065.000	50	338.964.000	50	338.964.000	1.897.029.470	Badan Kesbangpol			
8.1.2	Optimalnya Penguatan Gender Dan Hak Anak																				
02.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		100	4.914.776.269	3.840.463.059	100	4.026.840.000	100	4.114.402.000	4.249.960.000	100	4.110.840.000	100	4.110.840.000	25.257.281.328	DPPPA			
02.08.02	Program Penguatan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Capaian Anggaran Perilaku Ekspora (APE)	Kategori	0	Pratama	47.872.000	119.716.616	Madya	123.073.945	Madya	130.833.591	140.211.530	Utama	108.180.000	Utama	108.180.000	669.887.682	DPPPA			
02.08.03	Program Perindungan Perempuan	Persentase Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dilindungi	%	100	100	161.024.000	146.660.128	100	158.068.060	100	165.952.428	175.853.240	100	162.270.000	100	162.270.000	969.827.856	DPPPA			
02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	1.327.360.000	1.394.442.056	100	1.433.547.745	100	1.317.780.000	1.411.700.000	100	1.370.280.000	100	1.370.280.000	8.255.109.801	DPPPA			
02.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Ketersediaan Data Gender dan Anak	Profil	2	2	87.040.000	106.440.000	2	109.425.000	2	109.815.000	111.450.000	2	108.180.000	2	108.180.000	632.350.000	DPPPA			
02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	0	650	335.121.408	454.272.438	750	467.012.040	800	468.676.510	475.654.483	800	461.698.537	800	461.698.537	2.662.435.416	DPPPA			
02.08.07	Program Perindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Didampingi Instansi Terkait	%	100	100	330.752.000	277.403.928	100	291.800.000	100	300.161.000	312.060.000	100	310.116.000	100	310.116.000	1.822.292.928	DPPPA			
8.1.3	Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas																				
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Diberdayakan	%	1.62	1.62	1.531.904.000	528.652.000	4.87	597.825.250	4.51	599.955.950	608.888.500	5.47	591.023.400	5.47	591.023.400	4.458.249.100	Dinas Sosial			
					<b>JUMLAH 9 PROGRAM</b>																
					9.054.040.647												7.517.629.540	7.529.700.479	7.823.842.753	7.561.551.937	46.624.463.581

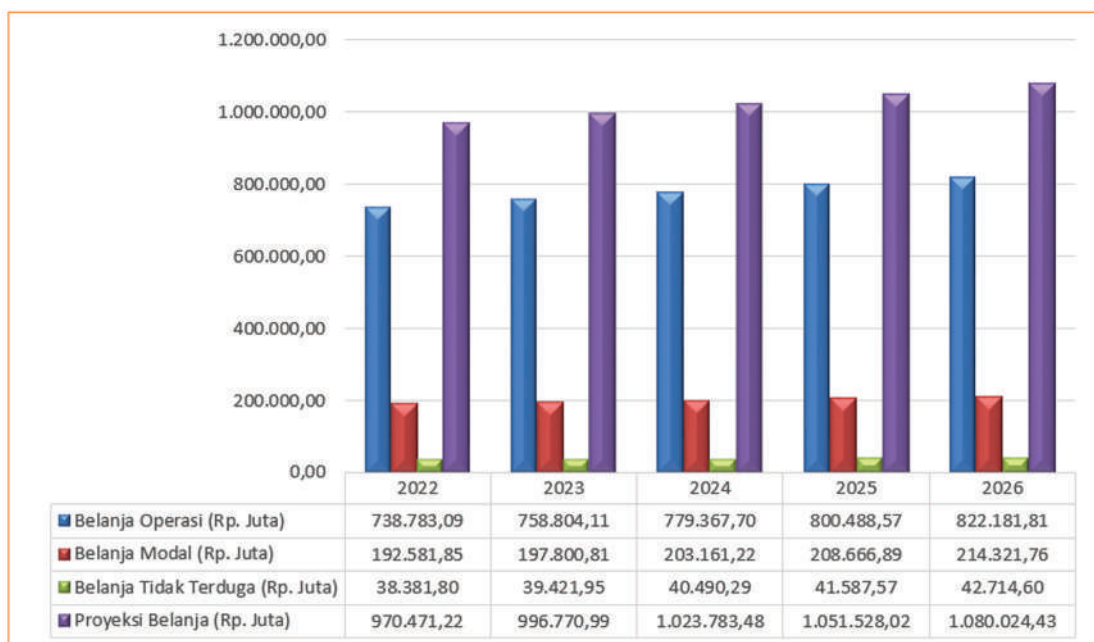
# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

### 7.1 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam bab III, proyeksi belanja tahun 2022-2026 ditunjukkan dalam Gambar 7.1 berikut.

**Grafik 7.1**  
Proyeksi Belanja Kota Ternate Tahun 2022-2026



Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2021



## 7.2 Program Prioritas

Program prioritas Walikota ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah, merupakan kebijakan umum pembangunan daerah, yang bertujuan agar program-program pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat diimplementasikan dilapangan. Oleh karena itu, program prioritas sejalan dan saling melengkapi dengan rumusan arah kebijakan sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Program prioritas disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun rumusan kebijakan umum yang akan ditempuh untuk memenuhi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2021-2026, dalam upaya mencapai Visi dan Misi serta untuk menjawab masalah daerah atau isu strategis Kota Ternate 5 Tahun ke depan dirumuskan 14 Program Prioritas, sebagai berikut:

1. Pengembangan Iklim Usaha yang Kondusif Serta Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM.
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
3. Mendorong Kemudahan Akses Pasar Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
4. Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
6. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional.
7. Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya.
8. Membangun dan Menghidupkan Entitas Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.
9. Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota yang Berkelanjutan.
10. Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif.
11. Konservasi Sumber Daya Air.
12. Literasi dan Mitigasi kebencanaan.
13. Pengembangan Kota Sebagai Pusat Informasi dan Konsolidasi Barang/Jasa.
14. Revitalisasi dan Penguatan Peran BUMD.

## 7.3 Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

### 7.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

##### 2) Program Pengelolaan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan dasar, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama dan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

**3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki Izasah Diploma Empat atau S1 atau memiliki Sertifikat, Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Izasah Diploma Empat atau S1 atau memiliki Sertifikat, Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah Pertama.

**4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengendalian Perizinan Pendidikan.

**5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Bahasa dan Sastra Daerah.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

**2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Persentase Ketercapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan, Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup), Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup), Prevalensi *Stunting* pada Balita, Jumlah Puskesmas yang direakreditasi dan Jumlah Puskesmas yang sesuai dengan standar pelayanan publik.

**3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar.

**4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar.

**5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Posyandu Aktif.

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

**2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio luas kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK *Outcome*).

**3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Indikator yang akan dicapai yaitu Presentasi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Kota Ternate.

**4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional.



- 5) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh Layanan pengolahan Air limbah domestik.
  - 6) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik.
  - 7) **Program Pengembangan Permukiman**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman.
  - 8) **Program Penataan Bangunan Gedung**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan.
  - 9) **Program Penataan Gedung dan Lingkungannya**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Terpelihara Bangunan dan Lingkungannya.
  - 10) **Program Penyelenggaraan Jalan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Panjang Jalan Kota Ternate yang Terbangun.
  - 11) **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki sertifikat Kompetensi.
  - 12) **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Pengembangan Perumahan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Kualitas Perumahan Swadaya.
  - 3) **Program Kawasan Permukiman**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.
  - 4) **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Kawasan dan Lingkungan Permukiman Kumuh yang Tertangani.
  - 5) **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.



**3) Program Penanggulangan Bencana**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

**4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

**2) Program Pemberdayaan Sosial**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PMKS yang Diberdayakan.

**3) Program Rehabilitasi Sosial**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.

**4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Terhadap Fakir Miskin.

**5) Program Penanganan Bencana**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.

**6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

**7.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

**2) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

**3) Program Penempatan Tenaga Kerja**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate.

**4) Program Hubungan Industrial**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Hubungan Industrial yang Diselesaikan.



## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

### 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

### 3) Program Perlindungan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti.

### 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga.

### 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Ketersediaan Data Gender dan Anak.

### 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA).

### 7) Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait.

## 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

### 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Infrastruktur dan Dokumen Pendukung yang Tersedia.

### 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Dengan Konsumsi Pangan B2SA yang Difasilitasi untuk Mendukung Stabilitas Harga Pangan.

### 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Informasi Daerah Rawan Pangan Serta Status Kesehatan dan Gizi.

### 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pangan Segar yang Aman.

## 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tersedianya Lahan untuk Kepentingan Pembangunan Umum.

### 2) Program Pengelolaan Tanah Kosong

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Terlaksananya Penataan dan Perlindungan Aset Tanah Pemerintah.





- 3) **Program Penatagunaan Tanah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Tanah Aset Pemerintah.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang tersedia.
  - 3) **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Kualitas air dan Indeks Kualitas Udara.
  - 4) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik.
  - 5) **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelenggaraan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbaya dan beracun (LB3).
  - 6) **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
  - 7) **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
  - 8) **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - 9) **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - 10) **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup.
  - 11) **Program Pengelolaan Persampahan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengurangan Sampah.
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.



- 2) **Program Pendaftaran Penduduk**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
  - 3) **Program Pencatatan Sipil**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
  - 4) **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Data, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Pengendalian Penduduk**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS Usia 15-49 Tahun.
  - 3) **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR*) dan Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
  - 4) **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Usia Kawin Pertama (UKP)  $\geq$  21 Tahun, Persentase Bayi Dua Tahun (Baduta) *Stunting* dan Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
8. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Fasilitas Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas.
  - 3) **Program Pengelolaan Pelayaran**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Standar Keselamatan Pelayaran.
9. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Informasi dan Komunikasi Publik**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.



**3) Program Aplikasi Informatika**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemanfaatan Aplikasi elektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat.

**10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

**2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi.

**3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi.

**4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya.

**5) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan.

**6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Jumlah Anggota yang Telah Mengikuti Pelatihan.

**7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Fasilitas Pelatihan.

**8) Program Pengembangan UMKM**

Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro.

**11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

**2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Investasi.

**3) Program Promosi Penanaman Modal**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tingkat Penanaman Modal.

**4) Program Pelayanan Penanaman Modal**

Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.

**5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelesaian Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha.



6) **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan.

12. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

2) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

3) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Pelaksanaan Even Olahraga Berprestasi di Daerah.

4) **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

13. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Indikator yang akan dicapai yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Sektoral.

14. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

15. **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

2) **Program Pengembangan Kebudayaan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kebudayaan.

3) **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kesenian Tradisional.

4) **Program Pembinaan Sejarah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah.

5) **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Indikator yang akan dicapai yaitu Terlestarikannya Cagar Budaya.

6) **Program Pengelolaan Permuseuman**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Permuseuman.



#### 16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

2) **Program Pembinaan Perpustakaan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina.

3) **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

#### 17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) **Program Pengelolaan Arsip**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Tingkat OPD.

2) **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah.

3) **Program Perijinan Penggunaan Arsip**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penerbitan Perizinan Penggunaan Arsip.

### 7.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

2) **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan.

3) **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

4) **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengawasan Usaha Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

5) **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Jumlah Peningkatan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

#### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.



- 2) **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata lama Tinggal Wisata Asing dan Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara.
  - 3) **Program Pemasaran Pariwisata**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.
  - 4) **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
  - 5) **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana dan Prasarana yang Diberikan.
  - 3) **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan.
  - 4) **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.
  - 5) **Program Penyuluhan Pertanian**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
  - 3) **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya.
  - 4) **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu dan Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.



- 5) **Program Pengembangan Ekspor**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang.
  - 6) **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera. Tera Ulang. Pengawasan dan Penyidikan Metrologi Legal yang Berkualitas.
  - 7) **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Promosi Pemasaran. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri.
  - 2) **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
  - 3) **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### 7.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. **Sekretariat Daerah**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - 3) **Program Perekonomian dan Pembangunan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan.
2. **Sekretariat DPRD**  
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
  - 2) **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.





### 7.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

##### 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Ternate yang Berkualitas dan Tepat Waktu, Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan yang Berkualitas dan Tepat Waktu dan Persentase Ketersediaan laporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Tepat Waktu.

##### 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Tepat Waktu, Persentase Ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Berkualitas dan Tepat Waktu dan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas dan Tepat Waktu.

#### 2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

##### 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

##### 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Aparatur Petugas Lapangan yang Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Persentase Jumlah Peralatan Sistem Informasi, Survei Data, Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah.

##### 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah.

##### 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Aparatur Petugas Lapangan yang Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Persentase Jumlah Peralatan Sistem Informasi, Survei Data, Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah.

#### 3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

##### 2) Program Kepegawaian Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Kepegawaian Daerah.



#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah.

#### 7.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

##### 1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

###### 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Penerbitan LHP dan Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

###### 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Pengendalian Intern Pemerintah.

#### 7.3.7 Unsur Kewilayahan

##### 1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

###### 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan.

###### 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat.

###### 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat.

###### 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

###### 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan.

#### 7.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

##### 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.



- 2) **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 3) **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Pemahaman Politik dan Pengembangan Etika Politik Serta Budaya Politik.
- 4) **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 5) **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 6) **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**  
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penurunan Tingkat Kerawanan Sosial.



**Tabel 7.1**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>																	
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				216.653.920.463	185.460.136.784	200.194.233.754	210.953.130.170	224.798.640.219	229.113.079.800	1.267.173.141.190	Dinas Pendidikan						
01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	155.656.288.463	133.244.930.384	143.830.729.354	151.560.522.014	161.507.910.464	164.607.645.058	910.408.025.737	Dinas Pendidikan						
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100	60.775.680.000	52.025.211.000	56.158.414.594	59.176.496.354	63.060.433.863	64.270.718.905	355.466.954.716	Dinas Pendidikan						
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik Pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah Diploma Empat atau S1 atau memiliki Sertifikat Jumlah Pendidik Pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah Diploma Empat atau S1 atau memiliki Sertifikat Jumlah Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar Jumlah Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama	%	100	152.320.000	130.389.000	140.747.906	148.312.021	158.046.200	161.079.496	890.894.623	Dinas Pendidikan						
01.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	69.632.000	59.606.400	64.341.900	67.799.781	72.249.692	73.636.341	407.266.114	Dinas Pendidikan						



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						435.200.000		372.540.000		402.136.875	423.748.631	451.560.572	460.227.131	2.545.413.209	Dinas Kebudayaan		
																	80	80
01.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Daerah	Persentase Penyelenggaraan Bahasa dan Sastra Daerah	%	75	372.540.000	80	435.200.000	85	402.136.875	85	423.748.631	90	451.560.572	90	460.227.131	Dinas Kebudayaan		
01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						133.553.834.461		109.396.721.906		112.966.722.500	113.978.818.750	116.294.360.000	113.451.972.000	699.642.429.617	Dinas Kesehatan		
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	48.742.058.461	100	40.798.806.800	100	42.095.797.500	100	42.397.741.250	100	43.183.160.000	42.071.202.000	259.288.766.011	Dinas Kesehatan		
																	100	100
01.02.02	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Per 1.000 kelahiran hidup	87	57.011.200.000	100	45.591.800.000	100	47.052.750.000	100	47.403.475.000	100	48.295.000.000	47.022.240.000	292.376.465.000	Dinas Kesehatan		
																	86	85
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	100	435.200.000	100	365.940.720	100	401.225.000	100	420.957.500	445.800.000	450.750.000	2.519.873.220	Dinas Kesehatan			
																100	100	100
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	50	278.528.000	65	259.004.000	70	291.800.000	75	329.445.000	371.500.000	396.650.000	1.926.937.000	Dinas Kesehatan			



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	%	75	80	478.720.000	82	407.920.656	84	437.700.000	86	457.562.500	88	482.950.000	90	486.810.000	Dinas Kesehatan	
01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					47.566.828.792		125.904.656.268		129.143.402.310		127.450.307.491		139.301.273.036		147.770.573.164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	100	100	14.558.993.255	100	23.077.434.452	100	24.909.463.578	100	26.177.259.354	100	27.853.460.452	100	28.133.551.402	Dinas PUPR	
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	Persen	55,28	55,5	5413247925	60	5338404209	65	6647015098	70	8090941709	75	9976013667	80	11786208504	Dinas PUPR	
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Kota Ternate	Persen	n/a	91,75	3.081.918.195	92	6.670.240.000	92,25	8.228.760.000	92,5	9.909.705.600	92,75	12.068.697.600	93	14.057.515.008	Dinas PUPR	
01.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Regional	Persen	5,13	5,13	522.240.000	6,41	496.720.000	7,69	536.182.500	8,97	564.998.175	10,26	602.080.763	11,54	613.636.175	Dinas PUPR	
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah domestik	Persen	n/a	89,34	3.236.147.200	89,5	5.585.954.170	89,75	5.960.285.790	90	6.555.888.381	90,25	7.294.699.070	90,5	8.071.806.755	Dinas PUPR	
01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	99,12	99,2	7.411.143.088	99,3	7.250.386.675	99,4	8.944.459.548	99,5	10.771.606.035	99,6	13.118.377.190	99,7	15.280.172.752	Dinas PUPR	
01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman	Persen	n/a	n/a	-	100	2.500.000.000	100	2.700.000.000	100	2.916.000.000	100	3.149.280.000	100	3.464.208.000	Dinas PUPR	
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi IKB yang dikeluarkan	Rekomendasi	259	241	5.310.971.904	261	5.493.297.440	265	6.114.304.250	268	5.908.193.420	272	7.834.266.300	275	10.636.257.600	Dinas PUPR	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPMD	Penasangung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Perisen	n/a	448.866.673	100	365.941.855	100	376.204.317	100	377.545.141	100	383.166.289	100	371.923.994	2.323.648.269	Dinas PUPR	
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kota Ternate Yang Terbangun	Km	319.789	7.311.360.000	319.843	63.685.350.000	319.870	55.127.130.000	319.897	55.947.900.000	319.924	54.306.360.000	304.136.030.000	Dinas PUPR			
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki sertifikat Kompetensi	Orang	-	71.714.092	20	73.725.240	20	73.988.003	20	75.089.586	20	72.886.419	367.403.340	Dinas PUPR			
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pencapaian RTRW dan Rencana Rinci Jata Ruang (RRJR) Kab/Kota	Perisen	n/a	271.940.552	50	1.296.633.375	100	967.651.989	100	977.051.673	100	998.242.119	976.046.555	Dinas PUPR			
01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				15.289.666.176		18.092.924.973		15.631.507.243		14.788.733.433		13.508.182.923	14.140.427.137	91.451.443.885	Disperkim		
01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	6.541.234.561	100	6.237.682.123	100	6.777.361.483	100	6.801.516.576	100	6.902.782.155	6.700.250.996	39.960.827.894	Disperkim		
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Jumlah Kualitas Perumahan Swadaya	Unit	779	-	1091	2.463.021.600	1500	1.631.891.500	1700	1.747.522.700	1800	1.934.029.000	2.093.643.600	9.870.108.400	Disperkim		
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Persen	61,18	304.640.000	35	283.840.000	25	291.800.000	15	256.235.000	10	222.900.000	216.360.000	1.575.775.000	Disperkim		
01.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan dan Lingkungan Perumahan Kumuh yang terintegrasi	Ha	n/a	8.443.793.615	105	3.516.443.733	165	3.158.735.000	225	2.781.980.000	285	2.749.100.000	2.654.016.000	23.304.068.349	Disperkim		
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	69,23	-	80,77	5.591.937.517	84,62	3.771.719.260	88,46	3.201.479.157	92,31	1.699.371.768	2.476.156.541	16.740.664.242	Disperkim		
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan Dan Keterlibatan Masyarakat				8.802.233.628		9.978.416.918		10.296.965.892		10.409.128.557		10.586.396.704	10.294.582.332	60.367.724.031	Satpol PP		
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	8.020.141.122	100	8.853.633.307	100	9.104.842.320	100	9.191.891.306	100	9.328.746.401	9.059.408.132	53.558.662.588	Satpol PP		





**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Peningkatan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.05.02	Program Peningkatan ketertarikan Dan ketertarikan Umum	Persentase Gangguan Transibum yang dapat diselesaikan	%	70	85	782.092.506	85	1.124.783.611	90	1.192.123.572	95	1.217.237.251	100	1.257.650.303	100	1.235.174.200	Satpol PP	
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang ketertarikan Dan ketertarikan Umum Serta Perlindungan Masyarakat					3.836.116.357	100	3.350.151.315	100	3.606.169.434	100	3.790.756.168	100	4.075.508.285	100	4.175.906.545	BPBD	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	5.573.777.608	100	5.236.604.926	100	5.375.826.038	100	5.284.064.531	100	5.443.232.089	100	5.369.471.254	BPBD	
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	100	100	3.836.116.357	100	3.350.151.315	100	3.606.169.434	100	3.790.756.168	100	4.075.508.285	100	4.175.906.545	BPBD	
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum Serta Perlindungan Masyarakat					6.040.899.975		111.73.648.659		7.398.519.360		7.540.194.062		8.456.012.071		7.421.439.752	Dinas Pemadam Kebakaran	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	5.993.027.975	100	10.225.268.259	100	7.008.236.860	100	7.101.666.162	100	7.128.271.071	100	7.040.646.152	Dinas Pemadam Kebakaran	
01.05.04	Program Pencegahan Penanggulangan. Penyelamatan. Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	94	95	47.872.000	96	948.380.400	97	390.282.500	98	438.527.900	99	1.327.741.000	100	380.793.600	Dinas Pemadam Kebakaran	
01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					11.044.070.400		11.844.749.766		13.394.615.910		13.442.355.460		13.642.494.341		13.242.216.579	Dinas Sosial	
01.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	4.532.608.000	100	7.112.782.166	100	8.043.478.085	100	8.072.145.725	100	8.132.329.291	100	7.951.962.159	Dinas Sosial	
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Diberdayakan	%	1.62	1.62	1.531.904.000	4.87	528.652.000	4.51	597.825.250	4.87	599.955.950	5.58	608.888.500	5.47	591.023.400	Dinas Sosial	
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial	%	10.69	10.69	1.490.560.000	7.04	1.435.166.000	7.08	1.622.955.125	7.36	1.628.739.475	7.36	1.652.989.250	5.26	1.604.489.700	Dinas Sosial	
01.06.05	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan jaminan Terhadap Fakir Miskin	%	1.15	1.15	2.931.072.000	0.85	1.933.660.000	1.29	2.186.676.250	1.13	2.194.469.750	1.57	2.227.142.500	1.36	2.161.797.000	Dinas Sosial	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tenggang Daurat Bencana Daerah	%	0.10	435.200.000	0.08	663.476.000	0.07	750.290.750	0.08	752.964.850	0.08	764.175.500	0.08	741.754.200	4.107.861.300	Dinas Sosial	
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Penjelenggaraan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	16.67	122.726.400	16.67	171.013.600	16.67	193.390.450	16.67	194.079.710	16.67	196.969.300	16.67	191.190.120	1.069.369.580	Dinas Sosial	
2	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>																	
02.07	Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja				14.110.265.927		11.772.571.486		12.465.331.231		12.812.848.131		12.947.889.480		12.971.899.841	77.080.806.096	Dinas Tenaga Kerja	
02.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.002.203.015	100	3.338.638.426	100	3.614.325.968	100	3.787.537.633	100	3.795.634.055	100	3.792.484.271	22.330.823.368	Dinas Tenaga Kerja	
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	100	3.238.256.832	100	2.657.313.400	100	2.757.710.613	100	2.793.162.828	100	2.860.754.325	100	2.798.454.330	17.104.212.068	Dinas Tenaga Kerja	
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate	%	100	4.619.822.080	100	3.894.071.920	100	4.109.054.650	100	4.189.586.670	100	4.170.236.100	100	4.260.633.240	25.243.406.660	Dinas Tenaga Kerja	
02.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	%	100	2.249.984.000	100	1.883.988.000	100	1.984.240.000	100	2.042.559.000	100	2.121.265.000	100	2.120.328.000	12.402.364.000	Dinas Tenaga Kerja	
02.08	Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				7.203.945.677		6.339.398.225		6.609.766.790		6.607.620.529		6.876.889.253		6.631.564.537	40.269.185.011	DPPPA	
02.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.914.776.269	100	3.840.463.059	100	4.026.840.000	100	4.114.402.000	100	4.249.960.000	100	4.110.840.000	25.257.281.328	DPPPA	
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekspira (APE)	Kategori	0	47.872.000	Pratama	119.716.616	Madya	125.073.945	Madya	130.833.591	Utama	140.211.530	Utama	1081.800.000	669.887.682	DPPPA	
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Tindak Kekenangan terhadap Perempuan yang Ditindak lanjut	%	100	161.024.000	100	146.660.128	100	158.068.060	100	165.952.428	100	175.853.240	100	162.270.000	969.827.856	DPPPA	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.06.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	1.327.360.000	100	1.394.442.056	100	1.435.547.745	100	1.317.790.000	100	1.411.700.000	100	1.370.280.000	8.255.109.801	DPPPA	
02.06.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Ketersediaan Data Gender dan Anak	Profil	2	87.040.000	2	106.440.000	2	109.425.000	2	109.815.000	2	111.450.000	2	108.180.000	632.350.000	DPPPA	
02.06.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	0	335.121.408	700	454.272.438	750	467.012.040	800	468.676.510	800	475.654.483	800	461.698.537	2.662.435.416	DPPPA	
02.06.07	Program Pelembagaan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	%	100	330.752.000	100	277.403.928	100	291.800.000	100	300.161.000	100	312.060.000	100	310.115.000	1.822.292.928	DPPPA	
02.09	Usuran Pemerintah Bidang Pangan				5.806.827.470		5.653.103.618		6.835.668.137		7.495.239.800		8.172.479.900		8.267.836.800	42.231.155.723	Dinas Ketahanan Pangan	
02.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	3.777.994.701	100	3.542.043.618	100	4.187.583.137	100	4.392.600.000	100	4.569.450.000	100	4.507.500.000	24.977.171.455	Dinas Ketahanan Pangan	
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur dan Dokumen Pendukung yang Tersedia	%	100	217.600.000	100	319.320.000	100	382.987.500	100	402.655.000	100	427.225.000	100	432.720.000	2.182.507.500	Dinas Ketahanan Pangan	
02.09.03	Program Peningkatan DIVERSIFIKASI Pangan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Dengan Konsumsi Pangan B2SA yang Difasilitasi Untuk Mendukung Stabilitas Harga Pangan	%	100	1.489.443.277	100	1.419.200.000	100	1.823.750.000	100	2.196.300.000	100	2.600.500.000	100	2.704.500.000	12.233.693.277	Dinas Ketahanan Pangan	
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Informasi Daerah Rawan Pangan Serta Status Kesehatan dan Gizi	%	100	103.628.954	100	159.660.000	100	200.612.500	100	237.932.500	100	278.625.000	100	306.510.000	1.286.968.954	Dinas Ketahanan Pangan	
02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	%	100	218.160.538	100	212.880.000	100	240.735.000	100	265.752.300	100	296.679.900	100	316.606.800	1.550.814.538	Dinas Ketahanan Pangan	
02.10	Usuran Pemerintah Bidang Pertahanan				5.222.400.000		7.787.860.000		7.805.650.000		5.362.632.500		5.442.475.000		4.976.280.000	36.597.297.500	Disperkim	
02.10.05	Program Penyelesaian Dan Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Tersedianya Lahan Untuk Kerentanan Pembangunan Umum	%	n/a	5.222.400.000	16,7	4.328.560.000	16,7	4.449.950.000	16,7	4.465.810.000	16,7	4.532.300.000	16,7	4.399.320.000	27.398.340.000	Disperkim	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Penataan dan Perilindungan Aset Tanah Pemerintah	%	n/a	-	-	20	2.661.000.000	20	2.735.625.000	20	274.537.500	20	278.625.000	20	270.450.000	Disperkim	
02.10.10	Program Penebangan Tanah	Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Tanah Aset Pemerintah	Bidang & Kel	n/a	-	-	407 Bid & 8 Kel	798.300.000	307 Bid & 8 Kel	620.075.000	307 Bid & 8 Kel	622.285.000	307 Bid & 8 Kel	631.550.000	156 Bid & 6 Kel	306.510.000	Disperkim	
02.11	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup				21.627.781.409	23.120.339.906		23.120.339.906		23.405.362.038		23.968.306.092		24.607.854.627		24.120.237.587	Dinas Lingkungan Hidup	
02.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemerintah Daerah	%	100	7.092.540.134	7.963.814.687	100	7.963.814.687	100	7.454.004.154	100	7.623.330.212	100	7.811.493.691	100	7.582.290.765	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang tersedia	%	0	217.600.000	496.720.000	2	496.720.000	2	510.650.000	2	512.470.000	1	445.800.000	1	432.720.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Darat/ Air/ Kesusaham Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air	Indeks	-	56.21	56.31	56.41	56.51	56.61	56.71	56.81	56.91	57.01	57.11	57.21	57.31	Dinas Lingkungan Hidup	
					91.7	91.81	91.92	92.02	92.14	92.25	92.35	92.45	92.55	92.65	92.75	92.85	92.95	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.04	Program Pengendalian Kelembagaan Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	12,6	1.576.036.152	1.953.954.560	13	1.953.954.560	14	2.010.137.250	14,4	2.024.622.550	15	2.054.766.500	15	2.066.598.600	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penyelenggaraan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan beracun (LB3) beracun (LB3)	%	n/a	-	35.480.000	100	35.480.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.450.000	100	180.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	87.040.000	248.360.000	100	248.360.000	100	328.275.000	100	402.655.000	100	482.950.000	100	486.810.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	%	0	-	70.960.000	02,06	70.960.000	02,06	72.950.000	4	146.420.000	4	148.600.000	4	144.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	0	100	26.112.000	100	120.632.000	100	145.900.000	100	256.235.000	100	334.350.000	100	324.540.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					100	34.816.000	100	70.960.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.450.000	100	108.180.000		
02.11.09	Program Peningkatan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	0	100	34.816.000	100	70.960.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.450.000	100	108.180.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					100	34.816.000	100	70.960.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	111.450.000	100	108.180.000		
02.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	%	9,2	13,8	87.040.000	16,2	212.880.000	18,5	291.800.000	23,1	371.500.000	23,1	360.600.000	23,1	360.600.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					9,4	12.310.571.23	9,51	11.435.666.659	9,62	11.847.555.634	9,73	11.926.386.330	9,84	12.178.254.436	9,95	11.893.058.222		
02.11.11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	%	9,4	9,4	12.310.571.23	9,51	11.435.666.659	9,62	11.847.555.634	9,73	11.926.386.330	9,84	12.178.254.436	9,95	11.893.058.222	Dinas Lingkungan Hidup	
					9,4	12.310.571.23	9,51	11.435.666.659	9,62	11.847.555.634	9,73	11.926.386.330	9,84	12.178.254.436	9,95	11.893.058.222		
02.12	Ususan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	4.482.499.773	100	3.996.238.641	100	4.516.951.434	100	4.987.819.456	100	5.561.974.134	100	5.936.497.666	Dinas Kependudukan dan Capil	
					100	4.482.499.773	100	3.996.238.641	100	4.516.951.434	100	4.987.819.456	100	5.561.974.134	100	5.936.497.666		
02.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	85	100	13.712.412	70	106.440.000	75	109.425.000	80	109.815.000	85	111.450.000	90	108.180.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
					100	13.712.412	70	106.440.000	75	109.425.000	80	109.815.000	85	111.450.000	90	108.180.000		
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	85	100	13.712.412	70	106.440.000	75	109.425.000	80	109.815.000	85	111.450.000	90	108.180.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
					100	13.712.412	70	106.440.000	75	109.425.000	80	109.815.000	85	111.450.000	90	108.180.000		
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	89	87,50	52.224.000	80	1.777.400.000	82	189.670.000	85	197.667.000	87	208.040.000	90	216.360.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
					87,50	52.224.000	80	1.777.400.000	82	189.670.000	85	197.667.000	87	208.040.000	90	216.360.000		
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data, Penyajian Data dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	93	80	1.564.532.241	90	1.349.575.000	90	1.349.575.000	90	1.361.706.000	90	1.389.410.000	95	1.370.280.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
					80	1.564.532.241	90	1.349.575.000	90	1.349.575.000	90	1.361.706.000	90	1.389.410.000	95	1.370.280.000		
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berbasisakan Pelembagaan Kejasama	%	23	23	1.564.532.241	78	1.277.280.000	85	1.349.575.000	93	1.361.706.000	100	1.389.410.000	100	1.370.280.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
					23	1.564.532.241	78	1.277.280.000	85	1.349.575.000	93	1.361.706.000	100	1.389.410.000	100	1.370.280.000		





Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.16	Usuran Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika				8.256.080.941	10.510.062.368	11.239.662.967	11.738.287.895	12.402.243.330	12.557.632.745					66.683.970.186	Diskonsand		
02.16.01	Program Penjangk Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	3.128.803.168	3.128.803.168	3.377.374.587	3.558.882.429	3.792.462.932	3.865.249.656	100	100	100	100	21.300.453.733	Diskonsand		
02.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan Publik Dan Layanan Administrasi Yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	70	2.378.579.200	2.378.579.200	2.616.453.880	2.809.583.684	3.051.013.693	3.168.800.069	80	85	90	90	15.460.590.526	Diskonsand		
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemantauan Aplikasi elektronik dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	%	40	3.242.240.000	5.002.680.000	5.245.834.500	5.369.821.722	5.558.766.685	5.503.583.020	60	65	70	75	29.922.925.927	Diskonsand		
02.17	Usuran Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				4.656.640.000	10.360.372.880	7.674.084.675	8.360.801.630	8.485.282.900	8.596.920.360					48.134.102.445	Dinas Koperasi dan UKM		
02.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	2.611.200.000	7.592.932.880	4.500.759.675	4.773.511.630	4.844.582.900	4.702.440.360	100	100	100	100	29.025.427.445	Dinas Koperasi dan UKM		
02.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Pemertoran Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan Untuk Koperasi	%	100	261.120.000	354.800.000	419.462.500	366.050.000	371.500.000	360.600.000	100	100	100	100	2.133.532.500	Dinas Koperasi dan UKM		
02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Fasilitas Penertiban Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	%	100	304.640.000	212.880.000	218.850.000	219.630.000	222.900.000	216.360.000	100	100	100	100	1.395.260.000	Dinas Koperasi dan UKM		
02.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Ditinjau Keseluruhannya	%	100	217.600.000	425.760.000	437.700.000	439.260.000	445.800.000	432.720.000	100	100	100	100	2.398.840.000	Dinas Koperasi dan UKM		
02.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	%	100	348.160.000	283.840.000	218.850.000	292.840.000	297.200.000	288.480.000	100	100	100	100	1.729.370.000	Dinas Koperasi dan UKM		
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perindungan Koperasi	Persentase Jumlah Anggota Yang Telah Mengikuti Pelatihan	%	100	217.600.000	354.800.000	291.800.000	366.050.000	371.500.000	360.600.000	100	100	100	100	1.962.350.000	Dinas Koperasi dan UKM		





Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	%	100	261.120.000	100	425.760.000	100	492.412.500	100	439.260.000	100	445.800.000	100	432.720.000	100	432.720.000	Dinas Koperasi dan UKM
02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Mirasaha baru yang berskala Mikro	%	100	435.200.000	100	709.600.000	100	1.094.250.000	100	1.464.200.000	100	1.486.000.000	100	1.803.000.000	100	1.803.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				6.713.564.646		6.473.464.142		7.597.884.516		8.573.582.597		9.561.068.644		10.212.693.002		49.132.257.547	DPMPPTSP
02.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.172.956.646	100	5.035.104.942	100	5.987.878.016	100	6.820.203.097	100	7.744.433.644	100	8.315.937.002	100	8.315.937.002	DPMPPTSP
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	304.640.000	55	283.840.000	60	328.275.000	65	366.050.000	70	371.500.000	75	396.660.000	75	2.050.965.000	DPMPPTSP
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	%	50	304.640.000	50	283.840.000	55	328.275.000	60	366.050.000	65	371.500.000	75	360.600.000	75	2.014.905.000	DPMPPTSP
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kenyamanan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	3,46	304.640.000	3,5 skala 4	283.840.000	3,5 skala 4	306.390.000	3,5 skala 4	329.445.000	3,5 skala 4	349.210.000	3,5 skala 4	360.600.000	3,5 skala 4	1.934.125.000	DPMPPTSP
02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha	%	n/a	409.088.000	50	338.479.200	45	355.266.500	38	362.389.500	35	390.075.000	25	418.296.000	25	2.273.594.200	DPMPPTSP
02.18.06	Program Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100	217.600.000	100	248.360.000	100	291.800.000	100	329.445.000	100	334.350.000	100	360.600.000	100	1.782.155.000	DPMPPTSP
02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga				9.790.525.642		10.530.279.592		11.170.279.172		11.468.156.245		11.773.756.412		11.831.098.578		66.564.095.641	Dinas Pemuda dan Olah Raga
02.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.354.762.681	100	3.693.988.367	100	3.872.356.211	100	3.961.197.867	100	4.088.902.360	100	4.042.854.874	100	24.014.062.360	Dinas Pemuda dan Olah Raga
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	1.080.148.992	100	2.135.896.000	100	2.301.572.500	100	2.397.627.500	100	2.563.350.000	100	2.578.290.000	100	13.056.884.992	Dinas Pemuda dan Olah Raga



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPKMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPKMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	Jumlah Pelaksanaan Even Olahraga Berprestasi Di Daerah	%	100	3.702.813.969	100	4.239.155.225	100	4.485.700.461	100	4.560.255.878	100	4.527.104.052	100	4.596.933.704	26.111.963.289	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	0	652.800.000	80	461.240.000	85	510.650.000	85	549.075.000	90	594.400.000	90	613.020.000	3.381.185.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				243.712.000		808.944.000		881.527.800		937.749.818		1.008.814.372		1.037.968.157	4.918.716.148	Diskomsandi	
02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Sektor	%	70	243.712.000	73	808.944.000	76	881.527.800	79	937.749.818	82	1.008.814.372	85	1.037.968.157	4.918.716.148	Diskomsandi	
02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				413.440.000		354.800.000		382.987.500		403.570.125		430.057.688		438.311.554	2.423.166.866	Diskomsandi	
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	30	413.440.000	53	354.800.000	55	382.987.500	58	403.570.125	61	430.057.688	64	438.311.554	2.423.166.866	Diskomsandi	
02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				8.268.800.000		7.078.260.000		7.640.600.626		8.051.223.996		8.579.650.867		8.466.179.218	48.086.714.707	Dinas Kebudayaan	
02.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.396.480.000	100	4.619.496.000	100	4.986.497.250	100	5.254.483.028	100	5.599.351.092	100	5.430.680.151	31.286.987.521	Dinas Kebudayaan	
02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kebudayaan	%	75	1.784.320.000	80	1.527.414.000	80	1.648.761.188	85	1.737.369.389	90	1.851.398.345	90	1.886.931.239	10.436.194.161	Dinas Kebudayaan	
02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	75	261.120.000	85	223.524.000	85	241.282.125	90	254.249.179	90	270.936.343	90	276.136.278	1.527.247.925	Dinas Kebudayaan	
02.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah	%	75	261.120.000	85	223.524.000	85	241.282.125	90	254.249.179	90	270.936.343	90	276.136.279	1.527.247.926	Dinas Kebudayaan	
02.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	75	304.640.000	85	260.778.000	85	281.495.813	90	296.624.042	90	316.092.401	90	322.158.992	1.781.789.248	Dinas Kebudayaan	
02.22.06	Program Pengelolaan Permusuman	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Permusuman	%	75	261.120.000	85	223.524.000	85	241.282.125	90	254.249.179	90	270.936.343	90	276.136.279	1.527.247.926	Dinas Kebudayaan	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
02.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				4.965.766.976	4.470.480.000	4.887.650.000	5.161.305.000	5.498.200.000	5.625.360.000							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Urusan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.117.128.976	3.548.000.000	3.829.875.000	4.026.550.000	4.272.250.000	4.327.200.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina	%	100	826.880.000	709.600.000	802.450.000	841.915.000	891.600.000	937.560.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	%	100	21.760.000	212.880.000	255.935.000	292.840.000	334.350.000	360.600.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				809.472.000	759.272.000	868.105.000	951.730.000	1.077.350.000	1.153.920.000							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Tingkat OPD	%	100	330.752.000	298.032.000	342.865.000	366.050.000	408.650.000	432.720.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	%	100	348.160.000	319.320.000	342.865.000	366.050.000	408.650.000	432.720.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
02.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Perizinan Penetapan Penggunaan Arsip	%	100	130.560.000	141.920.000	182.375.000	219.630.000	260.050.000	288.480.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
3	<b>Usuran Pemerintahan Pilihan</b>																	
03.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				11.354.470.728	20.229.170.755	21.307.801.769	21.677.352.375	21.472.101.742	20.640.907.790							Dinas Kelautan dan Perikanan	
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Urusan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.222.276.493	4.823.045.155	4.958.302.481	4.975.974.293	5.050.059.964	4.901.888.622	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan	
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	100	2.535.682.608	5.795.658.000	6.119.137.188	6.258.462.089	5.642.773.869	5.146.045.973	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	%	100	2.143.973.101	5.795.658.000	6.131.447.500	6.226.510.500	6.244.915.000	6.061.686.000	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan	



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%		100	148.596.472	100	999.116.800	100	1.129.849.600	100	1.247.264.128	100	1.392.417.664	100	1.486.719.759	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Kecil	%		100	64.980.191	100	333.512.000	100	377.151.500	100	380.692.000	100	408.650.000	100	432.720.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
03.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan Usaha Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%		100	192.923.838	100	234.168.000	100	264.808.500	100	271.096.630	100	297.370.890	100	311.219.436	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Dan Pemasaran hasil Perikanan	%		100	674.720.937	100	1.857.732.800	100	1.918.585.000	100	1.907.376.735	100	2.019.834.355	100	1.896.756.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%		100	371.417.088	100	390.280.000	100	408.520.000	100	409.976.000	100	416.080.000	100	403.872.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				24.637.455.360		20.044.048.493		22.699.729.936		22.177.950.388		21.619.816.832		21.694.658.662	Dinas Pariwisata	
03.26.01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		100	3.390.643.200	100	2.080.547.200	100	3.715.343.500	100	2.551.368.500	100	2.649.537.999	100	2.478.403.800	Dinas Pariwisata	
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari		2	1.653.760.000	2	1.383.720.000	3	1.422.525.000	3	1.464.200.000	3	1.486.000.000	4	1.587.240.000	Dinas Pariwisata	
03.26.02	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari		2	5.638.451.200	2	4.860.760.000	3	5.150.270.000	3	5.315.046.000	4	4.034.490.000	4	4.160.724.000	Dinas Pariwisata	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang		1000	1.582.735.360	1100	1.316.143.373	1200	1.380.114.321	1300	1.426.584.160	1400	1.491.258.833	1500	1.490.929.672	Dinas Pariwisata	
03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang		10.000	8.225.280.000	11.000	6.853.316.800	12.000	7.199.916.970	13.000	7.383.267.448	14.000	7.656.060.871	15.000	7.592.317.103	Dinas Pariwisata	
		Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%		100	2.001.920.000	100	1.713.684.000	100	1.849.829.625	100	1.949.243.704	100	2.077.178.631	100	2.117.044.804	Dinas Pariwisata	
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang		300	2.144.665.600	350	1.835.877.120	400	1.981.730.520	450	2.088.240.576	500	2.225.290.498	550	2.267.999.303	Dinas Pariwisata	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
03.27	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian				3.427.876.301	3.086.760.000	3.136.850.000	3.038.215.000	3.083.450.000	2.776.620.000					18.549.771.301	Dinas Pertanian		
03.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		1.786.674.432	1.454.680.000	1.495.475.000	1.500.805.000	1.523.150.000	1.478.460.000	100	100	100	100	9.239.244.432	Dinas Pertanian		
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Diberikan	%		869.592.269	1.064.400.000	1.094.250.000	951.730.000	965.900.000	721.200.000	100	100	100	100	5.667.072.269	Dinas Pertanian		
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan	%		572.375.040	354.800.000	291.800.000	292.840.000	297.200.000	288.480.000	100	100	100	100	2.097.495.040	Dinas Pertanian		
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	%		86.169.600	70.960.000	72.950.000	73.210.000	74.300.000	72.120.000	100	100	100	100	449.709.600	Dinas Pertanian		
03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian	%		113.064.960	141.920.000	182.375.000	219.630.000	222.900.000	216.360.000	100	100	100	100	1.096.249.960	Dinas Pertanian		
03.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				14.288.312.704	11.795.241.191	12.182.371.720	12.287.991.301	12.540.382.549	12.246.583.443					75.340.882.908	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
03.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%		13.623.570.100	11.050.283.176	11.363.062.317	11.406.746.428	11.625.133.663	11.244.163.323	100	100	100	100	70.312.959.007	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
03.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		215.789.900	235.904.824	243.647.434	245.759.826	205.807.651	244.931.669	100	100	100	100	1.391.841.304	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	%		173.940.397	155.986.806	176.397.423	194.728.732	217.390.784	232.113.669	100	100	100	100	1.150.557.811	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
03.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perseentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%		100	85.895.706	100	76.976.009	100	87.048.195	100	96.094.286	100	107.277.508	100	114.542.918	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Perseentase Pemeliharaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	%		100	56.551.629	100	50.714.544	100	57.350.460	100	69.310.348	100	70.678.250	100	75.464.966	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Perseentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Daigang	%		100	-	106.440.000	100	120.367.500	100	132.876.150	100	148.339.950	100	158.386.338	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
03.30.06	Program Standarisasi Dan Perindugan Kosumen	Perseentase Ketersediaan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, Pengawasan dan Penyidikan Metrologi Legal Yang Berkualitas	%		100	102.163.975	100	91.618.925	100	103.607.111	100	114.374.014	100	127.684.580	100	136.332.074	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Perseentase Ketersediaan Pelaksanaan Promosi Pemasaran, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%		100	30.460.997	100	27.315.907	100	30.891.280	100	34.101.517	100	38.070.163	100	40.648.486	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					147.672.064		629.149.810		649.465.534		694.995.312		753.587.160		782.988.180	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perseentase Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	%		100	147.672.064	100	132.429.810	100	149.758.034	100	165.320.962	100	184.560.610	100	197.060.058	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Perseentase Ketersediaan Penerbitan IUI, IPU, IUKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%		100	-	248.360.000	100	280.857.500	100	310.044.350	100	346.126.550	100	369.568.122	100	1.554.956.522	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perseentase Ketersediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%		100	-	248.360.000	100	218.850.000	100	219.630.000	100	222.900.000	100	216.360.000	100	1.126.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Pemanangung	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>																		
04.01	Unsur Sekretariat Daerah																	Sekretariat Daerah	
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	38.887.731.200	100	31.703.508.800	100	32.592.601.000	100	30.732.093.800	100	32.675.654.000	100	31.716.933.600	100	198.308.522.400	Sekretariat Daerah	
04.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	10.375.168.000	100	8.458.432.000	100	8.695.640.000	100	10.037.823.100	100	10.298.723.000	100	9.996.553.200	100	57.862.339.300	Sekretariat Daerah	
04.01.03	Program Perkonomian Dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perikonomian dan Pembangunan	%02.	100	2.263.040.000	100	1.844.960.000	100	1.896.700.000	100	2.049.880.000	100	2.154.700.000	100	2.091.480.000	100	12.300.760.000	Sekretariat Daerah	
04.02	Unsur Sekretariat DPRD																	Sekretariat DPRD	
04.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	42.088.577.090	100	47.055.152.153	100	44.383.811.760	100	51.220.394.746	100	35.928.093.725	100	58.026.459.492	100	278.702.488.965	Sekretariat DPRD	
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	IKM	90	8.599.260.808	90	14.078.855.642	90	16.644.735.015	90	19.209.667.006	90	22.420.024.550	90	25.026.540.999	90	105.979.084.021	Sekretariat DPRD	
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>																		
05.01	Unsur Perencanaan																		Bappeditbangda
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.396.480.000	100	4.475.802.000	100	4.679.742.500	100	4.775.305.275	100	4.926.090.000	100	4.859.085.000	100	29.112.504.775	100	Bappeditbangda
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Ternate yang Baik/kuualitas dan Tepat waktu	%	100	1.218.560.000	100	1.028.920.000	100	1.094.250.000	100	1.134.755.000	100	1.188.800.000	100	1.189.980.000	100	6.855.265.000	100	Bappeditbangda
05.01.02	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan yang Baik/kuualitas dan tepat waktu	%	100	348.160.000	100	319.320.000	100	364.750.000	100	402.655.000	100	445.800.000	100	468.780.000	100	2.349.465.000	100	Bappeditbangda
		Persentase Ketersediaan laporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik/kuualitas dan Tepat Waktu	%	100	696.320.000	100	567.680.000	100	620.075.000	100	622.285.000	100	668.700.000	100	649.080.000	100	3.824.140.000	100	Bappeditbangda





**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen	%	100	696.320.000	100	567.680.000	100	622.285.000	100	622.285.000	100	668.700.000	100	649.080.000	3.824.140.000	Bappellitbangda	
		Persentase Ketersediaan dokumen	%	100	565.760.000	100	461.240.000	100	512.470.000	100	512.470.000	100	557.250.000	100	540.900.000	3.148.270.000	Bappellitbangda	
		Persentase Ketersediaan Dokumen	%	100	609.280.000	100	496.720.000	100	549.075.000	100	549.075.000	100	594.400.000	100	576.960.000	3.373.560.000	Bappellitbangda	
05.02	Unsur Keuangan			32.462.857.284	28.318.173.915	31.150.190.842	33.449.497.664	36.323.842.560	199.827.932.118	BP2RD								
05.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	9.405.858.323	100	8.204.968.819	100	9.691.729.636	100	9.691.729.636	100	10.524.548.529	100	11.328.077.235	58.180.706.057	BP2RD	
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemeintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	22.608.204.755	100	19.721.710.525	100	23.295.333.665	100	23.295.333.665	100	25.297.122.274	100	26.273.734.192	138.890.125.951	BP2RD	
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	448.794.206	100	391.494.571	100	462.434.363	100	462.434.363	100	502.171.757	100	521.558.426	2.757.100.110	BP2RD	
05.02	Unsur Keuangan			15.418.292.378	13.163.080.000	13.752.534.000	14.321.340.200	14.894.921.000	86.414.099.578	BP2RD								
05.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	13.021.336.976	100	11.193.940.000	100	12.161.645.200	100	12.161.645.200	100	12.679.295.000	100	12.703.938.000	73.402.975.176	BP2RD	
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Aparatur Petugas Lapangan yang Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	1.526.561.112	100	1.252.444.000	100	1.339.743.000	100	1.339.743.000	100	1.378.265.000	100	1.345.038.000	81.404.561.112	BP2RD	
		Persentase Jumlah Pegawai Sistem Informasi, Survei Data, Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah	%	100	870.394.290	100	716.696.000	100	819.952.000	100	819.952.000	100	837.361.000	100	814.495.000	4.870.563.290	BP2RD	



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
05.03	Unsur Kepegawaian				24.727.758.614	25.238.973.471	25.852.788.918	26.036.974.569	25.933.139.694	25.557.788.981	153.347.424.247	BKPSDMD						
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Urusan Kegiatan Peringkat Daerah	%	100	20.971.853.285	17.626.753.618	18.027.092.212	18.183.386.414	17.962.622.006	17.821.130.359	110.592.837.894	BKPSDMD						
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Kepegawaian Daerah	%	100	3.755.905.329	7.612.219.853	7.825.696.706	7.853.588.155	7.970.517.688	7.736.658.622	42.754.586.353	BKPSDMD						
05.05	Unsur Penelitian Dan Pengembangan				783.360.000	674.120.000	747.737.500	787.007.500	854.450.000	865.440.000	4.712.115.000	Bappeitbangda						
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	522.240.000	461.240.000	510.650.000	549.075.000	594.400.000	613.020.000	3.250.625.000	Bappeitbangda						
6	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	n/a	261.120.000	212.880.000	237.087.500	237.932.500	260.050.000	252.420.000	1.461.490.000	Bappeitbangda						
06.01	Inspektorat Daerah				7.404.707.650	6.952.093.120	7.829.577.600	8.240.517.600	8.204.577.500	8.019.022.800	46.650.496.270	Inspektorat						
06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Peringkat Daerah	%	100	5.214.044.152	4.919.089.120	5.597.307.600	5.908.779.100	5.826.977.500	5.653.486.800	33.119.684.272	Inspektorat						
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan LHP dan Tidak Lanjut Rekomendasi TLHP	%	100	2.138.918.218	1.958.496.000	2.148.377.500	2.243.886.500	2.284.725.000	2.268.174.000	13.042.577.218	Inspektorat						
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Perumusan Dan Asistensi	Meningkatnya Pengendalian Intern Pemerintah	%	70	51.745.280	74.508.000	83.892.500	87.852.000	92.875.000	97.362.000	488.234.780	Inspektorat						
7	<b>Unsur Kewilayahan</b>																	
07.01	Kecamatan				14.096.129.618	11.926.004.508	13.034.706.000	15.352.137.000	16.962.690.000	17.318.896.800	88.690.563.926	Kec. Ternate Utara						
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Peringkat Daerah	%	100	9.245.762.757	8.009.012.508	8.187.178.500	9.663.720.000	10.353.705.000	10.092.472.800	55.551.851.565	Kec. Ternate Utara						
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	71.825.347	86.700.000	109.425.000	128.117.500	148.600.000	162.270.000	708.937.847	Kec. Ternate Utara						



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	3817.445.851	100	2.923.552.000	100	3.749.630.000	100	4.509.736.000	100	5.334.740.000	100	5.906.628.000	100	26.241.731.851	Kec. Ternate Utara
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	85	-	100	14.192.000	100	21.885.000	100	29.284.000	100	37.150.000	100	43.272.000	100	1.457.783.000	Kec. Ternate Utara
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	67.020.783	100	109.988.000	100	127.662.500	100	142.759.500	100	159.745.000	100	176.694.000	100	783.869.783	Kec. Ternate Utara
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	894.074.880	100	780.560.000	100	838.925.000	100	878.520.000	100	928.750.000	100	937.560.000	100	5.258.389.880	Kec. Ternate Utara
07.01	Kecamatan				1.9530.251.129		16.660.448.344		16.665.427.500		16.724.824.500		16.984.980.000		16.486.632.000		103.052.563.473	Kec. Ternate Tengah
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	11.962.157.945	100	10.486.928.344	100	10.315.130.000	100	10.351.894.000	100	10.506.020.000	100	10.197.768.000	100	63.819.898.289	Kec. Ternate Tengah
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	65.245.184	90	56.768.000	95	58.360.000	100	58.568.000	100	63.155.000	100	61.302.000	100	363.398.184	Kec. Ternate Tengah
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	63.119.104.000	100	5.151.696.000	100	5.299.817.500	100	5.318.706.500	100	5.397.895.000	100	5.239.518.000	100	32.726.737.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	17.408.000	100	14.192.000	100	14.590.000	100	14.642.000	100	18.575.000	100	180.300.000	100	97.437.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	130.560.000	100	106.440.000	100	109.425.000	100	109.815.000	100	115.165.000	100	111.786.000	100	683.191.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	1.035.776.000	100	844.424.000	100	868.105.000	100	871.199.000	100	884.170.000	100	858.228.000	100	5.361.902.000	Kec. Ternate Tengah
07.01	Kecamatan				1.7353.970.127		14.657.102.353		15.094.814.000		15.196.690.207		15.440.357.300		14.988.302.940		92.731.236.927	Kec. Ternate Selatan
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	12.609.192.166	100	10.778.824.000	100	11.107.367.000	100	11.187.220.100	100	11.353.783.000	100	11.020.657.200	100	68.057.043.466	Kec. Ternate Selatan



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	90	82.650.877	95	65.283.200	97	68.208.250	100	69.549.500	100	70.585.000	100	68.514.000	424.790.827	Kec. Ternate Selatan
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100	3.291.574.851	100	2.694.954.360	100	2.770.641.000	100	2.785.911.377	100	2.845.690.000	100	2.762.196.000	17.150.967.588	Kec. Ternate Selatan
07.01.04	Program Koordinasi Kententaman Dan Keterlibatan Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	100	12.995.072	100	10.608.520	100	10.942.500	100	10.981.500	100	11.145.000	100	10.818.000	67.490.592	Kec. Ternate Selatan
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	204.451.241	100	167.283.233	100	171.067.750	100	172.629.180	100	174.270.650	100	170.095.020	1.059.797.074	Kec. Ternate Selatan
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	100	1.153.105.920	100	940.149.040	100	966.587.500	100	970.398.550	100	984.883.650	100	956.022.720	5.971.147.380	Kec. Ternate Selatan
07.01	Kecamatan					10.328.713.976		8.560.149.476		8.834.969.119		8.918.436.800		9.038.589.520		8.779.554.613	54.460.413.504	Kec. Pulau Ternate
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	7.662.513.218	100	6.576.310.254	100	6.804.249.173	100	6.829.964.295	100	6.933.882.423	100	6.730.438.767	41.537.358.130	Kec. Pulau Ternate
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	100	29.729.478	100	48.252.800	100	48.876.500	100	49.050.700	100	50.524.000	100	41.829.600	268.263.078	Kec. Pulau Ternate
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100	2.323.436.760	100	1.634.006.422	100	1.694.420.446	100	1.715.101.505	100	1.748.067.097	100	1.703.989.913	10.819.022.143	Kec. Pulau Ternate
07.01.04	Program Koordinasi Kententaman Dan Keterlibatan Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	100	8.703.634	100	14.192.000	100	17.508.000	100	16.838.300	100	18.575.000	100	19.472.400	95.289.334	Kec. Pulau Ternate
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	65.157.535	100	85.152.000	100	58.360.000	100	91.512.500	100	66.870.000	100	155.058.000	522.110.035	Kec. Pulau Ternate
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	100	239.173.351	100	202.236.000	100	211.555.000	100	215.969.500	100	220.671.000	100	128.765.933	1.218.370.784	Kec. Pulau Ternate



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01	Kecamatan				8.449.074.591	7.370.023.865	7.621.289.950	7.674.076.375	7.788.333.215	7.559.819.535	46.462.617.531	Kec. Ternate Barat						
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.482.975.443	4.749.794.313	4.892.480.895	4.917.239.113	4.990.450.295	4.844.027.931	29.876.967.990	Kec. Ternate Barat						
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	731.100.368	125.599.200	129.121.500	129.581.700	131.511.000	127.652.400	716.566.168	Kec. Ternate Barat						
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	2.508.945.851	2.165.943.632	2.250.840.655	2.258.862.842	2.292.494.320	2.225.231.364	13.702.318.664	Kec. Ternate Barat						
07.01.04	Program Koordinasi Kententaman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	85	43.520.000	42.576.000	51.065.000	51.247.000	52.010.000	50.484.000	290.902.000	Kec. Ternate Barat						
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	94.035.649	85.152.000	91.187.500	109.815.000	111.450.000	108.180.000	599.820.149	Kec. Ternate Barat						
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	246.497.280	200.958.720	206.594.400	207.330.720	210.417.600	204.243.840	1.276.042.560	Kec. Ternate Barat						
07.01	Kecamatan				7.779.944.030	7.737.202.869	7.458.455.720	7.411.828.290	7.522.180.603	7.337.535.977	45.247.147.489	Kec. Pulau Hiri						
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	5.150.925.949	5.145.479.272	4.791.214.925	4.735.081.222	4.805.580.314	4.700.642.130	29.328.923.812	Kec. Pulau Hiri						
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	14.989.968	12.895.135	14.590.000	14.642.000	14.860.000	14.424.000	86.401.103	Kec. Pulau Hiri						
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	2.369.850.641	2.286.838.423	2.350.970.447	2.359.349.506	2.394.477.097	2.324.221.914	14.085.708.028	Kec. Pulau Hiri						
07.01.04	Program Koordinasi Kententaman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	73.782.911	152.400.082	156.842.500	157.401.500	159.745.000	155.058.000	855.229.993	Kec. Pulau Hiri						
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	155.404.593	126.694.822	130.247.848	130.712.062	132.658.192	128.765.933	804.483.450	Kec. Pulau Hiri						



**Tabel 7.1 (lanjutan)**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate**

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengembangan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Kelurahan	%	100	14.989.968	100	12.895.135	100	14.590.000	100	14.642.000	100	14.860.000	100	14.424.000	100	14.424.000	86.401.103	Kec. Pulau Hiri
07.01	Kecamatan				3.303.300.417		3.137.925.235		3.261.448.600		3.346.282.680		3.396.104.400		3.383.004.960		3.383.004.960	19.828.066.292	Kec. Moti
07.01.01	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	97	1.508.138.805	100	1.401.922.778	100	1.455.352.500	100	1.497.144.500	100	1.519.435.000	100	1.518.126.000	100	1.518.126.000	8.900.119.583	Kec. Moti
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	85	19.575.035	85	14.339.200	85	14.735.900	85	14.788.200	85	150.086.000	85	145.682.400	85	145.682.400	753.925.835	Kec. Moti
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	85	1.488.563.769	100	1.258.583.577	100	1.307.993.500	100	1.349.260.300	100	1.369.349.000	100	1.372.443.600	100	1.372.443.600	8.146.193.746	Kec. Moti
07.01.04	Program Koordinasi Kententanan Dan Keterlibatan Umum	Persentase Tingkat Penanganan Komik di Masyarakat	%	85	8.700.083	100	1.419.200	100	14.590.000	100	14.642.000	100	14.860.000	100	14.424.000	100	14.424.000	81.408.083	Kec. Moti
07.01.05	Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum	%	100	107.028.005	100	180.238.400	100	192.588.000	100	193.274.400	100	196.152.000	100	190.396.800	100	190.396.800	1.059.677.605	Kec. Moti
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengembangan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Kelurahan	%	100	171.294.720	100	139.649.280	100	143.565.600	100	144.077.280	100	146.222.400	100	141.932.160	100	141.932.160	886.741.440	Kec. Moti
07.01	Kecamatan				7.216.024.390		5.935.427.346		6.138.959.016		6.190.596.599		6.292.871.191		6.108.235.133		6.108.235.133	37.882.113.675	Kec. Batang Dua
07.01.01	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	3.865.881.600	100	3.151.688.400	100	3.242.262.750	100	3.254.916.600	100	3.305.607.000	100	3.208.618.800	100	3.208.618.800	20.028.975.150	Kec. Batang Dua
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	15.817.257	100	12.895.135	100	14.590.000	100	17.131.140	100	18.575.000	100	18.030.000	100	18.030.000	97.038.532	Kec. Batang Dua
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	2.805.050.962	100	2.286.838.422	100	2.372.855.452	100	2.397.627.500	100	2.433.325.000	100	2.361.930.000	100	2.361.930.000	14.657.627.336	Kec. Batang Dua



Tabel 7.1 (lanjutan)  
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ternate

Kode Bidang Urusan Dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kinerja Dan Usulan Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
07.01.04	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penanganan Konflik di Masyarakat	%	100	186.934.938	100	1.786.552.282	100	185.853.986	100	201.327.500	100	204.325.000	100	198.330.000	1.155.426.706	Kec. Batang Dua	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	186.934.938	100	1.786.552.282	100	193.148.980	100	188.881.800	100	198.381.000	100	192.560.400	1.138.562.400	Kec. Batang Dua	
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	%	100	155.404.695	100	1.266.948.825	100	130.247.848	100	130.712.059	100	132.658.191	100	128.765.993	804.483.551	Kec. Batang Dua	
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>																	
08.01	Unsur Kesatuan Bangsa Dan Politik				7.215.434.545		10.437.822.899		8.599.410.656		9.069.724.772		9.645.114.483		9.639.738.140	54.607.245.495	Badan Kesbangpol	
08.01.01	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	4.861.199.825	100	7.080.181.419	100	4.723.497.057	100	5.088.484.587	100	5.571.163.902	100	5.840.377.350	33.164.904.140	Badan Kesbangpol	
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	50	329.200.991	50	295.221.881	50	510.650.000	75	475.865.000	75	482.950.000	75	468.780.000	2.562.667.872	Badan Kesbangpol	
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pemahaman Politik dan Pengembangan Etika Politik Serta Budaya Politik	%	50	948.290.416	50	1.102.086.714	50	1.293.483.599	50	1.309.075.185	75	1.391.720.581	75	1.394.158.790	7.438.815.283	Badan Kesbangpol	
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	50	82.687.782	50	420.500.885	50	455.937.500	50	490.507.000	75	531.245.000	75	544.506.000	2.525.384.167	Badan Kesbangpol	
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	25	318.190.970	25	269.648.000	50	310.037.500	50	322.124.000	50	338.065.000	50	338.964.000	1.897.029.470	Badan Kesbangpol	
08.01.06	Program Peningkatan Kesadaran Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Tingkat Kerawanan Sosial	%	50	675.864.561	50	1.270.184.000	50	1.305.805.000	50	1.383.669.000	75	1.329.970.000	75	1.052.952.000	7.018.444.561	Badan Kesbangpol	
<b>JUMLAH</b>					<b>917.011.801.611</b>	<b>945.680.345.069</b>	<b>1.005.732.323.782</b>	<b>975.244.531.040</b>	<b>1.037.172.560.219</b>	<b>1.069.594.977.156</b>	<b>5.950.436.538.877</b>							





## BAB VIII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kota Ternate disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2.

**Tabel 8.1**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Ternate

No	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi PAUD	Persen	90	90	92	95	97	97	98	98
2	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Angka Harapan Hidup	Nilai	70,97	71,1	71,2	71,3	71,40	71,45	71,50	71,50
5	Indeks Aksesibilitas Sarana dan Prasarana yang Ramah terhadap Disabilitas dan Kelompok Rentan	Indeks	n/a	40,83	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,83	91,83	92,00	92,5	92,55	92,6	92,65	92,65
7	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,96	74,96	75,00	75,05	75,1	75,15	75,2	75,2
8	Indeks Kerentanan Kota	Indeks	n/a	0,75	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B	B	B	B	A	A	A	A
10	Indeks SPBE	Indeks	0	0	1,8	2,6	3,5	4,2	5	5
11	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	n/a	n/a	55	58	60	61	63	63
12	Jumlah Event Seni dan Budaya yang diselenggarakan	Jumlah	4	4	4	5	6	7	8	8
13	Laju Inflasi	Persen	2,13	2,11	2,8	2,5	2	2	1,93	1,93
14	Luas Genangan Banjir dan Rob	Ha	11,8	9,9	8,4	8,4	5	3,1	1,3	1,3
15	Ketersediaan Sistem Peringatan Dini	Persen	44,4	44,4	44,4	55,6	77,6	88,9	100	100
16	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Nilai SAKIP Kota	Kategori	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
18	OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM	OPD	n/a	n/a	5	7	10	12	15	15
19	Persentase Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	Persen	n/a	n/a	29	30	31	32	33	33
20	Persentase Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka	Persen	n/a	9,62	14,42	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
21	Persentase Layanan Persampahan	Persen	63,2	69,2	70,5	71,7	74,4	75,6	76,9	76,9
22	Persentase Keterhubungan Jalan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Jumlah Penurunan pasien COVID 19	90	95	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Penurunan Kemiskinan	Persen	3,36	3,26	3,16	3,6	3	2,4	2,4	2,4
25	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Persen	86	90	92	94	96	98	99,5	99,5



**Tabel 8.1 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Ternate**

No	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
26	Persentase Lembaga Sosial yang Mandiri	Persen	n/a	65	70	75	80	85	90	90
27	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase Pendapatan Daerah	Persen	n/a	n/a	95	97	98	98	99	99
30	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung	Persen	50	55	60	65	70	75	80	80
31	Pengurangan Luasan Kumuh	Hektar	287,4	287,4	229,92	172,44	114,96	57,48	0	0
32	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	Persen	40	50	55	60	65	70	75	75
33	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,07	7,08	7,13	7,18	7,23	7,28	7,33	7,33
34	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	71,16	72	73	74	75	76	77	77
35	Persentase OKP yang aktif	Persen	n/a	90	90	90	90	90	95	95
36	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	Persen	20	20	25	25	25	30	30	30
37	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial	Persen	3	3	3	2	2	2	0	0
38	Rasio Akses Air Minum Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	83,97	84	85	86	87	89	90	90
39	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12	12	12	12	12	12	12	12
40	Tingkat Pelayanan Jalan ( <i>Level Of Service</i> )	Kategori	C	C	C	B	B	B	B	B
41	Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Kebencanaan	Persen	15,8	15,8	19,2	25,6	32	38,5	44,9	44,9
42	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	600	600	650	665	675	685	695	695
43	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,8	5,6	5,5	5,24	5,09	4,83	4,68	4,68

Sumber: Bappedalitbang Kota Ternate, 2021

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>												
1	Angka <i>Stunting</i>	Persen	15	15	12	9	6	3	2	2		Kota Ternate
2	Rasio Gini	Persen	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22		Kota Ternate
3	Cakupan Luas Wilayah yang Terproteksi Bahaya Kebakaran (WMK)	Persen	88	89	90	91	92	93	94	94		Kota Ternate
4	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Perlindungan Budaya Lokal	Jumlah	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1		Kota Ternate
5	Persentase SD yang Menerapkan Pelajaran Bahasa Daerah	Persen	95	95	100	100	100	100	100	100		Kota Ternate
6	Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat	Persen	3	3	0	0	0	0	0	0		Kota Ternate
<b>B ASPEK PELAYANAN UMUM</b>												
<b>I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1 Urusan Pendidikan</b>												
1	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	78,55	78,55	78,60	78,65	78,70	78,75	78,80	78,80		Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	75,06	75,06	75,12	75,18	75,24	75,29	75,35	75,35		Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	73,05	73,05	73,10	73,15	73,20	73,26	73,31	73,31		Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	70,71	70,71	70,76	70,81	70,86	70,92	70,97	70,97		Dinas Pendidikan
<b>2 Urusan Kesehatan</b>												
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	86,9	86,4	85,9	85,4	84,9	84,4	83,9	83,9		Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	4,7	4,7	4,5	4,3	4,1	3,8	3,6	3,6		Dinas Kesehatan
3	<i>Annual Parasit Incidence (API)</i>	Persen	2	2	1,5	1,5	1	1	< 1	< 1		Dinas Kesehatan
4	<i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Permil	95	95	98	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan



**Tabel 8.2 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>												
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	66	68	73	75	80	85	90	90		Dinas PUPR
2	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Persen	81,39	82,75	84	85,25	86,5	87,75	89	89		Dinas PUPR
3	Persentase penduduk berakses air Limbah	Persen	89,5	90	92	94	96	98	100	100		Dinas PUPR
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	47	50	55	60	65	75	85	85		Dinas PUPR
<b>4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>												
1	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persen	n/a	n/a	34	54,34	75,23	85,11	100	100		Dinas Perkim
<b>5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>												
1	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91,5		1. BPBD 2. Dinas Pemadam Kebakaran 3. Satpol PP
2	Angka Kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
<b>6 Urusan Sosial</b>												
1	Persentase Penurunan PMKS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Sosial
<b>II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1 Urusan Tenaga Kerja</b>												
1	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	93,76	93,78	93,80	93,82	93,84	93,86	93,88	93,88		Dinas Tenaga Kerja
<b>2 Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>												
1.	Implementasi Pengarusutamaan Gender (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen	n/a	60	60	70	70	80	80	80		DPPPA
2.	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Nilai	n/a	650	650	700	750	800	850	850		DPPPA

**Tabel 8.2 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<b>3 Urusan Pangan</b>											
1 Skor Pola Pangan Harapan	Persen	73,7	78	80	85	90	93	95	95		Dinas Ketahanan Pangan
<b>4 Urusan Pertanahan</b>											
1 Cakupan Bidang Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	Persen	48	52	60	65	70	75	80	80		Dinas Perkim
<b>5 Urusan Lingkungan Hidup</b>											
1 Persentase pengendalian kualitas lingkungan hidup	Persen	0	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,5		Dinas Lingkungan Hidup
2 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persen	12,6	12,6	13	13,5	14	14,4	15	15		Dinas Lingkungan Hidup
3 Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	63,18	69,2	70,5	71,7	74,4	75,6	76,9	76,9		Dinas Lingkungan Hidup
4 Predikat Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	Tidak ada (Covid)	Tidak ada (Covid)	76	78	80	82	85	85		Dinas Lingkungan Hidup
<b>6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
1 Persentase Kepemilikan Elektronik	Persen	94,02	94,7	95,2	95,7	96,2	96,7	97,2	97,7		Dinas Kependudukan dan Capil
2 Persentase Kepemilikan KK	Persen	100,7	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Kependudukan dan Capil
3 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	88,97	88,97	89	89,15	89,20	89,25	89,30	89,30		Dinas Kependudukan dan Capil
<b>7 Urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>											
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2,2	2,2	2,1	2	1,8	1,6	1,4	1,4		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
<b>8 Urusan Perhubungan</b>											
1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Persen	68	70	75	85	90	95	100	100		Dinas Perhubungan
2 Indeks kepuasan layanan perhubungan	Persen	80	80	85	85	90	90	90	90		Dinas Perhubungan
3 Persentase penerimaan PAD dari pengelolaan perparkiran	Persen	80	90	100	100	100	100	100	100		Dinas Perhubungan



**Tabel 8.2 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>9</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>											
1	Tingkat pelayanan masyarakat melalui media <i>On-Line</i>	Persen	30	44	50	75	81	88	90	90		Diskomsandi
2	Tingkat Ketersediaan Data Base informasi daerah yang akurat	Persen	30	34,4	40,6	46,9	50	62,5	75	75		Diskomsandi
3	Cakupan Wilayah yang terakses Jaringan Internet/Celluler	Persen	75	80	85	90	93	97	100	100		Diskomsandi
4	Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi	Persen	20	25	37,5	62,5	75	87	93,8	93,8		Diskomsandi
<b>10</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>											
1	Proporsi UMKM yang memperoleh penghargaan/ <i>Award</i>	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6		Dinas Koperasi dan UKM
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	7,6	7,8	8	8,5	9	9,5	10	42,8		Dinas Koperasi dan UKM
<b>11</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>											
1	Realisasi Investasi PMDN	Persen	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	79,2	79,2		DPMPPTSP
<b>12</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>											
1	Persentase Pemuda yang Mandiri	Persen	20	20	25	25	50	50	60	60		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	n/a	20	20	20	25	25	30	30		Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>13</b>	<b>Urusan Statistik</b>											
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	30	35	50	60	70	80	90	90		Diskomsandi
<b>14</b>	<b>Urusan Persandian</b>											
1	Indek Keamanan Informasi	Nilai	n/a	174	270	312	455	535	645	645		Diskomsandi
<b>15</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>											
1	Jumlah Event Seni dan Budaya yang diselenggarakan	Jumlah	4	4	4	5	6	7	8	8		Dinas Kebudayaan
2	Persentase SD yang menerapkan pelajaran Bahasa Daerah	Perse	94	99	100	100	100	100	100	100		Dinas Kebudayaan



**Tabel 8.2 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>16 Urusan Perpustakaan</b>												
1	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Arsip dan Perpustakaan
<b>17 Urusan Kearsipan</b>												
1	Persentase jumlah OPD yang tertib arsip	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Arsip dan Perpustakaan
<b>III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>1 Urusan Kelautan dan Perikanan</b>												
1	Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Ternate	Persen	2,00	2,00	2,10	2,35	2,46	2,55	2,77	2,77		Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>2 Urusan Pariwisata</b>												
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	314	408	530	689	895	1.163	1.511	5.510		Dinas Pariwisata
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal	Orang	153.289	199.257	259.039	336.750	437.775	569.107	739.839	2.695.056		Dinas Pariwisata
3	Jumlah Tempat Wisata yang dilestarikan dan dikembangkan	Lokasi	3	3	4	4	5	5	5	29		Dinas Pariwisata
<b>3 Urusan Pertanian</b>												
1	Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	1,70	2,01	2,07	2,11	2,19	2,34	2,50	2,50		Dinas Pertanian
<b>4 Urusan Perdagangan</b>												
1	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	-7,45	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50		Dinas Perindag
2	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	Persen	85,19	85,25	85,60	86,00	86,50	87,00	87,50	8,00		Dinas Perindag
<b>5 Urusan Perindustrian</b>												
1	Pertumbuhan sektor Industri terhadap PDRB	Persen	-7,56	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50		Dinas Perindag



**Tabel 8.2 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>1</b>	<b>Urusan Sekretariat Daerah</b>											
1	Peringkat Nasional LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
2	Urusan Sekretariat DPRD											
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	Persen	80	82	84	86	88	90	92	92		Sekretariat DPRD
<b>V</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>1</b>	<b>Urusan Perencanaan</b>											
1	Persentase Terpenuhinya Kualias Dalam Perencanaan	Persen	18,57	19,22	19,89	20,59	21,31	22,06	22,83	22,83		Bappelitbangda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3		Bappelitbangda
<b>2</b>	<b>Urusan Keuangan</b>											
1	Opini BPK Terhadap laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		BPKAD dan BP2RD
<b>3</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>											
1	Persentase Penempatan Aparatur Berdasarkan Kompetensi	Persen	85	85	85	92	97	97	97	97		BKPSDMD
2	Persentase Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklatpim Sesuai Jenjang	Persen	75	75	75	79	83	83	83	83		BKPSDMD
3	Persentase Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	Persen	3	3	3	2	2	2	2	2		BKPSDMD
<b>4</b>	<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>											
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Bappelitbangda
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	n/a	4,88	9,76	14,63	19,51	24,39	29,27	29,27		Bappelitbangda

**Tabel 8.2 (lanjutan)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kota Ternate**

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Ket	Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>1</b>	<b>Urusan Inspektorat</b>											
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2		Inspektorat
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2		Inspektorat
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
<b>1</b>	<b>Urusan Kecamatan</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Indeks	B	B	B	B	B	B	B	B		Kecamatan
<b>VIII</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>											
<b>1</b>	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>											
1	Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat	Persen	2	1	1	0	0	0	0	0		Kesbangpol
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>											
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n/a	75	75	80	80	85	85	85		Kota Ternate
2	Indeks Kualitas Air	Nilai	n/a	n/a	80	80	80	80	80	80		Kota Ternate
3	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Nilai	40 - 59	40 - 59	60 - 79	60 - 79	80 - 89	80 - 89	90 - 100	90 - 100		Kota Ternate
4	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Kota Ternate
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Kota Ternate
6	Persentase Penyelenggaraan Event	Jumlah	4	4	4	5	6	7	8	8		Kota Ternate
7	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		Kota Ternate
8	Rasio Kemandirian Daerah	Persen	12,68	13,10	13,25	14,15	14,55	14,75	15,15	15,15		Kota Ternate

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021



## BAB IX

# PENUTUP

### 9.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2026–2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kota Ternate serta RPJMD Provinsi Maluku Utara yang berlaku.

### 9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Ternate serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Ternate;
2. Walikota dan Wakil Walikota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Kota Ternate dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
6. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
7. Bappelitbangda Kota Ternate melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD di lingkup Kota Ternate.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Kota Ternate ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia, Walikota dan Wakil Walikota juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Penyusunan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ternate, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 menjadi pendorong membangun gerakan bersama menuju Terwujudnya Ternate Mandiri dan Berkeadilan – **“TERNATE ANDALAN”** -.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka perlu adanya kesungguhan dan komitmen yang kuat, agar pada gilirannya mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Ternate. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Ternate ini, tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, khususnya kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah. Maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate di masa yang akan datang.













**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**KOTA TERNATE TAHUN 2021**